PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waroh matullohi wabarokatuh.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan hidayah, taufiq dan kekuatan serta kesehatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dinas kita sehari-hari, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LKPJ oleh Pemerintah Kabupaten Kediri ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Melalui LKPJ diharapkan DPRD Kabupaten Kediri memiliki informasi secara lengkap sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mencerminkan kinerja Kepala Daerah Tahun 2025, sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025.

Perlu diketahui bahwa ruang lingkup LKPJ ini antara lain : *Pertama,* hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. *Kedua*, hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu kami selaku Kepala Daerah bersama jajaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri menyadari segala keterbatasan kemampuan dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada tahun 2025 yang perlu terus disempurnakan dan tentunya membutuhkan kerja sama, sinergi, kalaborasi dengan seluruh stakeholders dan peran aktif masyarakat, sehingga urusan-urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik guna terwujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.

Demikian LKPJ ini disusun untuk kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Kediri. Semoga data yang kami sajikan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menerima LKPJ Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025. Kritik dan saran yang membangun kami terima dengan sangat terbuka, dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Wassalamu’alaikum warah matullahi wabarakatuh,

Kediri, 10 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
BUPATI KEDIRI

Hanindhito Himawan Pramana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI III
DAFTAR TABEL V
DAFTAR GAMBAR VII
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1. Dasar Hukum 1
1.2. Visi Misi Kepala Daerah 1
1.3. Data Umum Daerah 2
1.3.1. Data Geografis Wilayah 2
1.3.2. Jumlah Penduduk 4
1.3.3. Laju Pertumbuhan Penduduk 5
1.3.4. Jumlah PNS 5
1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan 8
1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 8
1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan 9
BAB II 11
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 11
2.1. Kondisi Umum dan Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah 11
2.1.1. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah 11
2.1.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah 11
2.1.3. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah 12
2.1.4. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah 14
2.1.5. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah 24
2.1.6. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah 25
2.1.7. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah 25
2.2. Kondisi Dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pembiayaan 26
2.2.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan 26
2.2.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan 26
2.2.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan 26
BAB III 28
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 28
3.1. Capaian Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri 28

3.1.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah 30
3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir; 38
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah/RPJMD; 46
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025 Dengan Realisasi Provinsi dan Nasional..... 54
3.2. Akuntabilitas Kinerja..... 61
3.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan..... 62
3.2.2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 109
3.2.3. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 127
3.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 133
3.3.1. Mekanisme Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri 134
3.3.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025..... 144
Lampiran Dokumen Perjanjinan Kinerja Perubahan Tahun 2025 148
3.3.3. Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja..... 166
3.4. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan..... 171
3.5. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya..... 181
3.6. Prestasi Kabupaten Kediri..... 242
3.7. Inovasi Daerah..... 262
BAB IV..... 265
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN 265
4.1. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Pusat..... 265
4.1.1. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri..... 265
4.2. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Provinsi 278
4.2.1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kediri 278
4.2.2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri..... 315
BAB V 353
P E N U T U P 353

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 s.d 2025 5
Tabel 2 Laju Pertumbuhan Tahun 2023 s.d 2025 5
Tabel 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri Menurut Perangkat Daerah Tahun 2025 6
Tabel 4 Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 8
Tabel 5 Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 9
Tabel 6 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 10
Tabel 7 Uraian Perubahan Pendapatan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun Anggaran 2025 12
Tabel 8 Belanja Daerah Sesuai Pembagian Urusan Pemerintahan Tahun 2025 17
Tabel 9 Ringkasan Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 25
Tabel 10 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 26
Tabel 11 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 30
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya 38
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPJMD 46
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Provinsi dan Nasional Tahun 2025 54
Tabel 15 Matrikulasi Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja 109
Tabel 16 Perbandingan Kinerja Dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025 128
Tabel 17 Penghitungan IKU Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025 134
Tabel 18 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 144
Tabel 19 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri 166
Tabel 20 Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 172
Tabel 21 Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya 181

Tabel 22 Prestasi Pemerintah Kabupaten Kediri selama Tahun 2025 242
Tabel 23 Prestasi Masyarakat Kabupaten Kediri selama Tahun 2025..... 255
Tabel 24 Inovasi Pemerintah Kabupaten Kediri selama Tahun 2025..... 262
Tabel 25 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 267
Tabel 26 Target dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025..... 268
Tabel 27 Target dan Realisasi Pelaksanaan Jumlah Dana keseluruhan Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 279
Tabel 28 Jumlah dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa..... 282
Tabel 29 Realisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa..... 283
Tabel 30 Jadwal Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur Program Jatim Puspa Tahun 2025..... 284
Tabel 31 Realisasi Dana Program Desa Berdaya 292
Tabel 32 Penerima BKK untuk Pemberdayaan Bum Desa Tahun 2025 302
Tabel 33 Musyawarah Desa Insidentil Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Pemberdayaan BUM 304
Tabel 34 Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa..... 308
Tabel 35 Monitoring Pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa 310
Tabel 36 Jadwal Musyawarah Desa Penerima BKK Bum Desa Tahun 2025..... 311
Tabel 37 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pondok Pesantren..... 322
Tabel 38 Pelaksanaan di Pondok Pesantren..... 331
Tabel 39 Hasil Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Desa Keling Kecamatan Kepung 332
Tabel 40 Pondok Pesantren An Nurul Burhan Desa Badas Kecamatan Badas..... 333
Tabel 41 Pondok Pesantren Ar-Robithoh Desa Kerkep Kecamatan Gurah 333
Tabel 42 Pondok Pesantren Sirojul Ulum Desa Tertek Kecamatan Pare..... 334
Tabel 43 Pondok Pesantren Al – Khoirot Desa Mojosari Kecamatan Kras 334
Tabel 44 Hasil kegiatan mewujudkan Peningkatan PHBS..... 347
Tabel 45 Hasil penilaian Pre dan Post Test 347
Tabel 46 Hasil kegiatan IKL dan skrening TB..... 347
Tabel 47 Hasil Skrining Jiwa..... 348

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kediri 4
Gambar 2 Pelaksanaan Sosialisasi Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa 284
Gambar 3 Musyawarah Desa Sosialisasi Bantuan Keuangan 285
Gambar 4 Fasilitasi Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan 286
Gambar 5 Undangan Penyerahan barang kepada 287
Gambar 6 Penyerahan barang kepada KPM Program Jatim Puspa di Desa Ngreco Kecamatan Kandat dan Desa Kandat Kecamatan Kandat 288
Gambar 7 Penyerahan barang kepada KPM Program Jatim Puspa 288
Gambar 8 Undangan Musyawarah Pertanggungjawaban 289
Gambar 9 Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (PUED) 290
Gambar 10 Fasilitasi percepatan pelaksanaan Program Desa Berdaya Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri 294
Gambar 11 Fasilitasi Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Program Desa Berdaya Tahun 2025 295
Gambar 12 Orientasi Program Desa Berdaya Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur 296
Gambar 13 Undangan Sosialisasi Program Desa Berdaya ke Desa Papar Kecamatan Papar 297
Gambar 14 Undangan Sosialisasi Program Desa Berdaya ke Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih 297
Gambar 15 Monitoring Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Konsultan Program Desa Berdaya 298
Gambar 16 Undangan Peresmian Ikon Tematik Program Desa Berdaya Sempu Kecamatan Ngancar pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025 299
Gambar 17 Undangan Peresmian Ikon Tematik Program Desa Berdaya Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025 300
Gambar 18 Undangan Peresmian Ikon Tematik Program Desa Berdaya Papar Kecamatan Papar pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025 300

Gambar 19 Pra Orientasi Program Pemberdayaan BUM Desa Tahun 2025 304
Gambar 20 Musyawarah Desa Insidentil Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Pemberdayaan BUM 305
Gambar 21 Orientasi Program Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas PMD 306
Gambar 22 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Program BKK Pemberdayaan BUMDesa 307
Gambar 23 Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan BKK 308
Gambar 24 Mendampingi monitoring Pelaksanaan BKK 310
Gambar 25 Musyawarah Desa Pertanggungjawaban BKK BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dari Desa Lokasi penerima 311
Gambar 26 Pelaksaan Rapat Tim Pembina Pesantren Sehat 320
Gambar 27 Dokumentasi Kegiatan Orientasi Poskestren 323
Gambar 28 Dokumentasi Kegiatan pendampingan 329
Gambar 29 Kegiatan di Pondok Pesantren 335
Gambar 30 Roll Banner dengan tema ajakan PHBS di Pondok Pesantren dengan judul Indikator PHBS 336
Gambar 31 Poster dengan 3 tema Etika batuk, cegah Scabies, Basmi DBD dengan 3M di Pondok Pesantren 336
Gambar 32 Lembar balik dengan tema isi piring dengan jumlah 7 paket 337
Gambar 33 Buku Raport yang Diberikan ke Pendamping Organisasi Masyarakat dan Petugas Pukesmas 337
Gambar 34. Peyerahan Pengadaan Media Promosi Kesehatan 338
Gambar 35 Dokumentasi Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pendampingan Pesantren Sehat 346
Gambar 36 Lampiran SK POSKESTREN 348
Gambar 37 Hasil Laporan PHBS DATA IKI PESAT 350

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Kabupaten Kediri adalah daerah otonom sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur tentang kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian Bupati Kediri diwajibkan menyampaikan LKPJ Tahun 2025 kepada DPRD Kabupaten Kediri paling lambat pada tanggal 31 Maret 2026.

1.2. Visi Misi Kepala Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan adanya visi dan misi yang merupakan arahan bagi penyusunan program dan kegiatan selama lima tahun. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi dilaksanakan melalui sejumlah misi yang merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk

mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, suatu pemerintahan membutuhkan adanya visi dan misi sebagai panduan bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tahun 2025 adalah merupakan tahun terakhir pelaksanaan Visi-Misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kediri, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani"

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius;
2. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;
3. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah;
4. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan;
5. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah;
6. Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal;
7. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Mitigasi Bencana;
8. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda; dan
9. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat.

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1. Data Geografis Wilayah

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 100.1-1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi

Pemerintahan, wilayah Kabupaten Kediri secara geografis terletak pada koordinat antara 111° 47' 05‖ s.d. 112° 18' 20‖ Bujur Timur dan 7° 36' 12'' s.d. 8° 0' 32‖ Lintang Selatan, dengan luas wilayah kurang lebih 1.523,563 km^2.

Berdasarkan topografinya Kabupaten Kediri terdiri dari dataran rendah dan pegunungan yang dilalui aliran sungai Brantas yang membelah dari selatan ke utara dengan ketinggian rata-rata 81 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan jenis tanahnya, Kabupaten Kediri dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu :

- Regosol coklat kekelabuan seluas 77.397 Ha, merupakan jenis tanah yang Sebagian besar ada di wilayah Kecamatan Kepung, Puncu, Ngancar, Plosoklaten, Wates, Gurah, Pare, Kandangan, Kandat, Ringinrejo, Kras, Papar, Purwoasri, Pagu, Plemahan, Kunjang, dan Gampengrejo.
- Aluvial kelabu coklat seluas 28,178 Ha, merupakan jenis tanah yang dijumpai di Kecamatan Ngadiluwih, Kras, Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Papar, Tarokan, dan Kandangan.
- Andosol coklat kuning, regosol coklat kuning, litosol seluas 4.408 Ha, dijumpai di daerah ketinggian di atas 1.000 dpl seperti di Kecamatan Kandangan, Grogol, Semen, dan Mojo.
- Mediteran coklat merah, grumusol kelabu seluas 13.556 Ha terdapat di Kecamatan Mojo, Semen, Grogol, Banyakan, Tarokan, Plemahan, Pare, dan Kunjang.
- Litosol coklat kemerahan seluas 15.066 Ha terdapat di Kecamatan Semen, Mojo, Grogol, Banyakan, Tarokan, dan Kandangan.

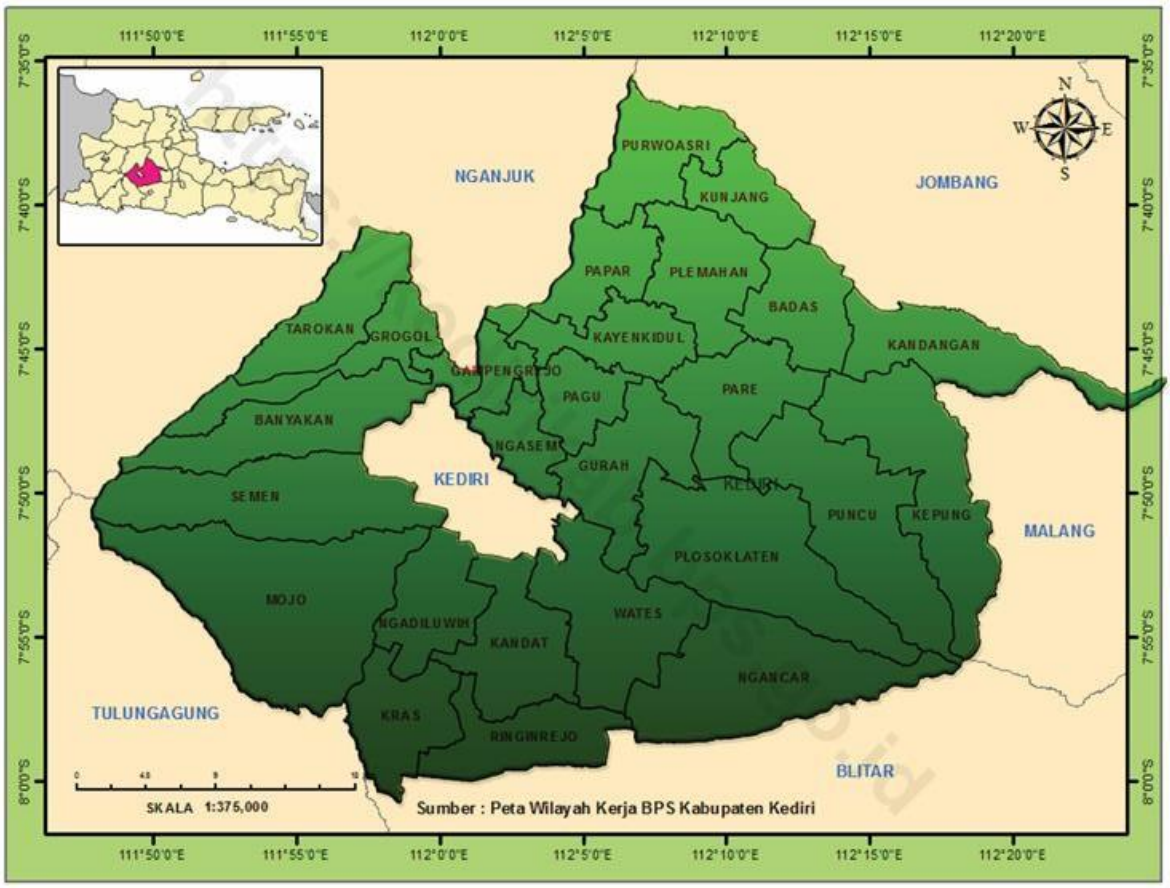
Pola penggunaan lahan di Kabupaten Kediri didominasi untuk lahan pertanian seluas 98.208 Ha atau sekitar 70,85% dari total luas wilayah dimana luas lahan pertanian tersebut terdiri dari lahan sawah seluas 51.968 Ha dan lahan bukan sawah seluas 86.637 Ha. Penggunaan lahan lainnya adalah guna lahan bukan pertanian seluas 40.397 Ha atau sebesar 29,15% dari total luas wilayah.

Batas-batas administratif wilayah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk;
- Sebelah Timur : Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar;
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.

Peta administrasi Kabupaten Kediri, seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kediri



Sumber: *Kediri Dalam Angka 2026*

1.3.2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang digunakan Kementerian Dalam Negeri dalam melayani administrasi kependudukan masyarakat didapatkan pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Kediri sebanyak 1.694.560 jiwa terdiri dari laki-laki 854.263 (50,41%) dan perempuan 840.297 (49,59%). Hal tersebut berarti sex ratio Kabupaten Kediri tahun 2025 adalah 101,66, hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan. Perkembangan jumlah penduduk selama tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kediri Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 s.d 2025

NO	JENIS KELAMIN	TAHUN		
		2023	2024	2025
1	Laki-laki	849.958	853.689	854.263
2	Perempuan	834.496	838.287	840.297
	Jumlah	1.684.454	1.691.976	1.694.560
	Sex Ratio	101,9	101,8	101,6

Sumber : Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2025 Kabupaten Kediri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri

1.3.3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kediri dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2 Laju Pertumbuhan Tahun 2023 s.d 2025

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Jumlah penduduk	1.684.454	1.691.976	1.694.560
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,71	0,79	0,88

Sumber : Jumlah Penduduk dari SIAK Kementerian Dalam Negeri

1.3.4. Jumlah PNS

Jumlah ASN Kabupaten Kediri menurut sumber data dari Badan Kepegawaian Daerah pada akhir tahun 2025 adalah 9.656. Berikut adalah gambaran ASN Kabupaten Kediri Menurut Perangkat Daerah :

Tabel 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kediri Menurut Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Satker	Eselon	Non Eselon				Jumlah
			JF	Staf	Sekdes	PPPK	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6	23	11	0	5	45
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7	6	9	0	7	29
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	14	1	29	0	8	52
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	1	7	0	13	24
5	Badan Pendapatan Daerah	10	5	48	0	24	87
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	14	11	0	10	42
7	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3	8	8	0	7	26
8	Bagian Hukum	1	8	4	0	6	19
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1	10	0	6	18
10	Bagian Organisasi	0	4	6	0	3	13
11	Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa	1	20	6	0	7	34
12	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	3	8	0	4	16
13	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	0	5	0	0	6
14	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2	1	7	0	2	12
15	Bagian Tata Pemerintahan	1	0	10	0	0	11
16	Bagian Umum	8	1	48	0	50	107
17	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	3	4	7	0	4	18
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7	4	15	0	42	68
19	Dinas Kesehatan	9	878	69	0	361	1317
20	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	6	31	23	0	17	77
21	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7	7	16	0	17	47
22	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	5	6	13	0	14	38
23	Dinas Lingkungan Hidup	7	6	61	0	22	96
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	6	6	25	0	36	73

25	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	15	16	54	0	28	113
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa	8	3	18	0	13	42
27	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	14	6	0	7	30
28	Dinas Pendidikan	13	3006	166	0	2231	5416
29	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	2	13	0	3	24
30	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7	10	33	0	25	75
31	Dinas Perhubungan	15	9	13	0	31	68
32	Dinas Perikanan	6	3	12	0	2	23
33	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	4	89	22	0	87	202
34	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	6	5	22	0	18	51
35	Dinas Sosial	3	7	12	0	5	27
36	Dinas Tenaga Kerja	8	5	11	0	9	33
37	Inspektorat	6	38	6	0	4	54
38	Kecamatan Badas	7	0	3	3	1	14
39	Kecamatan Banyakan	6	0	10	1	1	18
40	Kecamatan Gampengrejo	6	0	4	0	1	11
41	Kecamatan Grogol	5	0	6	0	2	13
42	Kecamatan Gurah	6	0	5	2	0	13
43	Kecamatan Kandangan	6	0	8	5	1	20
44	Kecamatan Kandat	4	0	5	0	1	10
45	Kecamatan Kayen Kidul	4	0	5	1	1	11
46	Kecamatan Kepung	6	0	4	4	1	15
47	Kecamatan Kras	5	1	3	4	1	14
48	Kecamatan Kunjang	7	0	6	2	1	16
49	Kecamatan Mojo	4	0	3	4	1	12
50	Kecamatan Ngadiluwih	6	0	5	2	1	14
51	Kecamatan Ngancar	6	0	6	0	1	13
52	Kecamatan Ngasem	7	0	5	0	1	13
53	Kecamatan Pagu	5	0	6	3	1	15
54	Kecamatan Papar	8	0	3	3	1	15
55	Kecamatan Pare	11	0	7	1	1	20
56	Kecamatan Plemahan	6	0	9	0	1	16
57	Kecamatan Plosoklaten	5	0	5	2	1	13
58	Kecamatan Puncu	6	0	2	6	1	15
59	Kecamatan Purwoasri	6	0	5	6	1	18

60	Kecamatan Ringinrejo	5	0	4	0	1	10
61	Kecamatan Semen	4	0	6	0	1	11
62	Kecamatan Tarokan	7	0	5	0	1	13
63	Kecamatan Wates	5	0	7	5	1	18
64	Satuan Polisi Pamong Praja	11	8	31	0	152	202
65	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	6	12	0	10	34
66	UOBK RSUD Kabupaten Kediri	7	287	66	0	45	405
67	UOBK RSUD SLG	10	136	9	0	56	211
JUMLAH		**403**	**4683**	**1099**	**54**	**3417**	**9656**

sumber : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, 2025

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 3.317.023.312.885,54 dan terealisasi sebesar Rp 3.361.022.617.572,85 atau 101,32% (*Unaudited*). Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	878.163.044.317,54	870.646.435.934,08	99,14	697.847.351.975,16
2.	Pendapatan Transfer	2.421.416.777.574,00	2.472.148.842.434,00	102,09	2.624.364.489.338,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.443.490.994,00	18.227.339.204,77	104,49	0,00
Jumlah		**3.317.023.312.885,54**	**3.361.022.617.572,85**	**101,32**	**3.322.211.841.313,16**

Sumber: BKAD (Konsolidasi LRA s.d tanggal 18 Februari 2026 – Unaudited)

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada TA 2025 Belanja Daerah Kabupaten Kediri dialokasikan sebesar Rp

3.539.790.270.834,00 dan direalisasikan sebesar Rp 3.198.460.496.513,12 *(Unaudited)* atau 90,35% dari anggaran. Rincian Belanja menurut jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025 dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	TA 2025			TA 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
A	Belanja Operasi	2.549.880.834.464,00	2.279.538.012.411,65	89,39	2.473.605.563.654,91
B	Belanja Modal	322.121.286.484,00	284.521.208.318,50	88,32	330.855.699.613,91
c	Belanja Tak Terduga	11.660.964.886,00	4.893.903.348,97	41,96	1.547.212.797,00
d	Belanja Transfer	656.127.185.000,00	629.507.372.434,00	95,94	690.872.949.517,00
Jumlah		**3.539.790.270.834,00**	**3.198.460.496.513,12**	**90,35**	**3.496.881.425.582,82**

Sumber: BKAD (Konsolidasi LRA s.d tanggal 18 Februari 2026 – Unaudited)

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi penerimaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran, antara lain berasal dari penggunaan SILPA tahun lalu dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah seluruh transaksi pengeluaran yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran, antara lain untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, dan pembayaran kewajiban lainnya. Realisasi Pembiayaan Tahun 2025 sebagaimana berikut :

Tabel 6 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

NO.	PEMBIAYAAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)
1)	Penerimaan Pembiayaan	222.766.957.949,76	410.613.961.575,42
2)	Pengeluaran Pembiayaan	13.177.419.356,00	0,00

Sumber: BKAD (Konsolidasi LRA s.d tanggal 28 Februari 2025 – Unaudited)

BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1. Kondisi Umum dan Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa Daerah diberikan hak otonomi sehingga Pemerintah Daerah mendapatkan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Namun dalam kenyataannya Pemerintah Daerah sangat tergantung pada Pendapatan Transfer yang diberikan oleh Pemerintah. Hal tersebut terlihat dari nominal komponen Pendapatan Transfer yang paling besar dibanding dengan komponen lainnya yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.1.1. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah

Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, permasalahan utama perubahan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perubahan target Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Perubahan target Pendapatan Transfer yang terdiri dari: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah.
3. Perubahan target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.1.2. Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah

Perangkaan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp. 3.314.665.162.885,54 naik 48.083.350.554,54 atau 1,47% dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.266.581.812.331,00. Pendapatan Daerah rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

Tabel 7 Uraian Perubahan Pendapatan Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**863.184.917.931,00**	**878.163.044.317,54**	**14.978.126.386,54**	**1,74%**
4.1.01	PAJAK DAERAH	462.396.318.826,00	455.446.318.826,00	(6.950.000.000,00)	-1,50%
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	110.879.057.500,00	312.623.002.162,54	201.743.944.662,54	181,95%
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	13.990.158.640,00	13.990.158.640,00	0,00	0,00%
4.1.04	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	275.919.382.965,00	96.103.564.689,00	(179.815.818.276,00)	-65,17%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.403.396.894.400,00**	**2.419.058.627.574,00**	**15.661.733.174,00**	**0,65%**
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.285.949.255.000,00	2.249.644.394.574,00	(36.304.860.426,00)	1,59%
4.2.02	TRANSFER ANTAR DAERAH	117.447.639.400,00	169.414.233.000,00	51.966.593.600,00	44,25%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**17.443.490.994,00**	**17.443.490.994,00**	**-**
4.3.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	0,00	17.443.490.994,00	17.443.490.994,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**3.266.581.812.331,00**	**3.314.665.162.885,54**	**48.083.350.554,54**	**1,47%**

Sumber: BKAD (Nota Keuangan RAPBD 2025)

2.1.3. Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Kebijakan Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan dengan melaksanakan perhitungan ulang target PAD APBD TA 2025 dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan PAD semester I TA 2025 untuk digunakan sebagai acuan target PAD semester II TA 2025;

2. Kebijakan Perubahan Pendapatan Transfer

Kebijakan pendapatan transfer daerah dengan melaksanakan penyesuaian Alokasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat tahun 2025 dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi tahun 2025 sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan yaitu :

a. Pergeseran dana Transfer ke Daerah (TKD) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang **Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut** Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Insentif Fiskal yang pada APBD Tahun Anggaran 2025 belum dianggarkan dikarenakan menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya, pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

c. Alokasi Silpa yang belum dianggarkan pada APBD TA 2025 yaitu: DAU Yang Ditentukan Penggunaannya, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Intensif Fiskal.

d. Adanya alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Kediri sebagai berikut :

1) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/KPTS/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

2) Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Januari 2025 Nomor 900.1/686.5/101.1/2025 perihal Pemberitahuan Pagu Anggaran Bantuan keuangan Khusus Daerah Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten/Kota Tahun 2025.

3) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/766/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

4) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/767/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
5) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/113/03/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

e. Perubahan Alokasi Dana Bagi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/767/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

2.1.4. Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas, efisiensi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangannya.

Kondisi umum Belanja Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa perubahan baik perubahan karena adanya penambahan kegiatan baru ataupun pergeseran kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan APBD. Perubahan-

perubahan tersebut antara lain disebabkan:

1. Adanya penyempurnaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. Adanya perubahan perencanaan belanja yang disebabkan:
   a. Perhitungan dengan pergeseran anggaran untuk ketersediaan anggaran gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan bagi PNSD.
   b. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan ketentuan yang mendasarinya.
   c. Penyesuaian penggunaan anggaran dana transfer dari pemerintah pusat sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

      29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
   d. Penyesuaian kegiatan yang bersumber dana DAU spesifik bidang Kesehatan, DAU spesifik Bidang Kesehatan, DAU spesifik Bidang Pekerjaan Umum dan DAU spesifik penggajian P3K.
   e. Penyesuaian anggaran dana transfer yang terdiri dari:
      1) Transfer Pemerintah Pusat yaitu DAU Yang Ditentukan Penggunaannya, DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Insentif Fiskal.
      2) Transfer Antar Daerah yaitu: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Khusus.

f. Penyesuaian anggaran dengan pergeseran untuk mendukung program-program prioritas, serta penyesuaian pergeseran belanja BLUD.

3. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang harus digunakan dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Disamping itu, sesuai prinsip efisiensi dan efektifitas, maka dalam mengalokasikan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kediri lebih mengutamakan pada aspek sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah serta capaian kinerja dari program dan kegiatan. Dengan memperhatikan kondisi sosial dan perekonomian daerah, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp.3.537.432.120.834,00 mengalami penambahan sebesar Rp.85.689.747.577,00 atau 2,48% dari APBD Tahun Anggaran 2025.

Belanja Daerah disusun sesuai dengan pembagian Urusan Pemerintahan yang diformulasikan ke dalam :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Urusan pemerintahan pilihan;
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan;
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan;
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan;
7. Unsur kewilayahan;
8. Unsur pemerintahan umum;
9. Non urusan.

Disusun sesuai dengan pembagian Urusan Pemerintahan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 8 Belanja Daerah Sesuai Pembagian Urusan Pemerintahan Tahun 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	JUMLAH BELANJA		
				Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/ Berkurang
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.020.141.532.397,00	2.123.573.424.123,00	103.431.891.726,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	990.598.275.692,00	1.012.015.549.723,00	21.417.274.031,00
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	987.041.293.292,00	1.009.088.137.823,00	22.046.844.531,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	228.029.454.609,00	210.705.360.296,00	(17.324.094.313,00)
2	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	3.556.982.400,00	2.927.411.900,00	(629.570.500,00)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.020.141.532.397,00	2.123.573.424.123,00	103.431.891.726,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	754.813.618.768,00	822.301.420.013,00	67.487.801.245,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	340.370.163.048,00	338.504.835.517,00	(1.865.327.531,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0001	RSUD Kabupaten Kediri	192.500.000.000,00	249.174.000.000,00	56.674.000.000,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0002	RSUD SLG	99.063.923.450,00	109.120.634.216,00	10.056.710.766,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0003	UPTD PUSKESMAS SEMEN	4.156.939.700,00	4.226.055.164,00	69.115.464,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0004	UPTD PUSKESMAS MOJO	4.607.737.529,00	4.288.371.825,00	(319.365.704,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0005	UPTD PUSKESMAS NGADI	2.981.360.400,00	2.812.045.324,00	(169.315.076,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0006	UPTD PUSKESMAS KRAS	2.628.690.000,00	2.747.648.414,00	118.958.414,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0007	UPTD PUSKESMAS PELAS	1.952.191.386,00	2.017.892.842,00	65.701.456,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0008	UPTD PUSKESMAS NGADILUWIH	4.657.513.405,00	5.184.686.462,00	527.173.057,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0009	UPTD PUSKESMAS WONOREJO	2.524.726.868,00	2.671.734.349,00	147.007.481,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0010	UPTD PUSKESMAS BLABAK	3.645.800.844,00	3.714.618.768,00	68.817.924,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0011	UPTD PUSKESMAS WATES	4.047.030.000,00	4.149.860.780,00	102.830.780,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0012	UPTD PUSKESMAS SILIR	2.508.224.000,00	2.617.613.294,00	109.389.294,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0013	UPTD PUSKESMAS NGANCAR	4.466.762.953,00	4.471.000.300,00	4.237.347,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0014	UPTD PUSKESMAS PUNCU	4.724.443.900,00	4.856.216.821,00	131.772.921,00

1	02	1.02.0.00.0.00.02.0015	UPTD PUSKESMAS PLOSOKLATEN	2.302.241.303,00	2.574.637.350,00	272.396.047,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0016	UPTD PUSKESMAS PRANGGANG	3.003.387.900,00	2.987.562.583,00	(15.825.317,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0017	UPTD PUSKESMAS GURAH	2.720.289.000,00	2.670.543.093,00	(49.745.907,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0018	UPTD PUSKESMAS ADAN-ADAN	2.393.168.000,00	2.497.792.159,00	104.624.159,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0019	UPTD PUSKESMAS PAGU	2.488.058.063,00	2.386.996.240,00	(101.061.823,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0020	UPTD PUSKESMAS GAMPENG	2.159.597.716,00	2.156.351.737,00	(3.245.979,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0021	UPTD PUSKESMAS GROGOL	3.084.449.892,00	3.098.280.333,00	13.830.441,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0022	UPTD PUSKESMAS TANON	4.491.130.600,00	4.675.085.853,00	183.955.253,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0023	UPTD PUSKESMAS PURWOASRI	2.685.370.314,00	2.640.327.213,00	(45.043.101,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0024	UPTD PUSKESMAS SUMBERJO	2.540.279.700,00	2.422.915.713,00	(117.363.987,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0025	UPTD PUSKESMAS PUHJARAK	4.302.596.000,00	4.303.430.460,00	834.460,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0026	UPTD PUSKESMAS PARE	2.769.994.000,00	2.459.851.182,00	(310.142.818,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0027	UPTD PUSKESMAS BENDO	2.316.595.586,00	2.253.721.575,00	(62.874.011,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0028	UPTD PUSKESMAS SIDOREJO	2.769.532.000,00	2.907.259.480,00	137.727.480,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0029	UPTD PUSKESMAS KEPUNG	3.388.220.869,00	3.369.833.723,00	(18.387.146,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0030	UPTD PUSKESMAS KELING	3.082.599.827,00	3.287.117.605,00	204.517.778,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0031	UPTD PUSKESMAS KANDANGAN	4.673.564.468,00	4.707.090.755,00	33.526.287,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0032	UPTD PUSKESMAS TAROKAN	4.324.717.639,00	4.393.982.583,00	69.264.944,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0033	UPTD PUSKESMAS KUNJANG	3.096.841.821,00	3.102.133.178,00	5.291.357,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0034	UPTD PUSKESMAS TIRON	2.937.316.468,00	3.538.003.276,00	600.686.808,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0035	UPTD PUSKESMAS SAMBI	6.299.058.940,00	6.419.763.736,00	120.704.796,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0036	UPTD PUSKESMAS BANGSONGAN	1.909.132.000,00	1.897.979.382,00	(11.152.618,00)
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0037	UPTD PUSKESMAS KAYEN KIDUL	1.979.532.089,00	2.196.088.912,00	216.556.823,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0038	UPTD PUSKESMAS NGASEM	3.163.522.690,00	3.384.853.311,00	221.330.621,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0039	UPTD PUSKESMAS BADAS	5.096.914.400,00	5.412.604.505,00	315.690.105,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	127.793.985.697,00	135.393.864.901,00	7.599.879.204,00
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan	127.793.985.697,00	135.393.864.901,00	7.599.879.204,00

			Penataan Ruang			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	81.393.216.175,00	95.824.155.410,00	14.430.939.235,00
1	04	1.04.1.03.2.10.04.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	41.050.700.000,00	41.747.627.848,00	696.927.848,00
1	04	1.04.1.03.2.10.04.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	39.802.516.175,00	53.702.193.002,00	13.899.676.827,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	228.029.454.609,00	210.705.360.296,00	(17.324.094.313,00)
2	04	1.04.1.03.2.10.04.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	540.000.000,00	374.334.560,00	(165.665.440,00)
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.020.141.532.397,00	2.123.573.424.123,00	103.431.891.726,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	38.571.491.357,00	28.803.384.229,00	(9.768.107.128,00)
1	05	1.05.0.00.0.00.05.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	31.597.434.605,00	23.787.022.029,00	(7.810.412.576,00)
1	05	1.05.0.00.0.00.29.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.974.056.752,00	5.016.362.200,00	(1.957.694.552,00)
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	31.067.927.108,00	32.536.796.307,00	1.468.869.199,00
1	06	1.06.0.00.0.00.06.0000	DINAS SOSIAL	31.067.927.108,00	32.536.796.307,00	1.468.869.199,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	228.029.454.609,00	210.705.360.296,00	(17.324.094.313,00)
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.689.191.355,00	14.438.873.150,00	(250.318.205,00)
2	07	2.07.3.32.0.00.07.0000	DINAS TENAGA KERJA	14.639.191.355,00	14.416.931.950,00	(222.259.405,00)
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	150.178.965.099,00	156.807.635.238,00	6.628.670.139,00
3	07	2.07.3.32.0.00.07.0000	Dinas Tenaga Kerja	50.000.000,00	21.941.200,00	(28.058.800,00)
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG	228.029.454.609,00	210.705.360.296,00	(17.324.094.313,00)

			TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	34.938.585.249,00	35.510.550.749,00	571.965.500,00
2	09	2.09.3.27.0.00.08.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	15.421.170.249,00	14.785.190.749,00	(635.979.500,00)
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	150.178.965.099,00	156.807.635.238,00	6.628.670.139,00
3	09	2.09.3.27.0.00.08.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	19.517.415.000,00	20.725.360.000,00	1.207.945.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	228.029.454.609,00	210.705.360.296,00	(17.324.094.313,00)
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	52.009.819.000,00	40.046.717.148,00	(11.963.101.852,00)
2	11	2.11.0.00.0.00.09.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	52.009.819.000,00	40.046.717.148,00	(11.963.101.852,00)
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.147.712.145,00	13.953.588.924,00	(1.194.123.221,00)
2	12	2.12.0.00.0.00.10.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.147.712.145,00	13.953.588.924,00	(1.194.123.221,00)
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.464.109.900,00	16.118.424.600,00	4.700,00
2	13	2.13.0.00.0.00.11.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	13.464.109.900,00	16.118.424.600,00	2.654.314.700,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	35.281.322.755,00	35.870.266.199,00	588.943.444,00
2	14	2.14.2.08.0.00.12.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.993.553.652,00	3.196.588.802,00	1.203.035.150,00
2	14	2.14.2.08.0.00.12.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33.287.769.103,00	32.673.677.397,00	(614.091.706,00)
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	23.469.052.901,00	20.113.661.325,00	(3.355.391.576,00)

2	15	2.15.0.00.0.00.13.0000	Dinas Perhubungan	23.469.052.901,00	20.113.661.325,00	(3.355.391.576,00)
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.773.307.532,00	18.240.846.725,00	(1.532.460.807,00)
2	16	2.16.2.21.2.20.14.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.735.765.532,00	17.211.796.125,00	(1.523.969.407,00)
2	16	2.16.2.21.2.20.14.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	262.542.000,00	405.656.600,00	143.114.600,00
2	16	2.16.2.21.2.20.14.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	775.000.000,00	623.394.000,00	(151.606.000,00)
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16.537.629.288,00	15.558.466.970,00	(979.162.318,00)
2	17	2.17.0.00.0.00.15.0000	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	16.537.629.288,00	15.558.466.970,00	(979.162.318,00)
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.829.425.379,00	7.745.590.205,00	(83.835.174,00)
2	18	2.18.0.00.0.00.16.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.829.425.379,00	7.745.590.205,00	(83.835.174,00)
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.035.523.833,00	4.265.643.016,00	(769.880.817,00)
2	24	2.24.2.23.0.00.17.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	517.448.333,00	475.500.966,00	(41.947.367,00)
2	24	2.24.2.23.0.00.17.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.518.075.500,00	3.790.142.050,00	(727.933.450,00)
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	150.178.965.099,00	156.807.635.238,00	6.628.670.139,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.440.921.860,00	7.985.207.800,00	544.285.940,00
3	25	3.25.0.00.0.00.18.0000	Dinas Perikanan	7.440.921.860,00	7.985.207.800,00	544.285.940,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	228.029.454.609,00	210.705.360.296,00	(17.324.094.313,00)
2	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	23.254.583.869,00	24.877.333.753,00	1.622.749.884,00
2	26	3.26.2.22.0.00.19.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.324.207.872,00	6.288.286.025,00	964.078.153,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	150.178.965.099,00	156.807.635.238,00	6.628.670.139,00
3	26	3.26.2.22.0.00.19.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	17.930.375.997,00	18.589.047.728,00	658.671.731,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN	55.013.451.812,00	63.054.654.798,00	8.041.202.986,00

			BIDANG PERTANIAN			
3	27	3.27.0.00.0.00.20.0000	Dinas Pertanian dan Perkebunan	55.013.451.812,00	63.054.654.798,00	8.041.202.986,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	50.226.800.430,00	46.431.423.712,00	(3.795.376.718,00)
3	30	3.30.3.31.0.00.21.0000	Dinas Perdagangan	48.683.010.930,00	44.612.665.712,00	(4.070.345.218,00)
3	30	3.30.3.31.0.00.21.0000	Dinas Perdagangan	1.543.789.500,00	1.818.758.000,00	274.968.500,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	185.080.528.382,00	186.854.500.701,00	1.773.972.319,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	107.909.343.722,00	117.939.037.441,00	10.029.693.719,00
4	01	4.01.5.06.2.16.25.0000	Sekretariat Daerah	107.881.068.722,00	117.916.982.441,00	10.035.913.719,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	761.102.834.534,00	758.754.746.346,00	(2.348.088.188,00)
5	01	4.01.5.06.2.16.25.0000	Sekretariat Daerah	28.275.000,00	22.055.000,00	(6.220.000,00)
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	185.080.528.382,00	186.854.500.701,00	1.773.972.319,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	77.199.459.660,00	68.937.518.260,00	(8.261.941.400,00)
4	02	4.02.0.00.0.00.26.0000	Sekretariat DPRD	77.199.459.660,00	68.937.518.260,00	(8.261.941.400,00)
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	761.102.834.534,00	758.754.746.346,00	(2.348.088.188,00)
5	01		PERENCANAAN	12.097.599.499,00	10.822.394.221,00	(1.275.205.278,00)
5	01	5.01.0.00.0.00.22.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.097.599.499,00	10.822.394.221,00	(1.275.205.278,00)
5	02		KEUANGAN	729.449.299.065,00	730.196.283.635,00	746.984.570,00
5	02	5.02.0.00.0.00.23.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	681.738.600.054,00	687.077.122.178,00	5.338.522.124,00
5	02	5.02.0.00.0.00.23.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17.022.612.300,00	16.291.418.440,00	(731.193.860,00)
5	02	5.02.0.00.0.00.24.0000	Badan Pendapatan Daerah	30.688.086.711,00	26.827.743.017,00	(3.860.343.694,00)
5	03		KEPEGAWAIAN	12.350.377.270,00	11.505.175.890,00	(845.201.380,00)
5	03	5.03.5.04.0.00.25.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.867.247.270,00	10.040.717.390,00	(826.529.880,00)
5	03	5.03.5.04.0.00.25.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.483.130.000,00	1.464.458.500,00	(18.671.500,00)
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7.177.283.700,00	6.208.837.600,00	(968.446.100,00)

5	05	5.05.0.00.0.00.26.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.177.283.700,00	6.208.837.600,00	(968.446.100,00)
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	14.066.709.400,00	14.354.390.900,00	287.681.500,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	14.066.709.400,00	14.354.390.900,00	287.681.500,00
6	01	6.01.0.00.0.00.27.0000	Inspektorat	14.066.709.400,00	14.354.390.900,00	287.681.500,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	74.043.722.546,00	66.011.449.360,00	(8.032.273.186,00)
7	01		KECAMATAN	74.043.722.546,00	66.011.449.360,00	(8.032.273.186,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.30.0000	Kecamatan Mojo	2.646.885.900,00	2.046.012.826,00	(600.873.074,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.31.0000	Kecamatan Kras	3.225.007.280,00	2.720.079.290,00	(504.927.990,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.32.0000	Kecamatan Ngadiluwih	2.879.543.089,00	2.653.918.520,00	(225.624.569,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.33.0000	Kecamatan Kandat	2.467.345.169,00	1.925.303.399,00	(542.041.770,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.34.0000	Kecamatan Wates	3.120.904.000,00	2.912.568.480,00	(208.335.520,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.35.0000	Kecamatan Ngancar	2.672.367.500,00	2.347.832.300,00	(324.535.200,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.36.0000	Kecamatan Puncu	3.004.314.320,00	2.645.817.620,00	(358.496.700,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.37.0000	Kecamatan Plosoklaten	2.486.996.100,00	2.248.653.660,00	(238.342.440,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.38.0000	Kecamatan Gurah	2.564.490.850,00	2.354.511.178,00	(209.979.672,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.39.0000	Kecamatan Pagu	2.557.743.306,00	2.284.383.956,00	(273.359.350,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.40.0000	Kecamatan Gampengrejo	2.317.076.700,00	2.116.334.900,00	(200.741.800,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.41.0000	Kecamatan Grogol	2.374.595.900,00	2.155.890.000,00	(218.705.900,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.42.0000	Kecamatan Papar	2.984.024.585,00	2.708.503.085,00	(275.521.500,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.43.0000	Kecamatan Purwoasri	3.129.147.600,00	2.951.054.900,00	(178.092.700,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.44.0000	Kecamatan Plemahan	2.889.922.572,00	2.515.753.472,00	(374.169.100,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.45.0000	Kecamatan Pare	5.440.105.755,00	4.916.043.528,00	(524.062.227,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.46.0000	Kecamatan Kepung	2.834.880.900,00	2.683.324.900,00	(151.556.000,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.47.0000	Kecamatan Kandangan	3.223.801.400,00	3.100.489.700,00	(123.311.700,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.48.0000	Kecamatan Tarokan	2.655.448.370,00	2.284.075.818,00	(371.372.552,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.49.0000	Kecamatan Kunjang	2.974.984.400,00	2.784.676.600,00	(190.307.800,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.50.0000	Kecamatan Banyakan	3.361.143.124,00	2.904.436.934,00	(456.706.190,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.51.0000	Kecamatan Ringinrejo	2.428.461.400,00	1.921.659.450,00	(506.801.950,00)

7	01	7.01.0.00.0.00.52.0000	Kecamatan Kayen Kidul	2.388.026.000,00	2.077.783.000,00	(310.243.000,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.53.0000	Kecamatan Ngasem	2.373.863.288,00	2.260.157.920,00	(113.705.368,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.54.0000	Kecamatan Badas	2.765.008.160,00	2.319.397.750,00	(445.610.410,00)
7	01	7.01.0.00.0.00.55.0000	Kecamatan Semen	2.277.634.878,00	2.172.786.174,00	(104.848.704,00)
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	19.098.626.290,00	20.370.613.870,00	1.271.987.580,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	19.098.626.290,00	20.370.613.870,00	1.271.987.580,00
8	01	8.01.0.00.0.00.28.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	19.098.626.290,00	20.370.613.870,00	1.271.987.580,00
TOTAL				**3.451.742.373.257,00**	**3.537.432.120.834,00**	**85.689.747.577,00**

Sumber Data : BKAD Kabupaten Kediri

Sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, total Belanja Daerah sebesar Rp.3.537.432.120.834,00 apabila dibandingkan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp.3.314.665.162.885,54 terdapat Defisit Anggaran sebesar (Rp.222.766.957.948,46).

2.1.5. Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam menyusun Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1) Penyesuaian belanja terkait perubahan Alokasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
2) Penyesuaian belanja terkait Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan ketentuan yang mendasarinya.
3) Penyesuaian belanja pada Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan.

4) Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dengan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah.

2.1.6. Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah untuk membiayai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangannya berdasarkan skala prioritas sesuai dengan ketentuan berlaku dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua.

2.1.7. Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Belanja Daerah

Ringkasan Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 9 Ringkasan Belanja Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM	SETELAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.504.621.510.572,00**	**2.553.997.946.746,00**	**49.376.436.174,00**	**1,97%**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.356.081.876.770,00	1.315.424.098.118,00	(40.657.778.652,00)	-3,00%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	955.914.464.746,00	1.021.545.417.028,00	65.630.952.282,00	6,87%
5.1.05	Belanja Hibah	152.844.943.556,00	179.202.431.600,00	26.357.488.044,00	17,24%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	39.780.225.500,00	37.826.000.000,00	(1.954.225.500,00)	-4,91%
5.2	**BELANJA MODAL**	**277.582.643.517,00**	**309.036.133.990,00**	**31.453.490.473,00**	**11,33%**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.908.795.600,00	7.152.547.600,00	243.752.000,00	3,53%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.818.915.751,00	79.779.859.989,00	28.960.944.238,00	56,99%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	127.397.468.910,00	122.349.047.511,00	(5.048.421.399,00)	-3,96%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.264.894.233,00	98.319.911.867,00	7.055.017.634,00	7,73%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	872.569.023,00	874.767.023,00	2.198.000,00	0,25%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	320.000.000,00	560.000.000,00	240.000.000,00	75,00%
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**17.911.034.168,00**	**22.270.855.098,00**	**4.359.820.930,00**	**24,34%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.911.034.168,00	22.270.855.098,00	4.359.820.930,00	24,34%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**651.627.185.000,00**	**652.127.185.000,00**	500.000.000,00	0,08%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	36.500.000.000,00	36.500.000.000,00	0,00	0,00%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	615.127.185.000,00	615.627.185.000,00	500.000.000,00	0,08%
TOTAL BELANJA		**3.451.742.373.257,00**	**3.537.432.120.834,00**	**85.689.747.577,00**	**2,48%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Kediri

2.2. Kondisi Dan Kebijakan Perubahan Anggaran Pembiayaan

2.2.1. Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan daerah terdiri atas:

   1) penerimaan pembiayaan; dan

   2) pengeluaran pembiayaan.

b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Adapun pembiayaan pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Kode	Jenis Pembiayaan Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (berkurang)	%
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**212.660.560.926,00**	**235.944.377.304,46**	**23.283.816.378,46**	**10,95%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	212.660.560.926,00	235.944.377.304,46	23.283.816.378,46	10,95%
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**27.500.000.000,00**	**13.177.419.356,00**	**(14.322.580.644,00)**	**-52,08%**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00%
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	24.000.000.000,00	9.677.419.356,00	(14.322.580.644,00)	-59,68%

Sumber Data : BKAD Kabupaten Kediri

2.2.2. Permasalahan Utama Perubahan Pembiayaan

Permasalahan utama pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu:

1. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 yang harus digunakan dan dianggarkan kembali pada tahun berjalan.
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo pada RSUD Kabupaten Kediri.

2.2.3. Kebijakan Umum Perubahan Pembiayaan

Kebijakan Umum Pembiayaan pada Rancangan Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan sisa lebih penerimaan anggaran tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sisa dana yang berasal dari sumber dana spesifik, dianggarkan kembali atau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sisa dana yang berasal dari sumber dana non spesifik digunakan untuk prioritas daerah dalam perubahan kebijakan umum APBD.
4. Penyesuaian pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo pada RSUD Kabupaten Kediri.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri

Capaian pelaksanaan kinerja pemerintah daerah adalah hasil konkret, terukur, dan terukur dari penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Ini merupakan indikator keberhasilan yang diukur berdasarkan target (sasaran) yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Hal ini mengandung makna bahwa capaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yaitu target kinerja yang ada di dalam RPJMD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

Dalam konteks perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, maka manajemen kinerja yang dimaksud adalah membandingkan antara capaian kinerja dengan perencanaan kinerja yang sudah dilaksanakan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah membandingkan antara sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Prinsip-prinsip dan sistematika yang diinformasikan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realiasi tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah.
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan jangka menengah/RPJMD.
d. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar provinsi dan nasional.

Dalam mengukur persentase capaian, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut;

1. Persentase capaian meningkat (positif)

   Rumus persentase capaian positif digunakan untuk mengukur target yang meningkat adalah sebagai berikut:

$$\frac{Realisasi}{Target} \; x \; 100$$

2. Persentase capaian menurun (negatif)

   Rumus persentase capaian negatif digunakan untuk mengukur target yang menurun adalah sebagai berikut:

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \; x \; 100$$

Gambaran capaian pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025 tersaji dalam data sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah

Tabel 11 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data dan Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	**Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**75,69**	**76,09**	**100,53%**	**Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025**
		Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,65	13,77	100,88%	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/7/418.20/2026
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,3	8,38	100,96%	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/7/418.20/2026
		Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	75,07	75,41	100,45%	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2026 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Kesehatan tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/1913/418.25/2026
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**5,0**	**4,71**	**105,80%**	**Berita Resmi Statistik No. 14/12/3506/Th. XXIX, 24 Desember 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja tanggal 27 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/6/418.30/2026 (Pengukuran Bermakna Negatif)**
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,31	69,65	97,67%	Berita Resmi Statistik No. 14/12/3506/Th. XXIX, 24 Desember 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja tanggal 30 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/8/418.30/2026

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data dan Keterangan
		Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	**Persentase Angka Kemiskinan**	**9,8**	**9,81**	**99,90%**	**Berita Resmi Statistik No. 09/09/3506/Th. XXIX, 25 September 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Sosial tanggal 22 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/2/418.26/2026 (Pengukuran Bermakna Negatif)**
		Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	90,05	89,63	99,04	Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi Inkelud sebagaimana termuat dalam Surat Kepala DP2KBP3A tanggal 27 Januari 2026 nomor 000.8.6.2/16/418.22/2026
		Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	**79**	**79**	**100,00%**	**Laporan Akhir Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 22 Januari 2026 nomor 000.8.63/3/418.62/2026**
		Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%	Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 22 Januari 2026 nomor 000.8.63/3/418.62/2026
2	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**85,99**	**83,16***	**96,71%**	**Diambil per tanggal 12 Februari 2025 dari Menu Evaluasi pada portalrb.id sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Bagian Organisasi tanggal 29 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/2/418.09/2026**
		Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	80	66,52	83,15%	Surat Menteri PANRB tanggal 30 Desember 2025 nomor B/513/AA.05/2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Bagian Organisasi tanggal 29 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/2/418.09/2026
			I K M	88,74	88,01	99,17 %	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Bagian Organisasi tanggal 29 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/2/418.09/2026
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No. 67.A/LHP/XVIII.SBY/05/2025 Tanggal 23 Mei Tahun

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data dan Keterangan
							2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala BKAD tanggal 29 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/0578/418.51/2026
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,85	3,85	100,00%	Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXVII tanggal 15 Juli 2024, Laporan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 Badan Pusat Statistik sebagaimana termuat dalam Surat Inspektur tanggal 20 Januari 2026 nomor 600.4.23.1/29/418.11/2026
		Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	81,62	83,67	102,51	Data IP ASN per 5 Januari 2026 Sumber : https://asndigital.bkn.go.id, Berdasarkan Surat BKN Nomor 15014/BBM.02.01/SD/C.VII/2025 tanggal 24 Oktober 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala BKPSDM tanggal 22 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/3/418.50/2026
		Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4,62	4,62	100,00%	Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tanggal 27 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/67/418.31/2026
3	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	**Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**4,65 – 5,35**	**5,03**	**108,17%**	**Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2026 No. Katalog: 1102001.3506 ISSN 0215-5585 Hal 653 Tabel 12.4**
		Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	29,99%	-63,58%	-212,00%	Laporan Realisasi Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 30 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/17/418.27/2026

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data dan Keterangan
		Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1.393.267	1.080.667	77,56%	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.XXIX, 21 November 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tanggal 21 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/28/418.28/2026 dan Surat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.7.2.6/25/418.29/2026
4	Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	**Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	**3,03**	**5,96**	**196,70%**	**Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2026 No. Katalog: 1102001.3506 ISSN 0215-5585 Hal 653 Tabel 12.4**
		Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	146,44 kg/kapita/ tahun	148,88 kg/kapita/ tahun	101,67%	Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tanggal 28 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/6/418.36/2026
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104,69	113,73	108,68%	Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/91/418.37/2026
5	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	**Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**70**	**81,19**	**115,98%**	**Laporan Akhir Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Kediri 2025 Hal. 122 Kategori Kepuasan**
		Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	87%	89,37%	102,70%	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/32/418.33/2026
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi	80,79%	88,26%	109,25%	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/32/418.33/2026

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data dan Keterangan
			baik				
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100%	100%	100%	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/32/418.33/2026
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86,08%	86,10%	100,01 %	Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 2 Februari 2026 000.8.6.3/27/418.32/2026
			Persentase Rumah Layak Huni	53,55%	54,15 %	101,12 %	Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 2 Februari 2026 000.8.6.3/27/418.32/2026
		Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	87,44	81,47	93,17%	Surat Kepala Dinas Perhubungan tanggal 23 Januari 2025 nomor 000.8.6.3/97/418.34/2026
6	Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	**Tujuan : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah**	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	**9,79**	**8,85**	**90,40%**	**Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2026 No. Katalog: 1102001.3506 ISSN 0215-5585 Hal 653 Tabel 12.4**
		Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	10,95%	0,33%	3,01%	Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 7 Maret 2026 nomor 000.8.6.3/14/418.21/2026

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data dan Keterangan
7	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana	**Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	**70,50**	**69,64**	**98,78%**	**Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/328/418.35/2026**
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	72,37	74,21	102,54%	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/328/418.35/2026
			Indeks Kualitas Udara	79,65	71,66	89,97%	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/328/418.35/2026
			Indeks Kualitas Lahan	39,34	58,05	147,56%	Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/328/418.35/2026
		Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	93,35	103,85	88,75%	Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 30 Januari 2026 nomor B-44/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Pelaksana BPBD tanggal 10 Februari 2026 nomor 000.8.6.3/12/418.74/2026
8	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	**Tujuan : Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah**	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	**98,21**	**90,90%**	**92,55%**	**Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 29 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/23/418.21/2026**
		Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	56,65%	58,30%	102,91%	Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 29 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/23/418.21/2026
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	**89**	**73,00**	**82,02%**	Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/7/418.20/2026

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data dan Keterangan
		Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	65,28%	76,97%	117,91	Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/7/418.20/2026
9	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	**Tujuan :** **Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa**	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	**0,78**	**0,78**	**100,00%**	**Keputusan Menteri Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/8/418.24/2026**
		Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	94,46%	97,38%	103,09%	Keputusan Menteri Nomor 343 Tahun 2025 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/8/418.24/2026

*) Data resmi namun Sementara
Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri

Catatan:
Pertumbuhan investasi daerah selama tahun 2022-2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2022 capaian pertumbuhan sebesar 35,07%, diikuti tahun 2023 sebesar 26,16% dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 29,99%, yang mencerminkan kondisi investasi daerah masih tumbuh positif dan relatif stabil. Namun pada tahun 2025 pertumbuhan investasi tercatat -63,58%, yang disebabkan oleh selesainya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi kontributor utama realisasi investasi daerah. Namun, apabila dilakukan perbandingan data dengan membandingkan Investasi Non-Bandara, maka terdapat pertumbuhan sebesar 16,1% (dari Rp1,45 Triliun di tahun 2024 menjadi Rp1,69 Triliun di tahun 2025);

Rentang Realisasi Capaian Kinerja :

Rentang Capaian	Jumlah Data	Persentase dari Total
> 100%	20	46,51%
80% > x >100%	20	46,51%
60% > x > 80%	1	2,33%
< 60%	2	4,65%
Total	**43**	**100%**

Berdasarkan data diatas, realisasi capaian kinerja diatas 100% sebanyak 20 indikator (46,51%), rentang 80% - 100% sebanyak 20 indikator (46,51%), 60% - 80% sebanyak 1 indikator (2,33%) dan kurang dari 60% sebanyak 2 indikator (4,65%). Dapat diartikan bahwa realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025 berdasarkan penjanjian kinerja Kepala Daerah mayoritas mencapai target dan melampui target yang ditetapkan.

3.1.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan Capaian
1	2	1	2	3	4	5	6	7
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	**Tujuan 1 :** **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**74,2**	**74,68**	**75,18**	**76,09**	**Meningkat (74,2 ke 76,09)**
		Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,61	13,62	13,63	13,77	Meningkat (13,61 ke 13,77)
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,23	8,24	8,26	8,38	Meningkat (8,23 ke 8,38)
		Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	74,58	74,85	75,07	75,41	Meningkat (74,58 ke 75,41)
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	**6,83**	**5,79**	**5,10**	**4,71**	**Menurun (Positif/Lebih Baik) (6,83% ke 4,71%)**
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,73	68,74	71,31	69,65	Meningkat (68,73% - 69,65%)

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan Capaian
1	2	1	2	3	4	5	6	7
		Tujuan 2 : **Menurunkan angka kemiskinan**	**Persentase Angka Kemiskinan**	**10,65%**	**10,72%**	**9,95%**	**9,81%**	**Menurun (Positif/Lebih Baik) (10,65% ke 9,81%)**
		Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	71,12%	84,78%	90,05%	89,63%	Meningkat (71,12% ke 89,63%)
		Tujuan 3 : **Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah**	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	**-**	**77,86**	**79**	**79**	**Meningkat (77,86 ke 79)**
		Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%	100%	Stabil (Konsisten 100%)
2	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Tujuan :** **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**65,66**	**77,00**	**87,09**	**83,16**	**Meningkat (65,66 ke 83,16)**
		Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	68,33	68,21	67,16	66,52	Menurun (68,33 ke 65,52)
			I K M	85,77	86,40	88,74	88,01	Meningkat (85,77 ke 88,01)
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	Stabil (Konsisten WTP)

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan Capaian
1	2	1	2	3	4	5	6	7
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,93	3,92	3,85	3,85*	Menurun (3,93 ke 3,85)
		Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	82,23	81,62	83,67	83,67	Meningkat (82,23 ke 83,67)
		Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	2,61	4,27	4,62	4,62	Meningkat (2,61 ke 4,62)
3	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	**Tujuan :** **Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**4,9**	**4,53**	**4,95**	**5,03**	**Meningkat (4,9 ke 5,03)**
		Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	35,07 %	26,16 %	29,99%	-63,58%	Menurun (35,07 % ke -63,58%)
		Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Rp963.750	Rp996.000	Rp1.032.333	Rp1.080.667	Meningkat (Rp963.750 ke Rp1.080.667)
4	Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	**Tujuan :** **Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	**0,02**	**3,03**	**-1,73**	**5,96**	**Meningkat (0,02 ke 5,96)**

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan Capaian
1	2	1	2	3	4	5	6	7
		Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	117,48 kg/kapita/ tahun	128,08 kg/kapita / tahun	146,44 kg/kapita/ tahun	148,88 kg/kapita / tahun	Meningkat (117,48 ke 148,88 kg/kapita)
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	103,54	104,44	104,65	113,73	Meningkat (103,54 ke 113,73)
5	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	**Tujuan :** **Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**66,82**	**-**	**69,84**	**81,19**	**Meningkat (66,82 ke 81,19)**
		Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	87,99%	79,08%	86,99%	89,37%	Meningkat (87,99% ke 89,37%)
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	74,68%	69,17%	80,79%	88,26%	Meningkat (74,68% ke 88,26%)
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	31,25%	62,5	100%	100%	Meningkat (31,25% ke 100%)
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	85,23%	86%	86,08%	86,10%	Meningkat (85,23% ke 86,10%)
			Persentase Rumah Layak Huni	29,95%	41,14%	53,55%	54,15%	Meningkat (29,95% ke 54,15%)

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan Capaian
1	2	1	2	3	4	5	6	7
		Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	86,48	86,59	87,44	81,47	Menurun (86,48 ke 81,47)
6	Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	**Tujuan :** **Meningkatkan daya saing pariwisata daerah**	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	**12,40**	**9,79**	**9,70**	**8,85**	**Menurun (12,40 ke 8,85)**
		Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	95,58%	18,31%	10,95%	0,33%	Menurun (95,58% ke 0,33%)
7	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana	**Tujuan :** **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	**64,79**	**67,42**	**70,49**	**69,64**	Meningkat (64,79 ke 69,64)
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	62,22	62,97	62,97	74,21	Meningkat (62,22 ke 74,21)
			Indeks Kualitas Udara	80,94	86,12	94,31	71,66	Menurun (80,94 ke 71,66)
			Indeks Kualitas Lahan	39,34	40,49	39,34	58,05	Meningkat (39,34 ke 58,05)

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan Capaian
1	2	1	2	3	4	5	6	7
		Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	112,47	104,53	97,89	103,85	Menurun (Positif/Lebih Baik) (112,47 ke 103,85) : Sesuai Surat BNPB nomor B-4/BNPB/D-I/ISS.01.03/1/2026 dalam point 5. bahwa Nilai IRB Tahun 2025 dihitung menggunakan komponen baseline yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024.
8	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	**Tujuan :** **Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah**	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	**80,77%**	**98,11%**	**98,21%**	**90,90%**	**Meningkat (80,77% ke 90,90%)**
		Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	22,99%	35,86%	56,65%	58,30%	Meningkat (22,99% ke 58,30%)
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	**73,96**	**57,30**	**60,00**	**73,00**	**Menurun (73,96 ke 73,00)**

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Keterangan Capaian
1	2	1	2	3	4	5	6	7
		Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	58,26	59,50	65,28	76,97	Meningkat (58,26 ke 76,97)
9	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	**Tujuan :** **Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa**	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	**0,73**	**0,75**	**0,78**	**0,78**	**Meningkat (0,73 ke 0,78)**
		Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	63,56%	84,55%	94,46%	97,38%	Meningkat (63,56% ke 97,38%)

*) Data resmi namun Sementara
Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri

Rentang Kategori Realisasi Capaian Kinerja :

Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
Meningkat	30	69,77%
Menurun (Positif/Lebih Baik)	3	6,98%
Stabil/Konsisten	2	4,65%
Menurun	8	18,60%
TOTAL	**43**	**100%**

Realisasi Capaian Kinerja meningkat dapat diartikan bahwa hasil aktual atau pencapaian kerja yang dicapai pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Realisasi Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025 mayoritas meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.. Terdapat 30 indikator dengan kategori Meningkat atau sebesar 69,77%, 3 indikator dengan kategori Menurun Positif atau sebesar 6,98%, 2 indikator dengan kategori Stabil/Konsisten atau sebesar 4,65%, 8 indikator dengan kategori Menurun atau sebesar 18,6%.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah/RPJMD

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target RPJMD

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*6*	7
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	**Tujuan 1 :** **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**75,65**	**76,09**	**100,58%**	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,65	13,77	100,88%	Melampaui Target Jangka Menengah
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,30	8,38	100,96%	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	72,87	75,41	100,45%	Melampaui Target Jangka Menengah
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,6	4,71	97,61%	Mendekati Target Jangka Menengah
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,50	69,65	97,41%	Mendekati Target Jangka Menengah

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*6*	*7*
		dan kesempatan kerja					
		Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	8,04	9,81	77,99%	Cukup Mendekati Target Jangka Menengah
		Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	73,11	89,63	122,59%	Melampaui Target Jangka Menengah
		Tujuan 3 : **Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah**	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	**79**	**79**	**100,00%**	Mencapai Target Jangka Menengah
		Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100,00%	Mencapai Target Jangka Menengah
2	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Tujuan :** **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**80**	**83,16**	**103,95%**	Melampaui Target Jangka Menengah

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*6*	*7*
		Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	82	66,52	81,12%	Mendekati Target Jangka Menengah
			I K M	86	88,01	102,30%	Melampaui Target Jangka Menengah
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	Mencapai Target Jangka Menengah
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,76	3,85*	102,39%	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	71,00	83,67	117,85%	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4,76	4,62	97,06	Mendekati Target Jangka Menengah
3	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	**Tujuan :** **Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**6,22**	**5,03**	**80,87%**	**Mendekati Target Jangka Menengah**
		Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	29,99%	-63,58%	-212,00%	Kurang Mendekati Target Jangka Menengah

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*6*	*7*
		Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1.310.563	1.080.667	82.46%	Mendekati Target Jangka Menengah
4	Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	**Tujuan :** **Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	**0,44**	**5,96**	**1354,55%**	**Melampaui Target Jangka Menengah**
		Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	147,56 kg/kapita/ tahun	148,88 kg/kapita/ tahun	100,90%	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	105	113,73	108,31 %	Melampaui Target Jangka Menengah
5	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	**Tujuan :** **Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**69,30**	**81,19**	**117,15%**	**Melampaui Target Jangka Menengah**
		Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	89,69%	89,37%	99,64%	Mendekati Target Jangka Menengah
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	92,20%	88,26%	95,70%	Mendekati Target Jangka Menengah

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*6*	7
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100%	100%	100%	Mencapai Target Jangka Menengah
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	93,15%	86,10%	92,43%	Mendekati Target Jangka Menengah
			Persentase Rumah Layak Huni	82,51%	54,15%	65,63%	Cukup Mendekati Target Jangka Menengah
		Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	86,25	81,47	94,46%	Mendekati Target Jangka Menengah
6	Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	**Tujuan :** **Meningkatkan daya saing pariwisata daerah**	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	**5,04**	**8,85**	**175,60%**	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	9%	0,33%	3,67%	Kurang Mendekati Target Jangka Menengah
7	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi	**Tujuan :** **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	**65**	**69,64**	**107,14%**	Melampaui Target Jangka Menengah

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*6*	*7*
	Bencana	Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	62,97	74,21	117,85%	Melampaui Target Jangka Menengah
			Indeks Kualitas Udara	77,68	71,66	92,25%	Mendekati Target Jangka Menengah
			Indeks Kualitas Lahan	37,42	58,05	115,13%	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	116,32	103,85	110,72%	Melampaui Target Jangka Menengah
8	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	**Tujuan :** **Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah**	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	**90%**	**90,90%**	**101%**	Melampaui Target Jangka Menengah
		Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	10%	58,30%	583%	Melampaui Target Jangka Menengah
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	99,00	73,00	73,73%	Cukup Mendekati Target Jangka Menengah

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2025	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	6	*6*	*7*
		Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	100,00%	76,97%	76,97%	Cukup Mendekati Target Jangka Menengah
9	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	**Tujuan :** **Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa**	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	**0,75**	**0,78**	**104,00%**	**Melampaui Target Jangka Menengah**
		Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	68,80%	97,38%	141,54%	Melampaui Target Jangka Menengah

*) Data resmi namun Sementara

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri

Rentang Kategori Realisasi Capaian Kinerja :

Kategori Capaian	Jumlah Indikator	Persentase
Melampaui Target (>100%)	22	51,2%
Mencapai Target (100%)	4	9,3%
Mendekati Target (80% >x> 100%)	11	25,6%
Cukup Mendekati (60% >x> 80%)	4	9,3%
Kurang/Jauh dari Target (< 60%)	2	4,6%
Total	**43**	**100%**

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, data diatas menunjukkan bahwa Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah/RPJMD Tahun 2021-2026 mayoritas terealisasi dengan kategori melampaui target.

Bedasarkan data diatas, dari 43 indikator, terdapat 22 indikator dengan kategori Melampaui Target (51,2%), 4 indikator dengan kategori Mencapai Target (9,3%), 11 indikator dengan kategori Mendekati Target (25,6%), 4 indikator dengan kategori Cukup Mendekati Target (9,3%), dan 2 indikator dengan kategori Kurang/Jauh dari Target (4,6%).

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025 Dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Provinsi dan Nasional Tahun 2025

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten Kediri	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tujuan 1 : **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	76,09	76,13	75,9	Lebih rendah dari Provinsi (76,13), namun lebih tinggi dari Nasional (75,9)
Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,77	13,44	13,30	Lebih tinggi dari Provinsi (13,44) dan Nasional (13,30).
	Rata-Rata Lama Sekolah	8,38	8,81	9,07	Lebih rendah dari Provinsi (8,81) dan Nasional (9,07).
Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	75,41	75,36	74,47	Lebih tinggi dari Provinsi (75,36) dan Nasional (74,47).
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,71	3,88	4,85	Lebih tinggi dari Provinsi (3,88%), namun lebih rendah (lebih baik) dari Nasional (4,85%).
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,65	73,98	70,59	Lebih rendah dari Provinsi (73,98%) dan Nasional (70,59%).
Tujuan 2 : **Menurunkan angka kemiskinan**	**Persentase Angka Kemiskinan**	9,81%	9,50%	8,47%	Lebih tinggi dari Provinsi (9,50%) dan Nasional (8,47%).

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten Kediri	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	89,63	90,50	91,53	Sedikit lebih rendah dari Provinsi (90,50%) dan Nasional (91,53%).
Tujuan 3 : **Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah**	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	79	84,17	79,81	Lebih rendah dari Provinsi (84,17) dan Nasional (79,81).
Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di Masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%	-
Tujuan : **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan public**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	83,16	-	71,83 (Rata-rata Nasional)	Diatas rata-rata Nasional (71,83). Tidak ada pembanding Provinsi.
Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	66,52	-	64,89 (Rata-rata Nasional)	Di atas rata-rata Nasional (64,89). Tidak ada pembanding Provinsi.
	I K M	88,01	89,71	-	Sedikit lebih rendah dari Provinsi (89,71). Tidak ada pembanding Nasional.
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	-	Mempertahankan standar tertinggi, selaras dengan Provinsi.
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,85	-	-	Tidak ada Pembanding Data

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten Kediri	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	83,67	IP PNS : 83,15 IP PPPK : 70,37	-	Sedikit diatas capaian Provinsi
Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	4,62	4,04	3,80	Diatas Provinsi (4,04) dan Nasional (3,80).
Tujuan : **Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	5,03	5,85	5,11	Sedikit di bawah Provinsi (5,85%) dan Nasional (5,11%).
Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	1,69 Triliun Rupiah	147,7 Triliun Rupiah	1.931,2 Triliun Rupiah	Dibawah capaian Provinsi dan Nasional
Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Rp1.080.667	Rp1.125.500	Rp1.066.833	Lebih rendah dari Provinsi (Rp1.125.500), namun lebih tinggi dari Nasional (Rp1.066.833).
Tujuan : **Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	5,96	4,98	5,33	Lebih tinggi dari Provinsi (4,98) dan Nasional (5,33)
Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan Masyarakat	Ketersediaan pangan utama	148,88 kg/kapita/ tahun	144,45 kg/kapita / tahun	140,60 kg/kapita/ tahun	Lebih tinggi dari Provinsi (144,45) dan Nasional (140,60).

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten Kediri	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	113,73	113,29	123,26	Lebih tinggi dari Provinsi (113,73), lebih rendah dari Nasional (123,26)
Tujuan : **Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	81,19	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	89,37%	-	-	Tidak ada Pembanding Data
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	88,26%	-	-	Tidak ada Pembanding Data
	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100%	-	-	Tidak ada Pembanding Data
	Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86,10%	-	-	Tidak ada Pembanding Data
	Persentase Rumah Layak Huni	54,15%	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	81,47	93,00	96,414	Lebih rendah dari Provinsi (93,00).
Tujuan : **Meningkatkan daya saing pariwisata daerah**	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	8,85	8,06	2,68	Lebih tinggi dari Provinsi (8,06) dan Nasional (2,68)

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten Kediri	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	0,33%	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Tujuan : **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	69,64	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	74,21	-	-	Tidak ada Pembanding Data
	Indeks Kualitas Udara	71,66	-	-	Tidak ada Pembanding Data
	Indeks Kualitas Lahan	58,05	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	103,85	108,36	-	Lebih rendah (lebih baik) dari Rata-rata Kab/Kota se-Provinsi Jawa Timur.
Tujuan : **Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah**	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	**90,90%**	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	58,30%	-	-	Tidak ada Pembanding Data

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten Kediri	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	73,00	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	76,97%	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Tujuan : **Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa**	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	0,78	-	-	Tidak ada Pembanding Data
Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	97,38%	92,67%	58,57%	Diatas Provinsi (92,67%) dan Nasional (58,57%).

*) Data resmi namun Sementara

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri

Kategori Posisi Perbandingan Capaian Kinerja :

Kategori Posisi	Jumlah Indikator (Dibanding Provinsi)	Jumlah Indikator (Dibanding Nasional)
Lebih Tinggi	11	13
Lebih Rendah	13	11
Sama	2	2
Tidak Ada Pembanding	17	17
TOTAL	**43**	**43**

Berdasarkan data diatas, perbandingan dengan Nasional, indikator yang Lebih Tinggi sebanyak 13 (30,23%), indikator yang Lebih Rendah sebanyak 11 (25,58%) dan indikator yang Sama sebanyak 2 (4,65%). Sedangkan perbandingan dengan Provinsi, indikator yang Lebih Tinggi sebanyak 11 (25,58%), indikator yang Lebih Rendah sebanyak 13 (30,23%) dan indikator yang Sama sebanyak 2 (4,65%). Dapat diartikan bahwa Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri cenderung Lebih Tinggi dari Capaian Nasional, namun cenderung Lebih Rendah dari Capaian Provinsi Jawa Timur.

3.2. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan/sasaran strategis, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Komponen utama meliputi pengukuran, analisis, dan pelaporan kinerja secara transparan guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas penggunaan anggaran.

Merujuk pada konsep akuntabilitas, penjelasan tentang akuntabilitas kinerja dalam penjelasan berikutnya didasarkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, prosedur dan alur manajemen, menakisme komunikasi dan koordinasi, pelaksanaan operasional, dan manajemen kinerja yang bermutu. Konsep-konsep secara operasional akan dijelaskan menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang relevan dengan sistem akuntabilitas. Dimana secara teknis diatur dalam Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 yang mengatur evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sebagai analisis sistematis untuk menilai kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2025 akan ditinjau dari berbagai perspektif dengan sistematika yang diinformasikan memuat hal-hal :

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
b. Analisis Akuntabilitas Kinerja.
c. Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025 secara keseluruhan tersaji pada data sebagai berikut :

3.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 15 Analisis Kinerja dan Solusi Yang Dilakukan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri yang menempatkan urusan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah dan program peningkatak akses serta pemerataan layanan pendidikan; 2. Ketersediaan satuan pendidikan dan Lembaga pendidikan nonformal (PKBM) di hamper seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kediri sebagai usaha Menunjang peluang anak untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah; 3. Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan dan Data ATS yang optimal sebagai dasar perencanaan program intervensi termasuk penargetan bantuan pendidikan. 4. Dukungan Pemerintah Pusat melalui Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	1. Keterbatasan jangkauan layanan pendidikan dan sarana transportasi di beberapa wilayah tertentu di Kabupaten Kediri masih menjadi kendala keberlanjutan anak untuk bersekolah; 2. Belum optimalnya intervensi pencegahan anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri; 3. Rendahnya dukungan konseling, motivasi belajar, dan pendampingan sosial bagi anak berisiko putus sekolah masih perlu ditingkatkan. 4. Kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mampu mengakibatkan anak cenderung menghadapi tekanan untuk bekerja atau membantu ekonomi keluarga sehingga berpotensi tidak sekolah;	1. Pemberian Beasiswa Pendidikan Kediri Berbudaya bagi masyarakat tidak mampu sebagai salah satu upaya meringankan beban biaya pendidikan dan mencegah anak putus sekolah; 2. Penguatan program pendidikan kesetaraan melalui Lembaga pendidikan nonformal (PKBM) sebagai tempat menempuh pendidikan lanjutan bagi anak putus skolah dan usia dewasa melalui kejar Paket A, B, dan C. 3. Pendataan dan Verifikasi Data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri sebagai dasar penentuan sasaran program intervensi pendidikan; 4. Koordinasi lintas bidang, lintas sector	1. Penguatan strategi pencegahan anak tidak sekolah berbasis data sekolah dan data desa; 2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat Kabupaten Kediri serta integrasi program pendidikan dengan pengarusutamaan gener dan inklusi sosial; 3. Penguatan peran sekolah dan guru BK dalam pendampingan peserta didik berisiko tidak melanjutkan sekolah 4. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas aktor (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan dan Desa) 5. Peningkatan peran pemerintah desa dan peningkatan sosialisasi pentingnya pendidikan menengah oleh organisasi kemasyarakatan; 6. Mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk memberikan motivasi dan gambaran manfaat pendidikan bagi masa depan anak di Kabupaten Kediri. 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan SDM : kegiatan pelatihan diperluas dan disempurnakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. 8. Evaluasi kinerja dan kebutuhan tenaga kesehatan : memastikan kecukupan dan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		(BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai salah satu usaha membantu menekan risiko putus sekolah; 5. Partisipasi orang tua, lemabga sosial dalam mendorong anak tetap bersekolah; 6. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup. 7. Ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup dan kompeten : mendukung mutu dan keberlangsungan pelayanan kesehatan. 8. Adanya program peningkatan kapasitas SDM (pelatihan, diklat, sertifikasi) 9. Dukungan anggaran untuk pengembangan SDM 10. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah : memperkuat arah dan pelaksanaan pembangunan kesehatan 11. Kerja sama dengan	5. Budaya kerja dini dan pernikahan di usia dini yang meningkat di Kabupaten Kediri karena masih terdapat pandangan bahwa melanjutkan pendidikan bukan prioritas utama; 6. Distribusi tenaga kesehatan belum merata : menyebabkan ketimpangan pelayanan antar wilayah. 7. Keterbatasan kompetensi sebagian SDM : memengaruhi kualitas dan efektivitas layanan kesehatan. 8. Tingginya beban kerja tenaga kesehatan : berdampak pada kinerja dan mutu pelayanan. 9. Distribusi tenaga kesehatan belum merata : menyebabkan ketimpangan pelayanan antar wilayah. 10. Keterbatasan kompetensi sebagian SDM : memengaruhi kualitas dan efektivitas	dan lintas actor dalam rangka penguatan perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian pendidikan. 5. Sinergitas dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam pleaporan, monitoring, evaluasi serta pendataan dan pendampingan berisiko putus sekolah; 6. Dukungan program pusat melalui optimalisasi pemanfaatan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP). 7. Distribusi tenaga kesehatan belum merata : menyebabkan ketimpangan pelayanan antar wilayah. 8. Keterbatasan kompetensi sebagian SDM : memengaruhi kualitas dan efektivitas layanan	pemerataan SDM. 9. Penguatan sistem manajemen SDM : mekanisme pengelolaan tenaga kesehatan disempurnakan agar lebih efektif dan efisien. 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan SDM : kegiatan pelatihan diperluas dan disempurnakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. 11. Evaluasi kinerja dan kebutuhan tenaga kesehatan : memastikan kecukupan dan pemerataan SDM. 12. Penguatan sistem manajemen SDM : mekanisme pengelolaan tenaga kesehatan disempurnakan agar lebih efektif dan efisien.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		institusi pendidikan dan pelatihan : mendukung peningkatan kualitas SDM kesehatan. 12. Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan 13. Perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan di tingkat desa/kecamatan : mendorong pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan.	layanan kesehatan. 11. Tingginya beban kerja tenaga kesehatan : berdampak pada kinerja dan mutu pelayanan.	kesehatan. 9. Tingginya beban kerja tenaga kesehatan : berdampak pada kinerja dan mutu pelayanan. 10. Koordinasi dengan pemerintah pusat : menyelaraskan kebijakan dan program kesehatan. 11. Kerja sama lintas sektor : memperkuat dukungan pelaksanaan program kesehatan. 12. Pemanfaatan teknologi digital kesehatan : meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan.	
Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Kediri yang menempatkan urusan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah dan program peningkatak akses serta pemerataan layanan pendidikan; 2. Ketersediaan satuan pendidikan dan Lembaga pendidikan	1. Keterbatasan jangkauan layanan pendidikan dan sarana transportasi di beberapa wilayah tertentu di Kabupaten Kediri masih menjadi kendala keberlanjutan anak untuk bersekolah; 2. Belum optimalnya intervensi pencegahan	1. Pemberian Beasiswa Pendidikan Kediri Berbudaya bagi masyarakat tidak mampu sebagai salah satu upaya meringankan beban biaya pendidikan dan mencegah anak putus sekolah; 2. Penguatan program pendidikan	1. Penguatan strategi pencegahan anak tidak sekolah berbasis data sekolah dan data desa; 2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat Kabupaten Kediri serta integrasi program pendidikan dengan pengarusutamaan gener dan inklusi sosial; 3. Penguatan peran sekolah dan guru BK dalam pendampingan peserta didik berisiko tidak melanjutkan sekolah; 4. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		nonformal (PKBM) di hamper seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kediri sebagai usaha Menunjang peluanganak untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah; 3. Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan dan Data ATS yang optimal sebagai dasar perencanaan program intervensi termasuk penargetan bantuan pendidikan; 4. Dukungan Pemerintah Pusat melalui Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)dan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai salah satu usaha membantu menekan risiko putus sekolah; 5. Partisipasi orang tua, lemabga sosial dalam mendorong anak tetap bersekolah; 6. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas	anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri; 3. Rendahnya dukungan konseling, motivasi belajar, dan pendampingan sosial bagi anak berisiko putus sekolah masih perlu ditingkatkan. 4. Kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mampu mengakibatkan anak cenderung menghadapi tekanan untuk bekerja atau membantu ekonomi keluarga sehingga berpotensi tidak sekolah; 5. Budaya kerja dini dan pernikahan di usia dini yang meningkat di Kabupaten Kediri karena masih terdapat pandangan bahwa melanjutkan pendidikan bukan prioritas utama; 6. Perpindahan penduduk usia sekolah ke luar daerah dan/atau ke sektor kerja informal menyebabkan tidak tercatatnya kelanjutan pendidikan dalam	kesetaraan melalui Lembaga pendidikan nonformal (PKBM) sebagai tempat menempuh pendidikan lanjutan bagi anak putus skolah dan usia dewasa melalui kejar Paket A, B, dan C; 3. Pendataan dan Verifikasi Data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri sebagai dasar penentuan sasaran program intervensi pendidikan; 4. Koordinasi lintas bidang, lintas sector dan lintas actor dalam rangka penguatan perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian pendidikan; 5. Sinergitas dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam pleaporan, monitoring, evaluasi serta pendataan dan pendampingan anak berisiko putus sekolah; 6. Dukungan program pusat melalui	lintas aktor (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan dan Desa); 5. Peningkatan peran pemerintah desa dan peningkatan sosialisasi pentingnya pendidikan menengah oleh organisasi kemasyarakatan; 6. Mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk memberikan motivasi dan gambaran manfaat pendidikan bagi masa depan anak di Kabupaten Kediri.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		hidup.	sistem pendidikan daerah.	optimalisasi pemanfaatan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).	
Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	1. Konsistensi kebijakan peningkatan akses dan pemerataan pendidikan dalam mendorong peningkatan akses pendidikan melalui program wajib belajar seta penguatan layanan pendidikan formal dan nonformal; 2. Optimalisasi pendidikan nonformal melalui program Paket A, B dan C melalui PKBM memberikan kesempatan bagi penduduk usia dewasa dan anak putus sekolah untuk kembali melanjutkan pendidikan; 3. Perbaikan tata kelola dan pemanfaatan Dapodik dan Data Anak Tidak Sekolah sebagai dasar perencanaan program meningkatkan ketepatan sasaran intervensi pendidikan.	1. Keterbatasan jangkauan layanan pendidikan dan sarana transportasi di beberapa wilayah tertentu di Kabupaten Kediri masih menjadi kendala keberlanjutan anak untuk bersekolah; 2. Belum optimalnya intervensi pencegahan anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri; 3. Rendahnya dukungan konseling, motivasi belajar, dan pendampingan sosial bagi anak berisiko putus sekolah masih perlu ditingkatkan; 4. Kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mampu mengakibatkan anak cenderung menghadapi tekanan	1. Pemberian Beasiswa Pendidikan Kediri Berbudaya bagi masyarakat tidak mampu sebagai salah satu upaya meringankan beban biaya pendidikan dan mencegah anak putus sekolah; 2. Penguatan program pendidikan kesetaraan melalui Lembaga pendidikan nonformal (PKBM) sebagai tempat menempuh pendidikan lanjutan bagi anak putus skolah dan usia dewasa melalui kejar Paket A, B, dan C; 3. Pendataan dan Verifikasi Data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Kediri sebagai dasar penentuan sasaran	1. Penguatan strategi pencegahan anak tidak sekolah berbasis data sekolah dan data desa; 2. Peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat Kabupaten Kediri serta integrasi program pendidikan dengan pengarusutamaan gener dan inklusi sosial; 3. Penguatan peran sekolah dan guru BK dalam pendampingan peserta didik berisiko tidak melanjutkan sekolah; 4. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas aktor (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP3A, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan dan Desa); 5. Peningkatan peran pemerintah desa dan peningkatan sosialisasi pentingnya pendidikan menengah oleh organisasi kemasyarakatan; 6. Mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk memberikan motivasi dan gambaran manfaat pendidikan bagi masa depan anak di Kabupaten Kediri.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		4. Dukungan kebijakan dan program pemerintah pusat dalam bentuk penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam menekan angka putus sekolah dan mendorong masyarakat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sebagai modal peningkatakan kualitas hidup; 3. Peran lembaga pendidikan nonformal (PKBM), organisasi kemasyarakatan dalam memfasilitasi pendidikan bagi kelompok usia dewasa dan masyarakat yang sebelumnya belum pernah mendapatkan pendidikan dan sebelumnya tidak menyelesaikan pendidikan.	untuk bekerja atau membantu ekonomi keluarga sehingga berpotensi tidak sekolah; 5. Budaya kerja dini dan pernikahan di usia dini yang meningkat di Kabupaten Kediri karena masih terdapat pandangan bahwa melanjutkan pendidikan bukan prioritas utama; 6. Perpindahan penduduk usia sekolah ke luar daerah dan/atau ke sektor kerja informal menyebabkan tidak tercatatnya kelanjutan pendidikan dalam sistem pendidikan daerah.	program intervensi pendidikan; 4. Koordinasi lintas bidang, lintas sector dan lintas actor dalam rangka penguatan perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian pendidikan; 5. Sinergitas dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam pleaporan, monitoring, evaluasi serta pendataan dan pendampingan anak berisiko putus sekolah; 6. Dukungan program pusat melalui optimalisasi pemanfaatan penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).	
Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan	Indeks Kesehatan	1. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan : kemudahan menjangkau	1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Kualitas layanan	1. Peningkatan mutu fasilitas layanan kesehatan : sarana	1. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan : standar pelayanan diterapkan di seluruh wilayah untuk

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
layanan kesehatan masyarakat		rumah sakit, puskesmas, dan klinik 2. Tenaga kesehatan yang memadai 3. Penggunaan alat medis dan ketersediaan obat-obatan esensial 4. Program promotif dan preventif 5. Dukungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 6. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam pelaksanaan program kesehatan 7. Dukungan lintas sektor 8. Tingkat pendapatan : memungkinkan akses ke nutrisi yang lebih baik dan biaya pengobatan 9. Stabilitas Ekonomi : mempengaruhi kemampuan Pemda dalam membangun infrastruktur kesehatan 10. Tingkat Pendidikan : orang yang berpendidikan lebih paham pada kesadaran akan gaya hidup sehat 11. Faktor sosial dan gaya hidup: - Aktivitas fifik : rutin berolah raga menjaga fungsi jantung dan	yang belum merata 3. Keterbatasan tenaga kesehatan 4. Pola hidup dan kebiasaan buruk : konsumsi zat adiktif (merokok, narkoba, konsumsi alkohol), pola makan tidak sehat (konsums tinggi gula, garam, dan lemak jenuh yang memicu obesitas serta penyakit kardiovaskuler), kurang aktivitas fisik (kurang gerak yang mempercepat penurunan fungsi tubuh) 5. Kesehaatn mental : kondisi psikologis seperti depresi berat atau stress kronis yg tidak tertangani 6. Literasi Kesehatan yang rendah : ketidak tahuan individu mengenai gejal awal penyakit sehingga terlambat mencari pertolongan medis 6. Kondisi sosial ekonomi masyarakat - Kemiskinan : membatasi kemampuan orang untuk membeli	dan prasarana diperbaiki untuk menjamin kualitas pelayanan yang sesuai standar. 2. Penempatan tenaga kesehatan ke wilayah prioritas : distribusi SDM diatur agar layanan dapat dijangkau secara merata di seluruh wilayah. 3. Penguatan layanan promotif dan preventif 4. Penguatan peran masyarakat : keterlibatan aktif warga difasilitasi agar program kesehatan lebih berdampak dan berkelanjutan. 5. Sinergi lintas sektor : kolaborasi antara berbagai pihak dijalankan untuk menyelenggarakan program secara terpadu. 6. Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan : upaya dilakukan agar masyarakat dari seluruh lapisan dan wilayah dapat memperoleh	memastikan mutu setara. 2. Penguatan sistem rujukan : prosedur rujukan disempurnakan agar alur pelayanan pasien lebih terstruktur dan efektif. 3. Monitoring dan evaluasi layanan kesehatan : pengawasan dan penilaian dilakukan secara rutin untuk menilai kinerja serta hasil program. 4. Penguatan peran masyarakat : keterlibatan aktif warga difasilitasi agar program kesehatan lebih berdampak dan berkelanjutan. 5. Sinergi lintas sektor : kolaborasi antara berbagai pihak dijalankan untuk menyelenggarakan program secara terpadu. 6. Peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan : upaya dilakukan agar masyarakat dari seluruh lapisan dan wilayah dapat memperoleh pelayanan secara optimal.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		metabolisme - Kesehatan mental : dukungan sosial yang kuat dan tingkat stress yang rendah akan memperpanjang umur - Penghindaran zat berbahaya	makanan bergizi dan mendaptkan hunian yang layak/sehat - Tingkat Pendidikan rendah : mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan pencegahan penyakit 7. Faktor lingkungan dan sanitasi - Kurangnya akses air bersih dan sistem pembuangan limbah yang buruk 8. Hambatan transportasi ke fasilitas kesehatan ruas terpencil.	pelayanan secara optimal.	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1. Tersedianya sumber daya manusia pelaksana program ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi 2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan informasi pasar kerja dan penempatan 3. Terselenggaranya kegiatan pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang mendukung peningkatan kompetensi	1. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program pelatihan, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja 2. Belum optimalnya koordinasi lintas bidang dan lintas sektor yang belum sepenuhnya efektif 3. Ketidaksesuaian kompetensi dan keterampilan pencari kerja dengan	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan 2. Optimalisasi program ketenagakerjaan agar lebih selaras dengan kebutuhan pasar kerja 3. Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui job fair dan layanan informasi ketenagakerjaan E-Kerjo 4. Peningkatan koordinasi internal	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih efektif dan akuntabel 2. Penguatan koordinasi dan sinergi antarbidang di lingkungan Dinas Tenaga Kerja 3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung administrasi dan pelaporan kinerja 4. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		4. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja dan industri 5. Ketersediaan lapangan kerja dan daya serap dunia usaha/industry	kebutuhan dunia usaha dan industry 4. Terbatasnya ketersediaan lapangan kerja dibandingkan dengan jumlah pencari kerja	dalam penanganan hubungan industrial, penguatan kapasitas mediator hubungan industrial 5. Peningkatan kualitas perencanaan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja dan optimalisasi sarana prasarana pelatihan 6. Peningkatan koordinasi perencanaan tenaga kerja 7. Kerjasama dengan instansi pendidikan dan lembaga pelatihan untuk penyelerasan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja 8. Kerjasama dengan lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan job fair, sosialisasi ketenagakerjaan, dan penyebarluasan informasi pasar kerja	
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan	Tingkat partisipasi angkatan kerja	1. Perencanaan dan pelaksanaan program ketenagakerjaan yang mendorong peningkatan partisipasi penduduk	1. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pendukung kegiatan peningkatan partisipasi angkatan	1. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program untuk memastikan	1. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi lintas sektor mengenai peluang kerja, pelatihan, dan kewirausahaan bagi masyarakat usia kerja. 2. Pengembangan kolaborasi dengan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
kerja		usia kerja 2. Ketersediaan penduduk usia kerja yang didukung bonus demografi menjadi potensi peningkatan penyerapan tenaga kerja 3. Ketersediaan peluang kerja di sektor formal dan informal 4. Dukungan dunia usaha dan industri dalam penyerapan tenaga kerja	kerja 2. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan ketenagakerjaan yang 3. Rendahnya tingkat keterampilan sebagian penduduk usia kerja 4. Ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia	efektivitas pencapaian target 2. Pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja 3. Fasilitasi mediasi antara pekerja dan pengusaha 4. Penyebarluasan informasi lowonga kerja kepada masyarakat 5. Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan data ketenagakerjaan 6. Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri 7. Penyebarluasan informasi lowongan kerja kepada masyarakat melalui media dan sistem informasi ketenagakerjaan	instansi pemberdayaan masyarakat dalam mendorong kelompok usia kerja yang belum aktif secara ekonomi agar berpartisipasi dalam kegiatan produktif 3. Penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam membuka akses kesempatan kerja dan program pemagangan 4. Evaluasi berkala terhadap hasil kerja sama lintas instansi untuk memastikan efektivitas upaya peningkatan TPAK.
Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	1. Koordinasi dan Kerjasamayang solid di tingkat OPD; 2. Adanya bantuan DBHCHT yang meringankan beban ekonomi masyarakat;	1. Program belum sepenuhnya berbasis evidence dan akar masalah; 2. Bidang pemberdayaan, perlindungan sosial,	1. membangun budaya untuk mengevaluasi berdasar evidence dan akar masalah; 2.Meningkatkan koordinasi antar bidang dan	1. a. Menyusun Standard Evidence Requirement untuk setiap usulan program (data P3KE, DSEN, hasil FGD, problem tree). b. Membentuk Tim Analisis Data Kemiskinan lintas bidang untuk menyusun rekomendasi intervensi prioritas.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		3. Integritas pegawai; 4. Membaiknya ekonomi yang sempat terpuruk akibat COVID-19; 5. Kerjasama yang baik antar berbagai sektor terkait; 6. Perubahan juknis penyaluran dana bantuan sosial yang memudahkan penyaluran.	dan rehabilitasi sering bekerja sendiri-sendiri; 3. Budaya kerja reaktif, bukan proaktif; 4. Bencana alam (banjir, kekeringan, gempa) yang meningkatkan jumlah penduduk miskin baru; 5. Intervensi politik di level bawah dalam penentuan sasaran bantuan; 6. Perlambatan ekonomi nasional/daerah yang menekan pendapatan rumah tangga.	mengurangi egobidang; 3. Membuat jadwal untuk perbaikan data, moniting program dan pelatihan perubahan mindset; 4. Membangun buffer stock bantuan di kecamatan rawan bencana; 5. Membuat SOP penetapan sasaran yang transparan dan dapat diaudit; 6. Menggunakan data P3KE untuk memprioritaskan keluarga yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi.	c. Mengembangkan dashboard internal sederhana (Excel/Power BI) untuk memetakan kantong kemiskinan. d. Melakukan evaluasi tahunan berbasis data untuk menentukan program yang efektif dan yang perlu dihentikan. e. Melakukan pelatihan internal tentang evidence-based planning. 2. a. Membentuk Tim Integrasi Layanan Kemiskinan dengan rapat koordinasi bulanan. c. Mengembangkan formulir rujukan digital internal untuk mempercepat koordinasi antarbidang. d. Menyusun paket intervensi terpadu untuk kasus tertentu (misal: keluarga miskin dengan ODGJ, disabilitas, lansia). e. Melakukan case conference rutin untuk kasus kompleks. 3. a. Menyusun Early Warning System berbasis indikator (harga pangan, pengaduan, data P3KE). b. Membuat kalender kerja proaktif: jadwal verifikasi data, monitoring lapangan, evaluasi program. c. Mengadakan innovation challenge internal untuk mendorong ide perbaikan layanan. d. Melakukan pelatihan service excellence, design thinking, dan manajemen perubahan. e. Menetapkan indikator kinerja individu yang mendorong kerja proaktif. 1. a. Menjalankan program pemulihan ekonomi pascabencana (cash for work, bantuan usaha, pelatihan singkat).

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
					b. Melakukan simulasi penanganan bencana bersama BPBD dan kecamatan. 2. a. Menguatkan verifikasi berbasis data (DTKS, P3KE, musdes) dengan SOP yang jelas dan transparan. b. Mengembangkan sistem pendaftaran dan pelacakan bantuan berbasis aplikasi untuk mengurangi intervensi manual. c. Melibatkan TKSK, pendamping, dan pihak ketiga sebagai pengawas independen. Melakukan publikasi daftar penerima bantuan (tanpa data sensitif) untuk meningkatkan akuntabilitas. • Melakukan sosialisasi kepada desa/kelurahan tentang mekanisme penetapan sasaran yang objektif. 3. a. Memperkuat program pemberdayaan ekonomi ultramikro (alat usaha, pelatihan singkat, akses pasar). b. Berkolaborasi dengan Disnaker, UMKM, dan swasta untuk membuka peluang kerja dan magang.
Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	1. Ketersediaan dan kualitas SDM (kader KB) yang menunjang pencapaian; 2. Ketersediaan data survei yang update; 3. Perencanaan program yang terarah; 4. Komitmen pimpinan perangkat Daerah; 5. 1. Kolaborasi antar OPD (DPMPD, Dinsos, Bappeda);	1. Publikasi hasil survei belum update; 2. Advokasi hasil survei ke OPD terkait belum optimal; 3. Kondisi sosial ekonomi keluarga; 4. Daya beli masyarakat turun; 5. Advokasi data ke desa yang belum mendapat perhatian;	1. Publikasi data; 2. Rapat koordinasi; 3. Advokasi data ke OPD terkait.	1. Publikasi melalui website dan kader 2. Rapat koordinasi dengan OPD terkait (Disnaker, Perkim, DPMPD, Dinsos, dan Bappeda) 3. Koordinasi dengan DPMPD dan Dinsos

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		6. Program propolis untuk masyarakat miskin;			
Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1. Ketersediaan perangkat regulasi daerah yang Menunjang pelaksanaan demokrasi dan stabilitas sosial; 2. Kapasitas dan kompetensi aparatur dalam fasilitasi kehidupan demokrasi dan kemasyarakatan; 3. Koordinasi internal OPD yang relatif baik dalam Menunjang program harmonisasi sosial; 4. Peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan; 5. Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan; 6. Dukungan Forkopimda dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah.	1. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi kegiatan demokrasi dan sosial politik; 2. Keterbatasan sumber daya teknis yang memiliki kompetensi khusus di bidang demokrasi dan politik; 3. Dinamika sosial dan politik yang berkembang cepat, terutama menjelang tahun politik; 4. Penyebaran informasi negatif dan hoaks di media sosial; 5. Perbedaan kepentingan kelompok masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik.	1. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor secara berkala. 2. Optimalisasi peran aparatur melalui peningkatan kapasitas dan pembagian tugas yang jelas. 3. Penyesuaian prioritas kegiatan sesuai kemampuan anggaran 4. Pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan dialog publik. 5. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. 6. Sinergi dengan Forkopimda dalam penanganan isu strategis daerah	1. Penguatan perencanaan program berbasis kinerja dan hasil; 2. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis; 3. Pengembangan sistem pemantauan Indeks Demokrasi Indonesia secara periodik; 4. Peningkatan intensitas dialog sosial dan pendidikan demokrasi masyarakat. 5. Penguatan jejaring kerja sama dengan lembaga vertikal dan organisasi masyarakat. 6. Edukasi publik terkait literasi informasi dan penguatan toleransi sosial.
Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat	Tingkat kondusifitas daerah	1. Adanya program pembinaan wawasan kebangsaan dan toleransi beragama. 2. Dukungan kelembagaan dan	1. Terbatasnya jangkauan kegiatan pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat. 2. Keterbatasan	1. Sosialisasi bertahap 2. Optimalisasi sarpras 3. Koordinasi internal 4. Pelibatan tokoh	1. Program berkelanjutan 2. Perencanaan & evaluasi 3. Basis data kondusivitas 4. Sinergi Forkopimda 5. Edukasi publik

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
demokrasi di masyarakat		struktur organisasi OPD yang relevan. 3. Pengalaman pelaksanaan kegiatan serupa pada tahun sebelumnya 4. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. 5. Peran aktif lembaga keagamaan dan organisasi sosial. 6. Kondisi keamanan daerah yang relatif kondusif.	sarana dan prasarana pendukung kegiatan. 3. Belum optimalnya dokumentasi dan evaluasi kegiatan 4. Masih adanya potensi konflik sosial berbasis perbedaan pandangan. 5. Pengaruh negatif media sosial terhadap sikap toleransi. 6. Rendahnya partisipasi sebagian kelompok masyarakat	5. Kerja sama lembaga 6. Pendekatan persuasif	6. Forum dialog
Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	1. Koordinasi Tim RB yang berjalan sesuai jadwal 2. Koordinasi dengan Tim Kerja Tematik yang berjalan dengan baik 3. Format penginputan data Realisasi RB dari Kementerian PANRB yang sesuai dengan Struktur Perencanaan Pemda. 4. Format Penginputan menggunakan excel. 5. Komitmen pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 6. Ketersediaan	1. Sebagian pelaksaan aksi belum sesuai jadwal 2. Terdapat penyesuaian Rencana Aksi sesuai Perubahan Perencanaan 3. Perubahan Peraturan Teknis tentang RB yang belum tersosialisasikan dengan baik 4. Penjabaran terkait Kegiatan Utama RB General dan RB Tematik yang belum diperinci karena masih dalam masa transisi. 5. Perpres Grand	1. Menyesuaikan ulang Rencana Aksi sesuai target baru; 2. Menyesuaikan format rencana aksi dengan peraturan yang disesuaikan; 3. Penguatan peran Tim Reformasi Birokrasi Daerah melalui pembentukan tim, pembagian tugas, dan koordinasi lintas perangkat daerah; 4. Penyelarasan pelaksanaan RB dengan SAKIP, SPBE, dan Zona Integritas agar perencanaan,	1. Menyusun Rencana Aksi dengan model cascading dan pohon kinerja; 2. Berkoordinasi dengan pihak terkait; 3. Penguatan peran dan kapasitas Tim Reformasi Birokrasi Daerah sebagai pengendali utama pelaksanaan RB lintas perangkat daerah; 4. Peningkatan kualitas dan konsistensi data dukung RB melalui standarisasi dokumen dan quality control internal. 5. Integrasi RB ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah agar seluruh program/kegiatan mendukung sasaran RB; 6. Penguatan budaya kinerja dan budaya melayani ASN melalui internalisasi nilai ASN BerAKHLAK dan penegakan disiplin; 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi layanan dengan penyederhanaan prosedur dan digitalisasi layanan.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		regulasiinternal (Perbup, SK SOP) yang mendukung pelaksanaan RB; 7. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang semakin baik; 8. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; 9. Peningkatan kapasitas SDM aparatur, termasuk kompetensi, integritas, dan profesionalisme ASN;	Design Reformasi Birokrasi yang masih proses penyusunan belum tersosialisasikan. 6. Belum meratanya pemahaman Reformasi Birokrasi di seluruh perangkat daerah; 2. Resistensi terhadap perubahan budaya kerja di sebagian aparatur; 7. Keterbatasan SDM pengelola RB yang kompeten dan konsisten; 8. Kualitas data dukung RB yang belum seragam antar perangkat daerah;	penganggaran, dan kinerja terintegrasi; 5. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi internal berupa Perbup, SK, dan SOP sebagai pedoman pelaksanaan RB; 6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan teknis pengisian LKE RB; 7. Monitoring dan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan pemenuhan indikator dan kualitas data dukung RB.	
Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	10. Pemanfaatan teknologi informasi dan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;	9. Beban administrasi yang tinggi sehingga fokus pada RB belum optimal; 10. Perubahan kebijakan dan indikator penilaian RB dari pemerintah pusat yang cukup dinamis; 11. Keterbatasan fiskal daerah yang mempengaruhi dukungan anggaran	8. Pemanfaatan kebijakan dan pedoman RB dari Kementerian PANRB sebagai acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi; 9. Pendampingan dan asistensi dari pemerintah pusat dan provinsi dalam peningkatan kualitas	1. Melakukan Reviu pada dokumen perencanaan 2. Menindaklanjuti hasil rekomendasi SAKIP bersama dengan Tim SAKIP 3. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah 4. Berkoordinasi dengan pihak terkait.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		1. Komitmen pimpinan dalam mendorong peningkatan implementasi SAKIP 2. Dukungan perencanaan dan penganggaran yang selaras 3. Keterlibatan stakeholder dalam implementasi SAKIP 4. Akurasi dan ketepatan waktu rilis data yang berasal dari BPS	RB; 12. Ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik; 13. Perkembangan teknologi yang cepat, tidak selalu diikuti kesiapan infrastruktur dan SDM. 1. Pengembangan aplikasi e-sakip Pemkab belum maksimal 2. Komponen perencanaan yang ditetapkan dalam laporan kinerja belum cukup menggambarkan kinerja, seringkali tidak relevan, sulit diukur, tidak berfokus pada outcome (dampak nyata) 3. Ketergantungan Data pada Instansi Lain – data yang dikeluarkan oleh BPS	pelaksanaan RB; 10. Tindak lanjut atas rekomendasi lembaga pengawas eksternal seperti BPK, BPKP, dan Ombudsman; 11. Respon terhadap tuntutan dan masukan masyarakat terkait peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik. 1. Penguatan komitmen pimpinan 2. Penyesuaian dokumen terhadap hasil evaluasi AKIP 3. Pembinaan Penyusunan Dokumen Perencanaan 4. Kolaborasi Lintas Sektor	
Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang	I K M	1. Perbaikan kualitas pelayanan publik pada unit pelayanan yang dilaksanakan terus menerus	1. Keterbatasan anggaran 2. Inovasi pelayanan belum dilaksanakan secara merata pada	1. Pembinaan kepada UPP terkait peningkatan kualitas pelayanan 2. Evaluasi kinerja	1. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh UPP; 2. Pelaksanaan, pembinaan pada seluruh UPP terkait aplikasi SKM Online

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
efektif dan bersih		2. Beroperasinya MPP Kabupaten Kediri 3. Berbagai inovasi pelayanan dilaksanakan antara lain pada layanan adminduk, layanan perizinan, pendidikan, kesehatan dan sosial 4. Digitalisasi layanan publik pemerintah menghadirkan layanan publik yang lebih mudah, cepat, terjangkau dan terpercaya. 5. Keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelayanan publik melalui kegiatan Forum konsultasi publik yang dilaksanakan oleh UPP. Pelibatan masyarakat membantu penyelenggara untuk mengetahui kebutuhan dan ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah, sehingga mendukung kepuasan masyarakat.	seluruh UPP 3. Terjadinya aksi massa yang menyebabkan kerusakan sebagian fasilitas pelayanan publik Kabupaten Kediri	penyelenggaraan pelayanan publik (PEPKPPP) 3. Pembangunan kembali atau rehabilitasi fasilitas publik yang rusak atau terdampak aksi massa. 4. Pembinaan terkait penyelenggaraan survey SKM melalui aplikasi SKM Online	
Sasaran 1 : Membangun institusional	Opini BPK terhadap LKPD	1. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang efektif	1. Potensi keterlambatan dalam proses penyusunan	1. koordinasi dan komunikasi lintas bidang di BKAD	1. Penerapan cut-off time penyusunan dan reviu secara berkala terhadap rancangan KUA-PPAS, KUPA-PPAS, dan Rancangan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih		antar bidang di BKAD Kabupaten Kediri, didukung dengan sistem pengelolaan dokumen keuangan dan aset yang rapi, terstruktur, serta terdokumentasi dengan baik, sehingga proses administrasi pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif dan efisien; 2. Proses perencanaan anggaran yang realistis dan berbasis kebutuhan riil serta melalui mekanisme verifikasi dan checking berlapis, sehingga mampu menekan peningkatan nilai SiLPA dibandingkan tahun sebelumnya dan menjaga keselarasan antara perencanaan anggaran dan realisasi; 3. Dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pengelolaan keuangan dan aset daerah, termasuk kegiatan penguatan sistem, pembinaan OPD, dan penyusunan laporan	dokumen perencanaan dan penganggaran daerah karena memerlukan koordinasi intensif lintas perangkat daerah, koreksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bappeda; 2. Potensi keterlambatan proses pencairan dana, ketidaksinkronan dokumen pencairan dengan anggaran kas, serta keterlambatan pelaporan keuangan pada akhir tahun anggaran oleh sebagian perangkat daerah; 3. Potensi keterlambatan penyampaian laporan Barang Milik Daerah (BMD) dari perangkat daerah kepada BKAD Kabupaten Kediri. 4. Tingkat partisipasi sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses rekonsiliasi ICSA (Internal Control Self Assessment) yang fluktuatif, sehingga	Kabupaten Kediri melalui rapat teknis rutin, pembentukan grup koordinasi lintas bidang (anggaran daerah, perbendaharaan, pengelolaan BMD, dan akuntansi), serta standarisasi alur administrasi dan pengelolaan dokumen guna memastikan keseragaman pemahaman dalam penyusunan dan pelaporan keuangan daerah. 2. Penyempurnaan perencanaan dan pengendalian anggaran berbasis realisasi historis BKAD Kabupaten Kediri telah menerapkan proses checking dan reviu berlapis terhadap perencanaan anggaran dengan membandingkan tren realisasi tahun sebelumnya, sehingga deviasi antara anggaran dan realisasi dapat ditekan serta nilai SiLPA lebih	APBD oleh BKAD Kabupaten Kediri. 2. Pelaksanaan early warning system paling lambat H-1 bulan sebelum akhir tahun anggaran kepada unit keuangan SKPD, percepatan proses pengajuan dan verifikasi berkas, serta optimalisasi peran seluruh pegawai bidang pengampu dengan dukungan lintas bidang apabila diperlukan; 3. Pelaksanaan reviu berkala atas laporan Barang Milik Daerah (BMD) untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan data aset daerah; 4. Pelaksanaan rekonsiliasi ICSA secara rutin setiap bulan terhadap unit keuangan SKPD, meliputi penerimaan, kas, aset, dan akuntansi, sebagai bagian dari penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 5. Penerapan reward and punishment bagi unit keuangan SKPD terkait keaktifan dalam proses rekonsiliasi ICSA, termasuk kebijakan administratif berupa penundaan pencairan SP2D (sebagai rencana jangka pendek Tahun 2025); 6. Penguatan kapasitas SDM melalui rekrutmen pegawai dengan kompetensi IT, partisipasi aktif dalam webinar yang diselenggarakan Kemendagri/Kemenkeu, serta pelaksanaan diklat dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. 7. Penguatan koordinasi dengan Kemendagri terkait optimalisasi dan sinkronisasi penggunaan aplikasi SIPD; 8. Penyesuaian kebijakan dan prosedur internal BKAD Kabupaten Kediri terhadap perkembangan regulasi nasional di bidang

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		keuangan; 4. Pengawasan pengelolaan kas daerah dan arus kas yang ketat dan berkelanjutan, sehingga mampu menjaga likuiditas daerah, ketepatan waktu pembayaran, serta meminimalisir potensi idle cash; 5. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten dan berkesinambungan dalam setiap tahapan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Kabupaten Kediri; 6. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang terintegrasi melalui aplikasi e- BMD, mencakup proses pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, hingga penghapusan, sehingga pencatatan aset daerah menjadi terpadu, terintegrasi, dan real time	berimplikasi pada keterlambatan penyusunan LKPD akibat tidak optimalnya mekanisme deteksi dini atas potensi kesalahan atau data bias. 5. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan teknologi informasi (IT) di lingkungan BKAD Kabupaten Kediri, khususnya dalam mendukung pengelolaan sistem keuangan berbasis aplikasi. 6. Belum optimalnya integrasi data dan sistem pada aplikasi SIPD Kemendagri, yang berpotensi menimbulkan perbedaan antara data yang tercatat pada sistem dengan kondisi riil pelaksanaan di daerah; 7. Perubahan dan penyesuaian kebijakan nasional di bidang pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan adaptasi cepat dari pemerintah	terkendali. 3. Optimalisasi pengawasan pengelolaan kas dan arus kas daerah dilakukan melalui monitoring harian posisi kas, penyusunan proyeksi arus kas yang lebih akurat, serta sinkronisasi jadwal pencairan dengan rencana kebutuhan belanja SKPD untuk mencegah penumpukan kas dan keterlambatan pembayaran. 4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten dan berkelanjutan dengan melakukan pembinaan teknis dan reviu internal terhadap penerapan SAP dalam setiap tahapan penyusunan laporan keuangan guna menjaga kesesuaian pencatatan dengan regulasi yang berlaku; 5. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-BMD dalam	pengelolaan keuangan daerah; 9. Penguatan komunikasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam rangka pemenuhan data dan laporan yang dibutuhkan.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		7. Dukungan regulasi nasional di bidan pengelolaan keuangan daerah, termasuk kebijakan SAP dan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan BPK; 8. Pembinaan dan pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta webinar kelas gratis dari Kemenkeu RI, Kemendagri, maupun sinergitas antar Kementerian yang mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah; 9. Dukungan sistem informasi nasional (SIPD Kemendagri) sebagai platform utama perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	daerah; 8. Ketergantungan pada ketepatan waktu penyampaian data dan laporan dari seluruh perangkat daerah.	pengelolaan BMD baik seluruh proses penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga penghapusan aset daerah telah direkam secara terintegrasi melalui e-BMD untuk mendukung ketertiban administrasi dan keandalan data aset dalam LKPD; 6. Pelaksanaan rekonsiliasi Internal Control Self Assessment (ICSA) merupakan pelaksanaan rekonsiliasi sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi kesalahan pencatatan keuangan dan aset sebelum proses penyusunan LKPD. 7. Koordinasi intensif dengan SKPD terkait percepatan penyampaian laporan keuangan dan BMDBKAD Kabupaten Kediri telah melakukan pendekatan persuasif dan asistensi teknis kepada SKPD agar	

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
				penyampaian laporan keuangan dan laporan Barang Milik Daerah dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan. 8. Penyesuaian dan adaptasi terhadap pengembangan Aplikasi SIPD Kemendagri dilakukan melalui sinkronisasi data secara berkala, klarifikasi teknis dengan pihak bersangkutan, serta penyesuaian prosedur internal untuk meminimalisir ketidaksesuaian antara data sistem dan kondisi riil. 9. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah lintas SKPD telah memfasilitasi dan mendorong partisipasi aparatur pengelola keuangan dalam kegiatan bimbingan teknis, webinar, dan pelatihan daring yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun	

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
				Kementerian Keuangan.	
Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	1. Komitmen dan kerjasama APIP dalam pemenuhan dokumen kelengkapan penilaian MCSP; 2. Ketersediaan data APIP yang memadai; 3. Komitmen/Dukungan Bupati dalam pelaksanaan penilaian MCSP; 4. Kerjasama OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pemenuhan dokumen penilaian MCSP.	1. Penugasan mandatory MCSP KPK tidak selesai seluruhnya sesuai waktu yang ditentukan oleh KPK; 2. Pelaporan MCSP mendekati injury time dengan timeline; 3. Kurangnya komitmen Pimpinan OPD untuk meminimalisir potensi KKN; 4. Kurangnya integritas individu pelaksana kegiatan terkait pencegahan korupsi; 5. Adanya temuan terkait dengan kelebihan pembayaran; 6. Belum seluruh pegawai mendapatkan sosialisasi anti korupsi; 7. Budaya Anti Korupsi masih lemah;	1. Peningkatan kedisiplinan pelaksanaan kegiatan monitoring MCSP sesuai dengan waktu yang tercantum dalam Surat Tugas; 2. Peningkatan ketepatan waktu pelaporan mandatory MCSP; 3. Sosialisasi Anti Korupsi kepada Kepala OPD dan perwakilan setiap OPD; 4. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi secara berkala.	1. Penyusunan timeline pada Program Kerja Pengawasan Tahunan; 2. Penyusunan Perencanaan Pelaporan mandatory MCSP n+1; 3. Penyusunan rencana Sosialisasi kepada seluruh pegawai; 4. Pembentukan tim tindak lanjut hasil pengawasan.
Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	1. Terselenggaranya berbagai kegiatan pengembangan kompetensi, baik melalui diklat klasikal, nonklasikal, maupun pembelajaran daring;	1. Masih terdapat ASN yang belum memenuhi ketentuan minimal jam pengembangan kompetensi; 2. Dukungan dan konsistensi	1. Menyelenggarakan dan memfasilitasi berbagai bentuk pelatihan sesuai kebutuhan organisasi dan individu ASN; 2. Mendorong	1. Menyusun peta kompetensi dan rencana pengembangan ASN secara berkelanjutan; 2. Melaksanakan evaluasi internal untuk memastikan peningkatan kualitas ASN secara berkelanjutan.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		2. Penilaian kinerja ASN telah dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan dan menjadi dasar pembinaan kinerja; 3. Adanya pembinaan dan pengawasan disiplin ASN dengan melakukan monitoring dan secara berkala; 4. ASN semakin menyadari bahwa pendidikan lanjutan merupakan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalitas aparatur.	pelaksanaan pembinaan ASN antar OPD masih bervariasi.	pelaksanaan penilaian kinerja yang objektif serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan disiplin.	
Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	1. Semua Indikator menjadi kekuatan dengan ada nya perbup Nomor 24 tahun 2023 yang merupakan hasil tindak lanjut dari reviu terhadap Perbup 33 tahun 2019. 2. Dokumen arsitektur, peta rencana, keterpaduan rencana anggaran spbe, kematangan inovasi 3. Proses bisnis tahun 2023 yang merupakan tindak lanjut dari hasil review dokumen SPBE	1. Kurangnya Mekanisme Pemantauan & Evaluasi (Monev) Berkala. 2. Rekomendasi dari auditor tahun lalu belum dieksekusi atau tidak ada dokumen "Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Audit". Penilai melihat audit hanya sebagai formalitas tahunan, bukan instrumen perbaikan.	1. Membuka kanal pengaduan atau survei kepuasan masyarakat yang terintegrasi langsung dengan fitur evaluasi layanan. 2. Membuat Berita Acara Tindak Lanjut Tahap I untuk poin-poin yang sudah diselesaikan.	1. Menyusun dan menetapkan SOP Penanganan Keluhan Digital yang mencantumkan Service Level Agreement (SLA). Misalnya: Keluhan teknis harus ditanggapi dalam 1x24 jam. 2. Mengumpulkan screenshot sistem, dokumen kebijakan/SOP yang telah ditandatangani, atau foto infrastruktur yang telah diperbaiki.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		2019. 4. Semua indicator merupakan kekuatan karena telah melakukan pengembangan Aplikasi SPBE secra berkesinambungan, keterpaduan dan integrasi aplikasi. Juga sudah memliki prosedur pengoperasian baku pusat data di seluruh unit perangkat daerah dan SLA, interkoneksi dan akses dengan jaringan intra Pemerintah Provinsi Jatim. Sudah dilakukan reviu dan ditindaklanjuti. 5. Semua indicator merupakan kekuatan karena sudah mempunyai tim koordinasi SPBE yang meliputi dari berbagai unsur dan sudah punya tupoksi sudah dijalankan dengan sangat baik. 6. Manajemen Resiko, manajemen Keamanan Sistem informasi, manajemen data, dan manajemen asset TIK sudah diterapkan dengan sangat baik dan dilakukan reviu serta ditindaklanjuti. 7. Sudah melakukan			

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		audit internal untuk audit keamanan berdasarkan pedoman BSSN dan ISO. 8. Sudah menggunakan aplikasi-aplikasi nasional seperti SIPD, SPSE, LPSE, Simpegnas, MyASN, Srikandi, e-BMD,sakip, yang Sebagian sudah terintegrasi satu sama lain. 9. Sudah menggunakan aplikasi-aplikasi nasional seperti LAPOR, SP4N, Aplikasi JDIH nasional, 10. OSS yang sudah terintegrasi menggunakan API, sudah dioptimalisasikan dan direview.			
Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi	1. Jumlah koperasi aktif dan usaha mikro yang bertambah; 2. Dukungan program pembinaan koperasi dan usaha mikro dari pemerintah daerah; 3. Perkembangan teknologi digital dan marketplace; 4. Kebijakan pemerintah pusat terkait pembentukan koperasi desa/kelurahan merah	1. Rendahnya kapasitas manajemen dan tata kelola koperasi 2. Kurangnya inovasi produk dan kemasan 3. Persaingan dengan produk skala besar dan produk impor 4. Fluktuasi harga bahan baku 5. Perubahan pola konsumsi masyarakat 6. Ketergantungan	1. Pelatihan manajemen usaha, akuntansi sederhana, dan kewirausahaan; 2. Pendampingan koperasi dan usaha mikro secara berkelanjutan; 3. Fasilitasi sertifikasi produk (NIB, PIRT, Halal); 4. Kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan	1. Penguatan koperasi sektor riil dan usaha mikro produktif; 2. Peningkatan kualitas dan daya saing produk koperasi dan usaha mikro; 3. Digitalisasi koperasi dan usaha mikro; 4. Perluasan akses pembiayaan dan pasar; 5. Sinkronisasi program daerah dan pusat di sektor koperasi dan UM; 6. Penguatan jejaring kemitraan usaha; 7. Pemanfaatan teknologi dan platform digital nasional; 8. Revitalisasi dan modernisasi sarana distribusi dan pas;

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		putih; 5. Kelancaran distribusi barang dari produsen ke konsumen melalui pasar rakyat, gudang, dan sarana distribusi yang memadai; 6. Fasilitas yang memadai dan penyederhanaan perizinan usaha perdagangan dan perizinan ekspor barang; 7. Adanya pengawasan yang maksimal terhadap barang beredar (takaran, mutu,label,dan legalitas) guna melindungi konsumen dan menciptakan iklim usaha yang sehat; 8. Kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan penting 9.Terjaminnya ketersediaan pasokan bahan kebutukan pokok dan penting 10. Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah yang Menunjang kegiatan perdagangan 11. Adanya perkembangan teknologi dan digitalisasi perdagangan	pada kondisi ekonomi nasional 7. Kurang optimalnya pengembangan perdagangan dalam negeri (tingginya biaya distribusi, kurang promosi) 8. Rendahnya produktivitas industri (tingginya ketergantungan bahan baku impor, belum ada kawasan industri); 9. Belum optimalnya sistem informasi & pelaporan secara rutin kegiatan industry ke dalam aplikasi SIINAS (data belum terintregasi); 10. Belum optimalnya standardisasi, desain, dan teknologi industri (produk IKM belum SNI, desain/kemasan lemah, teknologi rendah) 5. Pameran tidak bisa menampung semua potensi dari UMKM yang ada 12. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan penting (kurangnya	mikro; 5. Promosi produk koperasi dan usaha mikro melalui pameran dan digital marketing; 6. Kemitraan dengan pelaku usaha besar; 7. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi; 8. Peningkatan kegiatan promosi perdagangan; 9. Peningkatan kerja sama antara IKM/UMKM dengan penyedia bahan baku; 10. Peningkatan pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada para pelaku usaha; (IKM/UMKN) terhadap terhadap proses pelaporan kegiatan secara rutin ke dalam aplikasi SIINAS; 11. Peningkatan pelatihan dan pendampingan secara intensif kepada para pelaku usaha (IKM/UMKN) terhadap standardisasi produk, desain, dan teknologi produk IKM/UMKM;	9. Stabilisasi harga dan penguatan cadangan barang pokok; 10. Penguatan sistem informasi dan kebijakan berbasis data; 11. Peningkatan standardisasi, desain, dan teknologi produk IKM; 12. Peningkatan produktivitas dan pembangunan kawasan industri; 13. Stabilisasi harga dan penguatan cadangan barang pokok; 14. Fasilitasi dan promosi ekspor produk unggulan; 15. Penguatan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		(marketplace)	ketersediaan)	12. Peningkatan volume kegiatan promosi dagang baik lokal maupun nasional 13. Stabilisasi harga melalui kegiatan Operasi Pasar dan penguatan cadangan barang pokok; 14. Peningkatan daya saing produk dan peningkatan akses serta fasilitas ekspor; 15. Penguatan UU Perlindungan Konsumen.	
Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	1. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui sistem OSS dan penyederhanaan prosedur perizinan (SKM: 89,52) 2. Koordinasi OPD dalam fasilitasi dan pengawalan realisasi investasi 3. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam mendorong investasi daerah 4. Peluang potensi daerah yang disusun dalam Investment Project Ready to Offer (I-PRO)	1. Ketergantungan pada proyek investasi tertentu yang bernilai besar seperti PSN 2. Belum optimalnya integrasi perencanaan investasi dengan perangkat daerah teknis, khususnya terkait infrastruktur pendukung, ketenagakerjaan 3. Belum optimalnya promosi investasi yang bersifat berbasis proyek siap tawar 4. Keterbatasan informasi kesiapan lahan investasi (kepastian tata ruang,	1. Peningkatan koordinasi internal dan lintas perangkat daerah dalam fasilitasi investasi 2. Peningkatan kualitas promosi investasi 3. Pemutakhiran data potensi serta peluang investasi daerah (SIDAPOTIK) 4. Penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Investasi/ BKPM 5. Partisipasi dalam kegiatan promosi investasi di tingkat	1. Peningkatan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan penanaman modal. 2. Penguatan perencanaan promosi investasi 3. Penguatan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi 4. Mendorong keterlibatan pelaku usaha dan asosiasi dalam pengembangan investasi daerah melalui kegiatan FKP 5. Adaptasi kebijakan dan strategi peningkatan investasi dari Kabupaten/ Kota yang telah berhasil meningkatkan investasinya.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
			status kepemilikan, dan perizinan dasar) 5. Persaingan antar daerah dalam menarik investasi, khususnya dengan kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah memiliki kawasan industri matang dan infrastruktur lengkap	regional East Java Investment Forum 2025 (EJIF)	
Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1. Usaha mikro sebagai sumber pendapatan masyarakat; 2. Tersedianya lapangan kerja di sektor koperasi dan usaha mikro; 3. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat; 4. Stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; 5. Akses pasar yang semakin luas; 6. Pertumbuhan ekonomi nasional; 7. Tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang memadai dan sesuai standar 8. Meningkatnya kegiatan promosi dagang baik secara langsung maupun digital; 9. Kemudahan akses	1. Skala usaha koperasi dan usaha mikro yang masih kecil; 2. Pendapatan pelaku usaha yang belum stabil; 3. Rendahnya produktivitas usaha; 4. Daya beli masyarakat yang fluktuatif; 5. Persaingan harga dengan produk massal; 6. Dampak kondisi ekonomi global; 7. Kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan yang belum sesuai SNI (pasar tradisional kumuh, bangunan lama); 8. Kurangnya kegiatan	1. Penguatan koperasi sebagai sarana distribusi dan pemasaran; 2. Pelatihan peningkatan produktivitas dan kualitas produk; 3. Pengembangan usaha mikro berbasis komunitas; 4. Kerja sama distribusi antar wilayah; 5. Promosi produk lokal untuk meningkatkan konsumsi masyarakat; 6. Peningkatan kegiatan pasar murah; 7. Peningkatan pendampingan usaha berkelanjutan; 8. Sosialisasi Gerakan bangga buatan dalam	1. Peningkatan pendapatan pelaku koperasi dan usaha mikro; 2. Penguatan koperasi konsumsi dan koperasi produsen; 3. Pengembangan usaha mikro berorientasi pasar; 4. Keberlanjutan program pemberdayaan koperasi dan usaha mikro; 5. Sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi; 6. Perluasan pasar produk koperasi dan usaha mikro; 7. Penguatan kemitraan dengan sektor swasta; 8. Antisipasi dampak ekonomi makro terhadap daya beli; 9. Akan dilaksanakan kegiatan pameran yang berkualitas dengan memilih potensi yang menonjol untuk ditampilkan; 10. Akan memberikan Bantuan teknis dan fasilitasi pendaftaran serta edukasi standardisasi, desain, dan teknologi produk IKM; 11. Pengembangan perdagangan dalam negeri berbasis produk lokal;

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		informasi yang dibutuhkan masyarakat; 10. Kenaikan tingkat upah dan pendapatan masyarakat; 11. Meningkatnya kemudahan akses Masyarakat terhadap barang kebutuhan dengan harga yang lebih kompetitif; 12. Kestabilan kondisi sosial & kebijakan ekonomi.	promosi dagang lokal dan promosi dagang nasional; 9. Produk yang tidak memenuhi standar (mutu, keamanan, SNI, halal, label); 10. Perubahan pola Konsumsi dan Gaya Hidup; 11. Rendahnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat; 12. Kenaikan harga kebutuhan pokok tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.	negeri (produk lokal)	12. Akan melakukan penguatan branding produk lokal; 13. Penyelenggaraan kegiatan pasar murah secara rutin.
Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian				
Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	1. Pemantauan harga dan stok pangan secara berkelanjutan di sisi produksi, gudang distributor/ penggilingan maupun di tingkat konsumen (pasar). 2. Kabupaten Kediri merupakan wilayah surplus pangan dengan	1. Ketersediaan pangan utama sangat bergantung pada angka produksi. Sedangkan produksi gabah masih sangat dipengaruhi oleh mahalnya harga pupuk dengan ketersediaan pupuk yang terbatas	1. Monitoring pasokan pangan secara berkala 2. Penguatan kapasitas kelompok pengelola lumbung pangan masyarakat 3. Mitigasi daerah rentan pangan melalui Penyusunan Peta	1. Penguatan data lokasi sasaran survei lapangan berkala atas pasokan pangan pada sentra produksi, distributor, dan titik konsumsi 2. Penyusunan Regulasi Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi pasokan 3. Koordinasi lintas sektor yang lebih intensif dengan Dinas Pertanian serta

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		kualitas sumberdaya lahan dan air yang masih dapat dikembangkan. 3. Peran lumbung pangan masyarakat untuk pengelolaan cadangan pangan masyakat. 4. Adanya data daerah rentan pangan 5. Berkembangnya usaha penggilingan di Kabupaten Kediri dapat mengungkit jumlah ketersediaan pangan. 6. Adanya kegiatan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah melalui Bulog bagi penduduk Kabupaten Kediri mempengaruhi meningkatnya ketersediaan pangan di Kabupaten Kediri	yang memicu petani untuk beralih ke komoditas selain padi sehingga berpotensi menyebabkan produksi gabah berkurang 2. Ancaman krisis pangan global/ketersediaan pangan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan permasalahan lahan pertanian seperti: alih fungsi lahan, penurunan kesuburan tanah, ketersediaan air dan perubahan iklim ekstrim yang berpotensi mengganggu stabilitas produksi pangan utama	Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA). 4. Koordinasi lintas sektor terkait faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan utama 5. Komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha penggilingan dalam rangka penguatan ketahanan pangan masyarakat	instansi terkait mengenai produksi pangan utama. 4. Penguatan sistem distribusi pangan antarwilayah untuk menjamin pasokan saat produksi lokal menurun
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	1. Semakin lama pengalaman semakin efisien dalam pengelolaan produksi 2. Tambahan alokasi kegiatan di Perubahan APBD 2025 dimana realisasinya terjadi di triwulan IV 3. Adanya alokasi bantuan sarana dan prasarana (benih, pakan,	1. Kurang meratanya pengetahuan dan ketrampilan teknis usaha perikanan diantara para pelaku usaha 2. Rendahnya Kemauan untuk berkembang dan berinovasi 3. Harga jual ikan yang tidak stabil	1. Mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan 2. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan usaha perikanan 3. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pemuliaan induk	1. Pelibatan anggota kelompok dalam bimbingan teknis/ pelatihan Dinas Perikanan 2. Penambahan alokasi anggaran untuk bimbingan teknis dan pelatihan 3. Bekerja sama dengan instansi vertikal untuk kegiatan pengembangan perikanan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		kolam, alat budidaya)	4. Harga pakan yang cenderung terus naik karena pengaruh kurs mata uang rupiah terhadap dollar		
Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Faktor Internal 1. Kompetensi dan Profesionalisme SDM Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keahlian teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi infrastruktur. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan efektivitas layanan. 2. Kebijakan dan Regulasi yang Jelas Adanya regulasi yang mendukung penyelenggaraan layanan infrastruktur secara transparan dan berkelanjutan. Prosedur kerja yang jelas dan efisien dalam pengelolaan layanan public. 3. Dukungan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan yang Efektif Pengalokasian anggaran yang memadai dan tepat	1. Bidang Irigasi Kurang meratanya penyediaan irigasi di Kab Kediri Penyediaan diesel diperlukan pada saat musim kemarau. 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perlunya ditingkatkan pengguna RTH antara lain penerangan (lampu taman), pengelolaan parkir (parkir masih terbatas), pengelolaan sampah (pemisahan sampah organik dan anorganik), dan penataan RTH yang memungkinkan area RTH menjadi salah satu aktivitas ekonomi masyarakat sekitar (contohnya ada area untuk berjualan) 3. Persampahan Tidak ada proses pemilahan di rumah tangga, sampah dipilah di TPS3R	Mengidentifikasi dan menggambarkan kondisi riil terkait layanan infrastruktur di Kabupaten Kediri meliputi jalan dan jembatan, transportasi, infrastruktur air bersih dan irigasi, infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, infrastruktur ruang public (RTH) , infrastruktur Pendidikan, infrastruktur Kesehatan, infrastruktur sanitasi dan persampahan; 2.Mengukur angka/capaian indeks kepuasan layanan infrastruktur tahun 2026; 3.Menganalisis antara hasil cap aian yang	1. Bidang Irigasi ▪ Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah: ▪ Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan, dan sarana produksi lainnya di wilayah-wilayah sentra produksi pertanian 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Peningkatan tata kelola lingkungan hidup berbasis masyarakat 3. Persampahan ▪Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah: ▪Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten Kediri ▪Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman 4.Perumahan dan Permukiman ▪Meningkatkan penataan peruma han dan kawasan pemukiman yan g sehat dan berkelanjutan: ▪Pembangunan rumah layak huni 5. Jalan dan Jembatan ▪Memantapkan penyediaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah:

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		sasaran untuk pembangunan infrastruktur. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam setiap program pembangunan. Penggunaan Teknologi dan Inovasi Pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan infrastruktur seperti e-KIR, monitoring kondisi jalan, dan pemetaan kebutuhan infrastruktur. Inovasi dalam metode pembangunan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas hasil pembangunan. Faktor Eksternal: 1. Kolaborasi dengan Perangkat Daerah dan Stakeholder Sinergitas dengan pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek infrastruktur. Kemitraan dengan investor dalam penyediaan infrastruktur	Sebagian masyarakat tidak menyalurkan sampah ke TPS, melainkan melakukan pembakaran atau menyetor sampah ke bank sampah atau menjual sampah jenis dus ke pengepulan 4. Perumahan dan Permukiman ▪ perlu ditingkatkan menurut warga adalah distribusi bantuan RTLH seharusnya lebih merata dan tepat sasaran, sebab masih terdapat beberapa rumah tidak layak yang memerlukan bantuan RTLH namun belum mendapatkannya 5. Jalan dan Jembatan perlu ditingkatkan menurut pengguna jalan dan jembatan adalah: (a) perlu adanya perbaikan permukaan jalan yang rusak dan berlubang karena dilalui kendaraan berat; dan beberapa ruas jalan dirasa masih memiliki lebar yang	diperoleh pada tahun 2025dengan target/sasaran yang telah ditetapkan di dokumen peruba han RPJMD Kabupaten Kediri 2021- 2026; 4.Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan infrastruktur Kabupaten Kediri menurut indikator ketersediaan fisik(availability), kualitas fisik (quality), kesesuaian (appropriateness), pemanfaatan (utility). penyerapan tenaga kerja (job creation), dan kontribusi terhadap perekonomian yang terjadi pada pengukuran capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Kediri; 5.Mengidentifikasi dan menganalisis prioritas atribut-atribut pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan nilai	▪Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan yang menghubungkan sentra produksi dan pemasaran 6.Perhubungan ▪Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah: ▪Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan ▪Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ ▪Peningkatan pengujian berkala kendaraan bermotor

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		strategis melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha). 2. Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat Adanya mekanisme umpan balik dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan infrastruktur. Kepuasan masyarakat yang meningkat seiring dengan pelayanan infrastruktur yang lebih baik. 3. Dukungan Regulasi dari Pemerintah Pusat Kebijakan nasional yang sejalan dengan pembangu nan daerah, seperti program Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk infrastruktur. Peraturan yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran untuk infrastruktur. 4. Kondisi Geografis dan Ketersediaan Sumber Daya Alam •Wilayah yang mendukung pengembangan	kurang terutama jika dilalui oleh dua arah kendaraan secara bersamaan. 6. Perhubungan. perlu ditingkatkan menurut pengguna jalan dan jembatan adalah: (a) Perlu dilakukan penambahan rambu jalan, penertiban marka jalan dan perbaikan lampu lalu lintas yang rusak; (b) Perlu adanya penambahan lampu lalu lintas di jalur cepat; (c) Server uji kendaraan sering mengalami masalah dan hambatan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Kediri; 6.Memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah	

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		infrastruktur dengan ketersediaan bahan baku dan akses yang memadai. • Pemanfaatan potensi lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.			
Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	1. kualitas perencanaan teknis yg baik 2. SDM tim pelaksana kegiatan yang kompeten 3. Ketersediaan anggaran memadai 4. Kondisi Lingkungan dan Iklim	1. Kondisi Jaringan Jalan yang Luas dan Variatif 2. Keterbatasan Data dan Sistem Manajemen Jalan	1. Penyusunan perencanaan berbasis data kondisi aktual (survey jalan rutin)	1. Penguatan perencanaan berbasis prioritas 2. Pemutakhiran data kondisi jalan secara berkala 3. Optimalisasi pemeliharaan rutin dan preventif
Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	1. kualitas perencanaan teknis yg baik 2. SDM tim pelaksana kegiatan yang kompeten 3. Ketersediaan anggaran memadai 4. Peran aktif HIPPA 5. Kondisi hidrologi dan ketersediaan air	1. Luas dan Kompleksitas Jaringan Irigasi 2. Data dan Informasi Jaringan Irigasi yang Belum Lengkap 3. Kondisi alam dan iklim 4. Tingginya Laju Sedimentasi	1. Penyusunan perencanaan berbasis data kondisi aktual (survey irigasi rutin)	1. Inventarisasi dan pemutakhiran data jaringan irigasi 2. Penguatan operasi dan pemeliharaan (OP) 3. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan OP
Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	1. Ketersediaan dan Kompetensi SDM 2. Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Program 3. Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Kewenangan 4. Partisipasi dan	1. Keterbatasan Anggaran 2. Perencanaan dan Penjadwalan Kegiatan yang Kurang Optimal 3. Lamanya Proses Persetujuan Substansi 4. Keterbatasan Dukungan	1. Penajaman prioritas penyusunan RTRW/RDTR 2. Efisiensi tahapan kegiatan tanpa mengurangi substansi	-

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		Dukungan Masyarakat	Pembiayaan Eksterna		
Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	1. Komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan program SPAM 2. Perencanaan teknis yang sudah disiapkan pada tahun sebelumnya 3. Sinkronisasi program dengan perencanaan berjalan dengan baik 4. Terdapat kelompok pengelola SPAM dibeberapa desa 5. Partisipasi dan Komitmen Masyarakat terhadap ketersediaan air minum sangat kuat	1. Terbatasnya SDM yang berkualifikasi penyehatan lingkungan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Masih banyak daerah yang susah untuk terakses air minum dikarenakan lokasi sumber air yang terlalu jauh 3. Anggaran yang berkurang dikarenakan sudah tidak mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum dari Pemerintah Pusat 4. Masih banyak kelompok pengelola SPAM (KPSPAM) yang belum berbadan hukum	1. Meningkatkan kompetensi SDM dengan uji komptensi untuk penyehatan lingkungan 2. Berkolaborasi dengan Desa untuk mengatasi masalah air minum di wilayah yang sulit terjangkau 3. Mengoptimalkan kelompok swadaya masyarakat (KSM/KPSPAMS) untuk mengelola sarana air minum secara mandiri, yang terbukti meningkatkan keberlanjutan layanan 4. Mengajak pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur air minum	1. SDM yang memenuhi kualifikasi akan mengikuti uji kompetensi untuk jabatan fungsional penyehatan lingkungan 2. Menyediakan penampungan air komunal di lokasi yang mudah diakses warga yang belum memiliki sambungan rumah. 3. Melakukan pendampingan intensif agar pengelola lokal mampu menerapkan tarif yang cukup untuk biaya pemeliharaan (cost recovery) 4. Penanaman pohon dan pembuatan sumur resapan di sekitar sumber air baku untuk menjaga ketersediaan debit air tanah jangka panjang
Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Persentase Rumah Layak Huni	1. Kemampuan dinas dalam mengalokasikan dan mengelola APBD secara efektif untuk mendampingi dana dari pusat (sharing budget); 2. Adanya SOP yang jelas, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi, hingga pencairan dana,	1. Keterbatasan Anggaran Daerah (APBD) untuk menampung seluruh usulan perbaikan rumah 2. Akurasi Data Verifikasi yaitu adanya data warga yang kurang mutakhir atau duplikasi data	1. Melibatkan pihak perusahaan swasta di lingkungan wilayah kabupaten kediri melalui CSR 2. Mengembangkan sistem informasi mandiri untuk verifikasi real-time 3. Melibatkan pihak perusahaan swasta di	1. Berkoordinasi dengan perusahaan yang punya potensi untuk melaksanakan CSR 2. Update data real time RTLH melalui Sistem Informasi Pendataan Rumah Tidak Layak Huni yang dimiliki Dinas Perkim 3. Melaksanakan verifikasi lapangan yang lebih akurat dengan melibatkan perangkat desa agar penyampaian bantuan tepat sasaran 4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bantuan bersifat

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		memastikan transparansi dan akuntabilitas 3. Keahlian staf dalam melakukan verifikasi lapangan, pendampingan teknis konstruksi kepada masyarakat, serta administrasi pelaporan sesuai regulasi. 4. Adanya dukungan program nasional seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR yang menambah kuota penanganan di daerah 5. Kesiapan masyarakat penerima manfaat untuk bergotong-royong atau menambah dana secara swadaya guna menutupi kekurangan biaya konstruksi (karena bantuan biasanya bersifat stimulan)	penerima bantuan yang seringkali menghambat proses penetapan prioritas 3. Rendahnya tingkat gotong royong atau keswadayaan masyarakat sekitar untuk membantu proses pembangunan fisik rumah penerima manfaat 4. Adanya gesekan antar warga terkait kecemburuan sosial dalam penentuan penerima bantuan, atau intervensi kepentingan politik tertentu di tingkat lokal	lingkungan wilayah kabupaten kediri melalui CSR 4. Mengembangkan sistem informasi mandiri untuk verifikasi real-time	stimulant sehingga dibutuhkan partisipasi warga dalam pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	1. perencanaan jelas dan terukur; 2. kerjasama tim yang baik; 3. dukungan stakeholder; 4. kerjasama msayarakat yang baik.	1. keterbatasan SDM 2.kurangnya evaluasi 3.kondisi di lapangan 4.kurang komunikasi dengan pihak luar	1. pengembangan SDM 2. penguatan system monev 3.peningkatan koordinasi 4.optimalisasi penggunaan teknologi	1. mengadakan pelatihan SDM; 2. menyusunstrategi perbaikan; 3. memperkuat Kerjasama dengan pihak luar; 4. meningkatkan pengawasan dan koordinsi
Tujuan :	Pertumbuhan	1. Peningkatan promosi	1. Keterbatasan	1. Melakukan	1. Pengembangan paket wisata "bundling"

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	wisata kuliner khas Kediri secara digital; 2. Fasilitasi pelatihan bagi pelaku usaha akomodasi dan kuliner; 3. Beroperasinya Bandara Dhoho Kediri yang meningkatkan mobilitas pendatang; 4. Munculnya usaha kafe dan restoran baru oleh swasta yang meningkatkan variasi pilihan;	anggaran untuk event pameran skala nasional; 2. Fluktuasi harga bahan pokok yang mempengaruhi daya beli wisatawan terhadap produk kuliner; 3. Persaingan tarif hotel dengan daerah tetangga.	Pembinaan Perizinan Pelaku usaha makanan dan minuman berbasis risiko.	antara akomodasi, kuliner, dan destinasi wisata. 2. Optimalisasi promosi wisata di area Bandara.
Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	1. Penerapan e-ticketing di beberapa destinasi utama. 2. Perbaikan fasilitas dasar di area wisata Gunung Kelud dan Ubalan.	1. Kurangnya atraksi baru/wahana buatan di destinasi milik Pemkab dibandingkan wisata swasta; 2. Sarana prasarana di beberapa objek wisata pemerintah mulai membutuhkan beberapa perbaikan; 3. Cuaca ekstrem berkepanjangan (hujan intensitas tinggi) yang mengurangi kunjungan wisata alam; 4. Menjamurnya destinasi wisata desa dan swasta baru yang memecah konsentrasi pengunjung.	1. Melakukan pemeliharaan rutin sarana wisata; 2. Menambah spot foto instagramable di area wisata pemerintah; 3. Menggencarkan promosi wisata melalui media sosial resmi dinas.	1. Revitalisasi total objek wisata unggulan (masterplan pengembangan); 2. Kerjasama pemanfaatan aset wisata dengan pihak ketiga (swasta) untuk investasi wahana baru; 3. Penyesuaian tarif retribusi. sesuai Perda terbaru.
Tujuan : Meningkatkan	Indeks Kualitas Lingkungan	1. Ketersediaan Sumberdaya alam yang	1. Regulasi Data Kualitas udara dengan	1. Optimalisasi Bank Sampah;	1. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait kepatuhan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam	Hidup (IKLH) Kabupaten	tinggi	parameter PM 2,5 diambil dari citra satelit 2. Ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen pengelolaan lingkungan	2. Pembangunan TPS3R; 3. Pengawasan Rutin terhadap pelaku usaha/kegiatan; 4. Penanaman di Sumber air, kawasan Perlindungan setempat, lahan kritis, kanan kiri jalan; 5. Koordinasi dengan dinas/badan Instansi terkait.	terhadap dokumen lingkungan; 2. Melaksanakan pengukuran pm 2,5 24 jam metode manual aktif; 3. Penambahan luas Ruang terbuka Hijau (RTH) dan tanaman Perindang jalan penyerap polutan; 4. Koordinasi dengan SKPD terkait untuk bersama melakukan pembangunan berkelanjutan.
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	1. Terdapat banyak aliran sungai dan sumber air di wilayah Kabupaten Kediri;	1. Belum memiliki Regulasi yang tegas terhadap kualitas air permukaan; 2. Luas Wilayah Kab Kedirii 34% merupakan lahan pertanian. Kegiatan pertanian menghasilkan bahan-bahan organik kedalam air melalui proses erosi lahan sehingga berkontribusi terhadap penurunan kualitas air; 3. Terjadi pembuangan limbah dan sampah secara sembarangan ke Sungai/ Waduk/ Embung; 3. Sektor Peternakan belum memiliki	1. Memantau kualitas lingkungan hidup (air, udara) secara berkala; 2. Melaksanakan pengawasan rutin terhadap industri/kegiatan usaha yang membuang air limbah; 3. Penanamn pohon di sumber air/kawasan perlindungan setempat; 4. Melalui dinas pertanian dan perkebunan melakukan sosialisasi pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan; 5. Sosialisasi	1. Menyusun RPPLH dan RPPMA; 2. Menyusun Penetapan D3TLH; 3. Kampanye gaya hidup ramah lingkungan lebih masif baik di sektor industri maupun rumah tangga.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
			pengelolaan limbah; 4. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat menyebabkan meningkatnya pencemaran air akibat aktivitas manusia; 5. Pengelolaan limbah domestik dan limbah industri yang belum optimal.	pengurangan dan pengelolaan sampah; 6. Koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman membangun sarana sanitasi pengolahan air limbah dan darainase yang layak dan memadai untuk masyarakat.	
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Udara	1. Melaksanakan uji udara ambien di beberapa titik;	1. Data Pm 2,5 diambil dari citra satelit; 2. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan Industri; 3. Perilaku masyarakat membakar sampah; 4. Belum optimalnya uji emisi gas buang kendaraan bermotor.	1. Kegiatan penanaman di kanan kiri jalan dan penghijauan lingkungan di desa-desa; 2. Pengukuran kualitas udara secara rutin menggunakan passive sampler (SO2 dan NO2) di kawasan pemukiman, industri, perkantoran dan transportasi; 3. Pembinaan pelaku usaha terkait pengendalian pencemaran udara; 4. Pembinaan desa proklim dan desa berseri;	1. Melaksanakan pengukuran pm 2,5 24 jam metode manual aktif; 2. Penambahan luas Ruang terbuka Hijau (RTH) dan tanaman Perindang jalan penyerap polutan. 3. Koordinasi dengan dinas perhubungan untuk meningkatkan uji emisi kendaraan bermotor.
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas	Indeks Kualitas Lahan	-	1. Alih Fungsi Lahan	1. Kegiatan penanaman daerah tangkapan air, lahan	1. Konservasi kawasan rawan bencana akibat alih fungsi lahan; 2. Optimalisasi pengawasan kegiatan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
lingkungan				kritis; 2. Kebijakan penataan ruang yang disesuaikan dengan perkembangan wilayah dan kesesuaian lahan.	pertambangan.
Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	1. Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana; 2. Ketersediaan Regulasi dan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana; 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam upaya penanggulangan bencana; 4. Penguatan Sistem Peringatan Dini; 5. Pemanfaatan Data dan Informasi Kebencanaan; 6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan; 7. Partisipasi dan Kesiapsiagaan Masyarakat; 8. Dukungan kebijakan dan sumber daya dari pemerintah pusat dan provinsi;	1. Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Jumlah personel kebencanaan yang belum sebanding dengan luas wilayah dan tingkat risiko); 2. Penganggaran belum optimal penanggulangan bencana yang terbatas dibandingkan tingkat ancaman; 3. Sistem Data dan Informasi yang Belum Terintegrasi Optimal; 4. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti posko, gudang logistik, dan alat komunikasi darurat; 5. Tingginya ancaman bencana alam; 6. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan; 7. Kondisi geografis dan topografis wilayah; 8. Belum maksimalnya kemandirian	1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM; 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan; 3. Penguatan Sistem Peringatan Dini; 4. Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan; 5. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor; 6. Penguatan sinergi dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi; 7. Dukungan Lintas Sektor dan Lembaga non Pemerintahan; 8. Peningkatan kesadaran dan	1. Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana (PRB) secara lebih kuat ke dalam RPJMD, Renstra BPBD, dan Renja OPD; 2. Menyelaraskan indikator IRB dengan indikator kinerja perangkat daerah; 3. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pengelolaan data dan analisis risiko bencana serta Menetapkan penugasan personel kebencanaan secara lebih terfokus dan berkelanjutan; 4. Penguatan Sistem Data dan Statistik Sektoral Kebencanaan; 5. Mengoptimalisasi Sarana dan Prasarana Kebencanaan; 6. Penguatan sinergi dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi; 7. Meningkatkan kolaborasi Lintas Sektor dan Lembaga non Pemerintahan; 8. Peningkatan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana; 9. Penguatan peran media dan teknologi informasi kebencanaan.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		9. Peran dan dukungan lintas sektor terkait upaya penanggulangan bencana; 10. Keterlibatan Lembaga NonPemerintah dan Akademisi.	masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pemahaman bahwa untuk membangun ketangguhan adalah tugas bersama.	kemandirian masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana; 9. Penguatan peran media dan teknologi informasi kebencanaan.	
Tujuan : Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	1. Rutinnya pendataan dan registrasi objek pemajuan kebudayaan dan pelaku budaya; 2. Dukungan fasilitasi bagi sanggar-sanggar seni; 3. Kesadaran komunitas budaya lokal yang tinggi untuk menjaga tradisi.	1. Keterbatasan SDM Pamong Budaya untuk menjangkau seluruh wilayah kecamatan; 2. Kurangnya minat generasi muda pada jenis kesenian tradisional tertentu (langka peminat); 3. Dominasi budaya pop modern di media sosial.	1. Program "Lawatan Sejarah Masuk Sekolah" untuk mengenalkan budaya sejak dini. 2. Digitalisasi arsip budaya agar mudah diakses generasi muda.	1. Pemberian apresiasi atau penghargaan bagi pelestari budaya; 2. Penyelenggaraan workshop/pelatihan seni budaya berbasis milenial; 3. Penyelenggaraan Festival etnokediren.
Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	1. Konsistensi penyelenggaraan kalender event tahunan (Hari Jadi Kab. Kediri, Festival Kelud); 2. Sinergi antar bidang dalam pengemasan event; 3. Partisipasi aktif Desa Wisata dalam membuat event lokal yang berskala kabupaten; 4. Dukungan komunitas seni (Dewan Kesenian)	1. Keterbatasan venue pertunjukan indoor yang representatif untuk event skala besar saat musim hujan; 2. Jadwal event yang terkadang bentrok dengan agenda kegiatan desa/kecamatan; 3. Kendala perizinan keramaian pada situasi tertentu.	1. Kolaborasi penyelenggaraan event dengan pihak desa/kecamatan (sharing cost/tenaga); 2. Pemanfaatan ruang publik terbuka hijau (SLG) sebagai pusat kegiatan.	1. Peningkatan kualitas event agar masuk dalam Kalender Event Nasional (KEN); 2. Pembangunan gedung kesenian/kebudayaan yang representatif; 3. Kurasi event desa untuk diangkat menjadi event kabupaten.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		yang solid.			
	Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	1. Adanya komitmen daerah dalam penguatan peran lembaga kepemudaan dan olahraga sebagai mitra strategis pemerintah daerah; 2. Ketersediaan dokumen perencanaan dan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan kepemudaan dan olahraga baik di dalam RPJMD, Renstra Dinas Pendidikan dan Program Prioritas Tahunan Kabupaten Kediri; 3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan organisasi kepemudaan serta olahraga secara berkelanjutan. 4. Partisipasi aktif organisasi kepemudaan, organisasi olahraga dan komunitas pemuda dalam berbagai program pembinaan dan kegiatan daerah; 5. Dukungan lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan, KONI, induk organisasi	1. Keterbatasan alokasi anggaran yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan seluruh program peningkatan kapasitas lembaga kepemudaan dan olahraga; 2. Belum meratanya kapasitas SDM pengelola organisasi kepemudaan dan olahraga, khususnya dalam aspek manajerial, administrasi, dan pelaporan kelembagaan; 3. Ketersediaan data dan informasi kelembagaan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan diperbarui secara berkala. 4. Tingkat partisipasi sebagian organisasi yang belum optimal dalam mengikuti program pembinaan dan evaluasi yang diselenggarakan pemerintah daerah; 5. Keterbatasan SDM	1. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan kelembagaan; 2. Koordinasi lintas bidang dan lintas sektor dalam pengumpulan data prestasi kepemudaan olahraga di Kabupaten Kediri; 3. Pengumpulan dan pemutakhiran data lembaga kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kediri. 4. Kerjasama dengan KONI, dan organisasi olahraga dalam peningkatan kualitas latihan dan pembinaan bagi atlet pelajar di Kabupaten Kediri; 5. Fasilitasi keikutsertaan pemuda dan atlet pelajar berprestasi di Kabupaten Kediri pada kompetisi sesuai potensi unggulan daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; 6. Pemberian	1. Peningkatan sinergi dengan ssekolah, KONI, induk cabang olahraga di Kabupaten Kediri; 2. Perluasan keikutsertaan atlet pelajar dalam kompetisi di berbagai tingkat dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; 3. Pemberian Beasiswa Pendidikan bagi atlet pelajar berprestasi di Kabupaten Kediri; 4. Mendorong peran serta masyarakat dan duni usaha dalam mendukugn pembinaan prestasi atlet pelajar di Kabupaten Kediri; 5. Penguatan pembinaan berkelanjutan bagi atlet pelajar dan pemuda potensial di Kabupaten Kediri.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		cabang olahraga serta mitra swasta dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga; 6. tingginya potensi demografis di Kabupaten Kediri yang menjadi modal sosial dalam penguatan kapasitas lemabga kepemudaan dan olahraga.	pengelola program kepemudaan dan olahraga serta kapasitas kelembagaan dan manajerial sebagian lembaga masih terbatas; 6. Validitas dan pemutakhiran data kelembagaan pemuda dan olahraga belum optimal.	motivasi, penghargaan dan beasiswa pendidikan bagi pemuda dan atlet pelajar berprestasi	
Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	1. Komitmen Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam pembinaan prestasi kepemudaan dan olahraga; 2. Tersusunnya program dan kegiatan pembinaan prestasi kepemudaan dan olahraga dalam dokumen perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri; 3. Terlaksananya fasilitasi keikutsertaan pemuda dan atlet pelajar pada ajang kompetisi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. 4. Peran aktif organisasi kepemudaan, sekolah dan organisasi olahraga dalam pembinaan	1. Belum meratanya sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan yang memadai terutama di desa; 2. Keterbatasan intensitas monitoring dan evaluasi capaian prestasi olahraga dan kepemudaan di Kabupaten Kediri; 3. Tidak semua pemuda dan atlet aktif dalam organisasi atau kegiatan olahraga. 4. Kesiapan dan kualitas atlet/peserta yang belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Kediri; 5. Masih terbatasnya frekuensi dan jenjang	1. Prioritas anggaran untuk kegiatan pembinaan dan keikutsertaan dalam ajang prestasi olahraga; 2. Pelaksanaan pembinaan, seleksi dan pendampingan peserta secara bertahap; 3. Penguatan koordinasi dengan sekolah dan unit terkait dalam pembinaan prestasi bagi para atlet pelajar berprestasi di Kabupaten Kediri. 4. Kerja sama dengan KONI dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Kediri	1. Peningkatan kualitas perencanaan pembinaan prestasi yang lebih terarah dan berkelanjutan; 2. Pengembangan infrastruktur, fasilitas olahraga dan pengadaan peralatan olahraga yang merata di wilayah Kabupaten Kediri 3. Penguatan monitoring dan evaluasi capaian prestasi secara periodik. 4. Peningkatan sinergi dengan sekolah, KONI dan induk cabang olahraga dalam meningkatkan minat dan prestasi pemuda di bidang olahraga; 5. Perluasan keikutsertaan dalam kompetisi di berbagai tingkat mulai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		prestasi atlet pelajar di Kabupaten Kediri; 5. Dukungan KONI, induk cabang olahraga, dan pelatih dalam peningkatan kualitas pembinaan atlet Kabupaten Kediri; 6. Tingginya partisipasi pemuda dan atlet pelajar dalam berbagai kegiatan kompetisi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.	kompetisi yang diikuti oleh beberapa atletKabupaten Kediri;	dalam peningkatan kualitas latihan dan pembinaan; 5. Fasilitasi keikutsertaan pemuda dan atlet pelajar pada kompetisi sesuai potensi unggulan daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; 6. Pemberian motivasi, penghargaan dan beasiswa pendidikan bagi pemuda dan atlet pelajar berprestasi Kabupaten Kediri.	
Tujuan : Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	1. Komitmen Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam mendorong peningkatan kinerja pembangunan dan ekonomi desa; 2. Ketersediaan data dan hasil pengukuran Indeks Desa sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi; 3. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa termasuk penguatan kapasitas aparatur desa dan pengelola BUMDesa;	1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan pengelola BUMDesa di sebagian desa; 2. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan ekonomi desa secara berkelanjutan; 3. Keterbatasan koordinasi dan integrasi program antar perangkat daerah dalam Menunjang peningkatan indeks	1. Penguatan perencanaan, penganggaran serta pengendalian program pembangunan desa agar lebih terarah pada peningkatan indeks desa; 2. Peningkatan kapasitas aparatur perangkat daerah dan aparatur desa melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan pengelolaan ekonomi desa dan BUMDesa; 3. Optimalisasi	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Indeks Desa secara berkala sebagai dasar perbaikan kebijakan dan program pembangunan desa; 2. Penyusunan dan penyesuaian program pembinaan desa yang lebih fokus pada peningkatan indeks desa; 3. Penguatan peran perangkat daerah dalam pembinaan dan pendampingan desa secara berkelanjutan; 4. Peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi desa; 5. Peningkatan pendampingan kepada pemerintah desa dan BUMDesa dalam pengembangan usaha ekonomi dan kemitraan usaha;

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		4. Dukungan perencanaan dan penganggaran daerah yang selaras dengan arah pembangunan desa; 5. Dukungan kebijakan Pemerintah Pusat terkait pembangunan dan pemberdayaan desa; 6. Ketersediaan Dana Desa dan sumber pendanaan lainnya untuk pengembangan ekonomi; 7. Partisipasi masyarakat dan peran kelembagaan desa dalam pengembangan usaha ekonomi berbasis potensi lokal; 8. Dukungan pendamping desa dan jejaring kemitraan dalam pengembangan ekonomi desa.	ekonomi desa; 4. Perbedaan karakteristik dan potensi ekonomi antar desa yang mempengaruhi kecepatan peningkatan indeks desa; 5. Keterbatasan akses pasar, permodalan, dan teknologi usaha masyarakat desa; 6. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya Menunjang pengembangan ekonomi produktif; 7. Fluktuasi kondisi ekonomi dan pasar yang mempengaruhi keberlanjutan usaha ekonomi desa.	pemanfaatan data Indeks Desa sebagai dasar penetapan kebijakan, prioritas program dan evaluasi kinerja pembangunan desa; 4. Penguatan koordinasi dan integrasi program antar perangkat daerah dalam Menunjang pengembangan ekonomi desa. 5. Fasilitasi pemerintah desa dan masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal; 6. Penguatan peran BUMDesa dan kerjasama antar desa dan pihak swasta dalam Menunjang pengembangan ekonomi desa; 7. Sinergi dengan pemerintah pusat, pendamping desa dan pihak swasta dalam Menunjang pengembangan ekonomi desa; 8. Peningkatan akses masyarakat desa	6. Fasilitasi kerjasama dengan pelaku usaha, lembaga keuangan dan pihak terkait lainnya; 7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif dan pengembangan usaha desa; 8. Penguatan jejaring pemasaran produk unggulan desa untuk meningkatkan daya saing ekonomi desa.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
				terhadap permodalan, pemasaran dan inovasi usaha.	
Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	1. Komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan status desa melalui kebijakan dan program pembangunan desa; 2. Ketersediaan data Indeks Desa sebagai dasar penetapan indikator persentase desa maju dan desa mandiri; 3. Pelaksanaan pembinaan pendampingan dan fasilitasi desa oleh perangkat daerah terkait; 4. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa; 5. Dukungan kebijakan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan dan kemandirian desa; 6. Ketersediaan Dana Desa dan sumber pendanaan lainnya untuk Menunjang	1. Perbedaan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan kelembagaan desa antar wilayah; 2. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan desa secara merata dan berkelanjutan; 3. Keterbatasan koordinasi lintas perangkat daerah dalam Menunjang percepatan peningkatan status desa. 4. Ketimpangan potensi dan karakteristik desa yang mempengaruhi kecepatan peningkatan status desa; 5. Keterbatasan akses pasar, permodalan dan teknologi di sebagian desa; 6. Dinamika kondisi ekonomi dan kebijakan yang mempengaruhi capaian status desa.	1. Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan desa secara berkelanjutan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan desa; 2. Pemanfaatan data Indeks Desa sebagai dasar evaluasi dan penajaman program peningkatan status desa; 3. Sinkronisasi dan integrasi program pembangunan desa antar perangkat daerah; 4. Fasilitasi pengembangan BUMDesa dan usaha ekonomi produktif masyarakat desa; 5. Pendampingan desa dalam pemanfaatan Dana Desa untuk Menunjang peningkatan kemandirian desa; 6. Peningkatan peran masyarakat dan	1. Penguatan monitoring dan evaluasi capaian Indeks Desa untuk mendorong peningkatan persentase desa maju dan desa mandiri; 2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pendampingan desa yang lebih fokus pada percepatan peningkatan status desa; 3. Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam Menunjang kemandirian desa secara terpadu;

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisa Faktor Penunjang	Analisa Faktor Penghambat	Alternatif Solusi yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6
		pembangunan dan pemberdayaan desa; 7. Peran aktif pemerintah desa, BUMDesa, dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi desa; 8. Dukungan pendamping desa dan kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan desa.		kelembagaan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan desa.	

3.2.2. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Akuntabilitas Kinerja dianalisis dengan mengukur Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 15 Matrikulasi Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi A	45	16,64	36,98%	Kurang Menunjang
				Persentase Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi A	60	55,56	92,60%	Menunjang
				Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	65	71,88	110,58%	Sangat Menunjang
				Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	40	63,09	157,73%	Sangat Menunjang
				Persentase Satuan PAUD yang terakreditasi	25	98,94	395,76%	Sangat Menunjang
				Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	60	45,53	75,88%	Cukup Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase LKP/PKBM yang terakreditasi	45	87,5	194,44%	Sangat Menunjang
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan	100	100	100,00%	Menunjang
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rasio guru satuan SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap peserta didik SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1:15	1:17	100,00%	Menunjang
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Cakupan Fasilitasi Pelayanan UKP dan UKM	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kecukupan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	PROSENTASE PEMBERIAN REKOMENDASI APOTEK, TO, TK. ALKES DAN OPTIKAL, UMOT	75%	76%	101,67%	Sangat Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				PROSENTASE PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG BERSERTIFIKAT P-IRT	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Purnama Mandiri (Posyandu balita, poskestren, poskesdes, SBH, desa siaga)	69%	96%	138,77%	Sangat Menunjang
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	60%	87,95%	147,00%	Sangat Menunjang
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	14%	10,61%	76,00%	Cukup Menunjang
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	96%	97,59%	102,00%	Sangat Menunjang
			Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	9%	9,49%	105,00%	Sangat Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme transmigrasi	10%	11,12%	111,00%	Sangat Menunjang
	Sasaran:	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa	89%	89%	100,00%	Menunjang
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro	100%	100%	100%	Menunjang
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmet need	10,10%	7,44%	126,33%	Sangat Menunjang (Pengukuran Bermakna Negatif)
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR,	BKB : 32,87% BKR : 28,84% BKL : 36,32%	BKB : 59,85% BKR : 54,88% BKL : 48,50%	168,63%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				BKL)				
	Sasaran:	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sasaran masyarakat yang terbina terkait Nasionalisme	85%	100%	117,00%	Menunjang
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Persentase partisipasi aktif tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait isu sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama	85%	100%	117,00%	Menunjang
2	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang difasilitasi Penataan Organisasi (Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi	57	57	100,00%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun	100	66,63	66,63%	Cukup Menunjang
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase dokumen perbendaharaan yang diterbitkan	100	132,12	132,12%	Sangat Menunjang
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang tersusun	100	79,18	79,18%	Cukup Menunjang
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	400	400,00%	Sangat Menunjang
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100	150	150,00%	Sangat Menunjang
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen pengelolaan BMD yang tersusun	100	86,29	86,29%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan yang Tersusun	100%	91,50%	91,50%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan hasil pengawasan internal yang tersusun	100%	146%	146,00%	Menunjang
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang tersusun	100%	90,23%	90,23%	Menunjang
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Persentase Laporan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asitensi yang tersusun	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang tersusun	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan terhadap SKPD	100%	100%	100,00%	Menunjang
		Meningkatnya Profesionalitas ASN	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalisme dimensi Kinerja dan Disiplin	29.97	29.99	100,07%	Sangat Menunjang
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalisme dimensi Kompetensi dan Kualifikasi	52.03	53.68	103,17%	Sangat Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	100,00%	100,00%	100,00%	Menunjang
			Program Aplikasi Informatika	Cakupan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	Menunjang
3	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	Meningkatnya investasi di daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase investor yang diberikan insentif	25%	25%	100%	Menunjang
			Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Menunjang
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	100%	100%	100%	Menunjang
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman	84%	100,00%	119%	Sangat Menunjang
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 persen	100 persen	100%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	13,04	33,21	110%	Sangat Menunjang
			program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang cukup sehat	1,71	7,50	110%	Sangat Menunjang
			Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi terlatih	0,22	1,04	110%	Sangat Menunjang
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	33,67	46,81	110%	Sangat Menunjang
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	2,5	2,41	96%	Menunjang
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	5,34	5,12	96,00%	Menunjang
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi standar	50	53,34	106,68%	Sangat Menunjang
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	90	81	90,00%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Pengembangan Ekspor	Persentase Produk Ekspor Unggulan	70	70	100,00%	Menunjang
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	90	62,83	69,81%	Cukup Menunjang
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	70	70	100,00%	Menunjang
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan industri yang terstandarisasi	15	120	Di surat : 110,00% Hasil perhitungan: 800,00%	Sangat Menunjang
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	0,15	0,15	100,00%	Menunjang
4	Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan Akses Pangan Masyarakat	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah rumusan kebijakan infrastruktur kemandirian pangan yang tersusun	1 rumusan	1 rumusan	100,00 %	Menunjang
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koefisien variasi harga pangan utama	10%	10%	100,00 %	Menunjang
				Skor Pola Pangan Harapan	95,2	93,11	97,80%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah penanganan desa rentan pangan	2 desa	2 desa	100,00 %	Menunjang
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase keamanan pangan segar	*82 %*	*90%*	*109,15 %*	Sangat Menunjang
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kelompok tani yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan sarana pertanian	100	*100*	*100,00 %*	Menunjang
				Persentase pemanfaatan benih/bibit unggul pertanian	83,31	*89,49*	*107,42 %*	Sangat Menunjang
				Jumlah desa yang melaksanakan inovasi tani organik	70	70	100,00 %	Menunjang
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase jaringan Irigasi tingkat usaha tani dalam kondisi baik	73	73	100,00 %	Menunjang
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan pencegahan dan penanggulagngan bencana pertanian (Serangan OPT)	92	92	100,00 %	Menunjang
			Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	100	100	100,00 %	Menunjang
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pembesaran (ton)	25.449	25.514,27	100,00%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Ikan Hias (ribu ekor)	407.405	408.258,88	100,00%	Menunjang
				Benih (juta ekor)	21.651,82	21.709,40	100,00%	Menunjang
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan usaha perikanan tangkap yang diawasi	80%	80%	100,00%	Menunjang
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Konsumsi Asal Ikan (kg/kapita/tahun)	12,83	12,83	100,00%	Menunjang
5	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Sarana Infrastruktur Daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	1.091,50	1.094,09	100,24%	Sangat Menunjang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik	150.370,42	154.313,11	102,62%	Sangat Menunjang
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Peraturan Tata Ruang yang diselesaikan	3	3	100,00%	Menunjang
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga / KK mendapatkan akses air melalui SPAM	89%	86,10%	96,26%	Menunjang
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan Perbaikan Rumah di Kawasan Kumuh	66,09%	54,14%	81,93 %	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah	Program Penyelenggaraan Lalu lIntas dan Angkutan Jalan	Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ	87,5	90,53	103,46	Sangat Menunjang
				Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan Pengembangan Bidang Perhubungan	80,00	80,00	100,00	Menunjang
				Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	77,17	45,66	59,17	Cukup Menunjang
				Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan	98,00	98,12	100,12	Sangat Menunjang
6	Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase peningkatan obyek dan daya tarik wisata	12,50%	12,79%	102,32%	Sangat Menunjang
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompetensi dasar	2,75%	3,30%	120,00%	Sangat Menunjang
			Program Pemasaran Pariwisata	Lama Tinggal (Length of Stay) wisatawan di Kabupaten Kediri	2 hari	2 hari	100,00%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
7	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan kajian pengelolaan lingkungan hidup	83,00 %	100 %	120,00%	Sangat Menunjang
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	72,42 %	64 %	88,37%	Menunjang
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah kegiatan/usaha yang dibina terkait Pengelolaan Limbah B3	324 usaha/kegiatan	330 usaha/kegiatan	102,00%	Sangat Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan berizin Lingkungan dan PPLH yang dibina	75,00 %	91,30%	122,00%	Sangat Menunjang
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase MHA dan kearifan lokal terkait PPLH yang dibina	70,00%	8,96%	Di surat: 0,13% Perhitungan: 13%	Kurang Menunjang
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk	Persentase lembaga kemasyarakatan yang mendapat penyuluhan LH	28,72%	57,44%	200,00%	Sangat Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Masyarakat					
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah event penghargaan Lingkungan Hidup yang diadakan atau diikuti dalam 1 tahun	-	-	0	Kurang Menunjang
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Aduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang terselesaikan	100%	100%	100%	Menunjang
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan	0,05%	0,0004%	Di surat: 0,75% Pengukuran: 0,80%	Cukup Menunjang
			Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang dikelola	75,00%	57,79%	77,05%	Cukup Menunjang
		Meningkatnya Sinergitas antar Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase capaian penanggulangan bencana dalam pemenuhan indikator IKD	100 %	99,29 %	99,29 %	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
8	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	Meningkatnya Daya Dukung Generasi Muda Bagi Daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang dibina/dilatih	54,00	19,23	35,61	Kurang Menunjang
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet pelajar yang dibina/dilatih	75	65,22	86,96	Menunjang
		Meningkatnya pelestarian Seni Budaya Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan	25,00%	55,00%	220,00%	Sangat Menunjang
			Pengembangan Kesenian Tradisional	% Peningkatan grup kesenian yang diberdayakan	25,00%	69,00%	277,20%	Sangat Menunjang
				Prosentase peningkatan kesenian lokal yang dilestarikan	37,00%	52,00%	140,54%	Sangat Menunjang
			Program Pembinaan Sejarah	Prosentase sejarah lokal yang dilestarikan	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Prosentase CB yang dilestarikan	100%	100%	100,00%	Menunjang
			Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase sarpras museum yang dipelihara	100%	100%	100,00%	Menunjang
9	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penataan desa	95%	95%	100,00%	Menunjang

No	Misi	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Masyarakat							
			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah kerjasama desa yang dilakukan anar desa dan pihak ketiga	90%	90%	100,00%	Menunjang
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dalam menjalankan manajermen pemerintahan	95%	95%	100,00%	Menunjang
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	95%	95%	100,00%	Menunjang

*) Data resmi namun Sementara

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri

Rentang Kategori Penilian Indikator Akuntabiltas Kinerja

Kategori Penilaian	Jumlah	Persentase
Sangat Menunjang	43	37,72%
Menunjang	59	51,75%
Cukup Menunjang	8	7,02%
Kurang Menunjang	4	3,51%
TOTAL	**114**	**100%**

Berdasarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa indikator Program/Kegiatan mayoritas dengan kategori menunjang dan sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri. Dari 114 Indikator dengan kategori Sangat Menunjang sebanyak 43 atau 37,72%, kategori Menunjang sebanyak 59 atau 51,75%, kategori Cukup Menunjang sebanyak 8 atau 7,02%, kategori Kurang Menunjang sebanyak 4 atau 3,33%.

3.2.3. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi digunakan untuk mengukur ketepatan cara dalam mencapai target dalam menjalankan sesuatu dengan memerhatikan waktu, tenaga, biaya. Analisis dalam hal ini menggunakan pendekatan perbandingan hasil realisasi kinerja dan realisasi anggaran.

Efisiensi merupakan hal penting untuk meninjau proses yang telah dilaksanakan. Dari analisa efisiensi tersebut menggambarkan ketepatan dalam sisi manajemen waktu, tenaga yang terfokus, dan penggunaan biaya yang sesuai. Apabila hasil analisa masuk kedalam kategori efisien, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kinerja tersebut memiliki tingkat ketepatan waktu yang tinggi, ketepatan tenaga, dan ketepatan alokasi biaya yang tinggi. Namun, apabila hasil analisa masuk kedalam kategori tidak efisien maka didapati adanya proses pelaksanaan kinerja yang memiliki tingkat ketepatan waktu yang rendah, ketepatan tenaga yang rendah, serta ketepatan alokasi biaya yang rendah.

Kendati demikian, tidak mengesampingkan pula terdapatnya faktor-faktor eksternal yang berdampak besar terhadap pencapaian kinerja. Baik itu berdampak positif ataupun berdampak negatif, diluar proses internal yang telah dilaksanakan. Oleh karena demikian, faktor-faktor eksternal tersebut turut dijadikan variabel pencapaian kinerja disamping faktor- faktor proses pelaksanaan kinerja secara internal. Faktor penunjang dan penghambat tersebut dijelaskan dalam penjelasan pelaksanaan sasaran strategis.

Analisis efisiensi Sumber Daya tersaji dalam data sebagai berikut:

Analisis efisiensi dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2025 terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 16 Perbandingan Kinerja Dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Efisiensi	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	100,88	Rp324.367.414.145,00	Rp309.868.658.301,60	95,53	5,35%	Efektif dan Efisien
	Rata-Rata Lama Sekolah	100,96	Rp324.367.414.145,00	Rp309.868.658.301,60	95,53	5,43%	Efektif dan Efisien
Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	100,45%	Rp466.994.081.997,00	Rp422.098.658.666,33	90,38%	10,07%	Efektif dan Efisien
Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	97,67%	Rp14.599.273.150,00	Rp13.763.734.485,00	94,28%	3,39%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	99,04%	Rp36.120.266.199,00	Rp34.502.888.310,00	95,52%	3,52%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100,00%	Rp733.974.000,00	Rp733.962.000,00	99,99%	0,01%	Efektif dan Efisien

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Efisiensi	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	83,15%	Rp219.116.700,00	Rp150.015.179,00	68,46%	14,69%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
	I K M	99,17%	Rp198.268.200,00	Rp129.664.680,00	65,39%	33,78%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
	Opini BPK terhadap LKPD	100,00%	Rp723.594.469.529,00	Rp713.116.623.515,00	98,55%	1,45%	Efektif dan Efisien
	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	102,39%	Rp226.100.000,00	Rp172.335.103,00	76,22%	26,17%	Efektif dan Efisien
Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	102.51%	Rp11.934.237.890,00	Rp10.944.832.161,00	91.71%	10.80%	Efektif dan Efisien
Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan public	Indeks SPBE	100,00%	Rp5.245.800.000,00	Rp5.155.254.243,00	98,27%	1,73%	Efektif dan Efisien
Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	-212,00%	Rp7.745.590.205,00	Rp6.939.138.599,00	89,59%	-301,59%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	77,56%	Rp11.883.633.185,00	Rp6.528.399.196,00	54,93%	10,07%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
			Rp46.681.423.712,00	Rp37.371.652.030,00	80,06%		
					Rata-rata: 67,50%		

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Efisiensi	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	101,67%	Rp3.616.883.000,00	Rp3.510.279.237,00	97,05%	4,62%	Efektif dan Efisien
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	108,68%	Rp 63.304.654.798,-	Rp55.793.883.206,00	88,13%	21,61%	Efektif dan Efisien
			Rp8.235.207.800,00	Rp7.082.343.275,00	86%		
					Rata-rata: 87,07%		
Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	102,70%	Rp96.642.692.893,00	Rp93.252.600.490,00	96,00%	6,70%	Efektif dan Efisien
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	109,25%	Rp23.442.697.163,00	Rp19.622.854.515,00	84,00%	25,25%	Efektif dan Efisien
	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100%	Rp722.374.700,00	Rp698.948.476,00	97,00%	3%	Efektif dan Efisien
	Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	100,01%	Rp2.395.182.313,00	Rp1.407.797.000,00	58,78%	41,23%	Efektif dan Efisien

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Efisiensi	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Persentase Rumah Layak Huni	101,12%	Rp423.025.205,00	Rp251.183.653,00	59,38%	41,74%	Efektif dan Efisien
Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	93,17	Rp68.251.500,00	Rp65.199.972,00	95,53	-2,36%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	3,01%	Rp6.650.520.765,00	Rp5.685.631.656,00	85,49%	-82,48%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	102,54%	Rp40.046.717.148,00	Rp37.585.672.739,00	93,85%	19,51	Efektif dan Efisien
	Indeks Kualitas Udara	**89,97%**					
	Indeks Kualitas Lahan	147,56%					
		Rata-rata: 113,36%					
Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	88,75%	Rp5.076.855.300,00	Rp4.266.277.728,00	84,03%	4,72%	Belum Efektif (Kinerja <100%)
Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	102,91%	Rp9.046.997.690,00	Rp8.050.471.043,00	88,99%	13,92%	Efektif dan Efisien

*) Data resmi namun Sementara
Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri

Rentang Kategori Penilian Indikator penggunaan anggaran (sumber daya)

Kategori Penilaian	Jumlah (Frekuensi)	Persentase
Efektif dan Efisien	17	70,08%
Belum Efektif (Kinerja <100%)	9	29,2%
TOTAL	**26**	**100%**

Berdasaarkan data tersebut diatas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran (sumber daya) mayoritas dengan kategori efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri. Dari 26 Indikator yang Efektif dan Efisien sebesar 17 atau 70,08%, dan indikator yang Belum Efektif sebesar 9 atau 29,2%.

3.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) di instansi pemerintah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja. Dasar operasionalnya merujuk pada Pedoman Penyusunan IKU dalam PermenPANRB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan system yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau kepemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efesien akuntabel, demokratis dengan tetap menjujung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai suatu dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

IKU merupakan komponen utama dalam perjanjian kinerja yang disusun setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen untuk mencapai target yang terukur, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra).

3.3.1. Mekanisme Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kediri

Tabel 17 Penghitungan IKU Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Manual Pengukuran	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	**Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Diukur oleh BPS**	**Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS**	**Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025**
		Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	$n\ Et$ $HLSt = FK \sum i$ $a\ Pt$ $i{=}a\ i$ (Diukur oleh BPS)	Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025
			Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah (Diukur oleh BPS)	Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025
		Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat lahir (Diukur oleh BPS)	Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2026
		0	**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**Diukur oleh BPS**	**Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS**	**Berita Resmi Statistik No. 57/11/35/Th. XXIII, 5 November 2025 (Pengukuran Bermakna Negatif)**

		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	(Jumlah angka angkatan kerja 15 tahun keatas / Jumlah Penduduk usia kerja) X 100% (Diukur oleh BPS)	Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS	Berita Resmi Statistik No. 57/11/35/Th. XXIII, 5 November 2025
		Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	**Persentase Angka Kemiskinan**	**Diukur oleh BPS**	Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS	**Berita Resmi Statistik No. 09/09/3506/Th. XXIX, 25 September 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Sosial tanggal 22 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/2/418.26/2026 (Pengukuran Bermakna Negatif)**
		Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	jumlah keluarga sejahtera 2, 3, dan 3+ dibagi jumlah keluarga dikali 100%	Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III Plus / Jumlah Keluarga	Data Hasil Survei Keluarga Sejahtera dalam Aplikasi sebagaimana termuat dalam Surat Kepala DP2KBP3A tanggal 27 Januari 2026 nomor 000.8.6.2/16/418.22/2026
		Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Diukur oleh Lembaga Akademisi/Professional	Penghitungan berdasarkan agregasi indikator kebebasan sipil, hakhak politik, dan lembaga demokrasi sesuai metodologi	Laporan Akhir Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2024 sebagaimana dimuat dalam Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 22 Januari 2026 nomor 000.8.63/3/418.62/2026
		Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme,	Tingkat kondusifitas daerah	Jumlah konflik yang difasilitasi dibagi jumlah konflik yang ada dikali		Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 22 Januari 2026 nomor

		agama, dan semangat demokrasi di masyarakat		100%		000.8.63/3/418.62/2026
2	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Diukur oleh Kementerian PANRB**	Diukur oleh Kementerian PANRB dengan metode sesuai PermenPANRB nomor 9 Tahun 2023	
		Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi dari Kemenpan & RB.	Diukur oleh Kementerian PANRB dengan metode sesuai PermenPANRB nomor 88 Tahun 2021	
			I K M	Nilai capaian IKM Pelayanan	Nilai capaian IKM Pelayanan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
			Opini BPK terhadap LKPD	Diukur oleh BPK	Diukur oleh BPK	Surat Resmi: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI No. 67.A/LHP/XVIII.S BY/05/2025 Tanggal 23 Mei Tahun 2025.
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Hasil survei indeks persepsi anti korupsi dari KPK	Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXVII tanggal 15 Juli 2024, Laporan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 Badan Pusat Statistik	Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXVII tanggal 15 Juli 2024, Laporan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 Badan Pusat Statistik
		Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Perhitungan indeks profesionalitas ASN sesuai dengan Perka BKN no 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan	1. Dimensi Kualifikasi, bobot 25% 2. Dimensi Kompetensi, bobot 40% 3. Dimensi Kinerja, bobot 30%	Surat dari Badan Kepegawaian Negara perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Laman

				Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	4. Dimensi Disiplin, bobot 5%	https://asndigital.bkn.go.id
		Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	Hasil evaluasi dari Kemenpan & RB	Diukur berdasarkan metode dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.	
3	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	**Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Diukur oleh BPS**	Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS	Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2026
		Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	((Nilai Investasi Tahun n – Nilai Investasi tahun n – 1) / Nilai investasi tahun n – 1) X 100%	(Rp. 1.688.461.116.537-Rp4.636.215.436.458)/ Rp4.636.215.436.458*100%	
		Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Pengeluaran per kapita disesuaikan (Diukur oleh BPS) / 12	12.968.000 / 12	Berita Resmi Statistik No. 12/11/3506/Th.VII, 21 November 2025 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tanggal 21 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/28/418.28/2026 dan Surat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.7.2.6/25/418.29/2026
4	Revitalisasi	**Tujuan :**	**Pertumbuhan**	**Diukur oleh BPS**	Diukur oleh BPS dengan	Kabupaten Kediri dalam

	Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	**Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah**	**PDRB Sektor Pertanian**		metode yang ditetapkan oleh BPS	Angka Tahun 2026
		Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	Jumlah ketersediaan pangan utama/Jumlah penduduk Kg/kapita/Tahun	• Produksi beras= 200.484,05 ton • Pemasukan (distribusi beras masuk) = 46.080 ton • Pengeluaran (distribusi beras keluar) = 35.543 ton • Stok beras penggilingan= 15.883 ton • Stok Bulog= 25.000 ton • Total ketersediaan beras= produksi+pemasukan-pengeluaran+stok= 251.904,050 ton=251.904.050 kg • Jumlah penduduk= 1.691.976 jiwa • Ketersediaan Pangan Utama= 251.904.050 kg / 1.691.976 jiwa= 148,88kg/kapita/tahun	Data Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tanggal 28 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/6/418.36/2026
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	Diukur oleh Lembaga Akademisi/Professional		
5	Peningkatan Infrastruktur dan	**Tujuan : Menurunkan kesenjangan**	**Indeks Kepuasan Layanan**	**Diukur oleh Lembaga Akademisi/Professional**	Diukur dalam Laporan Akhir IKLI Tahun 2025	

	Konektivitas antar Wilayah	**pembangunan antar wilayah**	**Infrastruktur**			
		Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik/ panjang jaringan jalan Kabupaten X 100%	1094.09 km / 1224.2km x 100%	Hasil survey kondisi jar irigasi bidang OP SDA Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/32/418.33/2026
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik dibagi Total Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dikali 100%	154313.11m / 174829m x 100%	Hasil survey kondisi jalan bidang PT Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/32/418.33/2026
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	Jumlah Peraturan Tata Ruang yang di selesaikan (%)	4 buah / 4 buah x 100%	Hasil kegiatan penetapan kebijakan bidang Penataan Ruang Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 26 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/32/418.33/2026
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum / Jumlah Rumah Tangga x 100 %	481.394 KK / 559.128 KK	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase Rumah Layak Huni	Jumlah RTLH yang ditangani / Jumlah RTLH X 100%	9.086 Rumah / 16.779 Rumah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Sasaran 2 :	Indeks kepuasan	Nilai Survei Kepuasan	Survey online melalui aplikasi	Surat Kepala Dinas

		Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	Masyarakat terhadap unit pelayanan publik perhubungan	e-sukma jatim	Perhubungan tanggal 23 Januari 2025 nomor 000.8.6.3/97/418.34/2026
6	Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	**Tujuan : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah**	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	**Diukur oleh BPS**	Diukur oleh BPS dengan metode yang ditetapkan oleh BPS	Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2026
		Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	jumlah PAD pariwisata tahun n dikurangi jumlah PAD pariwisata tahun n – 1 dibagi jumlah PAD pariwisata tahun n – 1 dikali 100%	Rp. 3.511.722.000 - Rp. 3.805.247.000 / Rp. 3.805.247.000 X 100%	Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/19/418.21/2026
7	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana	**Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	**Diukur oleh KemenLH**	**IKLH = (0,376 x IKA)+(0,405 x IKU)+(0,219 x IKL)**	**Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/328/418.35/2026**
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	Diukur oleh KemenLH	Laporan Hasil Uji Sampel Air	(sda)
			Indeks Kualitas Udara	IKU = 100 – (X (Ieu – 0,1)) Leu = 50% indeks SO2 + 50% indeks NO2 (Diukur oleh KemenLH)	Laporan Hasil Uji udara	(sda)
			Indeks Kualitas Lahan	Diukur oleh KemenLH	Peta/Data hasil citra satelit identifikasi tutupan lahan	(sda)
		Sasaran 2:	Indeks Risiko	Penghitungan Indeks	Diukur oleh BNPB dan BPBD	Surat Kepala Badan

		Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Bencana (IRB)	Risiko Bencana dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mekanisme perhitungan Indeks Risiko Bencana yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilaksanakan melalui pendekatan terintegrasi yang mengombinasikan analisis ancaman bencana (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) pada suatu wilayah. BNPB mengolah data spasial dan statistik sektoral yang bersumber dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta hasil pemutakhiran lapangan, kemudian melakukan standardisasi dan pembobotan indikator sesuai metodologi nasional yang berlaku. Nilai ancaman diperoleh dari probabilitas kejadian dan intensitas bencana, kerentanan dihitung berdasarkan aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan, sedangkan kapasitas mencerminkan	Provinsi Jawa Timur	Nasional Penanggulangan Bencana tanggal 30 Januari 2026 nomor B-44/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Pelaksana BPBD tanggal 10 Februari 2026 nomor 000.8.6.3/12/418.74/2026

				kemampuan daerah dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana. Selanjutnya, ketiga komponen tersebut dikalkulasi menggunakan formula risiko bencana, sehingga menghasilkan skor Indeks Risiko Bencana yang diklasifikasikan ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi, serta dipublikasikan melalui sistem informasi kebencanaan nasional sebagai rujukan perencanaan pembangunan dan pengurangan risiko bencana		
8	Pengemba-ngan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	**Tujuan : Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah**	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	**(Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan/ Jumlah Seni Budaya yang ada x 100%)**	60 / 66 x 100%	Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 23 Januari 2026 nomor 000.8.6.3/19/418.21/2026
		Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	Jumlah event budaya skala kab/prov/nasional yang diselenggarakan satu tahun dibagi seluruh event budaya dari desa sampai	200 / 343 x 100%	Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tanggal 23 Januari 2026 nomor

				kabupaten dikali 100%		000.8.6.3/19/418.21/2026
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	(50%Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif + 50%Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif)	= (50% x 16) + (50% x 130) = 73	
		Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	(∑ Prestasi yang dicapai/∑ Perlombaan yang diikuti) x 100%	117/152 x 100%=76,97%	
9	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	**Tujuan : Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa**	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	**Diukur oleh Kementerian Desa**	Rata – Rata Indeks Desa Kabupaten Kediri dibagi Jumlah Desa di Kabupaten Kediri dikali 100%	
		Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	∑desa mandiri dan maju X 100% ∑desa seluruhnya	Jumlah Desa Mandiri dan Desa Maju Kabupaten Kediri dibagi Jumlah Desa di Kabupaten Kediri dikali 100%	

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri

3.3.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2025

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Kediri Tahun 2025 yang merujuk pada Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	**Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	75,69
		Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,65
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,3
		Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	75,07
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,0
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,31
		Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	**Persentase Angka Kemiskinan**	9,8
		Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	90,05
		Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	79

		Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%
2	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Tujuan :** **Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	85,99
		Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	80
			I K M	88,74
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,85
		Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	81,62
		Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4,62
3	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	**Tujuan :** **Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	4,65 – 5,35
		Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	29,99%
		Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1.393.267
4	Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	**Tujuan :** **Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	3,03
		Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan	Ketersediaan pangan utama	146,44 kg/kapita/tahun

		masyarakat		
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104,69
5	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	**Tujuan :** **Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**70**
		Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	87%
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80,79%
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100%
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86,08%
			Persentase Rumah Layak Huni	53,55%
		Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	87,44
6	Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	**Tujuan :** **Meningkatkan daya saing pariwisata daerah**	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	**9,79**
		Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	10,95%
7	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana	**Tujuan :** **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	**70,50**
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	72,37
			Indeks Kualitas Udara	79,65
			Indeks Kualitas Lahan	39,34
		Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar	Indeks Risiko Bencana (IRB)	93,35

		pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana		
8	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	**Tujuan :** **Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah**	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	**98,21**
		Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	56,65%
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	**89**
		Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	65,28%
9	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	**Tujuan :** **Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa**	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	**0,78**
		Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	94,46%

*) Data resmi namun Sementara

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kediri

Lampiran Dokumen Perjanjinan Kinerja Perubahan Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. Hanindhito Himawan Pramana, SH.**

Jabatan : **Bupati Kediri**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kediri, 8 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

Bupati Kediri,

H. Hanindhito Himawan Pramana, SH.

Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Kediri 0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD Pengampu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	**Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**75,69**	
		Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,65	Dinas Pendidikan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,3	
		Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	75,07	Dinas Kesehatan, DP2KBP3A
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,0	
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,31	Dinas Tenaga Kerja
		Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	**Persentase Angka Kemiskinan**	9,8	
		Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	90,05	DP2KBP3A, Dinas Sosial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD Pengampu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)**	79	
		Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	Bakesbangpol, Satpol PP
2.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	**Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**85,99**	
		Sasaran 1 : Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Nilai SAKIP	80	Bappeda, Sekretariat DPRD, Setda
			I K M	88,74	Dispendukcapil, Balitbangda, Kecamatan
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	BPKAD, Bapenda
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,85	Inspektorat
		Sasaran 2 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	81,62	BKD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD Pengampu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Sasaran : 3 Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks SPBE	4,62	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan & Perpustakaan
3.	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	**Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah**	**Pertumbuhan Ekonomi**	4,65 – 5,35	
		Sasaran 1 : Meningkatnya investasi di daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah	29,99%	DPMPTSP
		Sasaran 2 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	1.393.267	Dinas Perdagangan, Dinas Kopusmik
4.	Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	**Tujuan : Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah**	**Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**	**3,03**	
		Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	146,44 kg/ kapita/ tahun	DKPP
		Sasaran 2 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	104,65	DKPP, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD Pengampu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
5.	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	**Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah**	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur**	**70**	
		Sasaran 1 : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	87%	Dinas PUPR
			Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80,79%	
			Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100%	
			Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	89,44%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase Rumah Layak Huni	53,55%	
		Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	87,44	Dinas Perhubungan
6.	Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	**Tujuan : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah**	**Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum**	**9,79**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD Pengampu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Sasaran : Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Pertumbuhan PAD Pariwisata	10,95%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
7.	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana	**Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten**	**70,50**	
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Air	72,37	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara	79,65	
			Indeks Kualitas Lahan	39,34	
		Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	93,35	BPBD
8.	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	**Tujuan : Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah**	**Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah**	**98,21**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD Pengampu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	56,65%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	**89**	
		Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	65,28%	Dinas Pendidikan
9.	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	**Tujuan : Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa**	**Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten**	**0,78**	
		Sasaran : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	94,46%	DPMPD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH		ANGGARAN
DINAS		
1. DINAS PENDIDIKAN		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp	7.043.935.330,-
2 Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	283.097.878.015,-
3 Program Pengembangan Kurikulum	Rp	0,-
4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	34.181.961.800,-
5 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp	43.639.000,-
6 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	345.823.500,-
7 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	2.581.588.400,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**327.294.826.045,-**
2. DINAS KESEHATAN		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp	107.317.603.698,-
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	202.260.561.519,-
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	1.547.611.000,-
4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kasehatan dan Makanan Minuman	Rp	606.520.060,-
5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	1.242.570.700,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**312.974.866.977,-**
RSUD KABUPATEN KEDIRI		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp	217.500.000.000,-
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	31.674.000.000,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**249.174.000.000,-**
RSUD SIMPANG LIMA GUMUL		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Rp	107.720.634.216,-
2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Rp	1.400.000.000,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**109.120.634.216,-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
3.	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.263.355.600,-
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	150.494.000,-
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	1.982.210.548,-
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp	14.356.156.000,-
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	42.572.400,-
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	189.150.000,-
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp	7.925.300,-
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	137.741.800,-
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	0,-
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	56.661.000,-
11	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	10.878.786.800,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**30.065.053.448,-**
4.	**DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Rp	3.825.986.145,-
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	21.452.811.163,-
3	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	96.642.692.893,-
4	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	722.374.700,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**122.643.864.901,-**
5.	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.055.173.165,-
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	263.877.800,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	166.287.300,-
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	519.547.000,-
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	275.886.200,-
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	105.793.040,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**3.386.564.505,-**

6. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	1.285.557.900,-
2	Program Penataan Desa	Rp	15.796.800,-
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp	123.364.300,-
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	8.306.037.800,-
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	3.718.677.400,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**13.449.434.200,-**

7. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp	7.633.498.552,-
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	21.429.850,-
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp	78.499.700,-
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	202.459.400,-
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	87.389.600,-
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	423.874.700,-
7	Program Perlindungan Penduduk	Rp	602.949.800,-
8	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	16.083.350.400,-
9	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	10.986.814.197,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**36.120.266.199,-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH		ANGGARAN
8.	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.737.027.049,-
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	137.811.100,-
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	3.231.284.400,-
4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	21.762.400,-
5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	226.025.100,-
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	17.662.663.000,-
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	74.330.200,-
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	3.136.864.800,-
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp	101.502.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**26.329.270.049,-**
9.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	7.998.387.325,-
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	4.590.808.800,-
3	Program Aplikasi Informatika	Rp	5.122.600.000,-
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	755.656.600,-
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	623.394.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**19.090.846.725,-**
10.	**DINAS SOSIAL**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.801.631.369,-
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	2.909.498.000,-
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	2.254.890.670,-
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	21.578.752.400,-
5	Program Penanganan Bencana	Rp	575.700.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	231.994.600,-
7	Program Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp	2.470.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**29.354.937.039,-**
11.	**DINAS TENAGA KERJA**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.050.343.750,-
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	45.540.000,-
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	8.523.450.000,-
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	225.171.200,-
5	Program Hubungan Industrial	Rp	572.427.000,-
6	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	21.941.200,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**14.438.873.150,-**
12.	**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.786.702.166,-
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	20.674.339.532,-
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	5.079.904.500,-
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	692.365.500,-
5	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	6.315.785.600,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**35.549.097.298,-**
13.	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	7.659.726.987,-
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	2.395.182.313,-
3	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	1.292.981.400,-
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	6.330.713.035,-
5	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	31.728.751.100,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
6	Program Kawasan Permukiman	Rp	3.944.052.857,-
7	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp	18.797.590,-
8	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	42.079.615.568,-
9	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp	150.089.360,-
10	Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp	224.245.200,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**95.824.155.410,-**
14.	**DINAS PERIKANAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.283.916.000,-
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	3.117.768.100,-
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp	94.629.000,-
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	521.050.400,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**5.017.363.500,-**
15.	**DINAS PERHUBUNGAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.110.966.391,-
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp	11.664.888.206,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**12.775.854.597,-**
16.	**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	12.278.680.337,-
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	31.395.498.865,-
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	633.987.900,-
4	Program Pengembangan Ekspor	Rp	271.966.100,-
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	119.099.510,-
6	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Rp	113.433.000,-
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	1.861.400.000,-
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	7.358.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**46.681.423.712,-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
17.	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp	9.879.815.298,-
2	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	2.758.711.665,-
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	6.115.275.445,-
4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	535.245.320,-
5	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp	3.061.610.988,-
6	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	1.253.596.000,-
7	Program Pembinaan Sejarah	Rp	486.805.623,-
8	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	848.073.414,-
9	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp	638.200.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**25.577.333.753**,-
18.	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	697.159.650,-
2	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	475.500.966,-
3	Program Pengelolaan Arsip	Rp	326.465.100,-
4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	13.583.200,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**1.512.708.916,-**
19.	**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	1.237.599.195,-
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	84.699.000,-
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	15.206.400,-
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	614.485.885,-
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	412.998.100,-
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	2.364.268.100,-
7	Program Pengembangan UMKM	Rp	8.391.975.700,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**13.121.232.380,-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
20.	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.267.176.407,-
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	2.583.516.258,-
3	Program Pencatatan Sipil	Rp	551.020.000,-
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	849.513.000,-
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	8.475.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**7.259.700.665,-**
21.	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	1.146.859.003,-
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	7.290.229.266,-
3	Program Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non-Kebakaran	Rp	1.945.000.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**10.382.088.269,-**
II	**BADAN**		
1.	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	5.868.160.200,-
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	681.086.153.168,-
3	Pengelolaan Barang Milik Daerah Program	Rp	8.461.339.100,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**695.415.652.468,-**
2.	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.067.190.100,-
2	Program Penanggulangan Bencana	Rp	1.949.172.100,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**5.016.362.200.-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH		ANGGARAN
3. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
1 Program Penunjangan Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.112.768.280,-
2 Program Kepegawaian Daerah	Rp	1.526.457.410,-
3 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	1.464.458.500,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**5.103.684.190,-**
4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.043.796.554,-
2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.528.529.296,-
3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.864.995.271,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**4.437.321.121,-**
5. BADAN PENDAPATAN DAERAH		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.997.691.423,-
2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.803.943.621,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**8.801.635.044,-**
6. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	4.479.153.400,-
2 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp	1.729.684.200,-
Jumlah Anggaran	**Rp**	**6.208.837.600,-**
7. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	Rp	4.863.963.360,-
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	1.744.445.190,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	1.680.224.000,-
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	5 .935.236.000,-
5	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	5.887.342.000,-
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	Rp	1.079.403.320,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**21.190.613.870,-**
III	**INSPEKTORAT**		
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.935.461.700,-
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	438.805.600,-
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	1.554.766.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**4.929.033.300,-**
IV	**SEKRETARIAT DPRD**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	5.576.637.560,-
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	20.032.014.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**25.608.651.560,-**
V	**SEKRETARIAT DAERAH**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	68.110.724.094,-
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	41.974.587.848,-
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	5.821.670.499,-
4	Pengelolaan Perbatasan	Rp	22.055.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	**115.929.037.441,-**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PROGRAM - PROGRAM PERANGKAT DAERAH			ANGGARAN
VI	**KECAMATAN**		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.129.279.879,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	251.562.475,-
3	Program Pemberdayaaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	2.301.768.400,-
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	72.366.900,-
5	Program Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	1.371.344.500,-
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp	342.581.900,-
	Jumlah Anggaran	**Rp**	***10.468.904.054,-***
	TOTAL JUMLAH ANGGARAN	**Rp**	**2.450.254.128.802,-**

Kediri, 8 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

Bupati Kediri,

H. Hanindhito Himawan Pramana, SH.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.3.3. Perbandingan Target Dan Realisasi Indikator Kinerja

Tabel 19 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	**75,69**	**76,09**	**100,53%**	Sangat Baik
		Sasaran 1 : Meningkatnya Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,65	13,77	100,88%	Sangat Baik
			Rata-Rata Lama Sekolah	8,3	8,38	100,96%	Sangat Baik
		Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesbilitas dan layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	75,07	75,41	100,45%	Sangat Baik
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,0	4,71	105,80%	Sangat Baik
		Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,31	69,65	97,67%	Baik
		Tujuan 2 : Menurunkan angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	9,8	9,81	99,90%	Baik
		Sasaran 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Prosentase Keluarga Sejahtera	90,05	89,63	99,04%	Baik
		Tujuan 3 : Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	79	79	100,00%	Baik
		Sasaran 5 : Meningkatkan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Tingkat kondusifitas daerah	100%	100%	100%	Baik
2	Reformasi Birokrasi	Tujuan :	Indeks	85,99	83,16	96,71%	Baik

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
	dan Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Reformasi Birokrasi				
		Sasaran 1 :	Nilai SAKIP	80	66,52	83,15%	Baik
		Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih					
			I K M	88,74	88,01	99,17%	Baik
			Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100%	Baik
			Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	3,85	3,85	Surat: 102,39 Perhitungan: 100,00%	Sangat Baik
		Sasaran 2 :	Indeks Profesionalitas ASN	81,62	83,67	102,51	Sangat Baik
		Meningkatkan Profesionalitas ASN					
		Sasaran : 3	Indeks SPBE	4,62	4,62	100,00%	Baik
		Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik					
3	Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah	Tujuan :	Pertumbuhan Ekonomi	**4,65 – 5,35**	5,03	108,17%	Sangat Baik
		Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah					
		Sasaran 1 :	Pertumbuhan Investasi Daerah	29,99%	-63,58%	-212,00%	Kurang Baik
		Meningkatnya investasi di daerah					
		Sasaran 2 :	Indeks Pengeluaran	1.393.267	1.080.667	77,56%	Cukup Baik
		Meningkatnya daya beli masyarakat					
4	Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan	Tujuan :	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	**3,03**	5,96	196,70%	Sangat Baik
		Meningkatkan daya dukung dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah					
		Sasaran 1:	Ketersediaan pangan utama	146,44 kg/kapita/ tahun	148,88 kg/kapita/ tahun	101,67%	Sangat Baik
		Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat					
		Sasaran 2 :	Nilai Tukar	104,69	113,73	108,68%	Sangat Baik

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Petani				
5	Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah	Tujuan : Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	70	81,19	115,99%	Sangat Baik
		Sasaran 1 :	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	87%	89,37%	102,70%	Sangat Baik
		Meningkatnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80,79%	88,26%	109,25%	Sangat Baik
		sarana infrastruktur	Cakupan Penyelesaian Peraturan Tata Ruang	100%	100%	100%	Baik
		Daerah	Cakupan desa atau kelurahan yang telah mendapatkan layanan air minum	86,08%	86,10%	100,01%	Sangat Baik
			Persentase Rumah Layak Huni	53,55%	54,15%	101,12%	Sangat Baik
		Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan perhubungan	87,44	81,47	93,17%	Baik
6	Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal	Tujuan : Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	Pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	9,79	8,85	90,40%	Baik
		Sasaran :	Pertumbuhan	10,95%	0,33%	3,01%	Kurang Baik

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
		Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	PAD Pariwisata				
7	Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumberdaya Alam dan Mitigasi Bencana	Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	70,5	69,64	98,78%	Baik
		Sasaran 1:	Indeks Kualitas Air	72,37	74,21	102,54%	Sangat Baik
		Meningkatnya kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Udara	79,65	71,66	89,97%	Baik
			Indeks Kualitas Lahan	39,34	58,05	147,56%	Sangat Baik
		Sasaran 2: Meningkatnya sinergitas antar pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	93,35	103,85	88,75%	Baik
8	Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda	Tujuan : Meningkatkan potensi seni dan budaya generasi muda untuk pembangunan daerah	Tingkat Pelestarian Potensi Seni Budaya Daerah	98,21	90,90	92,55%	Baik
		Sasaran 1: Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	56,65%	58,30%	102,91%	Sangat Baik
			Indeks Kapasitas Lembaga Kepemudaan dan Olahraga	89	73	82,02%	Baik
		Sasaran 2: Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	65,28%	76,97%	117,91	Sangat Baik
9	Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat	Tujuan : Mendorong daya saing ekonomi masyarakat dan desa	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat	0,78	0,78	100,00%	Baik

No	Misi	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
			Kabupaten				
		Sasaran :	Presentase desa mandiri dan desa maju didasarkan dari IDM	94,46%	97,38%	103,09%	Sangat Baik
		Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa					

*) Data Resmi Namun Sementara
Sumber data : Bag. Organisasi Setda Kab. Kediri

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri pada tahun 2025 ini terdapat 43 indikator, dengan mayoritas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kediri dicapai dengan kategori sangat baik. Terdapat 21 indikator dengan kategori Sangat Baik atau sebesar 48,84%, dan 19 indikator dengan kategori Baik atau sebesar 44,19%, dan 1 indikator dengan kategori Cukup Baik atau sebesar 2,33% dan 2 indikator dengan kategori Kurang Baik atau sebesar 4,65%.

3.4. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 20 Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KEDIRI YANG MAJU, BERKARAKTER NASIONALIS-RELIGIUS, SERTA SEJAHTERA BERDASARKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DIDUKUNG BIROKRASI YANG MELAYANI.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1: Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius			
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan standarisasi dan inovasi layanan pendidikan	Pengembangan layanan pendidikan dasar yang merata di seluruh unit pendidikan
			Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar
			Pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter, dan kearifan lokal di tingkat pendidikan
			Penguatan kapasitas sumber daya dan manajemen pendidikan
			Pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan
			Inovasi layanan pendidikan berbasis teknologi Informatika
			Fasilitasi layanan pendidikan inklusi
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan	Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas serta terjangkau
			Meningkatkan kompetensi dan ketersediaaan SDM bidang kesehatan
			Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan jaminan kesehatan
			Penerapan pola hidup sehat bagi keluarga
			Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
			Penataan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
			Peningkatan promosi kesehatan dalam menghadapi kondisi pandemi
			Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan sampai dengan desa
			Penambahan layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja	Mencetak tenaga kerja unggul siap pakai	Peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal yang unggul
			Fasilitasi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan mendukung ekonomi daerah

			Fasilitasi pemasaran dan bursa tenaga kerja
			Perlindungan ketenagakerjaan
			Fasilitasi sertifikasi tenaga kerja
			Penyediaan *job training*
			Standarisasi sarana prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)
			Fasilitasi pendampingan dan konsultasi ketenagakerjaan
Menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga	Penguatan dan peningkatan ekonomi berbasis keluarga	Pemberian bantuan bagi masyarakat miskin dan rentan serta terdampak krisis (contohnya pandemi)
			Pemberdayaan keluarga miskin melalui pelatihan *life skill* dan *economic skill*
			Pengembangan program usaha bersama berbasis Keluarga
			Penanganan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial
			Penguatan kesiapsiagaan terhadap korban sosial dan bencana
		Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan
			Perlindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan
			Penyediaan pusat pendampingan dan konsultasi bagi perempuan dan anak
		Penguatan Program Keluarga Berencana	Penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga sehat sampai dengan desa
			Fasilitasi pendampingan tenaga penyuluh di kegiatan Masyarakat
			Fasilitasi alat kesehatan keluarga (contohnya KB)
			Penyediaan layanan konseling keluarga
Meningkatkan harmonisasi dan kondusivitas daerah	Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Penguatan dan kampanye nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di semua tingkatan masyarakat	Perumusan pengarusutamaan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan demokrasi di setiap tingkatan masyarakat
			Menyisipkan semangat nasionalisme kebangsaan di setiap kegiatan Perangkat Daerah
			Penguatan peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama sebagai mitra dan media propaganda positif di

	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	Penguatan kelembagaan peran masyarakat di skala lingkungan dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban
			Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan
			Monitoring bersama masyarakat secara berkala
Misi 2: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik			
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih	Percepatan penerapan kebijakan reformasi birokrasi	Evaluasi terhadap peta jalan reformasi birokrasi
			Perumusan kebijakan percepatan reformasi birokrasi
			Peningkatan koordinasi kelembagaan antar eksekutif dan legislatif
			Manajemen perubahan dengan mengubah pola komunikasi pemimpin-rakyat
			Penguatan tugas-tugas kewilayahan
			Pendelegasian kewenangan untuk mencapai birokrasi yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan Pemerintahan
			Penguatan kapasitas perencanaan daerah
			Optimalisasi peran Dewan Riset Daerah
			Peningkatan kreasi dan inovasi daerah
			Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	Meningkatkan Profesionalitas ASN	Peningkatan profesionalitas dan produktivitas ASN	Pemberian *reward and punishment* di jajaran birokrasi
			Penataan dan penguatan organisasi
			Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan aparatur
			Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Insentif untuk Tenaga Kontrak, Guru Honorer, serta
			Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja
	Transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik	Digitalisasi birokrasi, informasi, dan layanan publik	Penyiapan *roadmap* dan *masterplan* digitalisasi birokrasi, informasi, dan layanan publik
			Pengembangan *e-government*
			Penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik
			Pengembangan *Smart*-Pertanian melalui program Desa Inovasi Tani Organik (DITO)
			Pengembangan ekonomi digital (*e-commerce*)

			Menyediakan pelayanan cerdas menggunakan teknologi informasi berbasis *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Robotics*, *Cloud Computing* sehingga masyarakat bisa melayani dirinya sendiri dari rumah
			Pengembangan, pengintegrasian, dan pemanfaatan interoperabilitas sistem informasi dalam satu *big data*
			Penyediaan infrastruktur pendukung layanan teknologi informatika
			Pengembangan aplikasi pendukung layanan publik, informasi, promosi potensi daerah, pariwisata, dan aktivitas penunjang masyarakat lainnya
			Penguatan komunikasi informasi publik melalui media sosial, media tatap muka, dan radio
			Pengembangan komunikasi tematik melalui program NGOPI (Ngobrol Persoalan dan Solusi)
			Kerjasama dan penguatan jejaring komunikasi media masa, komunitas, dan kelompok informasi masyarakat
			Peningkatan kualitas dan kuantitas inovasi pelayanan publik
			Inovasi pelayanan publik jemput bola
			Penguatan jejaring komunikasi persandian daerah
			Peningkatan tertib administrasi arsip dan pelayanan Public
			Penyediaan Mall Pelayanan di kecamatan atau desa
			Mendorong intensitas komunikasi pemberi pelayanan kepada pengguna layanan untuk selalu melakukan
			perbaikan layanan guna meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat
			Peningkatan komunikasi dan informasi publik NGOPI (Ngobrol Persoalan dan Solusi)
			Penyediaan mobil siaga
Misi 3: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah			
Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	Meningkatnya daya beli masyarakat	Peningkatan fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi

			Pembinaan dan pengembangan usaha bagi wirusahawan baru
			Peningkatan Akses pasar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi ke daerah daerah yang potensial
			Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna
			Fasilitasi Kemitraan Usaha dengan perusahaan besar dan *stakeholder* potensial lainnya
		Meningkatnya kelancaran distribusi arus barang dan jasa secara aman dan terkendali	Pengembangan sarana dan prasarana serta fasilitas perdagangan yang semakin tersebar dan merata di wilayah Kabupaten Kediri
			Meningkatkan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh wilayah Kabupaten Kediri
			Pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar
			Peningkatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan
			Peningkatan penggunaan produk dalam negeri
		Menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah berbasis komoditas unggulan daerah	*Roadmap* pengembangan potensi sektor Industri Kabupaten Kediri
			Fasiltasi kemitraan usaha industri kecil dengan berbagai pihak potensial lainnya
			Pembinaan dan Pelatihan bagi pelaku industri kecil berbasis komoditas masyarakat
	Meningkatnya investasi di daerah	Peningkatan iklim kondunsif yang mendorong peningkatan realisasi investasi pada sektor unggulan daerah yang meyerap tenaga kerja lokal	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Bidang Penanaman Modal
			Pengembangan peta digital potensi investasi Kabupaten Kediri
			Peningkatan promosi potensi penanaman modal
			Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu
			Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal
			Pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi dengan SATU DATA Provinsi dan Nasional
Misi 4: Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan			
Meningkatkan daya dukung	Meningkatnya ketersediaan	Peningkatan produksi dan nilai tambah	Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan

dan kemandirian sektor pertanian dan pangan daerah	pangan dan akses pangan masyarakat	produk pertanian	Pengembangan kawasan agropolitan
			Pengembangan kawasan pertanian organik
			Optimalisasi lahan pertanian marginal dan pekarangan
			Pengembangan komoditas unggulan pertanian
			Pengembangan sistem pemasaran produk agro
			Pengembangan komoditas unggulan peternakan
			Pengembangan Desa Inovasi Tani Organik (DITO) di setiap kecamatan
			Penguatan gerakan pertanian organik, sertifikasi produk, dan kerjasama pemasaran organik
	Meningkatnya kesejahteraan petani	Peningkatan diversifikasi dan pengolahan pangan	Pengembangan lumbung pangan desa
			Peningkatan distribusi pangan
			Peningkatan ketersediaan pangan
			Pengembangan olahan pangan berbasis sumber daya
			Peningkatan keamanan pangan
		Peningkatan produksi perikanan	Pengembangan perikanan berkelanjutan
			Pengembangan olahan dan pemasaran produk
			Peningkatan pengawasan sumber daya perikanan dan perairan secara umum
Misi 5: Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah			
Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Memantapkan penyediaaan infrastruktur konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kediri guna menunjang produktivitas antar wilayah	Pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan yang menghubungkan sentra produksi dan
			Pembangunan infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (Kampung Inggris, SLG, kawasan bandara, PDP Margo Mulyo, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi)
			Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas serta sarana irigasi, pengairan, dan sarana produksi lainnya di
			Pengembangan dan pemeliharaan sumber daya air baku dan air bersih untuk mendukung kebutuhan
			Penguatan sistem sanitasi lingkungan wilayah Kabupaten Kediri
			Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman
			Penataan kawasan dan wilayah Kabupaten Kediri guna

			Pengembangan peta digital ruang wilayah Kabupaten Kediri dalam mendukung kebijakan SATU DATA
		Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat dan berkelanjutan	Pembangunan rumah layak huni
			Penataan kawasan perumahan dan pemukiman
			Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan lingkungan perumahan dan pemukiman
			Penataan kawasan kumuh perkotaan
	Meningkatnya pelayanan transportasi daerah	Memantapkan sistem transportasi antar wilayah guna peningkatan mobilitas orang dan barang antar wilayah	Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk
			Penguatan implementasi Rencana Induk Jaringan LLAJ
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung LLAJ
			Peningkatan pengujian berkala kendaraan bermotor
			Peningkatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam
			Peningkatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota
Misi 6: Optimalisasi Kepariwisataan Berbasis Kearifan Lokal			
Meningkatkan daya saing pariwisata daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Peningkatan pariwisata lokal berbasis desa dan kawasan	Identifikasi obyek wisata yang memiliki keunggulan karakter lokal belum dan sedang berkembang
			Pengembangan DEWI (Desa Wisata) & *Roadmap* Pemulihan Destinasi Wisata
			Perbaikan sarana pendukung aksesibilitas interkonektivitias antar obyek wisata yang bisa ditempuh dalam *trip* sehari (kerjasama dengan PUPR)
			Pengembangan Desa Wisata Pintar (S*mart* DEWI) berbasis karakter lokal didukung promosi *e-commerce* (kerjasama dengan Kominfo)
Misi 7: Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Mitigasi Bencana			
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya	Meningkatnya kualitas lingkungan	Peningkatan tata kelola lingkungan hidup berbasis masyarakat	Pengembangan aplikasi pemantauan kondisi area pembuangan sampah dan limbah (kerjasama dengan Kominfo)

alam			Pengawasan lingkungan di tingkat kecamatan, seperti satgas yang didukung ketentraman dan ketertiban (trantib)
			Peningkatan pemanfaatan ruang-ruang hijau di gedung pemerintahan dan sekolah
			Pengembangan kelompok atau komunitas berbasis desa atau kecamatan
			Peningkatan hasil olahan limbah bernilai ekonomi kerjasama dengan ekonomi kreatif dan *Smart* DEWI
	Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam penanggulangan bencana	Optimalisasi dan penguatan peran pemerintah, masyarakat, dan swasta berbasis desa tangguh bencana	Peningkatan kesepahaman mengenai pengurangan risiko bencana ada di semua elemen (urusan)
			Kerjasama pengembangan desa tangguh dengan sektor pertanian, wisata, dan informasi
Misi 8: Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda			
Meningkatkan potensi seni budaya dan peran generasi muda untuk pembangunan Daerah	Meningkatnya pelestarian seni budaya daerah	Pengembangan seni budaya, kearifan lokal, dan nilai tradisi berbasis masyarakat	Penguatan seni budaya, kearifan lokal, dan nilai tradisi di masyarakat sebagai potensi daerah
			Sinergitas seni budaya di kurikulum pendidikan dalam rangka keberlanjutan daya dukung potensi daerah
			Fasilitasi kegiatan seni budaya dan nilai tradisi masyarakat sampai dengan tingkat desa
			Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan berbasis seni budaya dan tradisi lokal
			Pembangunan sarana *event* seni budaya di tiap kecamatan
			Penyelenggaraan *event* seni budaya berskala nasional dan internasional
			Promosi potensi seni budaya lokal berbasis masyarakat
	Meningkatnya daya dukung generasi muda bagi daerah	Pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga prestasi	Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan: pemuda yang mandiri dan kreatif
			Meningkatkan sarana prasarana olahraga
Misi 9: Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat			
Mendorongdaya saing ekonomi masyarakat dan desa	Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Penguatan peran dan partisipasi masyarakat dan desa dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal	Optimalisasi peran lembaga desa dalam pembangunan
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi desa
			Penguatan kapasitas pemerintahan desa

			Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan perekonomian desa
			Fasilitasi penyediaan sarana prasarana, akses, dan aktivitas daya dukung perekonomian desa
			Sinergitas program pemerintah dengan desa

Sumber : RPJMD Kab. Kediri Th, 2021-2026

3.5. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel 21 Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Perangkat Daerah	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1. Pengelolaan Keuangan Daerah **a. Pengelolaan Pendapatan Daerah** Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 712.442.688.975,16, pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp.3.249.386.009.817, 00 naik sebesar Rp. 189.641 067.037,00 atau 6,20% dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.059.744.942.780,00, maka pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan (*roadmap*) dan menjalankan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan PAD, di antaranya: a) Melakukan optimalisasi aset daerah sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD di masa yang akan datang dengan memperhatikan *trend* perkembangan industri ke depan, sehingga aset daerah dapat didayagunakan lebih produktif di masa yang akan datang.	Badan Pendapatan Daerah	Realisasi PAD Tahun 2025 (unaudited) sebesar Rp870.578.812.289,03 atau 97,64% dari target Rp891.609.838.094,37.Tahun 2026 target PAD sebesar Rp.898.754.596.016,00 meningkat sebesar 1,14% dari tahun 2025 yaitu Rp.888.358.917.931 Strategi Perbaikan: • Monitoring realisasi PAD triwulanan • Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD • Digitalisasi pelayanan dan pembayaran pajak dan retribusi Pemerintah Kabupaten Kediri telah memulai program optimalisasi aset daerah melalui: • Inventarisasi aset dengan aplikasi E-BMD • Model Pengembangan: kerjasama pemerintah-swasta	
b) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu untuk terus mendorong inovasi dan akuntabilitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Kabupaten Kediri akan melaksanakan: • Identifikasi Wajib Pajak Baru melalui integrasi data Dispendukcapil • Transparansi Perhitungan BPHTB melalui Kalkulator BPHTB	

rangka meningkatkan PAD. Peningkatan PAD dari Pajak dapat ditempuh melalui identifikasi dan pendataan wajib pajak baru, penerapan monitoring masa berlaku pajak reklame berbasis digital, penegakan aturan perpajakan secara disiplin dan peningkatan akuntabilitas perhitungan nilai pajak setiap wajib pajak. Peningkatan PAD dari Retribusi Daerah dapat didorong melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan parkir, penerapan SOP yang disiplin termasuk *reward and punishment* yang terukur terkait pemungutan retribusi parkir dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan pendapatan hasil retribusi parkir berbasis digital.			
c) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu untuk terus mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui strategi inovasi yang berkelanjutan, baik inovasi produk dan layanan jasa kepada pelanggan, inovasi terhadap strategi pemasaran, inovasi dalam rangka efisiensi biaya operasional dan optimalisasi asset BUMD. Inovasi menjadi kunci bagi BUMD untuk dapat menciptakan atau	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Kabupaten Kediri akan mendorong peningkatan kinerja BUMD melalui: • Inovasi Produk & Jasa Berkelanjutan • Peningkatan Efektivitas Pemasaran & Branding • Efisiensi Biaya Operasional & Optimalisasi Aset • Transformasi Digital & Kelembagaan	

menangkap peluang *trend* industri di masa yang akan datang yakni industri hijau yang lebih ramah lingkungan.			
d) Kedepan perlu terus ditingkatkan inovasi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai upaya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Kabupaten Kediri akan melaksanakan: • Pembangunan aplikasi berbasis GIS • Ekspansi Digital Payment dengan QRIS	
e) Kenaikan PAD dari sektor pajak dapat dicapai melalui langkah-langkah seperti identifikasi dan pendataan wajib pajak baru, penerapan sistem pemantauan masa berlaku pajak reklame yang terintegrasi dengan penegakan aturan perpajakan, serta peningkatan transparansi dalam perhitungan nilai pajak masing-masing wajib pajak.	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Kabupaten Kediri akan melaksanakan: • Pendataan wajib pajak baru • Pemantauan & Penegakan Aturan pajak reklame dengan memaksimalkan Sistem Database Reklame, melakukan penegakan kepatuhan pembayaran pajak reklame • Melakukan sosialisasi tentang cara menghitung pajak	
f) Untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), perlu dilakukan penguatan basis data objek pajak dan retribusi melalui pemutakhiran sistem informasi perpajakan, integrasi data geospasial aset daerah, serta digitalisasi layanan. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap jenis retribusi, termasuk kajian potensi, penyesuaian tarif yang realistis, dan	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Kabupaten Kediri akan memaksimalkan penerimaan realisasi PAD, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui penguatan sistem, peningkatan layanan, optimalisasi potensi, dan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).	

penyusunan *roadmap* optimalisasi PAD. Transparansi dan akuntabilitas terhadap komponen ―Lain-lain PAD yang sah‖ harus ditingkatkan dengan penyusunan klasifikasi sumber secara rinci serta mendorong keberlanjutan sumber-sumber tersebut. Inovasi digitalisasi PAD harus terus didorong, seperti integrasi pembayaran non-tunai, pemanfaatan QRIS, serta pemetaan dan pemanfaatan aset daerah secara digital. Selain itu, penting untuk memfasilitasi kolaborasi lintas perangkat daerah dalam menggali potensi PAD dari sektor pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif melalui program-program yang bersifat intersektoral.			
g) Peningkatan PAD dari retribusi dapat dilakukan dengan memperbaiki mutu dan jumlah infrastruktur pelayanan parkir, menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang konsisten disertai sistem penghargaan dan sanksi yang jelas dalam pemungutan retribusi parkir, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan pendapatan retribusi melalui sistem digital.	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Kabupaten Kediri akan Meningkatkan pendapatan retribusi parkir secara signifikan melalui perbaikan layanan fisik, penegakan prosedur yang konsisten, dan pengelolaan keuangan yang transparan berbasis digital.	
h) Pemerintah perlu mendorong penguatan kinerja BUMD melalui	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Kabupaten Kediri akan mendorong penguaatan kinerja BUMD melalui:	

strategi inovasi yang berkelanjutan, mencakup pengembangan produk dan jasa, peningkatan efektivitas pemasaran, serta efisiensi biaya operasional dan optimalisasi pemanfaatan aset. Inovasi harus menjadi fondasi utama agar BUMD mampu bersaing, menciptakan nilai tambah, dan merespons dinamika pasar–khususnya dalam mengantisipasi tren industri masa depan yang semakin menuntut transformasi menuju industri hijau dan berwawasan lingkungan.		- Inovasi Produk & Jasa Berkelanjutan - Peningkatan Efektivitas Pemasaran & Branding - Efisiensi Biaya Operasional & Optimalisasi Aset - Transformasi Digital & Kelembagaan	
i) Pemerintah Kabupaten Kediri dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan mendata ulang wajib pajak, pengelolaan pajak yang inovatif, membangun Kerjasama dengan pihak swasta dalam pemungutan pajak, dan memberikan kemudahan layanan bagi wajib pajak.	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Kabupaten Kediri akan melaksanakan peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri melalui optimalisasi sektor perpajakan dengan pendekatan data yang akurat • inovasi pengelolaan dengan melakukan digitalisasi pelayanan dan pembayaran PAD • kolaborasi strategis • dan layanan yang mudah bagi wajib pajak (WP).	
k) Badan usaha Milik Daerah (BUMD) agar terus di dorong untuk dapat dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Badan Pendapatan Daerah	BUMD sebagai instrumen strategis daerah, memiliki potensi ganda: sebagai penyumbang PAD langsung (dalam bentuk dividen, bagi hasil, dan setoran lain) dan sebagai penggerak ekonomi daerah yang secara tidak langsung memperluas basis pajak dan retribusi. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan perbaikan tata kelola (governance), inovasi bisnis, dan optimalisasi aset. Strategi Kelembagaan & Tata Kelola: • Memperkuat struktur	

		pengawasan, profesionalisme manajemen, dan sistem insentif berbasis kinerja. • Strategi Ekspansi & Diversifikasi Bisnis: Mengembangkan lini usaha baru yang profitable dan sinergis dengan potensi unggulan daerah. • Strategi Optimalisasi Aset & Efisiensi: Maksimalkan pemanfaatan semua aset BUMD dan tekan kebocoran operasional untuk meningkatkan laba. • Strategi Sinergi & Dukungan Pemerintah: Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan BUMD.	
l) Diharapkan BUMD lebih dioptimalkan kinerja dan pendapatannya sesuai dengan kesanggupan para Direksi / Pimpinan BUMD waktu penandatanganan kontrak kinerja sehingga dapat memaksimalkan PAD.	Badan Pendapatan Daerah	Pemerintah Kabupaten Kediri akan Memastikan Kontrak Kinerja (PK) antara Pemerintah Daerah (sebagai Pemegang Saham) dan Direksi/Pimpinan BUMD menjadi alat yang efektif untuk mengoptimalkan kinerja dan pendapatan BUMD, sehingga kontribusi kepada PAD dapat dimaksimalkan.	
b. Pengelolaan Belanja Daerah Kondisi umum Belanja Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa perubahan baik perubahan karena adanya penambahan kegiatan baru ataupun pergeseran kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan APBD.	• BPKAD • BAGIAN PBJ	Kondisi umum Belanja Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat beberapa perubahan baik perubahan karena adanya penambahan kegiatan baru ataupun pergeseran kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan APBD. Perubahan-perubahan tersebut antara lain disebabkan: 1. Adanya penyempurnaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 2. Adanya perubahan perencanaan	

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas, efisiensi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangannya. Kondisi umum Belanja Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa perubahan baik perubahan karena adanya penambahan kegiatan baru ataupun pergeseran kegiatan		belanja yang disebabkan: a) Perhitungan dengan pergeseran anggaran untuk ketersediaan anggaran gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan bagi PNSD. b) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disesuaikan dengan ketentuan yang mendasarinya. c) Penyesuaian penggunaan anggaran dana transfer dari pemerintah pusat sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. d) Penyesuaian kegiatan yang bersumber dana DAU spesifik bidang Kesehatan, DAU spesifik Bidang Kesehatan, DAU spesifik Bidang Pekerjaan Umum dan DAU spesifik penggajian P3K. e) Penyesuaian anggaran dana transfer yang terdiri dari: 1. Transfer Pemerintah Pusat yaitu DAU Yang Ditentukan Penggunaannya, DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Insentif Fiskal. 2. Transfer Antar Daerah yaitu: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Khusus. f) Penyesuaian anggaran dengan pergeseran untuk mendukung program-program prioritas. g) Penyesuaian pergeseran belanja BLUD. 3. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 berdasarkan	

yang disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan APBD. Perubahan-perubahan tersebut antara lain disebabkan: 1. Adanya penyempurnaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 2. Adanya perubahan perencanaan belanja yang disebabkan: a) Perhitungan dengan pergeseran anggaran untuk ketersediaan anggaran gaji dan Tunjangan serta tambahan penghasilan bagi PNSD. b) Penyesuaian penggunaan anggaran dana transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Khusus sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Teknis c) Penyesuaian kegiatan yang bersumber dana DAU spesifik bidang Kesehatan, DAU spesifik Bidang Kesehatan, DAU spesifik Bidang Pekerjaan Umum dan DAU spesifik penggajian P3K. d) Penyesuaian anggaran dana transfer yaitu: 1) Transfer Pemerintah Pusat		Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang harus digunakan dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Disamping itu, sesuai prinsip efisiensi dan efektifitas, maka dalam mengalokasikan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kediri lebih mengutamakan pada aspek sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah serta capaian kinerja dari program dan kegiatan. Dengan memperhatikan kondisi sosial dan perekonomian daerah, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp.3.537.432.120.834,00 mengalami penambahan sebesar Rp.85.689.747.577,00 atau 2,48% dari APBD Tahun Anggaran 2025. Sebagai upaya tindak lanjut rekomendasi, berbagai langkah untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Rekonsiliasi ICSA (Internal Control Self Assistance) yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan guna memastikan kesesuaian data keuangan dan aset serta mendeteksi lebih dini potensi rendahnya realisasi anggaran; b. Dalam rangka penguatan tata kelola aset, BKAD juga telah beralih dari aplikasi e-SIMBADA ke e-BMD Kementerian Dalam Negeri agar pengelolaan barang milik daerah lebih terintegrasi, tersinkronisasi, dan terpusat. c. Pada Tahun 2025 memperoleh tambahan SDM bidang teknologi informasi untuk mendukung optimalisasi sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah; d. Pengembangan aplikasi e-Loket sebagai upaya peningkatan efisiensi	

yaitu DBHCHT dan Insentif Fiskal. 2) Transfer Antar Daerah yaitu: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Pajak Rokok dan Bantuan Keuangan Khusus. e) Penyesuaian anggaran dengan pergeseran untuk mendukung program-program prioritas. f) Penyesuaian pergeseran belanja BLUD. 3. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang harus digunakan dan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Disamping itu, sesuai prinsip efisiensi dan efektifitas, maka dalam mengalokasikan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kediri lebih mengutamakan pada aspek sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah serta capaian kinerja dari program dan kegiatan. Dengan memperhatikan kondisi sosial dan perekonomian daerah, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,		dan kelancaran proses administrasi belanja OPD. Ke depan, BKAD akan terus memperkuat koordinasi dengan TAPD dan OPD teknis dalam pemantauan realisasi belanja serta mendorong penerapan mekanisme early warning terhadap realisasi anggaran yang rendah, guna mendukung pencapaian target strategis RPJMD. Untuk Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp3.539.790.270.834,00 dengan realisasi sebesar Rp3.198.460.496.513,12 atau 90,35%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp3.496.881.425.582,82, realisasi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 8,53%. 1. Belanja Operasi Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp2.549.880.834.464,00 dan terealisasi sebesar Rp2.279.538.012.411,65 *(Unaudited)* atau 89,39%. Dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp2.473.605.563.654,91, Belanja Operasi menurun sebesar 7,85%. Penurunan dan kenaikan pada komponen Belanja Operasi antara lain: a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.174.242.820.092,48 (Unaudited) (89,33%) dan meningkat 5,46% dibanding Tahun 2024. b. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp933.654.359.929,17 (Unaudited) (91,68%) dan menurun 14,61% dibanding Tahun 2024. c. Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp137.192.082.390,00 (Unaudited) (76,77%) dan menurun 39,72%. d. Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp34.448.750.000,00 (89,53%) dan menurun 11,99%.	

Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp.3.659.923.926.392,00 mengalami penambahan sebesar Rp.173.004.151.335,00 atau 4,96% dari APBD Tahun Anggaran 2024. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas perencanaan teknis dan memastikan ketepatan waktu pelaksanaan proyek fisik, antara lain dengan mempercepat proses lelang melalui sistem *e-procurement.* Selain itu, belanja operasional harus diefisienkan dengan mengurangi aktivitas yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan mengalihkannya ke program yang lebih produktif. Penting pula dilakukan review lintas OPD terhadap program prioritas yang tidak terserap secara maksimal, agar penyesuaian anggaran tidak mengorbankan pencapaian target strategis dalam RPJMD. Koordinasi antara TAPD dan OPD teknis juga perlu diperkuat dalam pengawasan pelaksanaan fisik dan belanja modal, termasuk penerapan sistem peringatan dini *(early warning)* terhadap realisasi anggaran yang rendah.		2. Belanja Modal Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp322.121.286.484,00 dengan realisasi Rp284.521.208.318,50 (Unaudited) atau 88,32%, mengalami penurunan 14,00% dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp330.855.699.613,91. Rincian perubahan utama: a. Belanja Modal Tanah tidak terealisasi (0,00%) dan menurun 100,00%. b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi Rp72.315.356.795,08 (89,83%) dan meningkat 12,64%. c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi Rp107.539.785.882,82 (86,34%) dan menurun 36,03%. d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terealisasi Rp92.990.376.485,60 (94,84%) dan meningkat 10,93%. e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi Rp11.325.846.355,00 (99,99%) dan meningkat signifikan sebesar 1.026,44%. f. Belanja Modal Aset Lainnya terealisasi Rp349.842.800,00 (62,47%) dan menurun 43,96%. 3. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp11.660.964.886,00 dan terealisasi Rp4.893.903.348,97 atau 41,96%. Dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1.547.212.797,00, belanja ini mengalami peningkatan sebesar 216,30%. 4. Belanja Transfer Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp656.127.185.000,00 dengan realisasi Rp629.507.372.434,00 (Unaudited) atau 95,94%, mengalami penurunan 8,88%	

		dibanding realisasi Tahun 2024 sebesar Rp690.872.949.517,00. Rinciannya: a. Belanja Bagi Hasil terealisasi Rp36.500.000.000,00 (Unaudited) (100,00%) dan meningkat 4,73%. b. Belanja Bantuan Keuangan terealisasi Rp593.007.372.434,00 (95,70%) dan menurun 9,61%. 5. Surplus/Defisit Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi anggaran menunjukkan surplus sebesar Rp162.562.121.059,73, berbalik dari kondisi defisit Tahun 2024 sebesar Rp174.669.584.269,66, atau mengalami perbaikan kinerja fiskal sebesar 193,07%. (Unaudited) 6. Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp222.766.957.948,46 dan terealisasi Rp222.766.957.949,76 (Unaudited) atau 100,00%, mengalami penurunan 45,75% dibanding Tahun 2024. Capaian serapan belanja daerah terus diupayakan secara optimal sesuai dengan prioritas Pembangunan daerah.	
	Bagian PBJAP	Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan melaksanakan fungsi salah satunya adalah pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengadaan barang/jasa serta program kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2025, Bagian PBJAP selaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan	

		pengadaan barang/jasa sejak tahap perencanaan pengadaan dengan melaksanakan sosialisasi/pendampingan/ bimtek penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke dalam aplikasi SiRUP, menginisiasi pelaksanaan konsolidasi pengadaan, menerbitkan Surat Edaran Bupati tentang Implementasi *E-Purchasing* pada Pemerintah Kabupaten Kediri, dan Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Surat Edaran Tentang Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Dan Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2026 yang berisi himbauan dan arahan untuk melaksanaan pengadaan secara elektronik. Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengadaan dengan cara *desk* / pendampingan masing-masing SKPD terhadap capaian realisasi pengadaan barang/jasa dibandingkan dengan rencana pengadaan pada RUP. Kegiatan ini berfungsi sebagai *early warning* untuk memastikan pelaksanaan PBJ berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan mengevaluasi proyek fisik yang sedang berjalan agar tidak terjadi deviasi dan kontrak kritis yang berakibat pada keterlambatan dan kegagalan penyedia atau putus kontrak.	
2. Implementasi Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan sebagai implementasi strategi dan arah kebijakan daerah, maka catatan strategis berkaitan dengan hal tersebut dikelompokan ke dalam beberapa bidang, yaitu :			
a. Bidang Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa Penerapan nilai nasionalisme, agama	BAKESBANGPOL	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan indikator kinerja yang terukur dan akuntabel 2. Menetapkan kebijakan sosialisasi persatuan dan kesatuan secara terencana dan berkelanjutan 3. Mengoptimalkan peran aparatur, tokoh	

dan semangat demokrasi ditinjau dari tingkat pemahaman elemen masyarakat mulai menurun baik dari wawasan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, serta karakter bangsa. Disamping itu, diwarnai dengan mulai memudarnya tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta menjaga dan memelihara kondusifitas lingkungan dan kondusifitas wilayah/daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menjalankan langkah-langkah, di antaranya: 1. Sinkronisasi kerukunan umat beragama, diharap pemerintah terus mengadakan pembinaan agar hubungan antar umat beragama tetap harmonis, serta penanggulangan kelompok radikal yang dapat mengganggu kerukunan antar umat beragama; 2. Perlu Peningkatan Sarana dan prasarana tempat ibadah agar dapat memadai sehingga masyarakat nyaman dalam beribadah; 3. Perlu pembinaan yang berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka pembinanan kerukunan antar umat beragama; 4. Perlu Peningkatan sarana dan Prasarana Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan		agama, tokoh masyarakat, LSM, pendidik, pelajar, dan mahasiswa sebagai agen persatuan 4. Memanfaatkan media digital untuk penyebaran pesan persatuan dan penangkal narasi pemecah belah 5. Mengoptimalkan forum partisipasi publik yang inklusif, seperti musrenbang dan forum warga 6. Memberdayakan organisasi kemasyarakatan, komunitas lokal, dan kelompok pemuda sebagai penggerak demokrasi 7. Memperkuat peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai penjaga harmoni sosial 8. Mengembangkan kemitraan strategis antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan masyarakat sipil 9. Menguatkan FKUB dan forum lintas agama sebagai pusat dialog, mediasi, dan advokasi kerukunan 10. Memanfaatkan media digital untuk menjangkau masyarakat luas secara kreatif dan edukatif dalam penanaman ideologi bangsa dalam menjaga ketahanan nasional 11. Membentuk forum koordinasi rutin untuk evaluasi dan perencanaan pengamanan 12. Melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap sistem pengamanan	
	Bag. Kesra	• Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Besar Agama dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME dan menjaga kerukunan antar umat beragama. • Melaksanakan kegiatan Doa Bersama (umat Islam, Kristiani, Hindu) dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri dan HUT RI. Kegiatan ini antara lain bertujuan untuk menjaga hubungan antar umat beragama agar tetap rukun dan harmonis. • Pemberian bantuan hibah kepada tempat ibadah, TPQ dan Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Kediri guna meningkatkan sarana prasarana tempat ibadah, TPQ dan Pondok pesantren sehingga masyarakat dapat beribadah dan menuntut ilmu agama dengan	

Pondok Pesantren dan perlu di alokasikan dana insentif kesejahteraan bagi guru guru TPQ dan Pondok Pesantren.		nyaman.	
	Dinas Pendidikan	Tahun 2025 telah tersalurkan Hibah Uang Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Fisik dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Swasta/Madrasah/Perkumpulan Olahraga kepada 76 lembaga dengan realisasi anggaran Rp8.300.000.000,00 Bisyaroh Guru Keagamaan telah Diterimakan kepada 9.500 guru keagamaan sebesar Rp. 11.517.800.000	
b. Bidang Kehidupan Berdemokrasi, Berbangsa dan Bernegara. 1) Partisipasi Masyarakat a) Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidik melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Tujuan peningkatan peran parpol melalui pendidikan politik adalah untuk mencetak politisi-politisi yang santun dan beretika baik dari kalangan anggota parpol maupun dari masyarakat, utamanya dengan menggunakan dana Banpol yang telah diberikan oleh Pemerintah dan dana atas inisiatif Parpol sendiri. Maksud diadakannya Kegiatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik agar kesadaran politik anggota parpol maupun masyarakat luas semakin baik. Selain itu masyarakat diharapkan bisa lebih berpartisipasi dalam demokrasi dan dalam pelaksanaan pemilu. Efeknya, Indek	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang memaksimalkan penggunaan dai kanal aduan yang terpusat seperti SP4N Lapor yang mana kanal tersebut dari Kanal aduan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu Kabupaten Kediri juga memiliki kanal aduan masyarakat yaitu Halo Masbup yang mana pada kepemimpinan periode kedua masuk dalam program prioritas Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika pengembangan Halo Masbup 2.0 Respon Cepat Tanpa Batas. Diharapkan aduan-aduan dari masyarakat Kabupaten Kediri sanggup terkoordinir dan dapat ditindak lanjuti oleh perangkat daerah terkait	

Demokrasi Indonesia di daerah akan semakin baik. Adapun manfaat dari program ini yaitu timbul pemahaman tentang pentingnya pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga muncul kesadaran dan peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat dalam peningkatan pendidikan politik serta demokrasi di Kabupaten Kediri. Selain itu terfasilitasinya kegiatan antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan perwakilan partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik, serta terwujudnya sinergitas antara pemerintah daerah, instansi vertikal dan partai politik dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024; b) Secara umum, permasalahan yang menjadi penghambat upaya peningkatan penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat telah diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Kurang optimalnya peran aparatur, elite politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, tenaga pendidik, pelajar dan mahasiswa dalam memperkokoh wawasan kebangsaan; 2. Kurang optimalnya			

peran-peran masyarakat dalam menjaga inklusivitas dan demokrasi di Kabupaten Kediri. 3. Perlunya peningkatan keterpaduan sistem pengamanan melalui penataan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar stakeholder; 4. Jaringan data informasi strategis dalam rangka peningkatan kewaspadaan daerah perlu untuk ditingkatkan; 5. Perlunya sosialisasi terkait upaya pemecahan dan solusi atas upaya memberikan pemahaman terkait pentingnya persatuan dan kesatuan; 6. Perlunya sosialisasi ketahanan nasional melalui penanaman ideologi bangsa kepada Masyarakat. c) Sedangkan dari aspek tingkat partisipasi demokrasi, masyarakat pun mulai ada sedikit pergeseran pemahaman dan pengetahuan terkait demokrasi di Kabupaten Kediri. Karena ketiga hal tersebut adalah faktor-faktor kunci daerah yang kondusif. Selain meningkatkan karakter nasionalis dan agama masyarakat Kabupaten Kediri yang akan diwujudkan dengan meningkatnya kerukunan antar umat beragama, terpeliharanya semangat			

kepahlawanan, nilai-nilai dan karakter kebangsaan, serta partisipasi demokrasi dengan dimensi sebagai berikut: Meningkatnya toleransi umat beragama dengan menerima dan saling menghormati perbedaan keyakinan, baik dalam kehidupan sosial ataupun dalam peribadatan, Penerapan nilai-nilai dan karakter kebangsaan, Menumbuhkan semangat kepahlawan dalam sadar bela negara.			
2) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan a) Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang aman tertib dan teratur. Hal tersebut dimaksudkan untuk menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Diharapkan dengan hal penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman; b) Sedang permasalahan dalam bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Masih kurang idealnya jumlah personil Satuan Polisi	SATPOL PP	Dari data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) melakukan penyebarkan informasi kebijakan dan aturan pemerintah daerah mengenai ketertiban umum melalui media sosial, website pemerintah, dan videotron. Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2029 akan mengadakan program literasi digital untuk mencegah penyebaran konten negatif dan hoaks yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Menjaga keamanan informasi pemerintah daerah agar tidak disalahgunakan, yang bisa berdampak pada ketertiban umum	
		Dalam rangka upaya penambahan personel, sesuai usulan ke BKPSDM, Satpol PP medapatkan alokasi CPNS sebanyak 3 personel. Selanjutnya mengusulkan tambahan personel lagi pada pengadaan CPNS tahun berikutnya. PPNS yang ada dioptimalkan seoptimal mungkin dalam penegakan perda, disamping rencana pembentukan PPNS baru dengan mengikutkan Diklat PPNS. Koordinasi dengan OPD pengampu Perda untuk pembentukan PPNS baru dari OPD Pengampu Perda. Upaya perbaikan pengelolaan administrasi monitoring dan evaluasi terhadap tindaklanjut pelanggaran Perda dan Perkada	

Pamong Praja dan PPNS jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kabupaten Kediri; 2) Kurang tertibnya administrasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. c) Dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu berperan secara aktif untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan daerah, aktif menanggulangi tersebarnya informasi palsu atau hoax dan berita bohong atau fakta yang direkayasa yang dapat merusak ketentraman dan ketertiban umum; d) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu mengoptimalkan pemanfaatan kanal-kanal resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menyebarkan berbagai informasi sekaligus mengedukasi masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyebaran disinformasi yang dapat menimbulkan disorientasi di lingkungan masyarakat		dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, maupun memanfaatkan aplikasi pelaporan yang telah dibuat provinsi maupun pusat. Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Satpol PP telah berperan secara aktif untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan daerah yang dilaksanakan dalam bentuk program / kegiatan antara lain : - Deteksi Dini - Patroli Wilayah secara rutin di seluruh wilayah Kabupaten Kediri - Sosialisasi terkait Trantibumlinmas - Pengamanan kegiatan, unjuk rasa - Optimalisasi Satlinmas di Desa - Koordinasi dengan Instansi terkait - Penegakan Hukum berupa Tindakan Yustisi (sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Ringan) dan Tindakan Non Yustisi (Teguran Lisan s/d Surat Peringatan) - Peningkatan Kapasitas SDM - Penyusunan Perda Trantibumlinmas	

c.Bidang Kesejahteraan Masyarakat 1) Peningkatan Mutu, Akses dan Sarana Prasarana Pendidikan a) Pemerintah Kabupaten Kediri tengah mengupayakan beberapa hal sebagai berikut: Optimalisasi Pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket) Inovatif bagi Anak Putus Sekolah, Penambahan kuota penerima bantuan/beasiswa Pendidikan GNOTA yang tepat sasaran (SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School, Becak Kari STIKES Pamenang, Mahasiswa dan Atlet Berprestasi, Mahasiswa Baru, Siswa SMA/SMK/MA dan SMP/MTs dari keluarga tidak mampu), Penambahan kuota Guru PPPK, Penambahan kuota penerima Insentif GTT/PTT dan Bisyaroh Guru Keagamaan, Regrouping SDN untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Sekolah Dasar, Pendirian SMPN di kawasan blank zonasi, Pemerataan distribusi guru berdasarkan zonasi, Pembinaan minat dan bakat siswa baik kemampuan literasi, numerasi dan non akademik serta Peningkatan kompetensi GTK melalui Platform Merdeka Mengajar dan Guru Penggerak untuk meningkatkan	Dinas Pendidikan	Penanganan ATS dilakukan melalui skema sebagai berikut : 1. Usia sekolah diupayakan dikembalikan pada jalur Pendidikan formal, atau 2. Ketika tidak memungkinkan diterima di jalur formal, maka akan ditampung di jalur Pendidikan nonformal yaitu PKBM Penerimaan bantuan beasiswa pendidikan tahun 2025, sbb : Penambahan Kuota Beasiswa Pendidikan Tahun 2024 sejumlah 7.968 penerima manfaat, di Tahun 2025 menjadi 8.176 penerima manfaat Bisyaroh Guru Keagamaan telah Diterimakan kepada 9.500 guru keagamaan sebesar Rp. 11.517.800.000 Mengembangkan Platform belajar mandiri bagi anak yang sudah bekerja. Mengintegrasikan Kurikulum Berbasis Vokasi lokal contohnya budidaya ikan air tawar Menghubungkan Penerimaan Beasiswa Nonformal Ke Program Beasiswa Kapal Pesiar dan Sambut Bandara menuju Dunia Kerja Penambahan kuota GTK PPPK di tahun 2025 melalui PPPK Paruh Waktu sejumlah 2.167 orang Penerima insentif GTK di tahun 2025 sejumlah 9.443 orang. GPK mengikuti dari jenjang SD dan SMP mengikuti kegiatan Diklat berjenjang pendidikan inklusif di platform merdeka mengajar hingga jenjang Mahir Terlaksananya kegiatan Workshop Peningkatan Literasi dan Numerasi dengan sasaran 104 guru jenjang SD, Terlaksananya kegiatan FLS3N Tingkat Kabupaten, Keikutserataan siswa jenjang SD pada kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang dilaksanakan secara daring oleh ajang talenta Puspresnas dan pengiriman kontingen/tim Olimpiade Gasing Nasional (OGN) di Banyuwangi. Menyelenggarakan workshop yang fokus pada penerapan pembelajaran efektif, asesmen autentik, dan pengelolaan kelas (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa,Workshop Pembelajaran Mendalam), bukan hanya pemahaman konseptual. Pemenuhan kekosongan Kepala Sekolah sudah dilaksanakan dengan diklat BCKS dengan menggunakan anggaran APBN	

kualitas SPM Pendidikan dan Rapor Pendidikan; b) Bidang SDM pendidik dan motivasi siswa. Manajemen mutu pendidikan dalam sisi operasional perlu untuk dioptimalkan, karena di taraf konsep dan perencanaan sudah disusun dengan baik namun di sisi operasional masih banyak kendala; c) Secara umum, faktor-faktor penghambat dalam bidang pendidikan tidak memiliki kendala yang berarti. Apalagi dukungan Bupati Kediri dalam meningkatkan aksesibilitas, kuantitas dan kualitas pendidikan sangat tinggi. Dengan dukungan dan komitmen yang kuat dari Bupati Kediri tersebut menjembatani masalah-masalah yang menghambat permasalahan pendidikan di Kabupaten Kediri. Faktor penghambat dalam bidang perpustakaan tidak memiliki kendala yang berarti, hanya saja kurangnya sarana prasarana untuk perpustakaan keliling sehingga pelayanan yang diberikan terbatas. Bahwa diketahui luas wilayah Kabupaten Kediri yang termasuk daerah yang luas dan memiliki instansi pendidikan yang cukup banyak tersebar di Kabupaten		dan APBD. Terlaksananya kegiatan workshop Penyusunan Bahan Ajar dan Assesmen Jenjang SD dengan sasaran Ketua K3SD Kecamatan dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Satuan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah. Penerimaan Bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kemendikdasmen kepada seluruh satuan pendidikan baik formal maupun nonformal berupa Bantuan Interactive Flat Planel (IFP) yang sangat berguna dalam mendukung proses kegiatan pembelajaran, mempercepat digitalisasi pembelajaran, meningkatkan kualitas pengajaran, mendukung metode pembelajaran kreatif, dan menciptakan suasana kelas yang lebih interaktif dan menyenangkan Merealisasikan revitalisasi di 33 SD Negeri, 2 SD Swasta, 6 SMP Negeri dan 2 SMP Swasta. Pemberian Bantuan sarana Prasarana kepada PKBM A.YANI dan PKBM Fajar Mulia. Prasarana Perpustakaan Berupa buku sudah di alokasikan 10% dari dana BOSP yang di terima. Penambahan Kuota Beasiswa Pendidikan Tahun 2024 sejumlah 7.968 penerima manfaat, di Tahun 2025 menjadi 8.176 penerima manfaat 1. SMA Boarding School 481 siswa Rp. 11.135.000.000 2. Becak kari STIKES 155 Mahasiswa Rp. 2.353.500.000 3. Mahasiswa on going 312 orang Rp. 1.560.000.000 4. Mahasiswa baru 197 orang Rp. 985.000.000 5. Atlet 116 orang Rp. 498.000.000 6. SMA Sederajat 3.076 siswa Rp. 6.152.000.000 7. SMP Sederajat 3.003 siswa Rp. 4.504.500.000 Tahun 2025 telah melaksanankan Pembangunan Sarana Prasarana dan Rehabilitasi dari Anggaran DAU di 29 Lembaga SMP dan Satuan Pendidikan SD dengan rincian sebagai berikut : 1. Pembangunan sarpras dan utilitas sekolah berupa 3 pagar dan 1 toilet 2. Rahabilitasi ruang guru dan kepala sekolah berupa 4 R.Guru dan 1 R. KS 3. Rehabilitasi perpustakaan sekolah berupa 3 perpustakaan 4. Rehabilitasi sarpran dan utilitas di 12	

Kediri ini sehingga sarana pelayanan untuk menjangkau seluruh penjuru Kabupaten Kediri termasuk kurang; d) Perlu peningkatan Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan baik Sekolah Negeri maupun Swasta; e) Peningkatan akses pendidikan dan sarana dan Prasarana Perpustakaan bagi calon peserta didik juga dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan program paket A, B dan C; f) Perlu optimalisasi kemudahan belajar mengajar bagi masyarakat usia sekolah dan madrasah terutama penambahan quota GNOTA dan beasiswa; g) Permasalahan Pemerataan memberikan sarana, prasarana, dan mutu pendidikan yang sama di setiap sekolahan yang ada di Kabupaten Kediri. Dalam operasionalnya, ditemui cukup banyak kendala yang harus dioptimalkan lagi pengembangannya; h) Peningkatan peran serta Orang tua dan Wali murid dalam upaya untuk mendukung aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik, dukungan masyarakat dan wali murid menjadi penting untuk dilaksanakan. Namun begitu masih		Lembaga SD 5. Rehabilitasi ruang kelas di 17 Lembaga SD Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada orang tua melalui Parenting mengenai peran mereka dalam mendukung kehadiran, motivasi belajar, dan pembentukan karakter peserta didik. Terlaksananya kegiatan Pelatihan Matematika dengan Metode Gasing Menyediakan layanan SPMB yang mudah diakses, ramah teknologi, dan disertai pendampingan bagi masyarakat yang mengalami kendala akses informasi maupun digital (Lomba Kreasi Website Sekolah, Pembiayaan Operasional SMPN 3 Mojo, Sosialisasi SPMB, Penyelenggaraan SPMB). SPMB dengan penambahan kuota pagu rombel pada satuan pendidikan tertentu untuk memberikan layanan pendidikan jenjang SD Menerbitkan Edaran Fasilitasi Penyelenggaraan Sekolah Rumah/*Home Schooling* Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 400.13.7.2/149/418.20/2025 tanggal 19 November 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Informal. Dukungan Akreditasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan dan Layanan Mobil Pintar Dinas Pendidikan Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum yang memberi ruang diferensiasi pembelajaran sesuai bakat, minat, dan potensi peserta didik, baik akademik maupun nonakademik, Melaksanakan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi(OSN, FLS3N, Duta Anti Korupsi). Kegiatan Workshop Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Workshop Pembuatan Perpustakaan Digital Tahun 2025 Bidang SMP telah	

ditemui kendala-kendala yang menyebabkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan tidak dapat dilaksanakan dengan baik; i) Pemerintah Kabupaten Kediri harus mampu memfasilitasi akses pendidikan bagi calon peserta didik secara adil dan merata, salah satunya dengan menerapkan sistem zonasi yang tidak diskriminatif dan menyelenggarakan pendidikan gratis terutama bagi pengimplentasian program wajib belajar 12 tahun, serta melakukan perluasan terhadap akses pendidikan bagi peserta didik tertentu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi; j) Peningkatan akses pendidikan bagi calon peserta didik dengan mendukung penyelenggaraan pendidikan informal yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat; k) Peningkatan akses pendidikan dan Perpustakaan bagi calon peserta didik juga dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan program paket A, B dan C; l) Peningkatan daya saing peserta didik diformulasikan melalui pengembangan kurikulum pendidikan didasarkan pada bakat		melaksanankan Pembangunan Sarana Prasarana dan Rehabilitasi dari Anggaran DAU di 29 Lembaga SMP dan Melaksanakan Revitalisasi di 8 Lembaga SMP. Tahun 2025 Bidang SD telah merealisasi antara lain: - Rehabilitasi ruang kelas sebanyak 61 ruang dari DAU dan 154 ruang dari Revitalisasi - Rehabilitasi ruang administrasi sebanyak 18 ruang - Rehabilitasi ruang perpustakaan sebanyak 2 ruang - Rehabilitasi toilet sebanyak 35 paket - Pembangunan ruang kelas dan perabotnya sebanyak 1 ruang - Pembangunan ruang guru dan perabotnya sebanyak 3 ruang - Pembangunan ruang perpustakaan dan perabotnya sebanyak 2 ruang - Pembangunan ruang UKS dan perabotnya sebanyak 18 ruang - Pembangunan ruang KS dan perabotnya sebanyak 13 ruang - Pembangunan toilet sebanyak 35 paket - Pembangunan pagar sekolah sebanyak 1 paket - Pengadaan mebalair ruang kelas sebanyak 4 paket Penyediaan Beasiswa bagi : 1. Mahasiswa Baru 2. Mahasiswa on going 3. Mahasiswa Magang (LTE dan Stikes Pamenang) 4. Menjalin Kerjasama Dengan IIK Bhakta Wiyata, Stikes Pamenang dan Universitas Terbuka Malang. 5. Fleksibilitas Penggunaan dana beasiswa tidak hanya untuk UKT saja melainkan bisa untuk pembelian laptop sebagai sarana pembelajaran, Buku dan Biaya kos/tempat tinggal. 6. Mendorong Perguruan Tinggi lokal untuk Memberikan Kuota khusus bagi Mahasiswa Prestasi atau dari Keluarga tidak mampu. Melaksanakan kegiatan survey pendataan kebutuhan Sarana Prasarana di sekolah dan menganalisa kerusakan Untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Non ASN, Pemerintah Kabupaten Kediri	

dan minat peserta didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; m) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta Peningkatan Infrastruktur khususnya untuk mengimplementasikan program pendidikan wajib belajar 12 tahun; n) Perlu dioptimalkan dan didayagunakan secara menyeluruh dan sosialisasi yang meluas dalam program bantuan keuangan bagi anak didik di Kabupaten Kediri yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta bagi anak didik yang kurang mampu berkaitan biaya; o) Fasilitas belajar mengajar perlu dipetakan dan dianalisis kembali mana-mana yang rusak dan harus diperbaiki termasuk sarana dan prasarana praktek dan ruang perpustakaan siswa; p) Kesejahteraan guru menjadi salah satu permasalahan krusial yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Hal itu dikarenakan hingga saat ini kesejahteraan guru masih belum dapat terpenuhi; q) Presentase SD yang terakreditasi A yang masih rendah Pemerintah Kabupaten Kediri dapat		memberikan Insentif bagi GTK Non ASN Akan membentuk tim pendamping akreditasi yang beranggotakan staf bidang SD dan pengawas Sekolah Mengarahkan peserta didik berisiko ke program bantuan yang tersedia (KIP, beasiswa daerah, bantuan sosial pendidikan) untuk meringankan beban ekonomi keluarga; Memotivasi kepala sekolah untuk berkoordinasi dengan desa setempat (perangkat, Babinsa, Babinkamtibmas) memberikan pendampingan kepada anak yang berpotensi putus sekolah untuk kembali ke sekolah. Mengarahkan orang tua/peserta didik untuk memilih sekolah yang terdekat dengan domisili/rumah mereka	

membentuk tim pembinaan akreditasi guna percepatan pencapaian target yang ditentukan; r) Fenomena Masih ada anak putus sekolah karena faktor ekonomi, sekolah diwajibkan mempunyai program deteksi dini untuk pencegahan anak putus sekolah. dengan adanya program tersebut pihak sekolah bisa lebih responsif terhadap penanganan anak putus sekolah; s) Adaya sekolah-sekolah yang akan demerger untuk lebih bijak, dipertimbangkan agar nantinya anak peserta didik tidak terlalu jauh saat bersekolah.			
2) Dalam Pelayanan Kesehatan a) Rujukan pasien dari wilayah barat sungai masih banyak yang masuk ke rumah sakit di luar wilayah Kabupaten Kediri, hal ini karena aksesnya yang lebih dekat dan lebih mudah dijangkau; b) Pemberdayaan Posyandu di desa-desa agar tumbuh dengan baik dan perlu penambahan Anggaran dari APBD; c) Akses pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit perlu di tingkatkan	Dinas Kesehatan	2a. Penyelenggaraan rujukan pelayanan kesehatan telah diatur dalam Permenkes Nomor 16 tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa sistem rujukan dilakukan berdasarkan kebutuhan medis pasien dan kemampuan pelayanan pada setiap fasyankes. Namun dikecualikan bagi pasien dalam kondisi gawat darurat dan adanya KLB, wabah dan bencana. Selain berdasar kebutuhan medis, rujukan juga mempertimbangkan aksesibilitas berupa jarak dan waktu tempuh paling singkat dari fasyankes perujuk ke fasyankes penerima rujukan dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien. Sistem rujukan pasien terutama peserta BPJS Kab Kediri diatur dengan mapping RS rujukan yang telah disepakati antara Dinas Kesehatan, asosiasi FKTP, Organisasi Profesi dan BPJS Kesehatan. Namun dalam rangka optimalisasi program JKN terutama bagi peserta PBID di Kabupaten Kediri maka tujuan RS rujukan diutamakan ke RSU milik Pemda (sesuai dengan Perbup Nomor 62 Tahun	

		2023 dan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Nomor 400.7.3/11122/418.25/2024 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari segmen Penerima Bantuan Iuran Pemerintah Daerah (PBID). 2b. Pemberdayaan posyandu di desa2 agar tumbuh dengan baik pada tahun 2025 telah dilakukan Upaya untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah melakukan Program Kegiatan dan hasil dari pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut : 1. Transformasi ke Posyandu ILP (Siklus Hidup) 1. Layanan Integrasi: Menyatukan posyandu programatik (kia, stunting, lansia) menjadi satu layanan terpadu untuk semua umur yang melayani Posyandu dengan siklus hidup 2. Hasil : Jumlah Posyandu di Kab Kediri tahun 2025 : 1716 Posyandu Yang melaksanakan Posyandu ILP (Siklus Hidup) : 1643 Posyandu (95,75 %) 3. Kegiatan Yang sudah di lakukan untuk dapat menjadi Posyandu ILP (Siklus Hidup) a. Pembentukan Tim Pembina Posyandu mulai dari Tk Kabupaten, Kecamatan sampai desa dengan pembentukan SK Tim Pembina Posyandu b. Advokasi Ke Penentu Kebijan Desa untuk membentuk Posyandu ILP 2. Kegiatan Utama & Pemberdayaan Kesehatan • Pemantauan Pertumbuhan & Gizi: Penimbangan, pengukuran tinggi badan, serta deteksi dini stunting pada balita. • Pemberian Makanan Tambahan (PMT): Fokus pada pencegahan stunting melalui pemberian PMT berbasis bahan lokal dan edukasi pengolahannya bagi kader. • Layanan Imunisasi: Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap dan tambahan (booster) untuk mencegah penyakit menular (polio, campak, hepatitis B).	

		• Pelayanan KIA & KB: Pemeriksaan kehamilan, nifas, serta pelayanan keluarga berencana. • Posyandu Lansia: Pemeriksaan kesehatan lansia (tensi, gula darah, berat badan) dan penyuluhan gizi. 3. Tindakan Pemberdayaan Kader & Masyarakat • Peningkatan Kapasitas Kader: Pelatihan 25 Kompetensi Dasar Kader melalui LMS dengan jumlah peserta 150 Kader dari 30 Puskesmas @ 5 kader • Hasil Kompetensi Kader : Telah di lakukan uji Kompetensi kader sebanyak 6828 Kader dengan hasil kompetensi Kader Purwa : 1714 • Kader Madya ; 1636 • Kader Utama : 1064 • Kunjungan Rumah (Home Visit): Kader melakukan kunjungan aktif ke rumah-rumah untuk mendata keluarga dan memantau kesehatan, terutama bagi balita yang tidak hadir di posyandu. • Penggerakan Masyarakat: Kader berperan sebagai penggerak masyarakat untuk hidup sehat dan datang ke posyandu. 4. Digitalisasi & Inovasi (Modernisasi Posyandu) • Aplikasi Pendataan (Contoh: ASYIK /Aplikasi Posyandu): Penggunaan aplikasi untuk mempermudah pencatatan, pelaporan, dan pengajuan keluhan kesehatan oleh masyarakat. • Revitalisasi Digital: Penguatan peran kader melalui teknologi digital (kader digital) untuk memudahkan pemantauan kesehatan warga. 5. Penguatan Sarana & Kelembagaan • Dukungan Anggaran Desa: Pembiayaan operasional posyandu dan PMT dari dana desa untuk menjamin	

		keberlanjutan. 2c. Kemudahan akses masyarakat Kab Kediri terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit antara lain diupayakan dg cara sbb: 1. Pelayanan kesehatan yang bermutu dan tanpa kendala biaya diwujudkan dengan perluasan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Sampai dengan Desember 2025, cakupan UHC (Universal Health Coverage) sebesar 98,44% dengan tingkat keaktifan peserta 79,24%. 2. Melaksanakan bimtek pemanfaatan system rujukan terintegrasi (SISRUTE) bagi RS, puskesmas dan klinik 3. Melaksanakan pendampingan dan Monitoring Penggunaan Rekam Medik Eleketronik bagi RS 4. Melaksanakan pendampingan update data aspak dan SDMKes untuk mengetahui kompetensi RS Memberikan akses yang mudah melalui nomor bebas pulsa 119 atau nomor wa 085 212 117 119 commad center PSC119 selama 24 jam non stop untuk pelayanan *pre hospital care.*	
3) Gender dan Perlindungan Anak, Peran Pemuda dan Masalah Sosial Upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga masih menemui berbagai macam hambatan. Hambatan tersebut diidentifikasikan sebagai berikut; a) Kurangnya keterlibatan aktif, advokasi dan koordinasi terhadap kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (PUG); b) Masih adanya pelanggaran terhadap	DP2KBP3A	Mengoptimalkan peran organisasi wanita dan kader perempuan di desa untuk terlibat dalam pengarus utamaan gender terutamaperempuan kepalakeluarga. 1. Mengoptimalkan Satgas PPA yang ada di semua tingkatan termasuk desa dan sekolah untuk Upaya pencegahan dan berani untuk melapor 2. Berkoordinasi dengan OPD untuk memberi ruang bagi anak anak dalam Pembangunan Unmet need merupakan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi sehingga semakin rendah capaian unmet need semakin baik. Unmet need tahun 2A24 sebesar 7,9a/a dan tahun ini sebesar 7,44o/a. Upaya yang akan dilakukan untuk menurunkan unmet need adalah : 1. Memperbaiki sistem pencatatatan 2. Pelayanan KB gratis Usia Kawin Pertama { UKP) kurang dari 20 tahun di Kabupaten tahun 2425 sebesar 11,59. Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan sosialisasi	

hak anak, dimana sosialisasi terhadap hak anak dan peran strategis PPA masih belum optimal; c) *Unmet Need* masih tinggi dimana masih tingginya angka keengganan penggunaan alat kontrasepsi baik untuk laki-laki ataupun perempuan; d) Usia perkawinan dibawah 20 tahun masih tinggi; e) Angka kelahiran belum dapat dikontrol secara optimal, terutama kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait.		pencegahan perkawinan anak dan memperbaiki SOP Pengajuan Dispensasi Kawin dengan melibatkan psikolog TFR Kabupaten Kediri saat ini sudah optimal, sebesar 2.13. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, kelahiran turun dari 25.000 menjadi 15.000 an. Yang harus dilakukan sekarang adalah menjaga TFR supaya tetap 2.13, dan mencegah kehamilan tidak dinginkan	
4) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan pendataan dan pemutakhiran data PMKS sebagai basis data terlaksananya program penanganan PMKS. Adapun program penanganan PMKS yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri meliputi pemberian pelatihan keterampilan dan praktik kerja bagi anak terlantar, pembinaan alih profesi eks lokalisasi, pemberian pelatihan dan keterampilan eks korban narkotika, serta pemberian pendidikan dan pelatIhan (diklat) bagi anak putus sekolah di panti sosial remaja terlantar (PSRT). Berkaitan	Dinsos	a. Sebagai tindak lanjut atas penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menyesuaikan istilah Pemerlu PelayananKesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 20219 tentang Perubahan atas Permensos Nomor 8 Tahun 2012. Dalam Implementasinya, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan bagi anak putus sekolah secara berkala setiap dua tahun sekali dengan dua kali pemberangkatan angkatan. Program tersebut dilaksanakan melalui Kerjasama dengan Unit Pelayanan Terpadu Pelayanan Sosial Bina Remaja (UPT PSBR) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Blitar, Jombang, dan Bojonegoro. Dinas Sosial Kabupaten Kediri melakukan tahapan rekruitmen melalui penyebaran informasi kepada Masyarakat serta pendataan calon penerima manfaat yang berminat mengikuti pelatihan kemudian dilakukan seleksi Bersama tim dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Calon penerima manfaat yang di nyatakan lolos seleksi selanjutnya di antar ke UPT PSBR tujuan	

dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melaksanakan program penanganan PMKS secara efektif, agar permasalahan PMKS di Kabupaten Kediri dapat teratasi dengan baik.		oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediridan akan di jemput Kembali pada saat libur Hari raya Idul Fitri serta setelah masa pelatihan selesai. Pelatihan dilaksanaan selama enam bulan dengan system Asrama, Dimana penerima manfaat memperoleh fasilitas berupa pemenuhan kebutuhan makan 3x sehari, perlengkapan kebersihan, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, seragam, serta bantuan peralatan usaha sesuai dengan jurusan yang diambil setelah dinyatakan lulus. Adapun jurusan pelatihan yang tersediameliputi las, otomotif, dan tata rias, Pengantaran penerima manfaat ke UPT PSBR dilaksanakan pada bulan Januari dan Juli setiap tahun pelaksanaan program. Dalam penanganan anak terlantar, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial melaksanakan penelusuran dan reunifikasi keluarga sebagai Langkah utama pemulihan fungsi sosial anak. Selama proses penelusuran keluarga, anak terlantar diberikan perlindungan sementara berupa fasilitas Rumah Singgah Dinas Sosial Kabupaten Kediri guna menjamin keselatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan rasa aman.	
a) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan pendataan dan pemutakhiran data PMKS sebagai basis data terlaksananya program penanganan PMKS. Adapun program penanganan PMKS yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri meliputi pemberian pelatihan keterampilan dan praktik kerja bagi anak terlantar, pembinaan alih profesi eks lokalisasi, pemberian pelatihan dan keterampilan eks korban narkotika, serta pemberian pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi anak putus sekolah di panti sosial remaja terlantar		a. Pemutakhiran Data Kemiskinan terus dilaksanakan secara periodic di masing-masing Desa melalui aplikai Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) Kementerian Sosial RI dan Pelatihan/Bimtek kepada operator/IT SIKS NG Desa/Kelurahan (Pemerintah Daerah memiliki data kemiskinan yang valid dan tepat sasaran sehingga akan berdampak dalam penurunan jumlah keluarga fakir miskin karena perubahan data bersifat dinamis.Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes) / Musyawarah Kelurahan (Muskel) : Melakukan validasi data melalui forum rembug warga untuk memastikan warga yang meninggal, pindah, atau sudah mampu secara ekonomi dicoret dari daftar penerima bansos (data bersih (clean) berdasarkan	

(PSRT). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melaksanakan program penanganan PMKS secara efektif, agar permasalahan PMKS di Kabupaten Kediri dapat teratasi dengan baik;		kondisi terkini lapangan).	
b) Indikator keberhasilan pelayanan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah berapa jumlah PMKS yang berhasil dientaskan, tidak hanya sekedar jumlah PMKS yang dilayani. Oleh karena itu, program ke depan harus berorientasi pada pengentasan PMKS mesti banyak kendala dalam pelaksanaanya seperti : 1. Keterbatasan tenaga profesional yang mendampingi masalah KDRT dan Kekerasan Anak; 2. Kekerasan terhadap anak dan perempuan belum sepenuhnya bisa dicegah karena kompleksnya penyebab kekerasan; 3. Sistem pelayanan permasalahan perempuan dan anak belum dilaksanakan secara berjenjang; 4. Faktor sosial ekonomi masyarakat sebagai salah satu pemicu KDRT dan perkawinan anak; 5. Belum adanya filterisasi tayangan di sosial media yang		b. Pembentukan Forum Satu Data (Data tersedia real-time di dashboard pimpinan) Koordinasi lintas sektor SKPD/OPD terkait program kegiatan penanggulangan kemiskinan di bawah coordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Untuk menyamakan persepsi dan intervensi program kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan dan penanganan permasalahan sosial.)	

tidak baik untuk anak. c) Perbaikan Tata Kelola Data dan Akurasi DTKS a. Perlu ditingkatkan *verifikasi dan validasi berkala* terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bekerja sama dengan pemerintah desa/kelurahan, agar data penerima bantuan lebih akurat dan sesuai kondisi terkini; b. Integrasikan DTKS dengan data dari BPS dan instansi lain secara digital untuk mencegah tumpang tindih dan memastikan satu data yang dapat menjadi rujukan program bantuan lintas sektor;			
c. Gunakan aplikasi berbasis *cloud* untuk mempercepat proses pelaporan perubahan status sosial ekonomi warga (graduasi, pindah domisili, meninggal dunia, dll.).		Bimtek/Pelatihan bagi admin desa mengenai cara input foto rumah, koordinat GPS, dan dokumen pendukung perubahan status ke dalam aplikasi cloud (Data bisa di akses dari lapangan via smartphone.)	
d) Peningkatan Efektivitas Program Bantuan Sosial a. Susun indikator keberhasilan yang jelas dan terukur, seperti jumlah keluarga yang berhasil keluar dari status miskin (graduasi mandiri) setiap tahun; b. Bedakan secara tegas antara program bantuan jangka pendek (safety net) dan pemberdayaan jangka panjang untuk mencegah ketergantungan bantuan; c. Perlu evaluasi		a. Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) : Melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memisahkan keluarga yang sudah mampu secara ekonomi agar tidak lagi menerima bantuan (Adanya target graduasi memaksa pendamping program untuk focus pada kemandirian ekonomi warga untuk keluar dari kepesertaan program karena sudah dinilai mampu/Sejahtera.) b. Segmentasi Penerima Manfaat : -Jangka Pendek : difokuskan pada kelompok non produktif (lansia Tunggal, penyandang disabilitas berat, korban bencana) -Jangka Panjang : Di fokuskan pada kelompok produktif (usia kerja) yang masuk kategori keluarga miskin namun masih memiliki kemampuan fisik untuk berusaha (Pemberdayaan Jangka	

dampak sosial dan ekonomi dari setiap jenis bantuan (bantuan tunai, sembako, perlindungan lansia, disabilitas, dan lainnya) secara kuantitatif dan kualitatif.		Panjang mencakup akses Pendidikan dan Pelatihan yang memutus rantai kemiskinan antar generasi karena dengan pemberdayaan memberikan jalan untuk keluar dari status miskin.) c. Klasifikasi Evaluasi Spesifik : • Bansos Tunai/Sembako : Evaluasi daya beli dan kecukupan gizi (Evaluasi kualitatif mengungkap pola konsumsi warga sehingga skema bantuan bisa disesuaikan) • Lansia/Disabilitas : Evaluasi kualitas hidup, aksebilitas, dan Tingkat isolasi sosial. (Memastikan standar hidup layak bagi kelompok rentan terpenuhi secara manusiawi)	
e) Pemberdayaan Keluarga Miskin dan Rentan a. Kembangkan program peningkatan pendapatan untuk keluarga miskin berbasis potensi lokal, seperti pelatihan keterampilan rumah tangga, bantuan usaha mikro, atau kerja sama dengan koperasi desa; b. Gandeng lembaga keuangan mikro atau BUMDes untuk menyediakan akses permodalan, pendampingan usaha, dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga rentan.		a. Program Pemberdayaan : Pelatihan Keterampilan : Memberikan pelatihan tenis yang disesuaikan dengan potensi local sehingga mereka mempunyai skill sesuai kompetensinya.	
5) Angka Kemiskinan dan Permukiman a) Pemerintah Kabupaten Kediri berperan aktif dalam melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data warga miskin yang ada di Kabupaten Kediri. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kediri dapat merumuskan dan mengusulkan kriteria kemiskinan		Dengan kapasitas keterampilan yang meningkat, warga miskin ekstrem diharapkan mampu bersaing di pasar kerja local atau menciptakan lapangan kerja sendiri.) a. Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) khusus Verfikasi Data : Mewajibkan Desa menyelenggarakan Musdes untuk menetapkan siapa yang layak masuk DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) guna memastikan transparasi dan keadilan sosial. (Pemutakhiran data secara berkala untuk menghapus data yang sudah tidak	

yang sesuai dengan kondisi riil di daerah yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data warga miskin;		memenuhi kriteria (cleansing data) • Pengembangan Aplikasi Pendataan Mandiri : Menciptakan system informasi agar data dari Desa/Kelurahan dapat di verifikasi secara cepat melalui foto rumah dan titik koordinat (geotagging)	
b) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait sinkronisasi data dan penggunaan data warga miskin dalam berbagai program pemerintah;		b. Pembentukan Forum Satu Data Daerah : Mengadakan rapat koordinasi rutin lintas sectoral yang melibatkan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kominfo, hingga Instansi vertical seperti BPS (Badan Pusat Statistik) dan BPJS Kesehatan. (Memastikan satu keluarga miskin mendapatkan bantuan yang menyeluruh. Contoh : Jika datanya sinkron, keluarga tersebut bisa mendapatkan bantuan pangan (Dinsos), KIS (Dinkes), dan bantuan seragam sekolah (Disdik) sekaligus.	
c) Memberikan bantuan bagi warga miskin baik melalui bantuan tunai maupun non tunai guna memenuhi kebutuhan hidup;		c. Melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukkannya (kebutuhan pokok) dan bukan untuk barang konsumsi yang tidak perlu. (Bantuan diarahkan khusus pada komuditas pangan bergizi (telur,daging, kacang-kacangan dll.)	
d) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu memberikan perhatian terhadap upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem dengan melakukan perlindungan ekonomi maupun dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat dengan kondisi miskin ekstrem rawan terjadi permasalahan yang berkaitan dengan rawan pangan, dimana dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya persoalan sosial lain yang lebih kompleks, seperti terjadinya stunting		d. Program Pemberdayaan : Pelatihan Keterampilan : Memberikan pelatihan teknis yang disesuaikan dengan potensi local sehingga mereka mempunyai skill sesuai kompetensinya. Dengan kapasitas keterampilan yang meningkat, warga miskin ekstrem diharapkan mampu bersaing di pasar kerja local atau menciptakan lapangan kerja sendiri.)	

pada anak;			
e) Ketersediaan Data Kuantitatif - Penyajian data capaian dalam bentuk persentase telah memberikan gambaran makro terhadap program, namun - akan lebih informatif bila dilengkapi dengan data kuantitatif, seperti jumlah unit rumah yang telah direhabilitasi dan yang masih dalam antrean; - Penyediaan data yang lebih rinci akan membantu dalam proses perencanaan, alokasi anggaran, serta pengawasan yang lebih terarah oleh pemangku kepentingan, termasuk DPRD dan masyarakat. f) Pengawasan Pasca-Rehabilitasi - Program perbaikan RTLH tidak hanya berhenti pada pelaksanaan fisik, tetapi juga perlu disertai pengawasan pasca-rehab agar rumah benar-benar memenuhi standar kelayakan huni secara struktural, fungsional, dan lingkungan; - Penerapan sistem monitoring berbasis komunitas atau kolaborasi dengan pemerintah desa dapat menjadi alternatif pendekatan pengawasan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. g) Kesesuaian dengan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	• Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan sampai dengan 2025 berjumlah 9.086 rumah dari total 16.779 (sesuai target renstra Dinas Perkim Tahun 2021-2026) yang berarti sudah mencakup 54,15% rumah tidak layak huni yang diperbaiki sehingga masih terdapat 7.693 Rumah Tidak Layak Huni yang perlu mendapatkan bantuan untuk tahun-tahun berikutnya. • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senantiasa melaksanakan monitoring atas perbaikan RTLH yang dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya termasuk juga melaksanakan verifikasi lapangan atas data penerima bantuan • Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman akan melaksanakan verifikasi lapangan ke depannya untuk memilih skala prioritas pembangunan RTLH agar target menyesuaikan kemampuan fiskal daerah dan juga mencari sumber pendanaan lain baik melalui pemerintah pusat maupun CSR Perusahaan yang ada wilayah Kabupaten Kediri agar penanganan RTLH dapat lebih optimal lagi.	

Target RPJMD - Perlu ada pemetaan ulang secara berkala untuk menyesuaikan target yang tersisa dengan kemampuan fiskal daerah dan potensi kemitraan (misalnya dengan pemerintah pusat, CSR, atau lembaga donor); - Jika dibutuhkan, bisa dipertimbangkan penyesuaian strategi agar target akhir tetap realistis dan terukur dengan tetap mempertahankan prinsip keberlanjutan serta pemerataan.			
d. Bidang Ekonomi **1) Infrastruktur Perdagangan** a. Memberikan ruang bagi UMKM masyarakat supaya dapat masuk di supermarket yang ada di Kabupaten Kediri serta mempromosikan produk unggulan maupun produk UMKM di Kabupaten Kediri baik melalui *offline* maupun online dengan memanfaatkan kanal-kanal informasi maupun media sosial pemerintah;	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	a. Dinas perdagangan memfasilitasi UMKM untuk dapat memasarkan produk-produknya ke toko-toko swalayan minimarket dan supermarket di Kabupaten Kediri. Fasilitasi ini akan terus ditingkatkan dan diperluas dengan melibatkan lebih banyak produk dan toko swalayan . - Promosi produk unggulan dilaksanakan secara offline melalui event pameran lokal maupun nasional, serta melalui kegiatan misi dagang dan kerja sama antar daerah. Upaya promosi melalui online telah dilaksanakan melalui kanal website Pemerintah daerah maupun media sosial resmi SKPD. Ke depan kegiatan promosi akan ditingkatkan dengan edukasi digital untuk mendorong UMKM memanfaatkan marketplace dan platform digital untuk meningkatkan jangkauan pasar.	
b. Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan revitalisasi terhadap sarana dan prasarana yang ada di pasar tradisional, guna menghapus kesan kumuh dan meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan ritel modern;		b. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan melaksanakan langkah-langkah konkret guna meningkatkan kualitas pasar tradisional agar lebih bersaing dengan ritel modern. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: 1. Tahun 2025 Revitalisasi Pasar Ngadiluwih 2. Tahun 2026 Revitalisasi Ex.Pasar unggas Gringging dan Revitalisasi Fasad Pasar Gringging 3. Tahun 2027 Revitalisasi Pasar	

		Kandangan 4. Tahun 2028 Revitalisasi Pasar Gurah 5. Tahun 2029 Revitalisasi Pasar Pamenang	
c. Dalam rangka melindungi pedagang yang ada di pasar tradisional, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu melakukan penertiban terhadap ritel modern dengan menerapkan sistem zonasi;		c. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri berencana mengajukan Perda tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk menetapkan zona dan Jarak yang relevan dengan perkembangan daerah serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan di pusat. Usulan ini sudah masuk pada Propemperda untuk dapat dibahas pada tahun ini. Akan dilakukan tindak lanjut dengan SKPD terkait untuk penertiban ritel modern yang tidak sesuai ketentuan perizinan.	
d. Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menyediakan informasi terkait komoditi dan potensi perdagangan yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri secara up to date melalui website yang memadai. Penyediaan informasi berbasis website tersebut bertujuan agar masyarakat luas dapat mengakses informasi mengenai komoditi unggulan Kabupaten Kediri secara lebih mudah, sehingga dapat memulihkan daya beli masyarakat terhadap komoditi pertanian.		d. Pemkab memiliki sistem informasi pemantauan harga komoditas melalui aplikasi "simarko" yang dikembangkan oleh Dinas Perdagangan. Aplikasi ini menyajikan informasi terkini mengenai berbagai komoditas utama bersumber dari pasar yang dikelola Dinas Perdagangan. Simarko dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, melalui perangkat yang terhubung dengan internet sehingga memudahkan masyarakat, pedagang, dan pemangku kepentingan dalam mengakses harga pasar secara *real-time* melalui website https://simarko.kedirikab.go.id/. Kede pan aplikasi Simarko akan di *upgrade* untuk meningkatkan kualitas data dan laporan yang dihasilkan.	
2) Penanaman Modal a) Kedepannya, pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Kediri akan mengedepankan pada	DPMPTSP	Sebagai tindak lanjut arah kebijakan penanaman modal sektor primer dan sekunder serta antisipasi beroperasinya Bandara Dhoho, DPMPTSP Kabupaten Kediri telah mengedepankan isu sektor primer dan sektor sekunder dengan	

isu-isu sektor primer (pertanian, produksi aneka industri) sektor sekunder (perdagangan dan jasa). Hal tersebut sebagai langkah antisipasi beroperasionalnya Bandara Dhoho; b) Seiring dengan adanya pembangunan jalan tol yang melintasi jalur karesidenan Kediri maka dapat meningkatkan iklim berusaha dan berinvestasi. Pemerintah Kabupaten Kediri perlu memfasilitasi kemudahan berinvestasi dengan tetap memperhatikan kebijakan, kondisi sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan; c) Minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri mengalami peningkatan semenjak keberadaan bandara di Kabupaten Kediri dan adanya rencana pembangunan jalan Tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung. Untuk merespon hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu memfasilitasi kemudahan berinvestasi dengan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan; d) Pemerintah Kabupaten Kediri harus memprioritaskan investor lokal dan		melakukan promosi investasi atas Investment Project Ready To Offer (IPRO) Industri Olahan Berbahan Dasar Buah Kabupaten Kediri, fasilitasi kemitraan usaha serta penguatan pengendalian penanaman modal. Langkah ini diarahkan untuk mendorong investasi berbasis potensi daerah yang berdampak pada peningkatan PDRB dan kesejahteraan Masyarakat Poin b) dan c) Sebagai tindak lanjut pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah Karesidenan Kediri, Upaya fasilitasi/kemudahan investasi pada tahun 2025, DPMPTSP telah menyusun Perda Penanaman Modal. (progres: sudah dibahas bersama legislatif). Selain itu dengan adanya pengurusan perizinan berusaha melalui oss.go.id yang telah terintegrasi dengan Kementerian/ Lembaga dengan memperhatikan resiko usaha yang diajukan. Pengajuan perizinan berusaha memiliki resiko Menengah Tinggi dan Tinggi, wajib diverifikasi Sektor Teknis terkait. Sehingga meminimalisir resiko dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Penanaman Modal ini meliputi: 1. kebijakan dasar penanaman modal 2. kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah 3. perencanaan penanaman modal 4. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah 5. pelayanan penanaman modal 6. data dan sistem informasi penanaman modal 7. pemberdayaan usaha 8. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal 9. pengendalian pelaksanaan penanaman modal 10. insentif dan kemudahan penanaman modal 11. promosi penanaman modal 12. ketentuan dan sanksi. Selain itu dilakukan juga pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko pada obyek pengawasan yang diusulkan oleh OPD Teknis. Pada Tahun 2025 juga, Pelayanan perizinan keliling telah dijadwalkan di seluruh kecamatan/desa	

warga sekitar terkait keberadaan bandara dan rencana pembangunan jalan Tol Nganjuk-Kediri-Tulungagung untuk menghindari persoalan yang dapat terjadi di kemudian hari. Pemberian prioritas kepada investor lokal dan warga sekitar tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Kediri.		Kabupaten Kediri Poin d) Memperhatikan investor lokal dan warga lokal merupakan Langkah yang tepat agar tidak menjadi penonton dirumah sendiri. DPMPTSP Kabupaten Kediri mendorong dengan mengoptimalkan kolabolarasi dengan pihak eksternal baik Hipmi, Kadin, Iwapi sehingga peluang investasi dapat ditangkap oleh investor local dan warga lokal	
3) Pariwisata dan Kebudayaan Dalam upaya mengoptimalkan pariwisata berbasis seni budaya lokal di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah mengidentifikasikan permasalahan dan tantangan sebagai berikut: a) Masih rendahnya kompetensi SDM kepariwisataan yang ditandai dengan masih minimnya tenaga kerja bersertifikat; b) Tata kelola daya tarik wisata belum optimal, terutama pada bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi, dan upaya perbaikan; c) Belum diterapkannya digitalisasi pada pengelolaan obyek wisata dan masih rendahnya kesadaran insan-insan pariwisata terhadap pelestarian lingkungan; d) Sarana dan	Dinas PARBUD Dinas KOPUSMIK	1. Pengembangan Pariwisata a. Sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi SDM kepariwisataan sudah dilakukan sejak tahun 2022 hingga tahun 2025. b. Peningkatan tata kelola daya tarik wisata dilakukan dengan terus meningkatkan system perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta terus dilakukan perbaikan . c. Digitalisasi pada obyek wisata terus didorong dengan mengadaptasi QRIS untuk alat pembayaran dan terus mendorong percepatan digitalisasi di bagian tiket wisata. d. Perbaikan sarana dan prasarana akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara rutin,serta melihat kondisi obyek wisata dan masukan dari pengunjung.Koordinasi serta kerjasama antar opd juga dilakukan untuk menunjang infrastruktur pada obyek wisata di kabupaten kediri. e. Pemanfaatan asset terus dilakukan,salah satunya adalah obyek wisata ubalan yang sudah beroperasi lagi di tahun 2025. 2. Pemasaran pariwisata a. Kondisi konektivitas antar obyek wisata terus diforong dengan keberadaan bus pariwisata gratis yang beroperasi setengah bulan b. Peningkatan promosi dilakukan melalui media sosial dinas pariwisata dan kebudayaan serta	

prasarana di obyek-obyek wisata perlu ditingkatkan untuk memenuhi kenyamanan dan kepuasan wisatawan; e) Perlu terciptanya konektivitas antar daya tarik wisata, sebab belum ada transportasi wisata antar Daya Tarik Wisata; f) Masih minimnya return tourist adalah wisatawan akan terkesan sehingga ingin datang dan datang lagi di Kabupaten Kediri; g) Perlunya mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua; h) Perlunya peningkatan kerjasama kepariwisataan dan kebudayaan untuk peluang investasi yang aman dan kondusif; i) Memberikan dan mengoptimalkan pendidikan kebudayaan kepada anak sekolah supaya menyelamatkan budaya asli bangsa serta menjaga kelestarian warisan kebudayaan bangsa; j) Pemerintah Kabupaten Kediri juga diharapkan memberikan fasilitas bagi aktor penggerak wisata untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan pariwisata		menggandeng pemerintah kabupaten kediri, hal ini dilakukan untuk menarik minat dan antusiasme terhadap pariwisata di kabupaten kediri 3. Pelestarian kebudayaan a. Optimalisasi pendidikan kebudayaan kepada anak sekolah dilakukan dengan kegiatan Cagar budaya Masuk Sekolah Budaya.Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan dan mempertahankan warisan sejarah dan budaya yang ada di kabupaten kediri. b. Pembukaah Museum daerah kabupaten kediri juga merupakan salah satu upaya yang dapat mempertahankan sejarah dan budaya yang dipunya kabupaten kediri kepada pelajar serta masyarakat kabupaten kediri.	

lokal melalui berbagai bentuk, seperti pelatihan atau studi banding dengan wilayah lain yang memiliki potensi yang serupa dan lebih maju; k) Memberikan dan mengoptimalkan pendidikan kebudayaan kepada anak sekolah supaya menyelamatkan budaya asli bangsa serta menjaga kelestarian warisan kebudayaan bangsa; l) Pemerintah Kabupaten Kediri juga diharapkan dapat membantu melakukan promosi wisata daerah dengan menampilkan di media sosial pemerintah atau melalui rekomendasi yang diberikan saat adanya kunjungan kerja, m) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang paling dasar misalnya berupa akses jalan, air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata; n) Memberikan ruang bagi UMKM untuk dapat menunjukkan karya atau berjualan di sekitar wilayah wisata di Kabupaten Kediri sehingga dapat membantu menggerakkan ekonomi masyarakat; o) Masih banyaknya asset wisata yang belum termanfaatkan secara optimal dan membutuhkan perhatian lebih salah satnya juga untuk			

obyek wisata yang sudah tidak buka lagi pasca covid dan obyek wisata yang terbengkalai.			
4) Pertanian dan Ketahanan Pangan a) Permasalahan yang sering terjadi pada Sektor Pertanian di Kabupaten Kediri : 1. Terjadinya anomali iklim, memberi pengaruh negatif yaitu tidak adanya kepastian ketersediaan air dan munculnya berbagai macam OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan positif bagi tanaman yaitu musim kering yang cukup panjang membuat rasio bunga menjadi buah lebih tinggi untuk beberapa tanaman buah – buahan; 2. Meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan pertanian dan Komuditas Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan	a. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri pada Tahun 2025 meliputi: 1. Pembangunan sebanyak 10 saluran irigasi dengan total panjang 2.142 m. 2. Pembangunan irigasi perpompaan sebanyak 301 unit. 3. Pelaksanaan Deteksi dini serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta gerakan pengendalian melalui regu pengendali hama dan pemanfaatan teknologi drone. 4. Penyediaan pestisida serta agensi hayati sebagai upaya pengendalian OPT. 5. Telah ditetapkan kebijakan harga komoditas pertanian sebagai berikut: • Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500,- per kilogram. • Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung pipil kering sebesar Rp5.500,- per kilogram dengan kadar air 18-20 %. 6. Untuk komoditas cabai rawit telah difasilitasi kemitraan dengan PT Berkawan Jakarta dengan harga Rp 28.000,-/kg 7. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana produksi pertanian, Pemerintah Kabupaten Kediri telah mengajukan realokasi tambahan pupuk pada tahun 2025 sampai dengan 9 kali, dengan rincian sebagai berikut: • Pupuk Urea dari 34.815 ton menjadi 40.200 ton • Pupuk NPK dari 38.627 ton menjadi 46.283 ton • Pupuk ZA dari 0 ton menjadi 1.340 ton	
3. Pengaruh harga komoditas di pasaran yang fluktuatif 4. Semakin terbatasnya ketersediaan pupuk	DKPP	Penguatan stabilitas harga pangan strategis melalui pemantauan harga dan stok pangan di tingkat produsen, distributor/ penggilingan dan konsumen, Gerakan Pangan Murah, penyediaan informasi pasokan dan harga pangan,	

bersubsidi akibat kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi subsidi pupuk; 5. Sistem usaha peternakan yang masih bersifat tradisional belum bisa menjamin kesejahteraan peternak; 6. Banyaknya produk olahan hasil peternakan yang belum memiliki izin edar serta akses pemasaran produk olahan hasil peternakan perlu ditingkatkan;		koordinasi lintas sektor, pengembangan lumbung pangan masyarakat, pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) melalui Pasar Mitra Tani (PMT). Dalam rangka upaya peningkatan usaha peternakan, tahun 2025 telah dilaksanakan hibah uang untuk pengembangan peternakan bagi 10 kelompok ternak produktif. Selain itu terus dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas peternak dalam meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan melalui pelatihan manajemen peternakan yang berwawasan agribisnis sehingga mampu menghasilkan produk peternakan yang berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Tahun 2025 telah dilakukan pelatihan pengolahan produk hasil peternakan yang menyasar pelaku usaha olahan produk hasil peternakan. Di dalamnya juga dilakukan pembinaan dan sosialisasi pengurusan ijin edar pelaku usaha produk hasil peternakan serta mengikutsertakan pelaku usaha produk hasil peternakan dalam event-event pameran.	
7. Pengetahuan penanganan panen yang baik belum dipahami secara luas oleh pembudidaya dan pemasar perikanan sehingga kualitas ikan yang diproduksi belum optimal; 8. Masih terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha perikanan terkait manajemen usaha sehingga hasil produksi belum optimal; 9. Belum optimalnya kelembagaan pokdakan maupun poklahsar dalam melakukan kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi			

maupun permodalan; 10. Keterbatasan induk ikan yang berkualitas (lele, nila, gurami, patin, dan ikan hias); 11. Belum optimalnya penanganan penyakit ikan 12. Masih terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha perikanan terkait manajemen usaha sehingga hasil produksi belum optimal; 13. Pengetahuan penanganan panen yang baik belum dipahami secara luas oleh pembudidaya dan pemasar perikanan sehingga kualitas ikan yang diproduksi belum optimal; 14. Belum optimalnya promosi produk perikanan baik offline maupun online sehingga jangkauan pemasaran terbatas yang berdampak pada pendapatan rumah tangga perikanan (RTP) yang belum optimal; 15. Belum optimalnya kelembagaan pokdakan maupun poklahsar dalam melakukan kerjasama antar kelompok dan diluar kelompok dalam hal penyediaan pakan, penjualan produksi maupun permodalan; 16. Keterbatasan pengetahuan terkait keamanan pangan bagi pengolah perikanan; 17. Terbatasnya pengetahuan para pengolah produk perikanan terkait			

packaging yang benar dan menarik; 18. Belum banyak pengolah perikanan yang memiliki sertifikasi keamanan pangan; 19. Rendahnya tingkat konsumsi ikan; 20. Terbatasnya diversifikasi olahan perikanan;			
b) Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan upaya dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat. Upaya ini baik secara langsung atau secara tidak langsung harus ditunjang dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kediri melihat pengembangan ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat harus dilaksanakan lebih massif, terutama yang berdampak langsung kepada tersedianya dan kemudahan akses pangan masyarakat;	DKPP	DKPP Kabupaten Kediri berupaya memastikan ketersedian pangan bagi masyarakat mencukupi melalui pemantauan di sisi produksi, cadangan pangan masyarakat serta stok yang ada di gudang distributor/ penggilingan serta pemantauan harga pangan di tingkat konsumen (pasar). Koordinasi juga senantiasa dilakukan dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog terkait pelaksanan kebijakan terkait stok dan penyaluran pangan. Tahun 2025 telah dilaksanakan Gerakan Pangan Murah di 40 lokasi yang bertujuan untuk meningkatkan akses pangan masyarakat.	
c) Produksi pangan tidak berbanding lurus dengan pertambahan penduduk sehingga ketersediaan pangan cenderung melandai;	DIPERTABUN, DKPP	Seiring bertambahnya jumlah penduduk makan kebutuhan akan konsumsi pangan semakin meningkat, maka diperlukan upaya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Kegiatan yang dilakukan untuk penganekaragaman konsumsi pangan antara lain dengan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. Masyarakat diberikan pelatihan dan bantuan bibit tanaman sayur/buah, ternak ayam serta sarana produksi pertanian dan peternakan untuk dibudidayakan di pekarangan. Dengan adanya diversifikasi pangan yang bergizi dan seimbang, diharapkan ketergantungan konsumsi	

		beras menurun dan ketersediaan pangan selain beras menjadi lebih beragam sehingga dapat mendukung stabilitas ketahanan pangan. Kondisi ketahanan pangan, khususnya ketersediaan beras pada Tahun 2025, tercukupi dengan baik, dengan uraian sebagai berikut: • Produksi hasil panen padi Tahun 2025 sebesar 307.852 ton Gabah Kering Giling (GKG) • Perkiraan produksi beras hingga Desember 2025 sebesar 199.583 ton. • Tingkat konsumsi beras penduduk berdasarkan data BPS sebesar 75,27 kg per kapita per tahun. • Tingkat konsumsi beras pada bulan Desember 2025 sebesar 6,46 kg per kapita per bulan. • Jumlah penduduk Kabupaten Kediri sebanyak 1.684.454 jiwa. • Total kebutuhan beras selama Tahun 2025 sebesar 130.514,4 ton. • Berdasarkan perhitungan tersebut, Kabupaten Kediri mengalami surplus produksi beras sebesar 69.068,6 ton.	
d) Permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Kediri diakibatkan; 1. Masih terjadi fluktuasi harga pangan yang dapat berdampak pada menurunnya akses pangan masyarakat; 2. Masih tingginya angka stunting dan kemiskinan di Kabupaten Kediri; 3. Ketergantungan pada beras sebagai komoditas pangan pokok masih cukup tinggi dan pemahaman masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) masih perlu	DIPERTABUN, DKPP	1. Penguatan stabilitas harga dan peningkatan akses pangan masyarakat melalui pemantauan harga dan stok pangan di tingkat produsen, distributor/ penggilingan dan konsumen, operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, penyediaan informasi pasokan dan harga pangan, koordinasi lintas sektor, pengembangan kelembagaan cadangan pangan (lumbung pangan masyarakat), pengembangan dan peningkatan kapasitas Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) melalui Pasar Mitra Tani (PMT). 2. Tahun 2025 dilaksanaka n kegiatan Pengembangan Desa B2SA Pemberdayaan masyarakat desa dalam Pengembangan Pola Konsumsi B2SA melalui sosialisasi, penyediaan kebun B2SA, dan pelatihan pengolahan pangan B2SA; Pemberdayaan Masyarakat	

ditingkatkan; 4. Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan pestisida kimia pada pangan segar serta pemakaian bahan tambahan pangan yang sehat dan aman perlu ditingkatkan mengingat masih ditemukan pangan segar yang belum aman dari residu pestisida.		dalam pemanfaatan pekaranga n secara berkelanjutan disertai monitoring dan evaluasi sebagai salah satu upaya pendukung pencegahan *stunting* serta solusi pemenuhan pangan di tingkat rumah tangga yang beraneka ragam serta bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan di tingkat rumah tangga. 3. Sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan untuk mendorong masyarakat dalam konsumsi pangan berbahan baku lokal non beras serta pelaku usaha kecil dan menengah untuk memproduksi pangan olahan non beras 4. Sosialisasi, pembinaan, pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) bagi masyarakat dan pelaku usaha pangan serta peningkatan jaminan mutu dan daya saing produk melalui fasilitasi rekomendasi ijin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK). 4.d Dalam mendukung keberlanjutan produksi pertanian dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pada Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa upaya, antara lain: 1. Pemerintah Kabupaten Kediri menginisiasi pembangunan Koperasi Gapoktan Organik Palempare untuk memproduksi pupuk organik padat dan cair. 2. Pembinaan terhadap 12 Pusat Penyedia Agens Hayati (PPAH) sebagai bagian dari strategi pengendalian OPT. 3. Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Hama Terpadu.	
e) Dalam mewujudkan misi revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan perlu adanya program kebijakan Bupati Kediri untuk memberi stimulus kepada anak-anak muda agar mau	DIPERTABUN, DKPP	• DKPP mendorong terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui kegiatan Pemnafaatan pekarangan dan Pengembangan Pola Konsumsi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa untuk menyediakan sumber pangan dan gizi di tingkat desa. Bentuk	

bertani didesanya masing-masing dengan memberi bantuan pelatihan, modal, lahan, bibit, pupuk dan menyediakan pasar pasca panen.;		kegiatan berupa sosialisasi, penyediaan kebun B2SA yang menyediakan rumah bibit, media tanam, pupuk, benih, dan peralatan pembibitan, demplot kolam ikan dan ternak ayam serta bantuan sarana pengolahan pangan, serta pendampingan teknis bagi kader PKK desa di Kabupaten Kediri. Dengan pelaksanaan yang berkelanjutan diharapka n pemanfaatan pekarangan dapat dapat menjadi sarana sumber pangan sekaligus sumber pendapatan keluarga. • Dalam rangka upaya pengembangan usaha peternakan, terus dilaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan peternak dalam meningkatkan produksi peternakan secara berkelanjutan melalui pelatihan manajemen peternakan serta pelatihan pengembangan agribisnis peternakan (pengolahan hasil peternakan) yang melibatkan kelompok muda sebagai peserta yang bertujuan mendorong motivasi peternak muda dalam mengembangkan usaha peternaka n yang modern dan berteknologi. Pelatihan ini sekaligus juga memberikan gambaran analisis usaha peternakan sehingga menarik minat pemuda untuk memilih beternak sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan. 4.e. Pada Tahun 2025 telah dibentuk 4 Taruna Tani yang berlokasi di Kecamatan Puncu, Kecamatan Plemahan, Kecamatan Purwoasri, dan Kecamatan Gampengrejo. Taruna Tani tersebut berperan sebagai operator alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti drone, TR-4, combine harvester, dan transplanter, serta mengembangka n usaha pembenihan, produksi pupuk organik, dan mengikuti pelatihan agribisnis.	
f) Penyediaan sarana dan prasarana produksi sektor pertanian terutama penyediaan pupuk dan obat obatan yang	DIPERTABUN	4.f. Adapun dukungan sarana dan prasarana pertanian yang telah diberikan meliputi: • Ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai dengan e-RDKK. • Fasilitasi Pengendalian Hama	

memadai agar Petani tidak kesulitan mendapatkan disaat diperlukan.		Terpadu melalui penyediaan regu pengendali hama, pemanfaatan drone, serta bantuan pestisida dan agens hayati dari Dinas Pertanian dan Perkebunan. • Pelaksanaan Sekolah Lapang bagi kelompok tani untuk memproduksi pestisida nabati. • Bantuan benih tanaman pangan pada Tahun 2025, meliputi benih padi seluas 3.000 ha dan benih jagung seluas 633 ha, serta bantuan benih bagi lahan terdampak bencana banjir untuk komoditas padi dan jagung.	
5) Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Kediri dalam mengembangkan sektor perdagangan adalah dengan acuan peningkatan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan terkait dengan meningkatnya sektor perdagangan dan meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Mikro (IKM) dengan pendekatan strategis yakni kestabilan harga dan jumlah komoditas bahan pokok dan barang penting dalam pasar ekonomi di Kabupaten Kediri. Adapun permasalahan yang yang dihadapi dan sering menjadi permasalahan dalam pengembangan Usaha Kecil Mikro di Kabupaten Kediri : a) Perlunya peningkatan kualitas/standar produk usaha mikro	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1. Memberikan pendampingan kurasi dan fasilitasi perizinan kepada UMKM agar memenuhi standar kualitas dan berdaya saing. 4. Menjalin kerja sama dengan export center Kemendag dan instansi terkait untuk mendapatkan informasi peluang pasar baru di luar negeri dalam rangka memperluas pasar dan diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan pasar pasar tertentu. 5. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi standar ekspor melalui pendampingan dan pelatihan; Mengikutsertakan produk ekspor dan berpotensi ekspor dalam pameran dagang nasional dan internasional. 6. Menyelenggarakan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan bagi pelaku usaha terkait prosedur, regulasi, serta peluang ekspor-impor untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha. 7. Mendorong penggunaan produk lokal melalui regulasi dan kebijakan, serta memperkuat daya saing pasar tradisional dan UMKM melalui pelatihan, promosi, dan kemitraan dengan ritel modern; Melakukan pengawasan produk impor bekerja sama dengan instansi terkait; Menyampaikan kepada Kemendag selaku pemegang kebijakan dan regulasi ekspor-impor sebagai masukan yang konstruktif. 8. 1. Menyediakan arena bermain di pasar induk dan pasar Wates 2. Menyediakan ruang laktasi di Pasar Induk Pare, Pasar Kras dan Pasar Wates 3. Ruang Pos Ukur di Pasar Wates	

agar berdaya saing dan berdaya jual; b) Kurangnya diversifikasi terhadap usaha koperasi; c) Kurangnya SDM koperasi yang terlatih dalam penggunaan teknologi dalam peningkatan kualitas dan kinerja koperasi; d) Penurunan nilai ekspor dikarenakan turunnya permintaan pasar luar negeri; e) Belum mampunya produk-produk daerah untuk menembus pasar luar negeri; f) Pengetahuan Pelaku Usaha terkait Ekspor Impor masih rendah; g) Munculnya barang-barang impor dengan harga murah dan meningkatnya supermarket dan minimarket modern; h) Pemerintah Kabupaten Kediri meningkatkan sarana dan prasarana bangunan pasar tradisional untuk meningkatkan kenyamanan berbelanja dan perlindungan terhadap pedagang kecil; i) Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperbaiki manajemen pengelolaan pasar dalam rangka peningkatan retribusi daerah.		9. Upaya Pemerintah Daerah dalam Memperbaiki Manajemen Pengelolaan Pasar: 1. Penataan Pasar: 2. Peningkatan Pelayanan: penyediaan informasi pasar, keamanan, dan kebersihan. 3. Penggunaan Teknologi: Pemerintah daerah mulai memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan pasar. Contohnya, penggunaan sistem pembayaran retribusi secara elektronik sehingga lebih efisien dan transparan. E-retribusi di Pasar Kras, Sistem Entergate di Pasar Induk Pare 4. Pengawasan: Pemerintah daerah melakukan pengawasan secara rutin terhadap pengelolaan pasar. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasar dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5. Sosialisasi: Pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai pentingnya retribusi pasar bagi pembangunan daerah. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pedagang dalam membayar retribusi pasar.	
6) Pengelolaan Perusahaan Daerah a) Reformasi tata kelola BUMD dalam rangka pengelolaan BUMD yang profesional dan berdaya saing dan	• Bagian Perekonomian dan SDA • DPMPD	Sebagai contoh, BUMD Bank Daerah dapat mendorong dan membantu pembiayaan di BUMDes, terutama yang bergerak di sektor produktif. PDAM juga dapat menjalin kerja sama dengan BUMDes yang mengelola air bersih, baik dalam hal penyediaan air baku maupun pemasaran produk air bersih. Dengan	

peningkatan pelayanan publik serta berperan aktif untuk membantu menekan angka kemiskinan;		adanya kolaborasi ini, diharapkan BUMD dan BUMDes dapat tumbuh dan berkembang bersama, memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah.	
		a) Reformasi terkait tata kelola pengelolaan BUMD yang telah dilakukan yaitu penguatan regulasi dan kebijakan berbasis transparansi dan akuntabilitas, melakukan penguatan penerapan prinsip *good corporate governance,* profesionalisasi *top management* melalui rekrutmen berbasis kompetensi, serta optimalisasi kinerja usaha dan layanan BUMD agar lebih efisien, berdaya saing, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang disertai dengan pengawasan serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan guna memastikan peningkatan pelayanan publik dan kontribusi nyata BUMD terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, model bisnis yang inovatif dan berbasis potensi daerah harus menjadi prioritas agar BUMD mampu bersaing secara berkelanjutan. Melalui penerapan langkah-langkah tersebut, reformasi tata kelola BUMD akan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui seleksi terbuka Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD, diharapkan yang telah terpilih dapat benar-benar memimpin dan meningkatkan daya saing BUMD	
b) Pemerintah Kabupaten Kediri mendorong pengelolaan BUMD yang professional dan berdaya saing, sehingga kondisi BUMD semakin sehat;		b) Pemerintah Kabupaten Kediri mendorong pengelolaan BUMD yang professional dan berdaya saing melalui penguatan kebijakan daerah, peningkatan profesionalitas manajemen melalui rekrutmen terbuka berbasis kompetensi, dan optimalisasi kinerja keuangan serta operasional BUMD. Serta didukung dengan evaluasi kesehatan BUMD secara berkala, efisiensi pengelolaan usaha, serta pengawasan dan pembinaan berkelanjutan oleh pemerintah daerah agar kondisi BUMD semakin	

		sehat.	
c) Pemerintah Kabupaten Kediri mendorong kolaborasi BUMD dengan BUMDes untuk meningkatkan daya saing usaha masing-masing entitas bisnis, dimana BUMD juga dapat berperan sebagai incubator dan katalisator bisnis bagi BUMDes;		c) Pemerintah Daerah mendorong kolaborasi BUMD dengan entitas atau pihak lain dengan memberikan fasilitasi payung hukum Peraturan Bupati terkait Pedoman Kerja Sama BUMD, diharapkan BUMD bisa melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan bisnis yang dijalankan dan peraturan sebagaimana yang berlaku	
d) Evaluasi perlu dilakukan secara berkala dan menyeluruh yang kemudian dijadikan sebagai landasan agar pengelolaan terhadap Perusahaan-Perusahaan Daerah Kabupaten Kediri dapat lebih optimal dalam memperoleh laba;		d) Evaluasi dilakukan secara berkala dan menyeluruh melalui pelaksanaan telaah terhadap laporan keuangan dan operasional Perusahaan Daerah yang dilaksanakan secara triwulanan dan tahunan, guna menilai kinerja, tingkat kesehatan, serta efektivitas pengelolaan usaha. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan saran dan rekomendasi perbaikan terhadap pelaksanaan operasional dan manajerial BUMD, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembinaan apabila diperlukan. Selain pada Laporan Direksi dan Dewan Pengawas, Bagian Perekonomian juga melakukan evaluasi terhadap sistematika Rencana Bisnis dan sistematika Rencana Kerja dan Anggaran. Adanya audit internal dan audit eksternal, melalui Satuan Pengawas Intern dan Dewan Pengawas sebagai auditor internal dan KAP yang setiap tahun melakukan audit terkait laporan keuangan hasil kinerja BUMD selama satu tahun. Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan berbasis data tersebut, diharapkan pengelolaan Perusahaan Daerah Kabupaten Kediri dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan mampu meningkatkan perolehan laba secara berkelanjutan	
e) Dalam proses rekrutmen sumber		e) Proses rekrutmen sumber daya manusia Perusahaan Umum	

daya manusia Perusahaan Umum Daerah ini dapat dilaksanakan secara transparan serta mengutamakan dari kalangan profesional yang memang memiliki kapasitas, sehingga dapat maksimal dalam menjalan amanah.		Daerah, khususnya Direktur dan Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD, telah dilaksanakan secara terbuka dan transparan dengan membuka seleksi melalui kanal-kanal *job seeker* yang kredibel seperti Jobstreet dan LinkedIn, serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan seleksi dimulai dari seleksi administrasi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan, termasuk kriteria usia, tingkat pendidikan, dan sertifikasi yang dipersyaratkan, yang selanjutnya didukung dengan pelaksanaan *background checking* secara ketat guna memastikan rekam jejak, kinerja, serta profesionalitas peserta seleksi. Proses seleksi pada tahun 2025 mencakup tahapan psikotes yang dilengkapi dengan Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) selain wawancara dengan psikolog profesional untuk menilai aspek kepribadian, integritas, dan stabilitas psikologis peserta seleksi. Sampai dengan saat ini, proses seleksi telah dilaksanakan hingga tahap presentasi dan wawancara dengan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk menilai kecakapan peserta dari aspek pengalaman, kemampuan kepemimpinan, serta pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga diperoleh SDM yang profesional dan mampu menjalankan amanah secara optimal.	
7) Pengairan, Sarana dan Prasarana Wilayah a) Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan optimalisasi sistem irigasi teknis dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas usaha sektor pertanian di Kabupaten Kediri serta penanganan risiko banjir;	Dinas PUPR	untuk optimalisasi irigasi teknis dalam rangka mendukung Peningkatan usaha sektor Pertanian telah melakukan Rehabilitasi Jaringan irigasi Permukaan Sepanjang 11.942,85 meter dan untuk penanganan resiko banjir dilakukan dengan Normalisask/restorasi sungai/jaringan irigasi sepanjang 6,851 KM.	

b) Sumber-sumber mata air yang jumlahnya banyak di Kabupaten Kediri, perlu adanya perhatian untuk kelestarian alam dan pemanfaatnya;			
c) Memfasilitasi produksi dan penggunaan sumber energi yang dapat dihasilkan dan dikelola dalam skala kecil sesuai potensi lokal di Kabupaten Kediri, seperti biogas, mikro hidro, tenaga angin dan panel surya.	Bagian Perekonomian dan SDA	1, Pemerintah Daerah Berinisiatif dan Memfasilisasi usulan bantuan mikro hidro untuk PKL di Kawasan Wisata Air Terjun Dholo kepada Peremintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur. 2.Pemerintah Daerah berinisiatif dan memfasilitasi usulan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop pada Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Kediri dan Solar Home System (SHS) untuk wilayah belum dalam jangkauan Listrik PLN kepada Peremintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.	
8) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah a) Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan pendataan dan profiling terhadap Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kediri sebagai basis data dalam implementasi program peningkatan kinerja koperasi dan pemberdayaan UMKM. Pendataan dan profiling yang terupdate juga dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi dan produk unggulan UMKM pada setiap desa atau kecamatan; b) Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan pembinaan dan pengawasan serta secara selektif memfasilitasi penguatan permodalan koperasi serta mendorong perluasan akses	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	a) untuk profiling data dengan terbitnya PermenUMKM 8/2025 tentang Penyelenggaraan Satu Data UMKM maka pelaksanaan pendataan UMKM menggunakan aplikasi SAPA UMKM dari kementrian UMKM dan Kementrian Koperasi untuk pendataan koperasi menggunakan aplikasi OSS b) Melaksanakan pembinaan manajemen, tata kelola, dan kepatuhan koperasi secara berkala serta memfasilitasi usaha mikro untuk mengakses pembiayaan berbunga rendah melalui koperasi, perbankan dan lembaga keuangan resmi e. terdapat failitasi promosi melalui kegiatan pameran dalam dan luar daerah, katalog online, bazar, untuk bantuan alat produksi sesuai dengan tema pelatihan untuk menunjang peserta pelatihan mempraktekkan materi pelatihan produksi g. 1. Memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan desa dalam pengawasan koperasi serta Melibatkan asosiasi koperasi dalam pembinaan g. 2. Menyelenggarakan pelatihan teknis dan sertifikasi khusus di bidang pengawasan serta penilaian kesehatan koperasi, mengoptimalkan peran praktisi gerakan koperasi dan dekopinda sebagai pendamping teknis dalam proses pengawasan g. 3. Melibatkan tenaga ahli eksternal sebagai narasumber atau reviewer	

permodalan dengan tingkat bunga yang kompetitif bagi usaha mikro dalam rangka mengurangi praktek rente (pinjaman berbunga tinggi) yang selama ini menjerat banyak pelaku usaha mikro; c) Melakukan pendataan dan *profiling* terhadap Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kediri sebagai basis data dalam implementasi program peningkatan kinerja koperasi dan pemberdayaan UMKM. Pendataan dan profiling yang terupdate juga dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi dan produk unggulan UMKM pada setiap desa atau kecamatan; d) Perlu adanya peningkatan kuantitas maupun kualitas terhadap program-program yang mendorong kemajuan pelaku usaha UMKM khususnya dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional; e) Bantuan-bantuan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri terhadap para pelaku usaha UMKM dapat berupa bantuan alat produksi, peningkatan promosi, serta bantuan modal, serta secara rutin melakukan *monitoring* dan pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM di Kabupaten Kediri;		independen dalam pengawasan dan penilaian koperasi, Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan praktisi gerakan koperasi dan dekopinda terkait pengawasan koperasi i. 1. menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta dan BUMN/BUMD melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro melalui pemberian bantuan alat produksi i.2 melaksanakan kegiatan monitoring secara periodik terhadap penerima manfaat baik itu penerima manfaat dari semua program dan kegiatan yang di laksanakan j. akan di bentuk fasilitasi pemberdayaan usaha mikro secara online dengan memanfaatkan ruang di gedung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar kegiatan pemberdayaan usaha mikro bisa adaptif sesuai dengan perkembangan zaman k.1 terjalin kolaborasi dengan dinas perdagangan (pameran dalam daerah dan luar daerah), dinas kominfo (pemanfaatan media sosial pemkab kediri), Dinas Pariwisata (kolaborasi kegiatan pagelaran budaya) sebagai sarana fasilitasi pemasaran produk usaha mikro	

f) Program Pemulihan Ekonomi Nasional agar terus dipertahankan dan di tingkatkan agar pendapatan dan daya beli masyarakat bisa meningkat, program penguatan UMKM dan Koperasi agar terus ditingkatkan agar UMKM dan Koperasi bisa bersaing dalam dunia global; g) Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi 1. Capaian pengawasan terhadap koperasi aktif menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam memastikan seluruh koperasi memperoleh pendampingan dan pembinaan secara optimal. 2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi patut menjadi perhatian bersama; 3. Ke depan, perlu diperkuat sinergi internal maupun dengan pihak eksternal seperti lembaga auditor independen atau perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan memperluas cakupan penilaian secara menyeluruh terhadap koperasi yang aktif; h) Pemutakhiran dan Pemanfaatan Data Koperasi dan UMKM			

1. Upaya pemutakhiran data melalui sistem informasi (sisdatum.kedirikab.go .id) merupakan langkah maju yang sangat penting. Namun demikian, pemanfaatan data tersebut sebagai dasar pengambilan kebijakan dan integrasi lintas program OPD masih dapat ditingkatkan; 2. Dengan pemanfaatan data yang lebih strategis, diharapkan intervensi program—baik dalam bentuk bantuan, pelatihan, maupun pendampingan—akan lebih tepat sasaran dan berdampak pada penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas usaha. i) Evaluasi Program Bantuan UMKM 1. Program bantuan untuk UMKM, baik berupa hibah alat produksi maupun dukungan promosi, telah menjangkau banyak pelaku usaha. Namun, evaluasi atas dampak bantuan tersebut terhadap peningkatan omzet, keberlanjutan usaha, dan daya saing produk perlu diperkuat agar ke depan program yang disusun semakin responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM; 2. Dibutuhkan juga sistem umpan balik (*feedback mechanism*) dari penerima manfaat sebagai dasar evaluasi dan perbaikan			

program secara berkelanjutan. j) Kapasitas Kelembagaan dan Pembinaan UMKM Pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi dan UMKM merupakan faktor kunci dalam memperkuat ekosistem usaha mikro. Masih terdapat peluang untuk meningkatkan kualitas pelatihan, fasilitasi akses permodalan, digitalisasi usaha, dan jejaring pemasaran. Ke depan, penting untuk mendorong inovasi model pembinaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, misalnya dengan memanfaatkan platform daring untuk edukasi, mentoring bisnis, dan promosi produk lokal; k) Sinergi Lintas Sektor dan Kemitraan 1. Dalam pengembangan koperasi dan UMKM, sinergi dengan instansi lain seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, serta dunia usaha dan lembaga keuangan akan memberikan dampak yang lebih besar; 2. Dengan kolaborasi yang kuat, koperasi dan UMKM di Kabupaten Kediri dapat lebih mudah mengakses pasar, teknologi, serta mendapatkan dukungan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan			

usaha yang semakin kompleks.			
e. Bidang Hukum dan Pemerintahan 1) Pelayanan Pemerintahan a) Pemerintah Kabupaten Kediri perlu terus mendorong penyelenggaraan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa berbasis digital untuk mendorong birokrasi yang efektif dan efisien; b) Pemerintah Kabupaten Kediri harus mewujudkan Satu Data Kabupaten Kediri dalam mengintegrasikan seluruh data.	Bagian Organisasi	1) a. Telah dilaksanakan Penilaian Kinerja Organisasi Periodik secara simultan dengan hasil Kinerja yang dimasukkan dalam Kolom Capaian Kinerja Organisasi SKP sesuai Perangkat Daerahnya disusun dalam Keputusan Sekretaris Daerah sebagai berikut: a. Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 100.3.3.5/19/418.08/2025 tentang Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 b. Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 100.3.3.5/24/418.08/2025 tentang Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 c. Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 100.3.3.5/35/418.08/2025 tentang Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2025 d. PKO Triwulan IV dan Final sedang dalam tahapan Proses Penyusunan	
	Bagian Hukum	1) a. Telah dilaksanakan Penilaian Kinerja Organisasi Periodik secara simultan dengan hasil Kinerja yang dimasukkan dalam Kolom Capaian Kinerja Organisasi SKP sesuai Perangkat Daerahnya disusun dalam Keputusan Sekretaris Daerah sebagai berikut: a. Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 100.3.3.5/19/418.08/2025 tentang Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 b. Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 100.3.3.5/24/418.08/2025 tentang Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025 c. Keputusan Sekretaris Daerah nomor: 100.3.3.5/35/418.08/2025 tentang Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2025 d. PKO Triwulan IV dan Final sedang dalam tahapan Proses Penyusunan	
2) Pelayanan Ketenagakerjaan 1. Pemerintah	Dinas Tenaga Kerja	1. Dinas Tenaga telah melaksanakan kegiatan Job Fair / Bursa Kerja pada tanggal 20-21 Mei 2025 di Convention	

Kabupaten Kediri memfasilitasi tersedianya informasi lowongan kerja dan penyelenggaraan bursa kerja melalui media sosial dan website resmi yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kediri;		Hall SLG. Terdapat 40 perusahaan yang ikut serta dan Untuk lulusan SMA/SMK dan D3/S1 membuka lowongan kerja sebanyak 2.237 orang. Jumlah pelamar yang terdata sebanyak 5.374 orang. Dalam kegiatan bursa kerja tersebut juga dilaksanakan kegiatan talkshow dan bimbingan karier bagi pencari kerja. Publikasi terkait lowongan kerja telah dilaksanakan secara intens melalui social media dan website Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, implementasi penggunaan digitalisasi pelayanan ketenagakerjaan dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam Pasar Kerja melalui platform e-kerjo (https://e-kerjo.kedirikab.go.id) juga terus digalakkan secara optimal.	
2. Pemerintah Kabupaten Kediri memfasilitasi peningkatan keterampilan (*skill*) dan kemampuan para pencari kerja melalui pelatihan bekerjasama dengan swasta dan penyelenggaraan training centre;	DINAS TENAGA KERJA	2. Fasilitasi kompetensi pencari skill kerja salah satunya dapat dilakukan melalui program pelatihan dan Pendidikan peningkatan dan svokasional. Selama 2025, telah dilaksanakan 67 pelatihan yang diikuti oleh 1.380 peserta serta 7 kegiatan magang perusahaan yang diikuti oleh 140 peserta dimana sebelumnya telah dilakukan filter melalui prosedur assessment, sehingga diharapkan kegiatan dan hasil yang diperoleh dapat efektif dan efisien serta tepat sasaran. Terdapat 21 LPKS yang bermitra dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan magang	
3. Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PJTKI dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Sinergi dengan stakeholder terkait dalam penyaluran TKI menjadi salah satu upaya strategis menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) serta menurunkan angka kemiskinan;		3. Walaupun secara kewenangan untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia ada pada Kementerian Pusat dan Pemprov, Dinas Tenaga Kerja tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang masyarakat. Menyediakan informasi,Menjalin sinergi dan kemitraan dengan dengan stakeholder masih tetap bisa dilakukan secara kontinu dan konsisten. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja yaitu sosialisasi Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang di Desa Plaosan Kecamatan Wates tanggal 3 Desember 2025, bekerjasama dengan Polres jumlah pesertasosialisasi sebanyak 40 (empat puluh)orang.	

4. Program Pelatihan dan Sertifikasi Kerja a) Perlu disusun program pelatihan yang berbasis demand-driven, yaitu sesuai dengan kebutuhan riil dunia kerja dan sektor industri di Kabupaten Kediri;	DINAS TENAGA KERJA	4. Program Pelatihan dan Sertifikasi Kerja a. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri telah berkoordinasi dengan KADIN terkait dengan kebutuhan lowongan kerja diwilayah Kabupaten Kediri dan evaluasi dari lowongan kerja di Job Fair, dimana kebutuhan tenaga kerja yang lebih banyak bisa didukung dengan adanya pelatihan yang match.	
b) Perlu melibatkan dunia usaha dan industri (DU/DI) dalam penyusunan kurikulum pelatihan, termasuk kerja sama dalam penyediaan instruktur, tempat praktik kerja, dan program magang;		b. Dinas Tenaga Kerja bekerjasama dengan DU/DI dengan adanya program pelatihan + On The Job Training (OJT) Dimana sebelum pelatihan dimulai sudah di data perusahaan-perusahaan mana yang ditempati siap untuk magang. Harapannya lulusan pelatihan lebih siap terjun di dunia usaha karena sudah pernah merasakan magang di Perusahaan.	
c) Kedepan perlu *post-training evaluation*, termasuk pelacakan alumni pelatihan (*tracer study*) untuk mengetahui tingkat keberhasilan penempatan kerja dan kecocokan bidang pelatihan dengan pekerjaan yang diperoleh.	DINAS TENAGA KERJA	c. Adanya pendataan kegiatan alumni peserta pelatihan melalui link online dan juga melaksanakan sampling monev ke beberapa alumni peserta pelatihan. Adanya grup WA peserta pelatihan juga cukup membantu dalam penyampaian informasi.	
5. Penempatan Tenaga Kerja yang Terukur dan Transparan a) Perlu dibangun sistem informasi penempatan kerja yang terintegrasi dengan data peserta pelatihan, lowongan kerja, dan kebutuhan perusahaan;		5. Penempatan Tenaga Terukur dan Transparan a. Integrasi Kerja yanginformasi penempatan tenaga kerja dengan data peserta pelatihan, lowongan kerja, dan kebutuhan Perusahaan mulai dirintis pada Tahun 2026 serta akan terus dilakukan developing dengan optimalisasi aplikasi e-Kerjo.	
b) Perlu dibuat indikator kinerja yang jelas seperti: jumlah tenaga kerja terserap per jenis pelatihan, rasio penempatan kerja, serta data	DINAS TENAGA KERJA	b. Sinergi antara perencanaan dan penganggaran serta terkait data ketenagakerjaan akan lebih ditingkatkan lagi. Antara pelaporan	

tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan bidang pelatihannya.			
6. Optimalisasi Program Padat Karya dan Pekerja Migran a) Kedepan perlu dikembangkan program padat karya berbasis potensi desa, misalnya di sektor infrastruktur ringan, pertanian, atau kebersihan lingkungan dengan pengukuran dampak terhadap pengurangan pengangguran;		6. Optimalisasi Program Padat Karya dan Pekerja Migran a. Pada tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan Karya di 54 desa sebagai Upaya kebijakan ketenagakerjaan berbasis potensi desa, khususnya pada sektor infrastruktur pedesaan sederhana. Program ini berhasil menyerap 2.262 tenaga kerja lokal, terutama dari kelompok penganggur dan setengah penganggur, sehingga memberikan terhadap pengangguran, masyarakat, perekonomian masyarakat pembangunan desa berkelanjutan. Pendapatan penguatan partisipasi dampak pengurangan peningkatan serta dan dalam nyata	
b) Perkuat tata kelola penempatan pekerja migran dengan memastikan pelindungan, pembekalan, dan pengawasan pasca-penempatan, serta penyediaan data akurat tenaga kerja luar negeri asal Kediri.	DINAS TENAGA KERJA	b. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri terus memperkuat tata Kelola penempatan pekerja migran dengan pelindungan, pengawasan secara berkelanjutan. Upaya ini didukung SISKOP2MI, yaitu aplikasi milik Kementerian Pekerja Indonesia (KP2MI), sebagai sumber Migran data tenaga kerja luar negeri asal Kediri yang akurat dan terintegrasi.	
7. Kolaborasi Multipihak dan Integrasi Program a) Tingkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Balai Latihan Kerja (BLK) dalam merancang pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang saling melengkapi; b) Dorong pembentukan Forum Komunikasi Dunia Kerja sebagai ruang diskusi dan perencanaan bersama antara pemerintah, pelaku industri, dan lembaga pendidikan.		7. Rencana Tahun 2026 dibentuk Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Kabupaten Kediri sebagai wadah Kerjasama perencanaan, pelaksamaan dan pasca pelatihan vokasi.	

Sumber : OPD Kab.Kediri

3.6. Prestasi Kabupaten Kediri

Prestasi yang diterima Pemerintah Kabupaten Kediri selama Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 22 Prestasi Pemerintah Kabupaten Kediri selama Tahun 2025

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala (Internasional/ Nasional/Provinsi)	Ket.
1	International Grand Music Festival (IGMF) 2025	The Piano Institute	Internasional	Juara 2 oleh Peserta Didik SMPN 2 Pare
2	Penganugrahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)	Nasional	Opini: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Penghargaan Pelayanan Publik (Pelayanan Prima)	Kementerian PANRB	Nasional	Kabupaten Kediri memperoleh Indeks Pelayanan Publik 4,67 dengan kategori A (Pelayanan Prima)
4	SWASTI SABA PADAPA	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Nasional	Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2025
5	Sertifikat Penghargaan Atas keberhasilan mencapai target Non-Polio AFP (NPAFP) Rate ≥3 per 100.000 penduduk <15 tahun dan Discarded (bukan campak-bukan rubela) Rate ≥2 per 100.000 penduduk pada tahun 2024	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Nasional	-
6	Piagam Penghargaan Sebagai Pemerintah Daerah dengan KATEGORI PRATAMA dalam Pencapaian Universal Health Coverage	Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Nasional	-

7	Pasar Tertib Ukur	Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Nasional	Penerima Penghargaan UPT. Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri: Pasar Kandangan Pasar Ngadiluwih Pasar Pare Lama
8	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Klasifikasi Baik Tahun 2024	Kepala Badan Pangan Nasional	Nasional	Link bukti dukung: https://drive.google.com/drive/folders/19J9snr5R4Drj6FgSQYb5ZY34EIFFvCSn?usp=sharing
9	Pelepasan Varietas Tebu Panjalu 1 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tebu	Kementerian Pertanian	Nasional	Varietas Tebu Panjalu 1 telah dilepas Kementerian Pertanian sebagai varietas unggul tanaman tebu yang berasal dari Kabupaten Kediri yang mempunyai keunggulan diantaranya potensi hasil tinggi (+- 150 ton/ ha) dan rendemen tinggi (+- 8,22%)
10	Penetapan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Aplikasi Si Pandai	Kementerian Hukum	Nasional	
11	Komitmen rumah sakit dalam implementasi integerasi system antrian online, integrasi system klaim, implementasi E-SEP dan Finger Print/Frista	BPJS Kesehatan	Nasional	-
12	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Klasifikasi Baik Tahun 2024	Kepala Badan Pangan Nasional	Nasional	Link bukti dukung: https://drive.google.com/drive/folders/19J9snr5R4Drj6FgSQYb5ZY34EIFFvCSn?usp=sharing
13	Lomba Video Pendek "7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat" 2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)	Nasional	Juara Inspiratif 1 Lomba Video Pendek oleh Peserta Didik SMP NU Sabilil Huda
14	Semarak Anak Indonesia Hebat 2025	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)	Nasional	Juara 1 Lomba Video Pendek oleh Peserta Didik SMP NU Sabilil Huda

15	Piala Menhan RI 2025	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI)	Nasional	Juara 1 Karate Kumite Perorangan oleh Peserta Didik SMPN 1 Ngadiluwih
16	Sekolah Adiwiyata Nasional 2025	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Nasional	Diperoleh oleh SMP Negeri Mojo
17	Festival Dewi Cemara Tahun 2025	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	Provinsi	1. Penyaji Terbaik Virtual Tour Fasilitator Terbaik Penjaga Stan Eksotik Nominator Penghargaan Desa wisata Bersih
18	Olimpiade SIT Se-Jawa Timur 2025	JSIT Indonesia Wilayah Jawa Timur	Nasional	Juara Perunggu olimpiade IPA SIT Jawa Timur 2025 diraih oleh Peserta Didik SMP ISlam Terpadu Nurul Izzah
19	Indonesian Youth Competition (IYC) 2025	Lembaga Kompetisi Indonesia (LKI)	Nasional	Juara 3 oleh Peserta Didik SMPN 2 Pare
20	Kompetisi Sains Pelajar Nasional (KSPN)	Lembaga Sains Pelajar (LSP)	Nasional	Juara perunggu tingkat Nasional bidang Bahasa Indonesia kompetisi saint pelajar 2025 diperoleh oleh Peserta Didik SMPN 1 Papar
21	Kompetisi Pelajar Cerdas Indonesia 2025	Lembaga Kompetisi Indonesia, berkolaborasi dengan HMD Geografi Universitas Indonesia dan Olimpiade Indonesia	Nasional	Juara Perak tingkat nasional bidang Bahasa Inggris Kompetisi Pelajar Cerdas Nusantara Tahun 2025 diperoleh oleh Peserta Didik SMPN 1 Papar
22	Lomba Cerdas Cermat BPBD Se-Indonesia	Kepala BPBD Provinsi Jawa Timur	Nasional	BPBD Kabupaten Kediri yang diwakili oleh sdr. Bodi Gawanta, S.H. meraih juara harapan tiga Lomba Cerdas Cermat dalam rangka memperingati Bulan PRB Tahun 2025 yang diselenggarakan di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto pada tanggal 1 - 3 Oktober 2025

23	Penghargaan Peringkat Pertama - Penghargaan Pemerintah Daerah Tingkat Penyelesaian Temuan dan Pemenuhan Data Terbaik Tahun 2024	Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	Data Dukung berupa Foto Piagam/Sertifikat dengan Nomor: KEP- 125/WPB.16/2025 tanggal 23 September Tahun 2025
24	Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur Tahun 2025 di Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu)	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur	Provinsi	Dalam ajang ini berhasil meraih berbagai medali yaitu : - Emas 24 medali - Perak 22 medali - Perunggu 45 medali yang diperoleh dari beragam cabang olahraga, baik perorangan maupun beregu, antara lain Pordasi, Kodrat, IBCA MMA, FASI, PTMSI, IMI, Muaythai, Forki, Akuatik, ESI, Perpani, hingga cabang-cabang olahraga lainnya.
25	Musabaqah Tilawatil Qur'an(MTQ) Tingkat Provinsi Jawa Timur XXXI Tahun 2025 di Kabupaten Jember	Dewan Hakim MTQ Provinsi Jawa Timur	Provinsi	Kabupaten Kediri berhasil meraih =
26	Kejuaraan Panahan Piala Gubernur Jawa Timur III Tahun 2025 di Kabupaten Tulungagung	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	Memperoleh Juara 3 Beregu Kategori U10 Putra dan Juara 2 Mix Team Kategori U10
27	Lomba Wirausaha Lingkungan Hidup Gugus Depan se-Jawa Timur 2025	Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur (Kwarda Jatim)	Provinsi	Juara 2 Produk Unggulan Terbaik diperoleh oleh SMPN 2 Ngancar
28	Kejuaraan Provinsi Antar Klub Bola Voli U15 se-Jawa Timur di Kabupaten Sidoarjo	PBVSI Pengprov Jatim	Provinsi	Juara 4 Putri diperoleh Peserta Didik SMPN 1 Wates
29	Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Kickboxing Jatim Piala Bupati Mojokerto 2025	Pengurus Provinsi Kickboxing Indonesia (Pengprov KBI) Jawa Timur	Provinsi	Juara 2 Kejurprov Kickboxing Kelas Older Cadest 15 Tahun U50 Kg tahun 2025 oleh Peserta Didik SMP Islam Al Fath Pare
30	Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Taekwondo Indonesia Antar Pelajar Jawa Timur 2025	Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Taekwondo Indonesia Antar Pelajar Jawa Timur 2025	Provinsi	Juara 3 Free Style Cadet Individual oleh Peserta Didik SMP Islam Al Fath Pare

31	Jumbara PMR X PMI Provinsi Jawa Timur 2025	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur	Provinsi	Juara Umum 1 Kategori Utama oleh Peserta Didik SMP Islam Al Fath Pare
32	Kejuaraan Karate Piala Mbah Kung Open & Festival INKANAS se-Jawa Timur 2025	Institut Karate-Do Indonesia (INKANAS) Provinsi Jawa Timur.	Provinsi	Kejuaraan Karate Kumite -47 Kg Kadet Putri oleh Peserta Didik SMPN 1 Pagu
33	Kejuaraan Karate KONI Jatim Cup I Tahun 2025	KONI Jawa Timur	Provinsi	Juara 1 Karate Kumite Perorangan -70 Kg Kadet Putra oleh Peserta Didik SMPN 1 Ngadiluwih
34	Festival Dalang Muda Jawa Timur 2025	Persatuan Pedalang Indonesia Jawa Timur	Provinsi	Juara Penyaji Terbaik I Juara Penyaji Terbaik II
35	Kategori Kabupaten terbaik pada penilaian kinerja pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting (PPPS) Kabupaten/kota	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	Kabupaten Terbaik
36	Juara I Lomba Teknologi Tepat Guna Unggulan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	Penerima Ahmad Dusen, S.Si. (Sekretaris Desa Ngreco Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri
37	5 Terbaik Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Jawa Timur yang Optimal dalam Memberikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Seluruh Pekerja di Ekosistem Desa Segmen Penerima Upah Tahun 2025	Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur	Provinsi	Penerima Pemerintah Kabupaten Kediri
38	Penggerakan Kelas Ibu Hamil	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Republik Indonesia	Provinsi	Juara III Penggerakan Kelas Ibu Hamil
39	Desa Berseri Mandiri	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	Desa Sidomulyo Kecamatan Wates
40	Desa Berseri Mandiri	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	Desa Tertek Kecamatan Pare
41	Desa Berseri Madya	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	Desa Wonoasri Kecamatan Grogol
42	Desa Berser Pratama	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	Desa Balongjeruk Kecamatan Kunjang

43	Desa Berser Pratama	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih
44	Desa Berser Pratama	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	Desa Mlancu Kecamatan Kandangan
45	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	SDN Pandantoyo I Kecamatan Ngancar
46	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	SMPN 1 Ngancar
47	Terbaik III Penilaian Petugas IB Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 kategori Wilayah dengan Jumlah Akseptor Tinggi	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	Drh. Mukti Ali - Kecamatan Kayen Kidul, Kab. Kediri
48	Peringkat II Kabupaten dengan Jumlah Desa yang Telah Tervaksin PMK Terbanyak Tingkat Provinsi Jawa Timur	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Tim Satgas Penanganan PMK Provinsi Jawa Timur	Provinsi	
49	Apresiasi Kabupaten/Kota dengan Kontribusi PAD melalui Penggunaan SKKH Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Tim Satgas Penanganan PMK Provinsi Jawa Timur	Provinsi	
50	Juara I Penyelenggara Pelatihan Terbaik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Kompetisi ASN Achievement Awards Tahun 2025	BPSDM Provinsi Jawa Timur	Provinsi	-
51	Juara I Implementasi Corporate University Terbaik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Kompetisi ASN Achievement Awards Tahun 2025	BPSDM Provinsi Jawa Timur	Provinsi	-

52	Inisiator Kerjasama antar daerah baru terbanyak dalam rangka kegiatan high level meeting (HML) TPID, TP2DD dan TP2ED Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	-
53	Kompetisi Nasional Siswa Cendekia (KNSC)	Smart Student, Prisma Cendekia, atau Pakar Akademi.	Nasional	Juara 3 Kompetisi IPA – SMP 3 oleh Peserta Didik SMPN 2 Pare
54	Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N)	Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kemendikdasmen	Nasional	Juara Harapan 2 Ilustrasi oleh Peserta Didik SMPN 1 Ngadiluwih dan Harapan 2 Cabang Ilustrasi Digital dan Cabang Mendongeng oleh Peserta Didik SMPN 2 Pare
55	Kompetisi Pelajar Indonesia PKN SMP		Nasional	Meraih Medali Emas oleh Peserta Didik SMPN 1 Pagu
56	Kompetisi Sains Siswa Nasional (KSSN)	Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas	Nasional	Meraih Medali Emas oleh Peserta Didik SMPN 1 Pagu
57	Trunojoyo National Championship II 2025	Unit Kegiatan Mahasiswa Persaudaraan Setia Hati Terate (UKM PSHT) Universitas Trunojoyo Madura (UTM).	Nasional	Juara 2 Pencak Silat diperoleh Peserta Didik SMP Islam Al Fath Pare
58	Taekwondo Kyorugi Senior U-63 - KEMENPORA CUP 2025		Nasional	Diraih juara sebagai berikut ooleh peserta didik SMP Islam Al Fath Pare : · Juara 2 Kyorugi U 63 Kg Junior Putri · Juara 3 Kyorugi U 49 Kg Cadet Putra · Juara 2 Kyorugi U 41 Kg Junior Putri · Juara 1 lomba kyorugi cadet u 53 Diraih juara sebagai berikut ooleh peserta didik SMPN 1 Pagu : · Juara 1 Kyorugi Cadet Putri · Juara 1 Kyorugi Semi Prestasi Cadet F-44 · Juara 3 Kyorugi Cadet U 44 Putri Diraih juara sebagai berikut ooleh peserta didik SMPN 2 Pare : · Juara 1 Taekwondo Kyorugi Semi Prestasi Cadet M-658 · Juara 3 Taekwondo Kyorugi Semi Prestasi Junior M-55 · Juara 2 Taekwondo Kyorugi Semi Prestasi Cadet M-37 · Juara 3 Taekwondo Kyorugi Semi Prestasi Cadet M-33

59	Alberta Competition (Kejuaraan Alberta Nasional)	CV. Alberta Nusa Education	Nasional	Juara perunggu tingkat Nasional bidang Matematika kejuaraan Alberta Nasional tahun 2025 diperoleh oleh Peserta Didik SMPN 1 Papar
60	Regional Competition WRO Indonesia	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya	Nasional	Juara 2 dan 3 WRO tingkat Nasional 2025 Entry Level Robbomision Junior Arduino diperoleh Peserta Didik SMP ISlam Terpadu Nurul Izzah
60	Top Academic Generation (TAG) 2025		Nasional	Juara 2 Olimpiade Bahasa Inggris Top Academic Generation oleh Peserta Didik SMP Multimedia As Satar
61	Festival Olimpiade Sains dan Bahasa Tahun 2025		Nasional	Juara Peraih Medali Emas Festival Olimpiade Sains Dan Bahasa oleh SMP Multimedia As Satar
62	Kejuaraan Nasional Renang Antar Perkumpulan Seluruh Indonesia (KRAPSI)	Pengurus Besar Akuatik Indonesia (PB AI)	Nasional	Juara 3 Kejuaraan renang antar Perkumpulan Se- Indonesia diperoleh oleh Peserta Didik SMPN 1 Wates
63	Gothia Cup U13 2025	BK Häcken	Nasional	Juara 1 Gothia Cup U13 mewakili Indonesia di Swedia cabang Sepakbola oleh Peserta Didik SMPN 1 Wates
64	Central Sterilization Indonesia's Hero 2025 : Category Class C Hospital	Perkumpulan Praktisi Sentral Sterilisasi Indonesia	Nasional	The 1st Winner for Commitment to Standard Compliance in Sterilization untuk RSUD Gumul Kabupaten Kediri
65	Kejuaraan Paralympic Provinsi Jawa Timur 2025 di Kota Surabaya	National Paralympic Committee Indonesia	Provinsi	Memperoleh peringkat 6 dari 80 kontingen se-Jawa Timur dari berbagai nomor lomba dan klasifikasi, dengan meraih total 17 medali yang terdiri dari : - Emas 5 medali - Perak 5 medali - Perunggu 7 medali

66	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi Jawa Timur XXXI Tahun 2025 di Kabupaten Jember	Dewan Hakim MTQ Provinsi Jawa Timur	Provinsi	- Harapan I Cabang Tilawah Al-Qur'an Golongan Tartil Qari'ah - Harapan II Cabang Tilawah Al-Qur'an Golongan Anakanak Qari'ah - Terbaik III Cabang Tilawah Al-Qur'an Golongan Remaja Qari'ah - Harapan III Cabang Qira'at Al-Qur'an Golongan Qira'at Mujawwadah Dewasa Qari'ah
67	Kejuaraan Provinsi Junior Panahan Jawa Timur Tahun 2025 di Kabupaten Pacitan	Persatuan Panahan Indonesia (Perpani)	Provinsi	Jawa Timur Provinsi Memperoleh Juara 3 Beregu Kategori U10 Putra
68	Ajang Gala Siswa Indonesia (GSI) Tahun 2025	Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) Kemendikdasmen	Provinsi	Memperoleh Juara III oleh Peserta Didik SMPN 2 Wates, Juara 3 Gala Siswa Indonesia oleh Peserta Didik SMPN 2 Gurah dan Juara 3 Beregu Sepak Bola SMPN 2 Wates
69	Kejuaraan Nasional Panahan Antarklub 2025	Djarum Foundation dan MilkLife berkolaborasi dengan PB Perpani	Provinsi	Juara 1 sesi 2 Target 35 Divisi Recurve Kelompok U15 cabang panahan dan Juara 1 Finall oleh peserta didik SMPN 1 Wates
70	One Basketball Competition 2025		Provinsi	Juara 3 SMP Putra Pertandingan Bola Basket 5x5 One Basketball Competition 2025 oleh SMPN 2 Kepung
71	Pekan Olahraga Wanita (PORWAN) tingkat Provinsi Jawa	Timur tahun 2025 Perwosi (Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia)	Provinsi	Juara 3 Softball Pekan Olah Raga Wanita SMPN 1 Kepung

72	Ajang Prestasi dan Seni (APS) Putaran 1 se-Jawa Timur	MJ Education Center	Provinsi	Diperoleh oleh Peserta Didik SMP Islam Al Fath Pare : · Juara 1 Lomba Menyanyi Kategori C · Juara 6 lomba Foto Genic · Juara 4 lomba mata pelajaran Bahasa Inggris Diperoleh oleh Peserta Didik SMPN 2 Pare : · Juara 2 Sains Level 7 · Juara 3 Bahasa Indonesia Level 7 · Harapan 1 Bahasa Inggris Level 7 Diperoleh oleh Peserta Didik SMP ISlam Terpadu Nurul Izzah: · Juara 3 Olimpiade Bahasa Inggris Ajang Prestasi dan Seni Putaran 1 se-Jawa Timur
73	Kompetisi Matematika, Sains, dan Inggris (KMSI) 2025	Yayasan Intan Mutia (KMSI)	Provinsi	Juara Perunggu Bidang Sains Level 4 Final dan Juara Perak Bidang Bahasa Inggris oleh Peserta Didik SMP Islam Al Fath Pare
74	Kompetisi Pelajar Indonesia Bahasa Indonesia SMP		Provinsi	Peraih Medali Perunggu oleh Peserta Didik SMPN 1 Pagu
75	Kejuaraan Pencak Silat Lereng Kelud Championship VI 2025	Yayasan Lereng Kelud bekerja sama dengan KONI Kabupaten Kediri	Provinsi	Juara 2 dan 3 Pencak Silat Seni Tunggal Full Putri oleh Peserta Didik SMPN 1 Ngadiluwih, Juara 2 dan 3 Kejuaraan Pencak Silat oleh Peserta Didik SMPN 1 Ringinrejo

76	Kejuaraan Karate Kediri Open Piala Danbrigif 16/Wira Yudha 2025	Brigif Mekanis 16/Wira Yudha, Kediri	Provinsi	Prestasi diperoleh oleh Peserta Didik SMPN 1 Ngadiluwih = Juara 1 dan 2 Karate Kumite +45KG SMP Putri, Juara 2 Karate Kata Perorangan SMP Putra, Juara 1 Karate Kumite -45KG SMP Putri, Juara 2 Karate Kumite +50KG SMP Putra, Juara 2 Karate Kumite -45KG SMP Putri, Juara 2 Karate Kumite +45KG SMP Putri, Juara 2 Karate Kumite +45KG perorangan SMP Putri, Juara 2 Karate Kata Beregu Kadet Putra, Juara 2 Karate kelas kumite +50KG SMP Putra, Juara 2 Karate kelas Kata Perorangan SMP Putri, Juara 1 Karate kelas kumite +40KG SMP Putri, Juara 1 dan 2 Karate kelas Kata Perorangan SMP Putri, Juara 2 Karate kelas kumite +40KG SMP Putri, Juara 1 Karate kelas Kumite -50KG SMP Putra, Juara 2 Karate Kata Perorangan SMP Putri
77	Kejuaraan Karate Open ABC55CUP 1 Bupati Blitar 2025	ABC Karate Dojo	Provinsi	Juara 1 Karate Kumite -45KG SMP Putri, Juara 1 Karate Kumite -45KG SMP Putri, Juara 1 Karate kelas kata perorangan SMP Putri oleh Peserta Didik SMPN 1 Ngadiluwih
78	Kejuaraan Pencak Silat Jombang Open Tournament 2025	Federasi Olahraga Karate- Do Indonesia (Forki) Jombang & Polres Jombang	Provinsi	Juara 3 Karate Kelas Kata Perorangan Putri Pemula oleh Peserta Didik SMPN 1 Ngadiluwih
79	Aquatic Short Course Competition 2025 (Madiun)	Aquatic Short Course Competition 2025 (Madiun)	Provinsi	Prestasi diperoleh oleh Peserta Didik SMPN 1 Ngadiluwih = Juara 2 Renang 25M gaya dada putri, SCM - 2010-2011, Juara 2 Renang 50M gaya dada putri, SCM - 2010-2011, Juara 2 Renang 100M gaya dada putri, SCM - 2010-2011, Juara 3 Renang 50M gaya bebas putri, SCM - 2010-2011

80	Karate Lembu Peteng Championship 2025	Pengcab Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kabupaten Tulungagung	Provinsi	· Kejuaraan Karate Kumite -47 Kg Kadet oleh Peserta Didik SMPN 1 Pagu · Juara 2 Karate Kumite +40KG SMP Putri, Juara 2 Karate Kumite +40KG SMP Putri, Juara 2 Karate kelas kumite -50KG SMP Putri, Juara 2 Karate Kata beregu Pemula - Kadet Putra, Juara 2 Karate Kata perorangan SMP, Juara 2 Karate Kumite perorangan putri SMP +35KG, Juara 1 Karate Kumite perorangan putra SMP +45KG dan Juara 1 Karate Kumite perorangan putra SMP +50KG oleh Peserta Didik SMPN 1 Ngadiluwih
81	Jawa Timur Martial Arts Championship 2025 Piala Ketua Umum KONI Pusat	Puspresnas dan KONI Pusat RI	Provinsi	Juara 2 Karate Kata Perorangan Kadet Putra oleh Peserta Didik SMPN 1 Ngadiluwih
82	Kejuaraan Karate Antar Pelajar Terbuka Piala Bergilir Kadindik Jatim & Piala Tetap Ki Hajar Dewantara	Dojo INKAI JWON-MKC	Provinsi	Juara 1 Karate Kumite Perorangan -70 Kg Kadet Putra oleh Peserta Didik SMPN 1 Ngadiluwih
83	Paggora Cup-2-Kejurprov Jatim	Manajemen Wisata Paggora Kediri bekerja sama dengan Akuatik Indonesia Kota Kediri	Provinsi	Juara 3 Gaya Punggung oleh Peserta Didik SMPN 2 Grogol
84	East Java Karate Championship 2025	FORKI Kota Malang	Provinsi	Memperoleh Juara 1 dan 2 oleh Peserta Didik SMPN 2 Grogol
85	Kejuaraan Renang Antar Pelajar digelar di Indonesia untuk memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas)	Akuatik Indonesia di tingkat daerah	Provinsi	Juara 3 oleh Peserta Didik SMPN 2 Pare
86	Kejuaraan Provinsi Finswimming Antar Pelajar se-Jawa Timur	-	Provinsi	Juara 3 50M Surface KU C Putra Diperoleh oleh Peserta Didik SMPN 2 pare
87	Kompetisi Nasional Pelajar Indonesia Mapel PPKN	Prodi PPKn & Prodi Hukum Universitas Negeri Malang	Provinsi	Juara 3 oleh Peserta Didik SMPN 2 Pare
88	Olimpiade Nasional OSI (Omni Sains Indonesia)	Omni Sains Indonesia	Provinsi	Juara 3 Olimpiade IPA oleh Peserta Didik SMPN 2 Pare

89	Atletik Lari 100m Putra	-	Provinsi	Juara 3 Lari 100 M Putra / Daksa Upper T5-47 Provinsi Jawa Timur oleh Peserta Didik SMPN 1 Gurah
90	Lomba Balaraja - PMR Jawa Timur 2025	PMR Madya SMKN 3 Buduran, Sidoarjo	Provinsi	Peringkat Utama Tingkat PMR Madya oleh Peserta Didik SMPN 1 Gurah
91	Kediri Student Athletics Competition (KSAC) Jatim	(Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) Kabupaten Kediri	Provinsi	Juara 1 oleh Peserta Didik SMPN 3 Pare
92	Karate Open Piala Danyon Badak Hitam 511	Batalyon Infanteri (Yonif) 511/Dibyatara Yudha (Badak Hitam)	Provinsi	Juara 1 oleh Peserta Didik SMPN 1 Kandat
93	Tari Tradisional Single Se-Jawa Timur 2025	-	Provinsi	Juara 3 Tari Tradisional Single Se-Jawa Timur 2025 diperoleh oleh Peserta Didik SMPN 1 Papar
94	Kejuaraan Ju Jitsu se Jawa Timur 2025	-	Provinsi	Juara 1 Perkelahian atas junior putra U 14 Kejuaraan Ju Jitsu se Jawa Timur 2025 diperoleh oleh Peserta Didik SMPN 1 Papar
95	Instansi Terbaik II Realisasi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Periode Februari s.d. Juni 2025	KANREG II BKN Surabaya	Provinsi	-
96	Instansi dengan Komitmen Terbaik dalam Penuntasan Disparitas Data Semester I Tahun 2025	KANREG II BKN Surabaya	Provinsi	-
97	Produsen dan Kontributor data terbaik kedua dalam penyusunan publikasi kabupaten kediri dalam angka 2025	BPS Kabupaten Kediri	Kabupaten	Piagam penghargaan terkait produsen dan contributor data. Tertanggal 12 februari 2025
98	Radar Kediri Award Outstanding Institution in Sustainable and Good ealthcare	Radar kediri, Jawa Pos Group	Lokal	-

99	KONI Cup Series 6 Indonesia Taekwondo Championship 2025	KONI	-	Juara 2 dalam kategori Poomsae Individual Pracadet Putri oleh Peserta Didik SMP Islam Al Fath Pare

Sumber : OPD Kabupaten Kediri

Prestasi yang diterima Masyarakat Kabupaten Kediri selama Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 23 Prestasi Masyarakat Kabupaten Kediri selama Tahun 2025

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala (Internasional/ Nasional/Provinsi)	Ket.
1	Champion Internasional Juniors Tennis Tournament		Internasional	JUARA 1 Atas Nama Ahmad Zulfan Dwi Sadewa
2	Kejuaraan Taekwondo Bela Negara Cup 2025	Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI	Nasional	Juara 2 Atas Nama Latif Adam Fathin
3	Kejuaraan Renang Nasional Di Yogyakarta 2024		Nasional	Juara 1 Kejurnas SMPN 1 Plemahan
4	Medali Perunggu KEJURPROV 2025		Nasional	JUARA 1 Atas Nama Aqlan Azizi Farha
5	KYORUGI PRESTASI U 44 KEJURNAS PIALA MENPORA 2025		Nasional	Juara 2 Atas Nama Clarita Stevany Karina Putri
6	KYORUGI PRESTASI U 73 KEJURNAS PIALA MENPORA 2025		Nasional	Juara 3 Atas Nama Farell William Bagaskara
7	KEJUARAAN NASIONAL ITD ADISUTJIPTO AERO COMPETITION 2025		Nasional	Juara 1 Atas Nama Jonatan Maulana Aziz
8	KEJURNAS 2025 KAJARI KARAWANG		Nasional	Juara 1 Atas Nama Kheisya Rizqi Awiekha Santoso
9	KEJURNAS 2025		Nasional	Juara 2 Atas Nama M.Raditya Fahri Pratama
10	KEJURNAS 2025		Nasional	Juara 2 Atas Nama Mochammad Khozinatul Asror
11	KEJURNAS DISWAY 2024		Nasional	Juara 2 Atas Nama Raditya Tristan Firdaus
12	KEJURNAS		Nasional	Juara 1 Atas Nama Rara Anindita
13	KEJUARAAN TAEKWONDO GRADE C BELA NEGARA CUP 2025		Nasional	JUARA 2 KEJURNAS SMP Atas Nama Tasya Lista Rahmadani

14	KEJUARAN PENCAK SILAT NASIONAL 2025		Nasional	Juara 1 Kejurnas Atas Nama Valentino Charist Jatmiko
15	KEJURNAS 2025		Nasional	JUARA 3 KEJURNAS Atas Nama Vani Friska Milanik
16	RELAY BIATHLE KEJURPROV MPI 2025	Pengurus Provinsi (Pengprov) MPI Jawa Timur	Provinsi	JUARA 1 Atas Nama AQILA MARVA ANDHINI
17	CELEBRAL FALSY F-11 PROVINSI JATIM 2024	National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Timur	Provinsi	JUARA 1 Atas Nama RIRIS KEYRANA PUTRI
18	DAKSA LOWER T-42 PROVINSI JATIM 2024	National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Timur	Provinsi	JUARA 1 Atas Nama ILHAM ZAM ZAMI
19	DAKSA UPPER PROVINSI JATIM 2024	National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Timur	Provinsi	JUARA 1 Atas Nama YERIKHO CHRISTIAN MAKAMEA Dan NURUL MUNAWAROH
20	FIGHTING SISTEM KEJURPOV JATIM 2024	Pengurus Provinsi Muaythai Indonesia (MI) Jatim	Provinsi	JUARA 1 Atas Nama AURACINTA PUTRI RONITA Dan JOJO IKHLAS NANDA APRIANT
21	KEJURDA JATIM JOMBANG 2024	Pengprov Tarung Derajat Jawa Timur	Provinsi	JUARA 1 Atas Nama KHAFIDZ RAFI ROBBANI
22	KEJURDA JATIM KAB KEDIRI 2024	Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Jatim	Provinsi	JUARA 1 Atas Nama GENIAR CAHYA MENTARI
23	KEJURDA JATIM SURABAYA 2024	Pengurus Provinsi (Pengprov)	Provinsi	JUARA 1 Atas Nama AURELIA ARTHA MEY CHILLIA
24	KEJURPOV MALANG 2024	Pengurus Cabang (Pengcab) FORKI/TI Jatim Atau KONI Jatim	Provinsi	JUARA 1 Atas Nama LEOFRIAN SAKTI WIRAYUDHA Dam SEFA PRATAMA QOIRUL BAHARI
25	KEJURPROV 2024	(Pengprov) Dan KONI	Provinsi	JUARA 1 Atas Nama BILAL WITHA XAVIER AHSANO RAMADHANI KUNDAYADI
26	KEJURPROV MUAYTHAI JATIM 2024	Pengprov Muaythai Indonesia (MI) Jawa Timur Bekerja Sama Dengan TNI	Provinsi	JUARA 1 Atas Nama ELSA TRI SATYA WIDODO, VALENTINO ANGGORO PUTRO, ANGELIA FRIZA , Dan DWI NUR HALIMAH

27	KEJURPROV BEACH KURASH BANYUWANGI 2024	Federasi Kurash Seluruh Indonesia (Ferkushi) Jawa Timur	Provinsi	JUARA 1 KELAS +46 PEMULA PUTRA Atas Nama ZEVANYA CHRISTMADA SANTOSO
28	KEJURPROV PIALA DANDIM 2024	Kodim 0809/Kediri	Provinsi	JUARA 1 KELAS 45 SENIOR PUTRI Atas Nama ADELIA KARMILA SARI
29	KEJURPROV IBCA MMA GOR PERTAMIN A UB MALANG 2024	Pengurus Provinsi IBCA MMA Jawa Timur (IBCA MMA Jatim).	Provinsi	JUARA 1 KELAS 51 PUTRA Atas Nama M. HAFIS RISKI ROZULA
30	KEJURPROV FORKI JAWA TIMUR TAHUN 2024	Pengurus Provinsi (Pengprov) FORKI Jawa Timur Bekerja Sama Dengan FORKI Kota Malang	Provinsi	JUARA 1 KUMITE -47KG KADET PUTRI, Atas Nama LILASANIA PRESTANTI
31	KEJURPROV SAMBO JATIM 2024	Pengurus Provinsi Persatuan Sambo Indonesia (PERSAMBI) Jawa Timur	Provinsi	JUARA 1 POR COMBAT -50KG PI Atas Nama Yayang, JUARA 1 POR SPORT -59 PI Atas Nama SHIBGHAH AYU RACHMADANI
32	KEJURPROV JATIM 2024	Pengurus Provins (Pengprov) Cabang Olahraga Bersama KONI Jatim	Provinsi	JUARA 1 SPORT -58 PA Atas Nama HAIKAL YUNUS
33	KEJURDA JATIM SURABAYA 2024	Pengurus Provinsi (Pengprov)	Provinsi	JUARA 1 TARUNG PUTRA Atas Nama MUHAMAD SYAFIQ AMRUL HUDA
34	INAJAMKOKAB 2024	Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur	Provinsi	JUARA 2 100M PUNGGUNG PUTRA Atas Nama FAIZUL AKHYAR ALGHIFFARI
35	DAKSA LOWER T-44 PROVINSI JATIM 2024	National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Jawa Timur.	Provinsi	JUARA 2 Atas Nama MUHAMMAD FAHMI ZULFADLY
36	FIGHTING SISTEM KEJURPOV JATIM 2024	Pengurus Provins Muaythai Indonesia (Pengprov MI) Jawa Timur.	Provinsi	JUARA 2 Atas Nama AURACINTA PUTRI RONITA
37	KEJURPOV MALANG 2024	FORKI (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia) Kota Malan	Provinsi	JUARA 2 Atas Nama MARSHA ALYCIA RAHMADIAR SETIANTO
38	KEJURPROV 2024		Provinsi	JUARA 2 Atas Nama HELEN ADI SAFARINGGA Dan SYARIFA KHUZIANA

39	KEJURDA LONCAT INDAH 2024	Komisi Cabang Olahraga Loncat Indah Jawa Timur	Provinsi	JUARA 2 PIJAKAN 0,5 METER PUTRA Atas Nama NOVENDRA REGAPRIANDARU
40	KEJURPROV SAMBO JATIM 2024	Pengurus Provins (Pengprov) Persamb (Persatuan Sambo Indonesia) Jawa Timur	Provinsi	JUARA 2 POR SPORT -50 KG PI Atas Nama DWI APRILIANA
41	SPORT -36 KG PUTRA		Provinsi	JUARA 2 Atas Nama JONATHAN HARDYNATA SUSANTO
42	DAKSA LOWER T-44 PROVINSI JATIM 2024	National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Timur.	Provinsi	JUARA 3 Atas Nama KHOIRUL HIDAYAT EL NURIS
43	DISABILITAS NETRA F-11 PROVINS I JATIM 2024	National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Timur.	Provinsi	JUARA 3 Atas Nama ZAHKI BIMA PUTRA
44	EMBU BERPASANGAN CAMPURAN KYU II PADA KEJUARAAN POPDA 2024	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	JUARA 3 Atas Nama REISYA FAIRIZTYA JOCELYN ROY PUTRI
45	JUNIOR PUTRA KEJURPROV IBC A MMA PIALA DANDIM MALANG 2024	Kodim 0833/Kota Malang	Provinsi	JUARA 3 Atas Nama DAENG AKBAR PRAMUNDIKA BRAMASTA NABIM
46	KEJURPROV FORKI 2024	Pengprov FORKI Jawa Timur Bersama Pemerintah Kota Malang	Provinsi	JUARA 3 Atas Nama HARLEY PRASETYO PUTRO
47	KUMITE KEJURPROV FORKI JATIM 2024	FORKI (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia) Pengprov Jawa Timur Bekerjasama Dengan FORKI Kota Malang	Provinsi	JUARA 3 Atas Nama KEVIN VEDA CAHYA PREVIA
48	O2SN TINGKAT PROVINSI 2024	Kemendikbudristek	Provinsi	JUARA 3 LARI 400M Atas Nama MAY RATNA WATI
49	Outdoor Hand Launched Glider (OHLG), U-16 PUTRI	Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)	Provinsi	JUARA 3 Atas Nama KHANSA FAEYZA SALSABILA
50	Outdoor Hand Launched Glider (OHLG), U-19 PUTRA	Federasi Aero Sport Indonesia (FASI)	Provinsi	JUARA 3 Atas Nama HARUN AL ROSYID
51	POPDA XIV 2024	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	JUARA 3 Atas Nama GERARD JOSEPH KOLONDAM

52	Kejurprov Koarmada 2 Surabaya 2025	Koarmada 2 Surabaya	Provinsi	JUARA 3 KEJURPROV Atas Nama ABBID SULTHAN HAFIZUDDIN FITRAGUSTA
53	FIGHTING SYSTEM KEJURPROV JUJITSU JATIM 2024	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	JUARA 3 KEJURPROV Atas Nama AKHSAN MUKHLIS
54	KEJURPROV FORDA II		Provinsi	SD MUHAMADIYAH 1 NGADILUWIH
55	KEJURPROV 2025	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama ALFARO VINCEN BUDIONO
56	Medali Perunggu Kejurprov 2025	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	Atas Nama FACHRI ABRAR FATURROHMAN
57	BEST OF THE BEST JKC CUP KUMITE +45 PEMULA PUTRI		Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama ALIKA TRI WULANDARI
58	KUMITE -30 PA INKANAS OPEN SEJATIM 2024		Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama AMMIRIL MU'MININ
59	KEJURPROV	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	JUARA 3 KEJURPROV Atas Nama ARDIANSAH PUTRA NUR FIRDAUS
60	KEJURPROV JATIM 2025	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama ARFILA NASOKHUZ ZAKIYA
61	Beregu Divisi Nasional U13 Putri, Kejurprov Tahun 2025.		Provinsi	JUARA 3 KEJURPROV Atas Nama AYLA FADIYAH ARIYANTO
62	KEJURPROV 2025 JUARA 2		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama AYU RATIH EDININGTYAS
63	Kejuaraan Provinsi UB Malang		Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama Bastomi Rahman
64	Kejurda Jatim Piala Walikota Surabaya Ke VI Kota Surabaya 2024		Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama Brillian Joysta Valentino
65	KEJURPROV		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama CARLYTO VICKY FERDIANSYAH
66	KEJURPROV 2025		Provinsi	JUARA 3 KEJURPROV Atas Nama CESTA AYASI FRISTAMA
67	KEJURPROV SAMBO JATIM 2024		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama CHIN CHIN NURITA
68	KEJURPROV BEACH KURASH 2024		Provinsi	JUARA 3 KEJURPROV
69	KEJUARAAN PROVINSI SHORINJI KEMPO JAWA TIMUR 2025		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama DAFFA FAWAS UBAIDAH AL-KHASAN

70	KEJURDA TRIATHLON		Provinsi	JUARA 3 KEJURPROV Atas Nama DEMA ABITHALITA
71	Kejuaraan Provinsi SLC Jawa Timur 2024.		Provinsi	JUARA 3 KEJURPROV Atas Nama DIMAS ADIT TIYA DWI SAPUTRA
72	Beregu Divisi Nasional U13 Putri, Kejurprov Tahun 2025.		Provinsi	JUARA 3 KEJURPROV Atas Nama Dzakira Puri Naafisah
73	KEJURPROV JUJITSU JATIM 2024		Provinsi	JUARA 3 KEJURPROV Atas Nama ELIZA PUTRI
74	KEJURPROV 2025		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama FACHRI ABRAR FATURROHMAN
75	LBB KEJURPROV PDBI TAHUN 2024		Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV SEKOLAH Atas Nama FEBRIAN AGASTYA
76	Tri Star KEJURPROV Kota Surabaya 2024		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama Friska Meilanirahma Triyana
77	Kejuaraan Provinsi Piala Walikota Surabaya		Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama ISABELT FAUZA AURELLICA GABY MARETTO
78	LBB KEJURPROV PDBI TAHUN 2025		Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV SEKOLAH Atas Nama LUNA AURORA
79	FIGHTING SYSTEM KEJURPROV JATIM 2024		Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama M. DEKAVIANT PRASETHYA
80	Tri Star KEJURPROV Kota Surabaya 2024		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama MEI SHIZA UMAIZA
81	U-15 PUTRA SE-JAWA, TIMUR JUAR A 1 U-15 SE JAWA		Provinsi	JUARA 3 KEJURPROV Atas Nama MELVINO PUTRA MAHARDIKA
82	KEJURPROV 2024		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama MOCHAMMAD MAHESWARA WIDYATNA LAKSONO WIBOWO
83	PIALA DIKNAS JAWA TIMUR		Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama MOHAMMAD ILHAM ISLAMUDIN
84	Kejuaraan Provinsi IBCA MMA UB Malang		Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama Mohamad Vano Bagas Putra
85	Kejurda Jatim Piala Wali Kota Surabaya 2024	Pemerintah Kota Surabaya	Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama Mohammad Aksa Regan Ali Sarif

86	Piala Walikota Surabaya 2024	Pemerintah Kota Surabaya	Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama MOHAMMAD NUR KAREBET
87	Kejuaraan Provinsi IBCA MMA UB Malang	Universitas Brawijaya	Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama Muhammad Alifaturizqi SNW
88	KEJURPROV		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama MUHAMMAD ALVIN SETIA PRATAMA
89	BUPATI PONOROGO 2025 JUARA 1 (PROVINSI)	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama Muhammad Azmi Amrullah
90	LEMBU PETENG CHAMPIONSHIP KUMITE +30 USIA DINI PUTRA		Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama MUHAMMAD AZZAM KRISHNA TAMBAYONG
91	SHOOTING MAN POMPROV JAWA TIMUR 2025		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV UNIVERSITAS NEGERI MALANG
92	KEJURPROV 2025		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV SMPN 2 PARE
93	PORWAPROV 1 JATIM		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama NAURA YUMNAA DARMAWAN
94	KEJURPROV SAMBO JATIM 2024		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama NEHA RYEND WIBOWO
95	KEJURPROV SAMBO JATIM 2024		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama PUTRI RUSDYA
96	KEJURPROV,	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV SMP N 2 WATES
97	PERWAPROV JATIM 2024		Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama RISMA NURAINI WAHYUNINGTYAS
98	KEJURPROV 2025	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama RIZKY ADHI SAPUTRA
99	BUPATI PONOROGO 2025 JUARA 1 (PROVINSI)	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama RONALD ADI CANDRA WINATA
100	Beregu Divisi Nasional U13 Putri, Kejurprov Tahun 2025.		Provinsi	JUARA 3 KEJURPROV Atas Nama Shaquilla Kanaya Zahra
101	KEJURPROV ,BANYUWANGI 2025		Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama STEVEN GERRARD KIANTARA
102	KEJURPROV 2025	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	JUARA 1 KEJURPROV Atas Nama DIAH LUTFI ALUNA SAGITA

103	U-10 KEJURPROV 2025	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	JUARA 3 KEJURPROV Atas Nama WAHYU ABBI NUR FEBRIYANTO
104	KEJURPROV	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Provinsi	JUARA 2 KEJURPROV Atas Nama ZAKIA SHRIYA AWAHITA

Sumber : OPD Kabupaten Kediri

3.7. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kediri selama Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 24 Inovasi Pemerintah Kabupaten Kediri selama Tahun 2025

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintahan Pemerintahan	Kematangan	Tahapan	Tanggal Penetapan Penerapan	OPD
1	AKSIPENTING	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Kesehatan	82.00	Penerapan	5/1/2024	DP2KBP3A
2	ASIAP (Asisten Antar Pasien)	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan	67.00	Penerapan	4/1/2022	RSUD SLG
3	Penerapan TTE Layanan Cuti pada Aplikasi E-Besti	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	Kepegawaian	80.00	Penerapan	9/17/2024	BKPSDM
4	Si-Dori (Sistem Informasi Data Ormas Kabupaten Kediri)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	Penerapan	1/1/2024	Bakesbangpol
5	SAHAJA PRIMA	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.00	Penerapan	4/18/2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri
6	SI PANDAI (Sistem Panduan Penegakan Perda Kabupaten Kediri)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	80.00	Penerapan	9/20/2024	Satpol PP
7	Sistem Pelayanan	Inovasi Pelayanan	Digital	Kesehatan	84.00	Penerapan	1/2/2023	Dinas Kesehatan

	Puskesmas Kabupaten Kediri (TEMAN MAS ABDI) versi 2.0	Publik						
8	Emonev	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	Perencanaan	85.00	Penerapan	10/24/2024	Bappeda
9	Sinkronisasi Data Kesenian	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kebudayaan	31.00	Penerapan	9/11/2023	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
10	AKROBAT (Antar ke Rumah Obat Anda Tanpa Antri)	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan	59.00	Penerapan	1/10/2023	RSUD SLG
11	KIAN PRIMA (Kinerja Pelayanan Prima)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	92.00	Penerapan	8/24/2023	Bagian Organisasi
12	Aplikasi E-SPPT	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	74.00	Penerapan	1/28/2022	Badan Pendapatan Daerah
13	Satu Data Kabupaten Kediri	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Komunikasi dan Informatika	96.00	Penerapan	2/8/2023	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	SI MOLLI CEKAT (Aksi Mobil Keliling Cek Kualitas Air Tawar)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Kelautan dan Perikanan	84.00	Penerapan	1/2/2023	Dinas Perikanan
15	SIMTARU (Sistem Informasi Tata Ruang)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.00	Penerapan	2/5/2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Pembentukan Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Desa Bersama Kabupaten Kediri Periode Tahun 2023 -	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	76.00	Penerapan	7/18/2023	DPMPD

	2026							
17	E-Kerjo (Aplikasi Lowongan Kerja)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Tenaga Kerja	82.00	Penerapan	12/19/2023	Dinas Tenaga Kerja
18	Panjalu E-Library	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Perpustakaan	81.00	Penerapan	1/18/2023	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sumber : Brida Kabupaten Kediri

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Pusat

4.1.1. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri

Penugasan dari Kementerian/Lembaga :

1. Kementerian Komunikasi dan Digital
2. Badan Siber dan Sandi Negara
3. Badan Pusat Statistik

A. Dasar Penugasan

1. Badan Siber dan Sandi Negara :
   a. Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang Mengatur pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota
   b. Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2024 tentang Audit Keamanan SPBE
2. Badan Pusat Statistik :
   Peraturan Badan Pusat Statistik (Perka BPS) No 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
3. Kementerian Komunikasi dan Digital :
   Permenkominfo No 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan urusan konkuren Komunikasi dan Informatika bagi Pemda, mencakup informasi publik, aplikasi informatika, dan pembinaan pengawasan

B. Program Dan Kegiatan

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   Output : Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rincian Kegiatan :

- Relasi Media
- Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- Pelayanan Informasi Publik
- Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- Penyusunan Konten

2. Pegelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan : Pengelolaan *E-government* di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Output : Meningkatnya Pengelolaan *E-government* di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rincian Kegiatan :

- Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaran SPBE
- Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas

3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Output : Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Rincian Kegiatan :

- Statistik Sektoral dalam Sistem Statistik Nasional
- Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral sesuai Standar

4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Output : Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Rincian Kegiatan : Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

C. Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 25 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4.590.808.800	4.362.734.719
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.422.600.000	5.331.504.243
3	Urusan Pemerintah Bidang Statistik	755.656.600	749.434.500
4	Urusan Pemerintah Bidang Persandian	623.394.000	616.611.000
	Total Anggaran	11.392.459.400	11.060.284.462
	Persentase Realisasi Anggaran		97%

Sumber data : Diskominfo Kabupaten Kediri

D. Target Dan Realisasi Kegiatan

Gambaran target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri sebagai berikut :

Tabel 26 Target dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Persentase Target	Persentase Realisasi
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	95%
2	Pengelolaan Aplikasi Informatika	100%	98%
3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	99%
4	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	99%

Sumber data : Diskominfo Kabupaten Kediri

E. Permasalahan Dan Kendala

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri dalam pelaksaan kegiatan diantaranya :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   - Permasalahan :
     a. Literasi Digital Masyarakat : Masih rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam memfilter informasi, sehingga penyebaran hoaks sering kali lebih cepat daripada klarifikasi resmi pemerintah.
     b. Egosentrisme Sektoral : Masih adanya anggapan bahwa pengelolaan komunikasi hanya tugas Dinas Kominfo, sehingga OPD lain kurang proaktif dalam membagikan keberhasilan program mereka.
   - Kendala :
     a. Budaya Komunal : Kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung langsung membagikan informasi (*share*) di grup-grup keluarga/pesan instan tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu karena rasa percaya pada pengirim.
     b. Budaya Organisasi yang Tertutup : Masih adanya pola pikir birokrasi lama yang menganggap bahwa informasi adalah hal yang "sensitif" untuk dibuka, bukan sebagai bagian dari akuntabilitas publik.
2. Pengelolaan Aplikasi Informatika

- Permasalahan :
  a. Pemeliharaan Server : Beban server yang semakin berat seiring bertambahnya aplikasi *e-gov* yang seringkali tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas *storage* atau *bandwidth* yang memadai.
  b. Stabilitas Jaringan : Gangguan koneksi internet di titik-titik akses publik atau kantor dinas yang berada di lokasi geografis sulit.
- Kendala :
  a. Sering kali pengadaan anggaran lebih difokuskan pada pembuatan aplikasi (perangkat lunak) dibandingkan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur (perangkat keras).
  b. Biaya penarikan kabel fiber optik ke lokasi pegunungan atau kepulauan sangat mahal, sementara koneksi satelit sering kali memiliki latensi tinggi dan rentan terhadap cuaca.

3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Permasalahan :
  a. Validasi e-Walidata : Kendala teknis pada saat sinkronisasi data dari level daerah ke sistem pusat (seperti modul e-Walidata SIPD atau portal Satu Data Indonesia) yang sering kali mengalami *delay* di akhir tahun anggaran.
  b. Keterlambatan Konfirmasi Produsen Data : Masih adanya satu atau dua OPD (Produsen Data) yang terlambat mengirimkan elemen data pendukung atau hasil survei sektoral hingga batas waktu evaluasi (EPSS).
- Kendala :
  a. Dari permasalahan Validasi e-Walidata : Ketergantungan pada API Pusat : Daerah seringkali bersifat pasif. Jika API (*Application Programming Interface*) di tingkat pusat sedang dalam pemeliharaan atau tidak stabil, daerah tidak memiliki jalur alternatif untuk menyetor data.
  b. Dari permasalahan Keterlambatan Konfirmasi Produsen Data : Dampak Kumulatif pada EPSS : Penilaian EPSS bersifat holistik. Keterlambatan elemen data pendukung dari satu OPD dapat menyebabkan status "tidak lengkap" pada domain pemanfaatan data, yang secara otomatis menurunkan skor indeks kematangan statistik daerah.

4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
   - Permasalahan : Integrasi Sistem Pengamanan → Belum semua aplikasi milik pemerintah daerah terintegrasi dengan sistem *Single Sign-On* (SSO) atau protokol keamanan yang standar (misal: HTTPS/SSL yang belum terpasang di subdomain tertentu)
   - Kendala : Banyaknya aplikasi *legacy* (lama) yang dikembangkan dengan teknologi berbeda, sehingga sulit untuk disatukan dalam satu pintu (SSO)

F. Saran

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- Budaya Komunal (Melawan Hoaks dengan Kedekatan)

  Masyarakat kita lebih percaya pada "siapa" yang mengirim daripada "apa" yang dikirim. Strategi yang harus diambil adalah personalitas informasi.

  Saran:

  a. Pemberdayaan *Key Opinion Leaders* (KOL) Lokal : Jangan hanya menggunakan akun resmi pemerintah. Libatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, atau ketua komunitas yang memiliki kepercayaan tinggi di masyarakat untuk menyebarkan informasi benar.

  b. Konten Ramah "Grup Keluarga" : Buatlah konten verifikasi (klarifikasi) dalam format yang disukai masyarakat (seperti gambar dengan teks besar/infografis sederhana atau video pendek) agar mudah diteruskan (*forward*) kembali ke grup-grup pesan instan.

  c. Literasi Digital Berbasis Komunitas : Mengadakan sosialisasi "Saring sebelum Sharing" melalui forum warga atau PKK, bukan hanya melalui seminar formal.

- Indikator Kinerja yang Terfragmentasi (Integritas Komunikasi ke IKU)

  Jika komunikasi tidak ada dalam IKU, maka ia tidak akan dikerjakan. Komunikasi publik harus dipandang sebagai tanggung jawab kolektif. Saran :

  a. Sistem *Reward & Punishment* : Berikan penghargaan kepada OPD yang paling aktif memberikan data transparan dan melakukan edukasi publik lewat kanal komunikasinya.

  b. Mandat Agen Kehumasan : Mewajibkan setiap OPD memiliki satu

"Penanggung Jawab Informasi" yang terhubung langsung dengan Diskominfo untuk memastikan alur informasi searah dan cepat.

- Budaya Organisasi Tertutup (Transisi Menuju *Open Government*)
  Mengubah pola pikir birokrasi lama membutuhkan pendekatan kepemimpinan dan pembuktian manfaat. Saran :
  a. Komitmen *Top-Down* : Kepala Daerah harus memberikan instruksi tegas bahwa seluruh data yang tidak dikecualikan oleh UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) wajib dapat diakses publik.
  b. Standardisasi Klasifikasi Informasi : Buat pedoman jelas mengenai mana informasi yang bersifat "Rahasia Negara", "Terbatas", dan "Terbuka". Hal ini bertujuan agar aparatur tidak merasa takut salah saat membuka data.
  c. Publikasi Keberhasilan : Tunjukkan kepada birokrat bahwa keterbukaan informasi justru meningkatkan citra positif mereka di mata masyarakat dan mengurangi beban pengaduan karena masyarakat sudah terinformasi sejak awal.

2. Pengelolaan Aplikasi Informatika

- Sering kali pengadaan anggaran lebih difokuskan pada pembuatan aplikasi (perangkat lunak) dibandingkan biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur (perangkat keras). Saran :
  a. Kebijakan Persentase Tetap : Tetapkan aturan bahwa minimal 15-20% dari total anggaran tahunan TI harus dialokasikan khusus untuk pemeliharaan infrastruktur dan pembaruan perangkat keras (*refresh cycle*).
  b. Virtualisasi dan *Cloud* : Jika biaya pemeliharaan fisik terlalu tinggi, pertimbangkan migrasi ke *cloud* atau penggunaan infrastruktur berbasis langganan. Ini mengubah biaya perangkat keras yang besar di awal menjadi biaya operasional yang lebih terprediksi.
- Biaya penarikan kabel fiber optik ke lokasi pegunungan atau kepulauan sangat mahal, sementara koneksi satelit sering kali memiliki latensi tinggi dan rentan terhadap cuaca. Saran :
  a. Pemanfaatan LEO (*Low Earth Orbit*) *Satellite* : Untuk mengatasi

masalah latensi tinggi pada satelit tradisional (GEO), gunakan penyedia layanan satelit LEO (seperti Starlink). Satelit ini mengorbit lebih dekat ke bumi, sehingga latensinya jauh lebih rendah dan lebih tahan terhadap gangguan cuaca ringan dibandingkan satelit konvensional.

b. Pemanfaatan Infrastruktur Eksisting : Gunakan teknik *fiber on power lines* (menumpangkan kabel FO pada tiang listrik PLN) untuk mengurangi biaya penggalian tanah yang mahal di area kepulauan atau pegunungan.

3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Ketergantungan pada API Pusat : Daerah seringkali bersifat pasif. Jika API (*Application Programming Interface*) di tingkat pusat sedang dalam pemeliharaan atau tidak stabil, daerah tidak memiliki jalur alternatif untuk menyetor data. Saran :
  a. *Maintenance Window* : Jadwal pemeliharaan harus diinformasikan jauh-jauh hari melalui sistem notifikasi otomatis di dalam *dashboard* aplikasi daerah, sehingga daerah bisa mengatur jadwal penginputan data mereka.
- Dampak Kumulatif pada EPSS : Penilaian EPSS bersifat holistik. Keterlambatan elemen data pendukung dari satu OPD dapat menyebabkan status "tidak lengkap" pada domain pemanfaatan data, yang secara otomatis menurunkan skor indeks kematangan statistik daerah. Saran :
  a. Notifikasi Otomatis : Sistem mengirimkan peringatan otomatis via WhatsApp atau Email kepada Admin OPD dan Kepala Dinas terkait 7 hari sebelum batas waktu penginputan berakhir.
  b. *Reward & Punishment* : Berikan penghargaan kepada "OPD Sadar Statistik" terbaik dan berikan asistensi khusus (pendampingan intensif) bagi OPD yang terus-menerus menjadi penyebab keterlambatan data.

4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

- Banyaknya aplikasi *legacy* (lama) yang dikembangkan dengan teknologi berbeda, sehingga sulit untuk disatukan dalam satu pintu (SSO). Saran :

a. Migrasi Fitur : Pindahkan fungsi-fungsi penting dari aplikasi lama ke aplikasi baru satu per satu.

G. Tindak Lanjut

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
   a. **Eksekusi Pemberdayaan KOL (*Key Opinion Leaders*) Lokal**
   Fokus pada membangun Hubungan (*Relationship*), bukan sekadar instruksi. Tindak lanjut :
   - **Pembentukan Circle Informasi Terpercaya :** Buatlah Forum Komunikasi Digital di tingkat Kecamatan/Kelurahan yang mengundang Ketua RT/RW, tokoh agama, dan penggerak pemuda ke dalam satu grup WhatsApp/Telegram khusus.
   - **Akses Informasi Eksklusif :** Berikan mereka informasi atau klarifikasi lebih cepat (*first-hand information*) sebelum dirilis ke media sosial umum. Hal ini membuat mereka merasa dihargai dan memiliki otoritas untuk membantu warga.
   - **Kolaborasi Konten :** Sesekali buatlah konten (video/foto) di mana tokoh masyarakat tersebut yang berbicara atau memberikan testimoni, bukan pejabat pemerintah. Masyarakat lebih mendengar figur yang mereka temui sehari-hari.

   b. **Standarisasi Konten "Ramah Grup Keluarga"** Fokus pada Visualitas dan Kemudahan Berbagi. Tindak lanjut :
   - **Desain "Anti-Ribet" :** Gunakan format *Square* (1:1) atau *Vertical* (9:16) dengan ciri khas :
     1. Teks berukuran besar dan kontras (mudah dibaca lansia)
     2. Penggunaan warna "Lampu Lalu Lintas" : Merah (Hoaks), Kuning (Disinformasi/Cek Fakta), Hijau (Fakta/Info Resmi).
     3. Minimalisir kata-kata teknis atau birokrasi.
   - ***Copywriting* Siap Sebar :** Setiap infografis yang dikirimkan ke grup KOL harus disertai dengan *caption* pendek yang sudah jadi. Contoh:
   "Izin menginfokan bapak ibu, terkait berita bantuan [Nama Program] yang beredar di grup sebelah, setelah dicek ternyata kurang tepat

(Hoaks). Berikut info resminya, mohon bantu teruskan agar warga kita tidak tertipu. Suwun."

- **Katalog Konten :** Buat satu link (misal: *Bit.ly* atau *Drive*) yang berisi kumpulan gambar klarifikasi yang sudah dikategorikan berdasarkan topik (Kesehatan, Bansos, Keamanan).

c. **Integrasi Literasi Digital pada Kegiatan Rutin**. Fokus pada Metode Sisipan (*Embedding*), bukan acara khusus. Tindak lanjut :

- **Metode "5 Menit Literasi" :** Titipkan agenda pada setiap rapat rutin PKK, Karang Taruna, atau Arisan. Mintalah waktu 5 menit di awal atau akhir acara khusus untuk membahas satu berita hoaks yang sedang tren minggu itu.
- **Praktik Langsung (*Hand-held Coaching*):** Jangan hanya ceramah. Minta peserta membuka HP, tunjukkan cara menyimpan nomor Chatbot Cek Fakta (seperti milik Kominfo atau Mafindo), dan ajarkan cara mengirimkan pesan ke sana.
- **Lomba Berbasis Lingkungan :** Adakan kompetisi kecil antar RT, misalnya "RT Paling Aktif Cek Fakta" atau "RT dengan Konten Kreatif Edukasi Warga". Hadiahnya bisa berupa sarana publik sederhana (misal : tong sampah atau cat gapura).

2. Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Tindak Lanjut Anggaran & Infrastruktur (Persentase & Cloud)

Tujuan utamanya adalah memastikan keberlangsungan sistem agar tidak hanya "membangun lalu ditinggalkan".

- Penyusunan Peraturan Kepala Daerah/Instansi: Segera buat dasar hukum (Perkada/Instruksi) yang mewajibkan alokasi anggaran pemeliharaan minimal 15-20%. Tanpa regulasi, anggaran operasional akan selalu kalah oleh proyek aplikasi baru.
- Audit Siklus Hidup Aset (*Asset Lifecycle*): Buat inventarisasi perangkat keras. Tentukan kapan server atau perangkat jaringan harus diganti (*refresh cycle*). Langkah ini menjadi dasar argumen saat pengajuan anggaran ke bagian keuangan.

- Analisis Migrasi "*Cloud First*": Sebelum membeli server fisik baru, lakukan kajian perbandingan biaya (*Cost-Benefit Analysis*). Gunakan layanan *Government Cloud* (seperti PDN) untuk mengurangi beban pemeliharaan fisik di tingkat lokal.

b. Tindak Lanjut Konektivitas Area Sulit (*LEO & Fiber on Power Lines*)

Fokusnya adalah mencari efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas kecepatan internet. Tindak lanjut :

- Uji Coba (*Pilot Project*) *LEO Satellite*: Lakukan instalasi satu unit satelit LEO (seperti Starlink) di lokasi paling terpencil sebagai percontohan. Ukur latensi dan ketahanannya terhadap cuaca dibandingkan satelit lama (VSAT) untuk membuktikan efektivitasnya secara data.
- Penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan PLN/Penyedia Listrik: Lakukan koordinasi dengan PLN Icon Plus untuk skema *Fiber on Power Lines*.
- Gunakan tiang listrik yang sudah ada untuk menggantung kabel FO (*Aerial Fiber*), sehingga mengeliminasi biaya penggalian tanah yang bisa memakan 40–60% dari total anggaran proyek kabel.
- Peta Okupansi Jalur : Petakan jalur tiang listrik yang sudah masuk ke pelosok pegunungan atau kepulauan untuk menentukan rute penarikan kabel tercepat menuju fasilitas publik (seperti puskesmas atau sekolah).

3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Tindak Lanjut Ketergantungan API Pusat (*Maintenance Window*)

Tujuannya adalah mengubah daerah dari posisi "pasif" menjadi "terinformasi" dan "siap". Tindak lanjut :

- Pembuatan Kalender Maintenance Terpusat : Pusat harus menyediakan *endpoint* API khusus atau halaman status (seperti *status page*) yang memuat jadwal pemeliharaan rutin.
- Integrasi Notifikasi ke *Dashboard* Daerah: Tim pengembang di daerah menarik data dari kalender pusat tersebut dan menampilkannya sebagai banner pengumuman di aplikasi lokal.
- Contoh Pesan: "Perhatian: API Pusat akan mengalami pemeliharaan

pada Sabtu, 24 Jan pukul 22:00 WIB. Harap selesaikan input data sebelum waktu tersebut."

- Prosedur Standar Operasional (SOP) Cadangan: Menetapkan aturan bahwa jika API mati di luar jadwal (insidental) lebih dari 24 jam, daerah diizinkan menyiapkan data dalam format offline (CSV/Excel) yang akan diunggah otomatis segera setelah sistem kembali normal.

b. Tindak Lanjut Dampak Kumulatif pada EPSS. Fokusnya adalah menjaga agar kinerja kolektif daerah tidak rusak oleh satu titik lemah (OPD yang lambat).

1) Teknis : Sistem Peringatan Dini (Notifikasi Otomatis)
   - Integrasi API WhatsApp/ Email : Menghubungkan database profil admin OPD dengan layanan pengiriman pesan massal.
   - Skema Penjadwalan Pesan (*Scheduler*) :
     - H-14: Email pengingat pertama ke Admin OPD
     - H-7: WhatsApp otomatis ke Admin OPD dan Kepala Bidang.
     - H-3: WhatsApp "Lampu Merah" yang ditembuskan kepada Kepala Dinas terkait jika data masih kosong.
   - Dashboard Pantauan Publik : Menampilkan grafik progres pengisian data per OPD di grup koordinasi atau layar lobi kantor agar muncul rasa tanggung jawab sosial.
2) Manajerial : Mekanisme *Reward & Punishment*
   - Penyusunan Rapor Statistik OPD : Walidata (Diskominfo) menerbitkan nilai rapor kepatuhan data setiap semester.
   - Pemberian Penghargaan (*Reward*): Memberikan piagam atau insentif (missal : publikasi program OPD tersebut diprioritaskan di media resmi daerah) bagiD dengan nilai kematangan statistik tertinggi.
   - Pendampingan Klinis (*Punishment/Assistance*) :
   - OPD yang merah (terlambat) tidak hanya ditegur, tetapi diwajibkan mengikuti "Klinis Data" (pendampingan intensif oleh BPS atau Diskominfo) untuk mengidentifikasi hambatan teknis mereka.

- Jika keterlambatan berulang tanpa alasan logis, laporkan sebagai bahan evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau kinerja organisasi kepada Sekda.

4. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

   Tindak lanjut dari strategi Migrasi Fitur (*Strangler Fig Pattern*) ini bertujuan untuk mengganti sistem lama secara bertahap tanpa harus mematikan operasional secara total. Dengan memecah aplikasi besar menjadi fungsi-fungsi kecil, risiko kegagalan sistem dapat diminimalisir. Berikut adalah langkah-langkah teknis dan manajerial untuk mengimplementasikannya :

   a. Inventarisasi dan Prioritas Fitur

      Jangan memindahkan semua fitur sekaligus. Lakukan pemetaan berdasarkan urgensi dan kemudahan.

      - Identifikasi Modul: Pecah aplikasi legacy menjadi modul-modul mandiri (misal: Modul Login, Modul Penginputan, Modul Pelaporan).
      - Analisis Dampak dan Usaha : Gunakan matriks prioritas. Pilih fitur yang memiliki dampak tinggi bagi pengguna tetapi kerumitan rendah untuk dipindahkan sebagai proyek percontohan (*pilot project*).
      - Dokumentasi Alur Bisnis : Pastikan alur bisnis pada fitur lama didokumentasikan dengan jelas agar fungsi yang dibangun di sistem baru tetap konsisten dan tidak ada data yang hilang.

   b. Implementasi Jalur Paralel (Interoperabilitas)

      Selama masa migrasi, aplikasi lama dan aplikasi baru harus bisa "hidup berdampingan".

      - Integrasi Database : Pastikan aplikasi baru menggunakan basis data yang sama (atau tersinkronisasi) dengan aplikasi lama. Dengan begitu, user yang menginput data di aplikasi baru dapat melihat hasilnya di aplikasi lama, dan sebaliknya.
      - *Fasade (Proxy) Layer*: Pasang lapisan perantara yang akan mengarahkan trafik pengguna.
      - Jika user mengakses fitur yang sudah dimigrasi, sistem secara otomatis mengarahkan ke Aplikasi Baru.

- Jika *user* mengakses fitur yang belum dimigrasi, tetap arahkan ke Aplikasi Lama.
- *User* tidak akan merasa berpindah aplikasi karena antarmuka dibuat serupa atau terintegrasi.

c. Pengujian dan Validasi Data

Lakukan pengujian ketat untuk memastikan fitur baru bekerja lebih baik dari yang lama.

- ***Parallel Running*** **:** Jalankan kedua fitur (lama dan baru) secara bersamaan untuk beberapa waktu. Bandingkan output datanya. Jika hasilnya identik, maka fitur baru siap mengambil alih sepenuhnya.
- ***User Acceptance Test*** **(UAT) :** Libatkan pengguna akhir (staf OPD) untuk mencoba fitur baru dan pastikan pengalaman pengguna (*User Experience*) lebih mudah dibandingkan sistem *legacy*

d. **Penghentian Bertahap (*Sunsetting*)**

Setelah fitur baru terbukti stabil, tutup akses ke fitur lama secara permanen.

- **Mode *Read-Only* :** Sebelum dihapus sepenuhnya, ubah fitur di aplikasi lama menjadi Read-Only (hanya bisa lihat, tidak bisa input) agar pengguna terbiasa beralih ke aplikasi baru.
- **Pembersihan Kode :** Hapus kode lama yang sudah tidak digunakan di server untuk menghemat memori dan meningkatkan keamanan.

4.2. Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Provinsi

4.2.1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kediri

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/113/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

3. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.1/71/112.3/2025 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan bersifat Khusus Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
4. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.5/78/112.3/2025 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan bersifat Khusus Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
5. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 400.10.5/79/112.3/2025 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan bersifat Khusus Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Jumlah Dana

Jumlah Dana keseluruhan Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Desa Tahun 2025 sebesar Rp. 1.679.125.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Jumlah Dana keseluruhan Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 27 Target dan Realisasi Pelaksanaan Jumlah Dana keseluruhan Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Desa	Program	Jumlah Dana (Rp)
1	-	BOP	84.000.000

		Kabupaten	
2	Desa Babadan Kecamatan Ngancar	BUM Desa	100.000.000
3	Desa Jagul Kecamatan Ngancar	BUM Desa	100.000.000
4	Desa Sidorejo Kecamatan Pare	BUM Desa	100.000.000
5	Desa Sebet Kecamatan Plemahan	BUM Desa	100.000.000
6	Desa Blimbing Kecamatan Tarokan	BUM Desa	100.000.000
7	Desa Tempurejo Kecamatan Wates	BUM Desa	100.000.000
8	Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih	Desa Berdaya	100.000.000
9	Desa Papar Kecamatan Papar	Desa Berdaya	100.000.000
10	Desa Sempu Kecamatan Ngancar	Desa Berdaya	100.000.000
11	Desa Sumberagung Kecamatan Wates	Jatim Puspa	162.125.000
12	Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo	Jatim Puspa	141.125.000
13	Desa Kandat Kecamatan Kandat	Jatim Puspa	133.250.000
14	Desa Kunjang Kecamatan Ngancar	Jatim Puspa	130.625.000
15	Desa Ngreco Kecamatan Kandat	Jatim Puspa	128.000.000
Jumlah keseluruhan			3.679.125.00

Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa)

Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur yang difokuskan untuk peningkatan pendapatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Prioritas Program Jatim Puspa diarahkan untuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh KPM di sektor usaha mikro antara lain agribisnis, perdagangan, jasa, industri rumah tangga.

Sasaran program Jatim Puspa adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang berusia maksimal 60 tahun.

a. Maksud dan Tujuan

Program Jatim Puspa dimaksudkan untuk mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui kegiatan pemberdayaan bagi KPM dengan memberikan fasilitasi bantuan dan pemberdayaan, serta ketahanan pangan dan ekonomi berjejaring. Program Jatim Puspa memiliki tujuan sebagai berikut :

- Mendorong motivasi berusaha *(need for achievement)* dan kemampuan *(life skill)* Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- Memberikan kapasitas usaha KPM melalui optmalisasi peran Pendamping Desa untuk meningkatkan ketahanan pangan.
- Membantu meningkatkan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- Mengupayakan konektifitas usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan pelaku usaha ekonomi desa untuk membangun ekonomi berjejaring.

b. Sasaran

- Sasaran program Jatim Puspa adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Desil 1 dan 2 berdasarkan Data

Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang berusia maksimal 60 tahun.

- Apabila kuota data sasaran KPM berdasarkan graduasi PKH dan Regsosek tidak terpenuhi, dapat diisi data KPM yang ditetapkan melalui musyawarah desa maksimal 10%.
- KPM yang mempunyai usaha atau akan memulai usaha.

c. Lokasi

Di Kabupaten Kediri lokasi Program Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebanyak 5 (lima) Desa dengan jumlah keseluruhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 241 KPM, dengan rincian sebagai berikut:

- Desa Sumberagung Kec. Wates : 57 KPM
- Desa Kunjang Kec. Ngancar : 45 KPM
- Desa Ngreco Kec. Kandat : 44 KPM
- Desa Dawung Kec. Ringinrejo : 49 KPM
- Desa Kandat Kec. Kandat : 46 KPM

d. Jumlah Dana dan Realisasi

Jumlah dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 695.125.000,- yang digunakan untuk modal usaha bagi Anggota Rumah Tangga (ART) perempuan yang diwujudkan dalam bentuk barang dengan nilai masing-masing KPM Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Biaya Operasional Pemerintah Desa serta Honor Pendamping Desa Program Jatim Puspa, dengan jumlah dana sebagai berikut :

Tabel 28 Jumlah dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Pemerintah Desa

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Kpm	Jumlah Total (Rp)
1	Wates	Sumberagung	57	162.125.000
2	Ngancar	Kunjang	45	130.625.000
3	Kandat	Ngreco	44	128.000.000
4	Ringinrejo	Dawung	49	141.125.000
5	Kandat	Kandat	46	133.250.000
Jumlah Keseluruhan				695.125.000

Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

Tabel 29 Realisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Desa

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Kpm	Jumlah Total (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)
1	Wates	Sumberagung	57	162.125.000	162.125.000
2	Ngancar	Kunjang	45	130.625.000	130.625.000
3	Kandat	Ngreco	44	128.000.000	128.000.000
4	Ringinrejo	Dawung	49	141.125.000	141.125.000
5	Kandat	Kandat	46	133.250.000	133.250.000
Jumlah Keseluruhan				695.125.000	695.125.000

Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

e. Pelaksanaan

- Sosialisasi Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 diselenggarakan secara daring oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada :
  - Hari/Tanggal : Kamis, 6 Maret 2025
  - Pukul : 09.00 WIB – Selesai
  - Media Daring : Zoom Meeting
  - Acara : Sosialisasi Program BKK Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Prov. Jawa Timur Tahun 2025
  - Peserta : Dinas PMD Kabupaten/Kota Batu, Camat dan Kepala Desa Lokasi Program Jatim Puspa Tahun 2025.
- Orientasi Program Jatim Puspa yang telah dilaksanakan di Favehotel Jl. Jenggolo No.15, Pucang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo pada Hari Rabu – Jumat, tanggal 14 – 16 Mei 2054, Peserta dari :
  - DPMD Kabupaten/pejabat yang membidangi Program Jatim Puspa Tahun 2025 se-Jatim dan Kota Batu, masing-masing 1 (satu) orang;
  - Sekretaris Desa dan Bendahara Desa lokasi Program Jatim Puspa Tahun 2025.

Gambar 2 Pelaksanaan Sosialisasi Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa



Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kediri

- Bimbingan Teknis Program Jatim Puspa secara daring (dalam jaringan) oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada :
  - Hari/Tanggal : Senin, 16 Juni 2025
  - Pukul : 09.00 WIB – Selesai
  - Media Daring : Zoom Meeting
  - Peserta : DPMD Kabupaten/pejabat yang membidangi Program Jatim Puspa Tahun 2025 se-Jatim dan Kota Batu, Pendamping Kabupaten Program Jatim Puspa, Calon Pendamping Desa Program Jatim Puspa
- Musyawarah Desa Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur Program Jatim Puspa Tahun 2025 kepada 5 (lima) Desa dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 30 Jadwal Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur Program Jatim Puspa Tahun 2025

No	Kecamatan	Desa	Jumlah KPM
1	Wates	Sumberagung	1 Juli 2025
2	Ngancar	Kunjang	1 Juli 2025
3	Kandat	Kandat	2 Juli 2025
4	Kandat	Ngreco	2 Juli 2025
5	Ringinrejo	Dawung	2 Juli 2025

Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

Gambar 3 Musyawarah Desa Sosialisasi Bantuan Keuangan













Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

Fasilitasi Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan Khusus Dari Provinsi Jawa Timur Program Jatim Puspa tanggal 14 Agustus 2025 ke Desa Ngreco Kecamatan Kandat, Desa Kandat Kecamatan Kandat dan Desa Dawung Kecamatan Ringinrejo serta tanggal 15 Agustus 2025 ke Desa Sumberagung Kecamatan Wates dan Desa Kunjang Kecamatan Ngancar.

Gambar 4 Fasilitasi Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan



Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

- Undangan Penyerahan barang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Jatim Puspa ke 5 (lima) Desa yang telah dilaksanakan pada :

a) Penyerahan barang kepada KPM Program Jatim Puspa di Desa Sumberagung Kecamatan Wates dan Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Tanggal 27 Oktober 2025.

Gambar 5 Undangan Penyerahan barang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)



Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

b) Penyerahan barang kepada KPM Program Jatim Puspa di Desa Ngreco Kecamatan Kandat dan Desa Kandat Kecamatan Kandat Tanggal 28 Oktober 2025.

Gambar 6 Penyerahan barang kepada KPM Program Jatim Puspa di Desa Ngreco Kecamatan Kandat dan Desa Kandat Kecamatan Kandat



Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

c) Penyerahan barang kepada KPM Program Jatim Puspa di Desa Dawung Kec. Ringinrejo Tanggal 29 Oktober 2025.

Gambar 7 Penyerahan barang kepada KPM Program Jatim Puspa di Desa Dawung Kec. Ringinrejo



Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

- Undangan Musyawarah Pertanggungjawaban Program Jatim Puspa telah dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :
  a) Tanggal 12 Desember 2025 ke Desa Kunjang Kec.Ngancar dan Desa Dawung Kec.Ringinrejo.
  b) Tanggal 19 Desember 2025 ke Desa Kandat Kecamatan Kandat, Desa Sumberagung Kecamatan Wates dan Desa Ngreco Kecamatan Kandat.

Gambar 8 Undangan Musyawarah Pertanggungjawaban Program Jatim Puspa



Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

- Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (PUED) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di The Aliante Hotel & Convention Center, Jl. Aries Munandar No.41-45, Kota Malang Tanggal 01 Desember 2025 sampai dengan 02 Desember 2025 dengan peserta dari 2 (dua) orang Dinas PMD Kabupaten/Kota Batu se Provinsi Jawa Timur dan 1 Orang dari Bappeda Kabupaten.

Gambar 9 Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (PUED)





Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

f. Evaluasi

Dinas PMPD Kabupaten Kediri telah menghadiri Musyawarah Pertanggungjawaban Desa Program Jatim Puspa Tahun 2025. Secara umum hasil Musyawarah Pertanggungjawaban yaitu Desa penerima Program Jatim Puspa telah menyusun Pertanggungjawaban administrasi berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kegiatan.

g. Permasalahan

1) Bersasarkan data Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, maka desa melakukan verifikasi sehingga masih ditemukan KPM menerima program PKH dan usia diatas 60 tahun.
2) Kuota data sasaran KPM berdasarkan graduasi PKH dan Regsosek tidak terpenuhi, dapat diisi data KPM yang ditetapkan melalui musyawarah desa maksimal 10%.
3) Berdasarkan ketentuan diatas, maka desa mengusulkan KPM melalui musyawarah desa.

h. Kesimpulan dan Saran

Program Jatim Puspa di Kabupaten Kediri telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah graduasi. Program ini perlu

dilanjutkan pada tahun mendatang agar lebih banyak KPM graduasi PKH bagi ART perempuan yang dapat merasakan manfaatnya.

i. Penutup

Dinas PMPD Kabupaten Kediri berharap program Jatim Puspa dapat terus diberikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kediri sehingga dapat memberikan manfaat bagi KPM yang sudah graduasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan dapat meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi desa di Kabupaten Kediri.

2. Pelaksanaan Program Program Desa Berdaya

a. Pendahuluan

1) Maksud Program Desa Berdaya adalah Program yang dikhususkan untuk menemukan, meningkatkan dan memperkuat jejaring perekonomian desa dengan Pengembangan Desa Tematik Melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif Berbasis BUM Desa, dalam rangka mempertegas legalisasi status desa mandiri.
2) Program Desa Berdaya memiliki tujuan sebagai berikut :
   a) Menumbuhkan inovasi melalui pengembangan desa tematik wisata dan/atau ketahanan pangan berbasis potensi dan sumber daya secara kreatif dan berkelanjutan sehingga mampu menggerakkan perekonomian desa.
   b) Memunculkan produk ikonik desa tematik yang dikuatkan melalui *economic branding*.
   c) Mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk menguatkan ikon desa tematik yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
   d) Menciptakan praktik keteladanan (*good practices*) sehingga mampu menginspirasi desa-desa yang lain.
3) Sasaran Program Desa Berdaya adalah Desa yang mempunyai status kemajuan dan kemandirian desa sebagai Desa Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024.

4) Lokasi Program Desa Berdaya di Kabupaten Kediri Tahun 2025, yaitu :
   a) Desa Sempu Kecamatan Ngancar;
   b) Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih; dan
   c) Desa Papar Kecamatan Papar.
5) Masing-masing Desa mendapatkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk kegiatan Operasional Program maksimal 10% (sepuluh persen) dan kegiatan Pengembangan Desa Tematik melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif Berbasis BUM Desa minimal 90% (sembilan puluh persen).
6) Realisasi dana Program Desa berdaya, sebagai berikut :

Tabel 31 Realisasi Dana Program Desa Berdaya

No.	Kecamatan	Desa	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Dana Realisasi (Rp)
1	Ngancar	Sempu	100.000.000	100.000.000
2	Ngadiluwih	Purwokerto	100.000.000	100.000.000
3	Papar	Papar	100.000.000	100.000.000
Jumlah Keseluruhan				**300.000.000**

Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

b. Pelaksanaan

1) Sosialisasi Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 diselenggarakan secara daring oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada :
   - Hari/Tanggal : Kamis, 6 Maret 2025
   - Pukul : 09.00 WIB – Selesai
   - Media Daring : Zoom Meeting
   - Acara : Sosialisasi Program BKK Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Prov. Jatim Tahun 2025.

- Peserta : Dinas PMD Kabupaten/Kota Batu, Camat dan Kepala Desa Lokasi Program Desa Berdaya Tahun 2025.

2) Pra Orientasi Program Desa Berdaya Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur secara daring melalui aplikasi zoom pada :
   - Hari/Tanggal : Rabu - Kamis, 12 – 13 Maret 2025
   - Pukul : 09.00 WIB – Selesai
   - Media Daring : Zoom Meeting
   - Acara : Pra Orientasi Program Desa Berdaya Tahun 2025.
   - Peserta : Dinas PMD Kabupaten/Kota Batu, Camat dan Unsur Tim Kerja Desa serta BPD Lokasi Program Desa Berdaya Tahun 2025.
3) Coaching Klinik Program Desa Berdaya Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur secara daring melalui aplikasi zoom pada :
   - Hari/Tanggal : Selasa, 18 Maret 2025
   - Pukul : 09.00 WIB – Selesai
   - Acara : *Coaching* Klinik Program Desa Berdaya Tahun 2025.
   - Catatan : Lokasi Program Desa Berdaya Tahun 2025 yaitu Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih, Desa Papar Kecamatan Papar dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar.
4) Fasilitasi percepatan pelaksanaan Program Desa Berdaya Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri bersama Konsultan Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin, 21 April 2025 ke Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih, Desa Papar Kecamatan Papar dan Desa Sempu Kecamatan Ngancar.

Gambar 10 Fasilitasi percepatan pelaksanaan Program Desa Berdaya Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri







Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

5) *Desk Virtual* Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Lokasi sasaran Program Desa Berdaya Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur secara daring melalui aplikasi zoom pada :
   - Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025
   - Pukul : 09.15 WIB – Selesai
   - Acara : Desk Virtual Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Lokasi sasaran Desa Berdaya Tahun 2025.
6) Fasilitasi Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Program Desa Berdaya Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri pada hari Rabu, 4 Juni 2025.

Gambar 11 Fasilitasi Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan Program Desa Berdaya Tahun 2025



Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

Orientasi Program Desa Berdaya Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada Hari Rabu – Jumat, tanggal 11 – 13 Juni 2025 bertempat di Favehotel Jl. Jenggolo No. 15, Pucang, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo dengan peserta terdiri dari Unsur pejabat Dinas PMD Kabupaten/Kota Batu serta 3 Orang yaitu Kepala Desa, Pengurus BUM Desa dan Koordinator Tim Kerja Desa (TKD).

Gambar 12 Orientasi Program Desa Berdaya Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur







Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

7) Undangan Sosialisasi Program Desa Berdaya ke Desa Papar Kecamatan Papar pada Hari Rabu, 18 Juni 2025.

Gambar 13 Undangan Sosialisasi Program Desa Berdaya ke Desa Papar Kecamatan Papar







Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

8) Undangan Sosialisasi Program Desa Berdaya ke Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih pada Hari Jumat, 27 Juni 2025.

Gambar 14 Undangan Sosialisasi Program Desa Berdaya ke Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih





Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

9) Undangan Sosialisasi Program Desa Berdaya ke Desa Sempu Kecamatan Ngancar pada Hari Kamis , 10 Juli 2025.

10) Monitoring Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Konsultan Program Desa Berdaya pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025 ke Desa Sempu Kecamatan Ngancar dan Desa Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih serta pada hari Jumat 17 Oktober 2025 ke Desa Papar Kecamatan Papar.

Gambar 15 Monitoring Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur bersama dengan Konsultan Program Desa Berdaya





Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

11) Undangan Peresmian Ikon Tematik Program Desa Berdaya bersama dengan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dan Tim Konsultan ke Desa :

a) Sempu Kecamatan Ngancar pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025.

Gambar 16 Undangan Peresmian Ikon Tematik Program Desa Berdaya Sempu Kecamatan Ngancar pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025



Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

b) Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025.

Gambar 17 Undangan Peresmian Ikon Tematik Program Desa Berdaya Purwokerto Kecamatan Ngadiluwih pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2025



Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

c) Papar Kecamatan Papar pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025.

Gambar 18 Undangan Peresmian Ikon Tematik Program Desa Berdaya Papar Kecamatan Papar pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2025



Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

c. Evaluasi

1) Dinas PMPD Kabupaten Kediri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
2) Permasalahan kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengelola kegiatan karena kegiatan ini merupakan suatu hal baru yang harus segera dilaksanakan.

d. Kesimpulan

1) Program Desa Berdaya di Kabupaten Kediri telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan perekonomian desa. Program ini perlu dilanjutkan dan diperluas jangkauannya agar lebih banyak desa berstatus Mandiri yang dapat merasakan manfaatnya, sehingga dapat memperluas jangkauan program ke desa berstatus Mandiri di Kabupaten Kediri.
2) Dinas PMPD Kabupaten Kediri berharap program Desa Berdaya dapat terus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan manfaat bagi desa-desa dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat desa.

3. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Bum Desa

a. Pendahuluan

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Pemberdayaan BUM Desa merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa. BKK ini diharapkan dapat mengungkit BUM Desa sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Desa.

1) Maksud dan Tujuan
   a) Program Pemberdayaan BUM Desa dimaksudkan untuk penguatan kapasitas BUM Desa yang berdampak pada pengembangan usaha BUM Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa.
   b) Tujuan :
      - meningkatkan kapasitas kelembagaan BUM Desa;
      - memberikan stimulus kepada Pemerintah Desa dan organ BUM Desa melalui penyertaan modal BUM Desa untuk pengembangan dan inovasi usaha BUM Desa;
      - meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat desa; dan
      - membangun ketahanan pangan di desa.
2) Sasaran
   a) BUM Desa Berbadan Hukum di Jawa Timur yang sudah terverifikasi melalui SIPD sebagaimana yang telah diatur dalam Pergub Jatim No 64

Tahun 2023 dengan klasifikasi Maju atau Berkembang berdasarkan DDC Provinsi Jawa Timur.

b) Lokasi Pemerintah Desa yang mendapatkan BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur.

c) BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa digunakan untuk pengembangan usaha tematik yang yang tercantum dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

3) Di Kabupaten Kediri BUM Desa penerima BKK untuk Pemberdayaan Bum Desa Tahun 2025 sebanyak 6 (enam) BUM Desa, yaitu :

Tabel 32 Penerima BKK untuk Pemberdayaan Bum Desa Tahun 2025

No.	Kecamatan	Desa	Nama Bum Desa
1	Ngancar	Babadan	Lancar Sejahtera
2	Ngancar	Jagul	Karya Mandiri
3	Pare	Sidorejo	Kami Jaya
4	Plemahan	Sebet	Mitra Jaya Abadi
5	Tarokan	Blimbing	Kalimosodo
6	Wates	Tempurejo	Mitra Sejahtera

Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

4) Masing-masing Desa mendapatkan dana BKK Pemberdayaan BUM Desa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang penggunaannya sebesar 96% untuk dana penyertaan modal kepada Bum Desa, sedangkan 4% untuk biaya Operasional Pemerintah Desa.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Sosialisasi Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 diselenggarakan secara daring oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada :

- Hari/Tanggal : Kamis, 6 Maret 2025
- Pukul : 09.00 WIB – Selesai

- Media Daring : Zoom Meeting
- Acara : Sosialisasi Program BKK Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Prov. Jatim Tahun 2025.
- Peserta : Dinas PMD Kabupaten/Kota Batu, Camat dan Kepala Desa Lokasi Program Desa Berdaya Tahun 2025.

2) Fasilitasi Update Data BUM Desa di Data Desa Center Jawa Timur dilaksanakan secara daring oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada:
   - Hari/Tanggal : Senin, 10 Maret 2025
   - Pukul : 09.00 WIB – Selesai
   - Media Daring : Zoom Meeting
   - Acara : Fasilitasi Update Data BUM Desa di Data Desa Center Jawa Timur.
   - Peserta : Dinas PMD Kabupaten/Kota Batu dan Direktur/Pengurus BUM Desa Lokasi penerima Program Pemberdayaan BUM Desa Tahun 2025.
3) Rapat Persiapan Pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 diselenggarakan secara daring oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada :
   - Hari/Tanggal : Selasa, 11 Maret 2025
   - Pukul : 09.00 WIB – Selesai
   - Media Daring : Zoom Meeting
   - Acara : Rapat Persiapan Pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
   - Peserta : Dinas PMD Kabupaten/Kota Batu, Kepala Desa serta Direktur/Pengurus BUM Desa Lokasi penerima Program Pemberdayaan BUM Desa Tahun 2025.
4) Pra Orientasi Program Pemberdayaan BUM Desa Tahun 2025 diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada :
   - Hari/Tanggal : Senin, 17 Maret 2025

- Pukul : 11.30 – 12.30 WIB.
- Tempat : Kantor Bakorwil Madiun, Jln. Pahlawan No. 31 Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.
- Acara : Pra Orientasi Program Pemberdayaan BUM Desa Tahun 2025.
- Peserta : Dinas PMD Kabupaten/Kota Batu, Kepala Desa serta Direktur/Pengurus BUM Desa Lokasi penerima Program Pemberdayaan BUM Desa Tahun 2025.

Gambar 19 Pra Orientasi Program Pemberdayaan BUM Desa Tahun 2025



Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

5) Musyawarah Desa Insidentil Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur 2025, dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 33 Musyawarah Desa Insidentil Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Pemberdayaan BUM

No.	Kecamatan	Desa	Hari / Tanggal	Jam
1	Tarokan	Blimbing	Senin, 24 Maret 2025	09.00 WIB.
2	Plemahan	Sebet	Senin, 24 Maret 2025	12.00 WIB.
3	Wates	Tempurejo	Selasa, 25 Maret 2025	09.00 WIB.
4	Pare	Sidorejo	Selasa, 25 Maret 2025	12.00 WIB.

5	Ngancar	Jagul	Rabu, 2025	26	Maret	09.00 WIB.
6	Ngancar	Babadan	Rabu, 2025	26	Maret	12.00 WIB.

Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

Gambar 20 Musyawarah Desa Insidentil Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Pemberdayaan BUM










Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

6) Orientasi Program Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada :

Hari : Senin - Rabu

Tanggal : 21 – 23 April 2025

Tempat : Hotel Selecta, Jl. Raya Selecta, No. 1 Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu.

Peserta : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten / Kota Batu, 1 (satu) orang Kepala Desa, dan 1 (satu) orang Direktur/Pengurus BUM Desa Desa lokasi program BKK Pemberdayaan BUM Desa.

Gambar 21 Orientasi Program Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas PMD





Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

7) Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Program BKK Pemberdayaan BUMDesa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas PMPD Kabupaten Kediri pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Agustus 2025

Tempat : Ruang rapat Dinas PMPD Kabupaten Kediri.

Peserta : Direktur BUM Desa, Bendahara BUM Desa dan 1 (satu) orang Pengurus BUM Desa penerima program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

Gambar 22 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Program BKK Pemberdayaan BUMDesa





Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

8) Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa yang diselenggarakan secara daring oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Politeknik Keuangan Negara STAN pada :

   Hari : Kamis

   Tanggal : 28 Agustus 2025

   Acara : Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa (Materi I : Dasar-dasar Akuntansi BUM Desa).

   Peserta : Direktur BUM Desa dan Bendahara BUM Desa penerima program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

9) Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa yang diselenggarakan secara daring oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Politeknik Keuangan Negara STAN pada :

   Hari : Rabu - Kamis

   Tanggal : 10 – 11 September 2025

   Acara : Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan BUM Desa (Materi : Penggunaan Aplikasi Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan I dan II).

   Peserta : Direktur BUM Desa dan Bendahara BUM Desa penerima program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

10) Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas PMPD Kabupaten Kediri pada :

Tabel 34 Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa

No.	Kecamatan	Desa	Hari / Tanggal	Pukul
1	Wates	Tempurejo	Jumat, 12 September 2025	09.30 WIB.
2	Pare	Sidorejo	Jumat, 12 September 2025	13.00 WIB.
3	Tarokan	Blimbing	Senin, 15 September 2025	09.30 WIB.
4	Plemahan	Sebet	Senin, 15 September 2025	13.00 WIB.
5	Ngancar	Babadan	Selasa, 16 September 2025	09.30 WIB.
6	Ngancar	Jagul	Selasa, 16 September 2025	13.00 WIB.

Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

Gambar 23 Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa








Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

11) Mendampingi monitoring Pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada :

Tabel 35 Monitoring Pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa

No.	Kecamatan	Desa	Hari / Tanggal	Pukul
1	Tarokan	Blimbing	Senin, 22 September 2025	09.00 WIB.
2	Wates	Tempurejo	Senin, 22 September 2025	12.00 WIB.
3	Pare	Sidorejo	Senin, 22 September 2025	14.00 WIB.

Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

Gambar 24 Mendampingi monitoring Pelaksanaan BKK Pemberdayaan BUM Desa









Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

Menghadiri Musyawarah Desa Pertanggungjawaban BKK BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dari Desa Lokasi penerima, dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 36 Jadwal Musyawarah Desa Penerima BKK Bum Desa Tahun 2025

No	Kecamatan	Desa	Hari/Tanggal	Waktu
1	Tarokan	Blimbing	Senin, 20 Oktober 2025	10.00 WIB
2	Plemahan	Sebet	Senin, 20 Oktober 2025	13.00 WIB
3	Ngancar	Jagul	Selasa, 21 Oktober 2025	09.00 WIB
4	Ngancar	Babadan	Selasa, 21 Oktober 2025	11.00 WIB
5	Pare	Sidorejo	Kamis, 23 Oktober 2025	09.00 WIB
6	Wates	Tempurejo	Kamis, 23 Oktober 2025	11.00 WIB

Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

Gambar 25 Musyawarah Desa Pertanggungjawaban BKK BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dari Desa Lokasi penerima





Sumber data : DPMPD Kabupaten Kediri

13) Rapat Percepatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Pengembangan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 secara daring yang dilaksanakan oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Desember 2025

Acara : Rapat Percepatan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Pengembangan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

Peserta : Dinas PMD Kabupaten/Kota Batu, Direktur, Penasehat, Pengawas dan Pengurus BUM Desa penerima program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

c. Hasil

1) Desa telah menerima transfer sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masuk ke rekening kas Desa dan selanjutnya ditransfer ke Rekening BUM Desa.
2) Sudah dilaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yaitu 4% atau Rp. 4.000.000,- untuk biaya Operasional dan 96 % atau Rp. 96.000.000,- untuk penyertaan modal BUM Desa, dan dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati pada musyawarah insidental sebagaimana petunjuk pedoman yang ada program.

d. Evaluasi

1) Kurang pemahaman Forum BUM Desa Kabupaten dalam hal mekanisme program BKK BUM Desa pada saat mendampingi program, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman pengelola BUM Desa lokasi sasaran yang mengakibatkan setiap proses mengalami kendala dan keterlambatan.
2) Form pada Petunjuk Teknis Operasional, form pada DDC serta form yang diberikan Forum banyak ketidaksamaan hal ini menyebabkan kekeliruan dan kebingungan bagi pengelola BUM Desa.

e. Hasil dan Dampak Program

Program BKK untuk Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 telah menghasilkan beberapa hasil, antara lain :

1) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
2) Meningkatnya kapasitas dan kelembagaan BUM Desa.

3) Meningkatnya jumlah dan kualitas produk unggulan desa.

Program BKK untuk Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 telah memberikan beberapa dampak positif, antara lain:

1) Meningkatnya taraf hidup masyarakat desa.
2) Meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan.
3) Meningkatnya geliat ekonomi di desa.

f. Kesimpulan

Program BKK Pemberdayaan BUM Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Program ini telah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat desa namun perlu beberapa evaluasi dalam proses pendampingan agar hasil serta pertanggungjawaban dapat berjalan lebih efektif.

4.2.2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

A. Dasar Penugasan

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.2.2.1/66/013/2025 Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diversifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025
2. SAJADAH (Santri Jatim Sehat dan Berkah) merupakan program pendampingan pesantren sehat yang diinisiasi sejak tahun 2019.

B. Program Dan Kegiatan

- Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten
- Output : Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pendampingan Pesantren Sehat
- Rincian Kegiatan :
  1. Rapat Koordinasi Tim Pembina Pesantren Sehat
  2. Orientasi Pendampingan Pesantren Sehat bagi pendamping dan kader Santri Husada
  3. Pengadaan media promosi kesehatan
  4. Pendampingan Pesantren Sehat oleh Ormas
  5. Evaluasi Kegiatan Pendampingan Pesantren Sehat

C. Anggaran

- Alokasi Anggaran : Rp 76.000.000,00
- Realisasi Anggaran : Rp 64.718.000,00 / 85,15%

D. Tujuan

- Mewujudkan pesantren sehat melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- Meningkatkan kualitas poskestren menuju strata Purnama Mandiri (PURI)
- Mewujudkan Pondok Pesantren ber-PHBS minimal Klasifikasi III
- Menghasilkan kebijakan Pondok Pesantren berwawasan kesehatan

- Meningkatkan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah (TTD) pada santriwati
- Melaksanakan inspeksi kesehatan lingkungan secara mandiri
- Melaksakanan skrining TBC dan kesehatan jiwa

E. Sasaran

Sasaran program meliputi santri, pengasuh Pondok Pesantren, pimpinan Pondok Pesantren, pengunjung dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren di bawah binaan Puskesmas setempat. Terdapat 5 (Lima) Pondok Pesantren yang terpilih yaitu :

- Pondok Pesantren Hamalatul Qoran Kec. Kepung
- Pondok Pesantren An Nurul Burhan Qoran Kec. Badas
- Pondok Pesantren Al Khoirot Kec. Kras
- Pondok Pesantren Sirojul Ulum Kec. Pare
- Pondok Pesantren Ar Robitoh Kec. Gurah

F. Pelaksanaan

1. Rapat Koordinasi Tim Pembina Pesantren Sehat

Pelaksaan Rapat Tim Pembina Pesantrean Sehat dilakukan pada :

- Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2025
- Tempat : Ruang Pertemuan Kahuripan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
- Peserta dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari :
  - Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kediri
  - Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kediri
  - Pimpinan Forum CSR/TLSP Kab. Kediri
  - KADIN Kab. Kediri
  - RRI Pare
  - Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kediri
  - Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Kediri
  - Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri
  - Universitas Islam Kediri

- Stikes Karya Husada Pare
- IIK Bhakti Wiyata
- Universitas STRADA
- STIKES Ganesha Husada
- STIKES Pamenang
- Dhoho TV
- Kilisuci TV
- Radio Andhika FM
- Media Radar Kediri
- Pimpinan Cabang Bank Jatim Kediri
- Pimpinan Cabang Bank Jatim Pare
- Ka. Dinas Pendidikan
- Ka. Dinas Kesehatan
- Ka. Bappeda
- Ka. Dinas Kominfo
- Ka. DP2KBP3A
- Ka. Dinas Lingkungan Hidup
- Ka. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Ka. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
- Ka. Dinas Pertanian
- Ka. Dinas PUPR
- Direktur RSKK
- Direktur RSUD SLG
- Ka. Bagian Hukum
- Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan primer
- Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
- Kepala Seksi KGM
- Kepala Seksi Kesling Kejaor
- Kepala Seksi P2
- Kepala Seksi Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

Adapun hasil dari pelaksanaan Kordinasi Tim Pembina Poskestren Sehat adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Orientasi Poskestren dilakukan selama 1 hari yakni tanggal 15 Mei 2025 bertempat di ruang pertemuan Kahuripan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
b. Kegiatan Orientasi Poskestren dihadiri oleh 50 peserta orang peserta dari lintas program Dinas Kesehatan dan lintas sektor Kabupaten Kediri. Kegiatan diawali dengan sambutan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten kediri dr Ahmad Khotib , M.Kes
c. Dilanjutkan paparan materi. Materi - materi pada kegiatan tersebut Kebijakan Penyelenggaran Poskestren sehat oleh dr Ika Tjandra selaku kabid Kesmas, Kerangka Kerja Tim PPS & Peran Penting Pentahelix Dalam Mewujudkan Pesantren Sehat oleh Bapak Adrian dari Bagian kesra, Evaluasi 2024 dan sosialisasi kegiatan pendampingan poskestren sehat di tahun 2025 oleh ibu Eny Soehartini selaku Koordinator Promkes
d. Kesepakatan yang diambil dari pertemuan kegiatan Koordinasi Tim Pembina Pesantren tersebut adalah
    - Institusi Kesehatan siap mendukung dan membantu fokus di pesantren dalam rangka pembinaan serta bersinergi dengan mahasiswa dan peminatan salah satunya dengan kesehatan lingkungan
    - Data yang ada masih belum valid antara kementerian agama dan Dinas kesehatan sehingga akan ada pendataan detail Pondok Pesantren yang ada di kab Kediri
    - Klasifikasi Pondok Pesantren yang didampingi dengan anggaran dana BK tahun 2026
    - Bila ada usulan tentang kebutuhan di Pondok Pesantren diharapkan berkirim dengan sekertaris daerah yang akan diteruskan ke forum TLSP melibatkan perusahaan - perusahan di Kabupaten Kediri sehingga bisa menghubungkan perusahaan mana yang relevan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat misalnya pertenian untuk

stunting.

- Contoh dari Bank Jatim yang telah mengeluarkan anggaran untuk CSR dengan nominal 750 jt serta mitigasi untuk kegiatan tim Pembina pesantren dan rencana kerja
- DP2KB sudah dilaksanakan sekolah ramah anak, pendampingan kekerasan, peningkatan kapasitas ustad / pengajar lebih fokus dalam pengetahuan terkait kesehatan reproduksi
- Dinas Lingkungan Hidup untuk pembangunan sesuai isu strategi Pondok Pesantren tersebut
- Dari Media bertekad untuk menyebarluaskan informasi kegiatan sehingga bisa diketahui masyarakat
- Bagian hukum informasi perda dan perbup, SK untuk sering harus koordinasi
- KSTV sebagai rekan publikasi kegiatan dan koordinasi dengan institusi kesehatan terkait Managemen Kesehatan Menstruasi dan Tablet tambah Darah TD
- UNISKA dari akademisi prodi pertanian akan mendukung pelaksanaan pedampingan pesantren dengan mengadakan pembinaan pertanian untuk lahan kosong
- BASNAZ akan mendukung dan memberikan stimulan sesuai kebutuhan pesantren dengan melalui proposal

Gambar 26 Pelaksaan Rapat Tim Pembina Pesantren Sehat





Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

2. Orientasi Pendampingan Pesantren Sehat Bagi Pendamping Dan Kader Santri Husada

A. Tujuan

- Mewujudkan pesantren sehat melalui orientasi penyelenggaraan pesantren sehat
- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang kesehatan di Pondok Pesantren
- Mengetahui status kesehatan Santri (status gizi, resiko TBC, Anemia. Jiwa dll)
- Menentukan Strata Poskestren dalam menentukan telaah kemandirian dan indikator PHBS di Pondok Pesantren
- Menentukan IKL (Inspeksi Kesehatan lingkungan) PHBS di Pondok Pesantren

B. Sasaran

Peserta kegiatan ini terdiri dari lintas sektor dan lintas program dan 5 lokus Pondok Pesantren pendampingan Poskestren tahun 2025. Peserta terdiri 30 orang terdiri dari

- Pengasuh Pondok Pesantren
- Pengurus Kesehatan Pondok Pesantren
- Pendamping Ormas
- Kementerian agama Kecamatan
- Kepala Puskesmas
- Pengelola Promkes Puskesmas
- Bidan Desa Kesehatan Desa /Kel
- Santri Husada

C. Materi

- Kebijakan Penyelenggaraan Pendampingan Pesantren Sehat
- Strategi pelaksanaan penyelenggaraan pendampingan Pesantren Sehat
- Optimalisasi Pondok Pesantren dalam Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)
- Prinsip - prinsip Pembentukan Poskestren
- Gizi Remaja dan Pentingnya Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD),
- Strategi Penanggulangan dan Pencegahan Anemia pada Remaja Putri
- Kesehatan Reproduksi Remaja
- Manegemen Kebersihan Mrntruasi
- BLS / *Basic live suport*
- Inspeksi Kesehatan Lingkungan,
- Pencegahan dan Pengendalian TBC,
- Kesehatan Jiwa Remaja.
- Penyakit Menular di Pondok Pesantren
- Pengukuran Strata Tingkat Perkembangan Pondok Pesantren
- Pengukuran Tingkat Kemandirian Pondok Pesantren
- Pencatatan dan Pelaporan Poskestren
- SMD DAN MMPP

D. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Tabel 37 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Pondok Pesantren

NO	PONDOK PESANTREN	DESA	PUSK	KECAMATAN	TANGGAL
1	Sirojul Ulum	Tertek	Sidorejo	Pare	24 - 25 Juni 2025
2	An Nurul Burhan	Blaru	Badas	Badas	26 - 27 Juni 2025
3	Hamalatul Quran Putri	Keling	Keling	Kepung	01 - 02 Juli 2025
4	Al Khoirot	Mojosari	Pelas	Kras	04 - 05 Juli 2025
5	Ar Robithoh	Kerkep	Adan Adan	Gurah	15 - 16 Juli 2025

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

E. Hasil Kegiatan Diskusi Dan Kesepakatan

- Kegiatan Orientasi Poskestren dilakukan selama 2 hari di bulan Juni dan Juli bertempat di ruang pertemuan masing masing Pondok Pesantren
- Kegiatan dihadiri oleh 30 orang peserta dari lintas program Dinas Kesehatan, lintas sektor serta santri putra dan santri putri serta perwakilan 5 Poskestren binaan dengan masing-masing terdiri dari pengasuh, pengurus, Santri Husada, pendamping dari unsur pengurus, serta petugas Puskesmas wilayah Poskestren yang terdiri dari petugas promkes, sanitarian, nutrisionis, pengelola program TB dan pengelola program kesehatan jiwa.
- Sebelum acara di mulai diadakan *pre-test* kepada seluruh santri.
- Sesi berikutnya yakni pemberian materi oleh narasumber dari Dinas Kesehatan, Puskesmas serta institusi pendidikan di Kediri
- Kegiatan selanjutnya adalah *post-test* kepada seluruh peserta santri yang hadir. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan
- Kesepakatan pembentukan SK dan struktur organisasi Poskestren
- Pelaksanaan SMD dan MMPP segera dilakukan

Gambar 27 Dokumentasi Kegiatan Orientasi Poskestren








ORIENTASI PENYELENGGARAAN
PENDAMPINGAN PESANTREN SEHAT






KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN
PESANTREN SEHAT
GPS Map Camera
Kecamatan Badas, Jawa Timur, Indonesia
76vm+f74, Selorjo, Baru, Kec. Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64219, Indonesia, Kecamatan Badas, Jawa Timur 64219, Indonesia
Lat -7.706492° Long 112.233302°
25/06/2025 09:29 AM GMT +07:00
Google














Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

3. Pendampingan Pesantren Sehat

Pendampingan dilakukan mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2025.

PERIODE 1 :

- Keberadaan jumlah santri dan Santri Husada di Pondok Pesantren
- Membantu dan monitoring program 1 tahun untuk bidang Kesehatan
- Peninjauan tempat lokasi pesantren, ketersediaan tempat untuk ruang poskestren
- Melakukan penilaian tingkat kemandirian pesantren
- Monitoring Tugas dan Fungsi Kader Santri Husada di Pondok Pesantren
- Monitoring administrasi pembukuan yang ada di Poskestren
- Melakukan penilaian tingkat kemandirian pesantren
- Melakukan kegiatan SMD / Survei Mawas Diri
- Melaksanakan MMPP / Musyawarah Masyrakat Pondok Pesantren
- Mendata jumlah santri yang rutin minum TTD
- Melakukan skrining TBC
- Melakukan skrining jiwa
- Melaksanakan inspeksi lingkungan dengan IKL
- Penyusunan struktur organisasi Santri Husada di Poskestrendi pesantren
- Menyusun dan menyepakati tugas dan fungsi dari setiap Santri Husada
- Setelah dilakukan SMD (Survei Mawas Diri), menginventarisasi permasalah yang muncul untuk memprioritaskan masalah yang terjadi
- Membantu penyusunan aturan *intern* Pondok Pesantren terkait aturan yang menunjang kesehatan misalkan kawasan bebas asap rokok, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari - hari
- Membahas permasalahan kesehatan yang muncul dan membantu memberikan solusi kesehatan
- Diskusi dengan Santri Husada untuk administrasi yang ada di poskestren
- Mempersiapkan pertemuan MMPP (Musyawarah Mufakat Pondok Pesantren) dengan memprioritaskan permasalah Kesehatan yang sedang dialami

PERIODE 2

- Peninjauan SK poskestren
- Monitoring sistem organisasi poskestren apakah sudah terbentuk sistemnya beserta tugas dari Santri Husada
- Monitoring pendistribusian poster, leaflet serta buku pedoman poskestren
- Monitoring pendistribusian tablet tambah darah bagi santri putri
- Monitoring dan pendampingan struktur organisasi Santri Husada di Poskestren Pondok Pesantren

Monitoring tugas dan fungsi dari setiap **Santri** Husada

- Monitoring program satu tahun untuk bidang kesehatan
- Memberikan edukasi terkait obat-obatan dasar yang nanti bisa di gunakan di Poskestren
- Memberikan penyuluhan cara bagaimana menangani penyakit terbanyak yang sering muncul di Pondok Pesantren
- Monitoring tugas dan fungsi Kader Santri Husada di Pondok Pesantren
- Monitoring administrasi pembukuan yang ada di Poskestren
- Menginventarisasi permasalah yang muncul setelah dilakukan SMD (Survei Mawas Diri), untuk memprioritaskan masalah yang terjadi
- Monitoring dan membantu pendampingan penyusunan aturan intern Pondok Pesantren terkait aturan yang menunjang kesehatan misalkan kawasan bebas asap rokok, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari
- Membahas rencana tindak lanjut kesehatan yang muncul dan membantu memberikan solusi kesehatan
- Menyusun aturan internal terkait isu kesehatan yang ada di Pondok Pesantren
- Merencanakan adanya dana sehat dari santri untuk santri
- Diskusi terkait menu harian sehat di Pondok Pesantren
- Mengajarkan untuk selalu melakukan aktivitas fisik setiap seminggu sekali
- Pelaksanaan pertemuan MMPP (Musyawarah Mufakat Pondok Pesantren) dengan memprioritaskan permasalah kesehatan yang sedang dialami

PERIODE 3

- Monitoring kegiatan minum tablet tambah darah bagi santri putri
- Monitoring dokumentasi penimbangan BB dan TB dan pemeriksaan rutin yang dilakukan di poskestren
- Monitoring pelaksanaan aturan internal terkait isu kesehatan yang ada di Pondok Pesantren
- Monitoring dana sehat dari santri untuk santri
- Monitoring untuk PHBS di lingkungan Pondok Pesantren
- Monitoring Inspeksi Pondok Pesantren terkait kebersihan lingkungan
- Monitoring menu makanan harian sehat di Pondok Pesantren
- Monitoring Penerapan PHBS di Pondok Pesantren sudah memenuhi berapa indikator
- Penerapan kawasan bebas asap rokok di lingkungan Pondok Pesantren
- mempersiapan pertemuan evaluasi kegiatan di Pondok Pesantren MMPP (Musyawarah Mufakat Pondok Pesantren) dengan memprioritaskan permasalah kesehatan yang sedang dialami
- Monitoring penyusunan kebijakan berwawasan kesehatan yang ada di Pondok Pesantren
- Terbitnya SK berwawasan kesehatan yang ada di Pondok Pesantren
- Terbitnya struktur organisasi poskestren di Pondok Pesantren
- memaksimalkan penerapan 12 indikator PHBS di Pondok Pesantren
- Monitoring selalu melakukan aktivitas fisik setiap seminggu sekali
- monitoring minum TTD setiap 1 minggu sekali
- Memastikan menu harian gizi seimbang sudah terjadwal
- Membuat rencana tahunan untuk poskestren yang meliputi SMD dan MMPP
- Monitoring administrasi Poskestren sudah dijalankan

Gambar 28 Dokumentasi Kegiatan pendampingan



















Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

4. Musyawarah Masyarakat Pondok Pesantren (MMPP) Dalam Pendampingan Poskestren Sehat Tahun 2025

A. Tujuan

- Mengetahui permasalahan di 5 Poskestren binaan tahun 2025.
- Klasifikasi prioritas masalah di 5 Poskestren binaan tahun 2025
- Identifikasi solusi masalah dan inovasi yang dilaksanakan Poskestren untuk mengatasi masalah yang terjadi
- Pembinaan kepada Poskestren untuk bisa meningkatkan stratanya

B. Peserta

Adapun peserta dalam musyawarah masyarakat Pondok Pesantren adalah sebagai berikut :

1. Perwakilan santri Santri Husada pengurus dan Pengasuh di masing - masing Poskestren
2. Pendamping Poskestren
3. Perwakilan pendamping dari petugas puskesmas dan Dinas Kesehatan
4. Total peserta adalah 150 orang. Setiap Pondok Pesantren mengirim 30 orang untuk melaksanakan MMPP di Pondok Pesantren masing - masing

C. Metode

Metode yang dipergunakan pada pertemuan ini dengan sistem presentasi dan diskusi terarah serta menghasilkan kesepakatan bersama untuk penyelesaian masalah dan inovasi yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren

D. Pelaksanaan

Tabel 38 Pelaksanaan di Pondok Pesantren

NO	PONDOK PESANTREN	DESA	PUSK	KECAMATAN	TANGGAL
1	An Nurul Burhan	Blaru	Badas	Badas	4 Juli 2025
2	Sirojul Ulum	Tertek	Sidorejo	Pare	15 Agustus 2025
3	Hamalatul Quran Putri	Keling	Keling	Kepung	29 September 2025,
4	Al Khoirot	Mojosari	Pelas	Kras	22 Agustus 2025,
5	Ar Robithoh	Kerkep	Adan Adan	Gurah	2 Oktober 2025

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

E. Hasil Kegiatan

Tabel 39 Hasil Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Desa Keling Kecamatan Kepung

Analisis Masalah	Solusi	Timeline dan PJ
Belum ada SK Poskestren	Berdiskusi dengan Pimpinan Pondok Pesantren tentang konsep SK Poskestren.	1 Bulan PJ : Sekretaris Poskestren
Belum ada kebijakan PHBS untuk Pondok	Membuat kebijakan terkait Pesantren KTR (Kawasan Tanpa Rokok); kebijakan terkait Pesantren Ramah Anak; Memasang Poster Edukasi terkait PHBS, Jadwal pengurasan Kamar mandi, mading terkait kesehatan, dll Membuat peraturan (berupa surat edaran) terkait perilaku menjaga lingkungan *reward and punishment* Punishment : Baju keleleran akan disita	1 Tahun berkala PJ : Seksi PHBS
Belum ada jadwal minum dan pengawasan minum TTD	- Penyuluhan tentang TTD - Membuat Jadwal minum TTD pada hari minggu - Pengawas : Pengurus Poskestren	3 Bulan PJ Gizi
Adanya 12% santri ber status gizi obesitas	- Penyuluhan tentang obesitas dan penyakit tidak menular dan gizi seimbang - Jalan sehat (konsultasi pengasuh Pondok Pesantren) - Pembinaan makanan sehat di koperasi dan kantin - Kuesioner aktifitas fisik pilihan	1 Bulan PJ Pencegahan Penyakit
Masih banyaknya santri yang tidak berobat ke fasilitas kesehatan (54%)	Apabila ditemukan santri yang mengeluh segera dilaporkan ke poskestren untuk di tindak lanjuti dan diberikan obat (jika sakit ringan) atau berobat ke faskes (bila keluhan sedang- berat)	Setiap Bulan PJ Pencegahan Penyakit

Masih sedikit santri yang terdaftar Dana sehat (BPJS) (26%)	• Penyuluhan tentang pentingnya BPJS • Koordinasi dengan pengasuh Pondok Pesantren terkait kebijakan santri wajib punya BPJS • Pendataan santri punya bpjs dan tidak punya	PJ Pencegahan Penyakit

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Tabel 40 Pondok Pesantren An Nurul Burhan Desa Badas Kecamatan Badas

Analisa Masalah	Rencana Tindak Lanjut
Belum ada SK Poskestren	Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat SK Poskestren
Belum ada Kebijakan PHBS untuk Pondok	Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat Kebijakan untuk Pondok
Belum ada struktur organisasi Poskestren	Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat Struktur Organisasi Poskestren
Santri yang sakit segera di periksakan	Santri sakit Langsung di periksakan ke Pelayanan Kesehatan
Belum ada jadwal minum TTD	Berkoordinasi dengan tim Kesehatan dan Pengasuh Pondok untuk membuat jadwal minum TTD

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Tabel 41 Pondok Pesantren Ar-Robithoh Desa Kerkep Kecamatan Gurah

Analisa Masalah	Rencana Tindak Lanjut
Belum ada SK Poskestren	Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat SK Poskestren
Belum ada Kebijakan PHBS untuk Pondok	Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat Kebijakan untuk Pondok
Belum ada struktur organisasi Poskestren	Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat Struktur Organisasi Poskestren
Santri yang sakit segera di periksakan	Santri sakit Langsung di periksakan ke Pelayanan Kesehatan
Belum ada jadwal minum TTD	Berkoordinasi dengan tim Kesehatan dan Pengasuh Pondok untuk membuat jadwal minum TTD

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Tabel 42 Pondok Pesantren Sirojul Ulum Desa Tertek Kecamatan Pare

Analisa Masalah	Rencana Tindak Lanjut
Belum ada SK Poskestren	Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat SK Poskestren
Belum ada Kebijakan PHBS untuk Pondok	Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat Kebijakan untuk Pondok
Belum ada struktur organisasi Poskestren	Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat Struktur Organisasi Poskestren
Santri yang sakit segera di periksakan	Santri sakit Langsung di periksakan ke Pelayanan Kesehatan
Belum ada jadwal minum TTD	Berkoordinasi dengan tim Kesehatan dan Pengasuh Pondok untuk membuat jadwal minum TTD

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Tabel 43 Pondok Pesantren Al – Khoirot Desa Mojosari Kecamatan Kras

Analisa Masalah	Rencana Tindak Lanjut
Belum ada SK Poskestren	Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat SK Poskestren
Belum ada Kebijakan PHBS untuk Pondok	Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat Kebijakan untuk Pondok
Belum ada struktur organisasi Poskestren Al - Khoirot	Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat Struktur Organisasi Poskestren
Santri yang sakit segera di periksakan	Santri sakit Langsung di periksakan ke Pelayanan Kesehatan
Belum ada jadwal minum TTD	Berkoordinasi dengan tim Kesehatan dan Pengasuh Pondok untuk membuat jadwal minum TTD

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Gambar 29 Kegiatan di Pondok Pesantren



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

G. Pengadaan Media Promosi Kesehatan

Pengadaan media Promosi Kesehatan berupa :

1. Roll Banner dengan tema ajakan PHBS di Pondok Pesantren dengan judul Indikator PHBS di Pondok Pesantren berjumlah 7 (Tujuh)

Gambar 30 Roll Banner dengan tema ajakan PHBS di Pondok Pesantren dengan judul Indikator PHBS



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

2. Poster dengan 3 tema Etika Batuk, Cegah Scabies, Basmi DBD dengan 3M di Pondok Pesantren dengan jumlah masing - masing tema 15 lembar dan diberikan ke Pondok Pesantren masing - masing 2 lembar dengan 3 tema berbeda

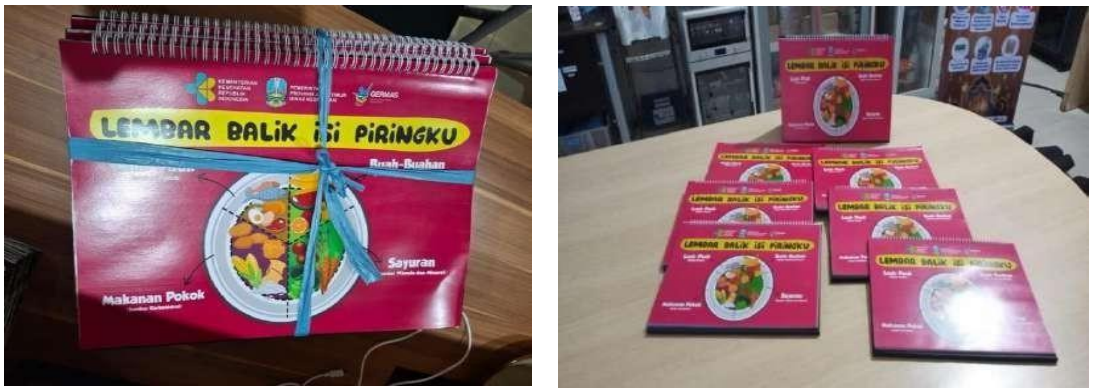
Gambar 31 Poster dengan 3 tema Etika batuk, cegah Scabies, Basmi DBD dengan 3M di Pondok Pesantren



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

3. Lembar balik dengan tema isi piring dengan jumlah 7 paket. Lembar balik yang diberikan oleh Puskesmas Kras dilewatkan sejenak.

Gambar 32 Lembar balik dengan tema isi piring dengan jumlah 7 paket



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

4. Buku *raport* yang diberikan ke pendamping organisasi masyarakat dan ke petugas pukesmas. Buku *raport* sejumlah 25 buah. Masing - masing pesantren diberikan 5 buku.

Gambar 33 Buku Raport yang Diberikan ke Pendamping Organisasi Masyarakat dan Petugas Pukesmas



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Gambar 34. Peyerahan Pengadaan Media Promosi Kesehatan



Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

H. Evaluasi Kegiatan Pendampingan Poskestren Sehat

1. Tujuan

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pesantren di Kabupaten Kediri
2) Peningkatan Strata di Pondok Pesantren berwawasan kesehatan
3) Peningkatan klasifikasi PHBS Pesantren berwawasan kesehatan
4) Terlaksananya kegiatan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada santri putri bersama sama di Pondok Pesantren
5) Jumlah kegiatan skrining TBC pada santri
6) Jumlah kegiatan Inspeksi Lingkungan Kesehatan pada santri
7) Jumlah kegiatan skrining kesehatan jiwa pada santri
8) Terbentuknya kebijakan Pondok Pesantren berwawasan kesehatan.

2. Materi

Evaluasi pelaksanaan pendampingan Poskestren Kabupaten Kediri di 5 (Lima) Pondok Pesantren. Adapun Narasumber yang memberikan materi dari :

- Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri
- Puskesmas Wilayah Pondok Pesantren
- Pengasuh Pondok Pesantren

3. Peserta

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan evaluasi pendampingan poskestren sehat berjumlah 64 peserta yang terdiri dari :

- Kementerian Agama
- Kabag Kesra
- Dinas Lingkungan Hidup
- Institusi Kesehatan
- Pengasuh Pondok Pesantren
- Pengurus Kesehatan Pondok Pesantren
- Pendamping Ormas
- Kepala Puskesmas
- Bidan Desa
- Pengelola Promosi Kesehatan PKM
- Pengelola Kesehatan Lingkungan
- Pengelola Gizi Puskesmas
- Tim Kerja Kesga
- Tim Kerja Kesling Kejaor
- Tim Kerja PTM
- Tim Kerja P2
- Tim Kerja promkes

4. Waktu Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan pendampingan Pesantren sehat dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Desember 2025 bertempat di Ruang Pertemuan Kahuripan Dinas Kesehatan Kab. Kediri

5. Hasil Kegiatan

1) Pondok Pesantren Hamalatul Qoran Kec Kepung

- SK Poskestren sudah ada

- Pembuatan kebijakan PHBS
- Pembagian TTD setiap Minggu
- Pengurus Poskestren mengawasi langsung santri meminum TTD dilakukan pada hari Ahad seminggu sekali
- Penyuluhan TTD oleh kader

  Adanya 12% santri berstatus gizi obesitas dberikan penyuluhan tentang resiko obesitas, porsi makan, memilih camilan sehat, senam bersama tiap hari Jum'at
- Masih banyaknya santri yang tidak berobat ke fasilitas kesehatan (54%) , Apabila ditemukan santri yang mengeluh segera dilaporkan ke poskestren untuk ditindak lanjuti → diberikan obat jika (sakit ringan) atau berobat ke faskes
- Pengecekan dan pendataan setiap kasus dalam buku laporan kesehatan santri Kebijakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS). Dalam rangka menciptakan lingkungan pondok yang bersih, sehat, dan kondusif untuk kegiatan pendidikan serta ibadah, maka ditetapkan Kebijakan PHBS sebagai berikut :

  a. Kebersihan Pribadi
     - Santri wajib menjaga kebersihan tubuh, mandi minimal 2 kali sehari
     - Memotong kuku minimal 1x dalam 2 minggu.
     - Rambut rapi dan bersih; dilarang memakai kosmetik berlebihan
     - Wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah dari kamar mandi.

  b. Kebersihan lingkungan
     - Setiap kamar wajib menjaga kebersihan dan kerapian daerah masing -masing.
     - Larangan menumpuk pakaian kotor dan menggantung handuk sembarangan.
     - Sampah dibuang pada tempatnya.
     - Piket kebersihan ruangan, kamar mandi, halaman dan area

belajar dilaksanakan sesuai jadwal.

c. Sanitasi dan Penggunaan Fasilitas Umum :
   - Dilarang membuang sampah, tisu, atau benda asing ke dalam WC.
   - Menjaga kebersihan kamar mandi setelah digunakan.
   - Peralatan makan dan minum wajib dicuci bersih setelah digunakan.

d. Pola Makan dan Gaya Hidup Sehat
   - Mengikuti jadwal makan pondok dan mengambil makanan secukupnya (tidak mubazir).
   - Mengonsumsi makanan yang disediakan pondok.
   - Minum air putih yang cukup dan mengurangi minuman manis.

e. Pencegahan Penyakit
   - Santri sakit wajib melapor ke pengurus / bagian kesehatan.
   - Tidak diperkenankan bertukar handuk, sikat gigi, atau barang pribadi.
   - Dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyakit (begadang, malas mandi, menimbun sampah).

2) Pondok Pesantren An Nurul Burhan Qoran Kec. Badas

a. Rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sederhana seperti mengukur :
   - Berat Badan
   - Tinggi Badan
   - Lingkar Perut
   - Tekanan Darah

b. Sudah terdapat jadwal piket harian santri

c. Sudah terdapat jadwal piket membersihkan kamar santri

d. Sudah menjemur bantal dan alas tidur

e. Sudah terdapat pemilahan sampah

f. Larangan merokok di area pondok putri

g. Kerja Bakti membersihkan area pondok

h. Checklist minum Tablet Tambah Darah

Santri Putri rutin minum Tablet Tambah Darah

3) Pondok Pesantren Al Khoirot Kec. Kras

a. Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat SK Poskestren
b. Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat Kebijakan untuk Pondok
c. Berkoordinasi dengan Pengasuh Pondok untuk membuat Struktur Organisasi Poskestren
d. Santri sakit langsung diperiksakan ke Pelayanan Kesehatan
e. Berkoordinasi dengan tim Kesehatan dan Pengasuh Pondok untuk membuat jadwal minum TTD
f. Pencegahan dan Penyuluhan penyakit lainnya
g. Menyiptakan lingkungan Pondok yang rapi, bersih, indah dan sehat
h. Penyuluhan Kesehatan (PHBS)
i. Pelayanan Kesehatan Sederhana
j. Mengefektifkan jadwal kebersihan halaman pondok dan kamar mandi
k. SMD untuk mengumpulkan data masalah kesehatan terkait
l. Monitoring kesehatan lingkungan Pondok Pesantren
m. Monitoring status gizi santri
n. Pemeriksaan Kesehatan Santri

4) Pondok Pesantren Sirojul Ulum Kec Pare

a. Kegiatan yang Direncanakan

- Santri putra dengan program ¯BERKAH‖ Bebas Asap Rokok, Edukasi Bahaya Rokok, Razia dan Pendampingan Santri Merokok, Kegiatan positif pengganti merokok, Ajak teman, Hadiah
- Kebersihan perorangan dengan program ¯SANTRI BERSINAR‖ yaitu Santri Bersih, Sigap, Nyaman, Aman, Rapi
- Santri putri dengan program ¯PUTRI SEHAT‖ Peduli Untuk Tubuh Ramping dan Ideal, Segar Energi Hari - hari Agar Tetap kuat

b. Tindak Lanjut yang Dilakukan

PROGRAM BERKAH

- Penyampaian kawasan bebas asap rokok pemasangan banner/papan larangan merokok dan peraturan dari pondok untuk larangan merokok
- Edukasi bahaya asap rokok : Santri Husada bekerjasama dengan RS Amelia terkait edukasi bahaya asap rokok pada 05 september 2025
- Razia dan pendampingan santri merokok : Santri Husada bekerjasama dengan pengurus pondok setiap hari melakukan razia kepada santri di sekitar kamar mandi dan kamar tidur
- Kegiatan positif pengganti merokok santri mengalihkan aktivitas rokok. Dengan adanya sarana kegiatan positif dari pondok seperti lomba sepak bola, hadrah, dll
- Ajak teman kampanye dari santri untuk santri : Santri Husada mengajak 5 santri yang merokok untuk membuat deklarasi ¯Stop Merokok‖ yang ditanda tangani oleh santri, serta melaksanakan praktik akibat merokok
- Hadiah atau *reward* belum terlaksana karena memang masih dalam proses pemantauan

c. Hasil Kegiatan

Hasil dari pelaksanaan pendampingan Pesantren Sehat adalah Pondok Pesantren Sirojul Ulum dengan kegiatan merokok ada komitmen untuk pelaksanaan Program Merokok dengan **Program Berkah : Bebas asap rokok, Edukasi bahaya rokok, Razia dan pendampingan santri merokok, Kegiatan positif pengganti merokok, ajak teman, Hadiah.**

Adanya komitmen dengan bebas asap rokok dengan memasang promosi tidak merokok dan membuat kebijakan, memberikan edukasi di seluruh santri serta merazia rokok di jam 23.30 ke kamar kamar santri, di setiap hari serta mengajak temen berhenti merokok dengan

5 orang temen dan selanjut temen yang sudah berhenti merokok mengajak 5 orang temen lagi, memberikan hadiah / *reward* kepada santri yang sudah bisa berhenti merokok.

Pondok Pesantren Sirojul Ulum dengan kegiatan Program Kebersihan perorangan dengan **Program Bersinar : Santri Bersih, Sigap, Nyaman, Aman, Rapi** dengan cara mengecek kebersihan kuku dan telinga setiap minggu. Edukasi PHBS minimal 1 tahun 2 kali, duta Santri Sehat

Kebijakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Pondok Pesantren

1) Strata PHBS klasifikasi 2 nilai 7 -> klasifikasi 3 nilai 10
2) Strata poskestren dari madya nilai 54 -> purnama nilai 70
3) Pondok mempunyai ruangan poskestren dan berproses pengisiannya
4) IKL MS (76,74) -> MS (83)
5) Kebijakan Larangan merokok
6) Sanksi poin bagi yang membawa ataupun yang merokok
7) Razia rokok
8) Pendampingan 5 santri untuk berhenti merokok
9) Razia kebersihan perorangan setiap hari Selasa
10) Pemantauan minum TTD setiap hari Kamis malam

5) Pondok Pesantren Ar Robitoh Kec. Gurah

Permasalahan dan RTL

1. Belum ada SK dan SOTK → Sudah ada SK dan SOTK nya
2. Kebersihan kamar mandi terutama di asrama santri putra → sudah dilaksanakan piket yang terjadwal
3. Masih ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya → setiap minggu dilakukan bersih bersama
4. Santri banyak yg belum mempunyai jaminan kesehatan/dana sehat →
5. Santri masih ada yang status gizi kurang dan overweight → belum ada buah dalam menu makanan dan akan dimasukan menu tersebut

ke dalam daftar makanan

6. Kebersihan pribadi santri masih minim → dilaksanakan edukasi Santri Husada ke teman - teman santri yang lain
7. Santri masih beli obat sendiri → sudah diarahkan untuk berobat ditemani ustad/ustadzah berobat ke rumah sakit

Di 5 lima Pesantren sehat yang didampingi sudah ada gedung Poskestren walaupun ada yang permanen dan tidak permanen sehingga untuk kegiatan yang bisa di gunakan untuk musyawarah maupun bagi yang sakit sudah bisa dilayani dengan ruang tersendiri tidak di kamar santri begitu juga sudah ada jadwal piket

Di 5 lima Pesantren sehat yang didampingi sudah ada menu makanan dalam waktu tujuh hari sehingga menu makanan bervariasi ada yang makan dua kali sehari dan ada yang tiga kali sehari. Dan ada 2 pesantren yang mendapatkan MBG

Gambar 35 Dokumentasi Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pendampingan Pesantren Sehat








Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

I. Lampiran Hasil Pendampingan

Kondisi Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Tabel 44 Hasil kegiatan mewujudkan Peningkatan PHBS

No	Puskesmas	Nama Ponpes	Strata		Klasifikasi	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Badas	An Nurul Burhan	Pratama	Purnama	II	IV
2	Sidorejo	Sirojul Ulum	Pratama	Purnama	II	IV
3	Keling	Hamalatul Qur'an Putri	Pratama	Purnama	II	IV
4	Pelas	Al Khoirot	Pratama	Purnama	II	IV
5	Adan - Adan	Ar Robithoh	Pratama	Purnama	II	IV

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Tabel 45 Hasil penilaian Pre dan Post Test

No	Puskesmas	Nama Ponpes	Jumlah Santri		Nilai	
			P	L	Pre	Post
1	Badas	An Nurul Burhan	40	25	52,66	74,4
2	Sidorejo	Sirojul Ulum	370	340	66,67	90
3	Keling	Hamalatul Qur'an Putri	137	0	50	87
4	Pelas	Al Khoirot	25	25	63,33	91,7
5	Adan - Adan	Ar Robithoh	68	34	62,34	73,33

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Tabel 46 Hasil kegiatan IKL dan skrening TB

No	Puskesmas	Nama Ponpes	Skrining TB dan Jumlah Santri				
			Sebelum	Sesudah	Yang diskrining	Yang Terduga	Yang Positif
1	Badas	An Nurul Burhan	MS	MS	75	0	0
2	Sidorejo	Sirojul Ulum	MS	MS	370	0	0
3	Keling	Hamalatul Qur'an Putri	MS	MS	114	0	0
4	Pelas	Al Khoirot	MS	MS	25	0	0
5	Adan - Adan	Ar Robithoh	MS	MS	59	0	0

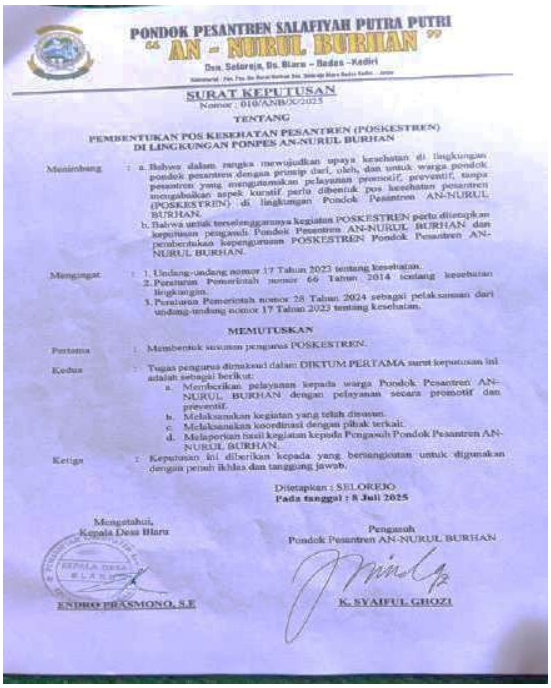
Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

Tabel 47 Hasil Skrining Jiwa

No	Puskesmas	Nama Ponpes	Jumlah Santri		Skrining Kesehatan Jiwa	
			P	L	Jumlah Santri yang diskrining	Yang Beresiko
1	Badas	An Nurul Burhan	40	25	65	0
2	Sidorejo	Sirojul Ulum	370	340	370	0
3	Keling	Hamalatul Qur'an Putri	137	0	114	0
4	Pelas	Al Khoirot	25	25	25	0
5	Adan - Adan	Ar Robithoh	68	34	59	0

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kedir

Gambar 36 Lampiran SK POSKESTREN



PONDOK PESANTREN SALAFIYAH PUTRA PUTRI
"AN - NURUL BURHAN"
Dsn. Sidorejo, Ds. Blaru – Badas –Kediri

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 010/ANB/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN) DI LINGKUNGAN PONPES AN-NURUL BURHAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan upaya kesehatan di lingkungan pondok pesantren dengan prinsip dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren yang mengutamakan pelayanan promotif, preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif perlu dibentuk pos kesehatan pesantren (POSKESTREN) di lingkungan Pondok Pesantren AN-NURUL BURHAN.
b. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan POSKESTREN perlu ditetapkan keputusan pengasuh Pondok Pesantren AN-NURUL BURHAN dan pembentukan kepengurusan POSKESTREN Pondok Pesantren AN-NURUL BURHAN.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Pertama : Membentuk susunan pengurus POSKESTREN.

Kedua : Tugas pengurus dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA surat keputusan ini adalah sebagai berikut:
a. Memberikan pelayanan kepada warga Pondok Pesantren AN-NURUL BURHAN dengan pelayanan secara promotif dan preventif.
b. Melaksanakan kegiatan yang telah disusun.
c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait.
d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pengasuh Pondok Pesantren AN-NURUL BURHAN.

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab.

Ditetapkan : SILOREJO
Pada tanggal : 8 Juli 2025

Mengetahui,
Kepala Desa Blaru
ENDRO PRASMONO, S.E

Pengasuh
Pondok Pesantren AN-NURUL BURHAN
K. SYAIFUL GHOZI





PONDOK PESANTREN TAHFIDHIL QUR'AN
SIROJUL 'ULUM
Semanding Tertek Pare Kediri
Jl. Merak No. 10, Semanding, Tertek, Pare, Kediri, PO.BOX 156 Pare Kediri 64215 Telp. 0812 3433 4335

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 092/ANB/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN) DI LINGKUNGAN PONPES SIROJUL ULUM

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan upaya kesehatan di lingkungan pondok pesantren dengan prinsip dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren yang mengutamakan pelayanan promotif, preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif perlu dibentuk pos kesehatan pesantren (POSKESTREN) di lingkungan Pondok Pesantren Sirojul Ulum
b. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan POSKESTREN perlu ditetapkan keputusan pengasuh Pondok Pesantren Sirojul Ulum dan pembentukan kepengurusan POSKESTREN Pondok Pesantren Sirojul Ulum

Mengingat :
1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan.
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

MEMUTUSKAN

Pertama : Membentuk susunan pengurus POSKESTREN.

Kedua : Tugas pengurus dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA surat keputusan ini adalah sebagai berikut:
a. Memberikan pelayanan kepada warga Pondok Pesantren Sirojul Ulum dengan pelayanan secara promotif dan preventif.
b. Melaksanakan kegiatan yang telah ditusun.
c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait.
d. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pengasuh Pondok Pesantren Sirojul Ulum

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab.

Ditetapkan di : Desa Tertek
Pada tanggal : 15 Agustus 2025

Pengasuh Pondok Sirojul Ulum

(K.H. Yusuf Akmad)



PONDOK PESANTREN TAHFIDHIL QUR'AN
SIROJUL 'ULUM
Semanding Tertek Pare Kediri
Jl. Merak No. 10, Semanding, Tertek, Pare, Kediri, PO.BOX 156 Pare Kediri 64215 Telp. 0812 3433 4335

STRUKTUR POSKESTREN
PONPES SIROJUL ULUM PUTRA

KETUA
Ahmad Saifudin Syifa'i

SEKRETARIS
Adelio Sandya

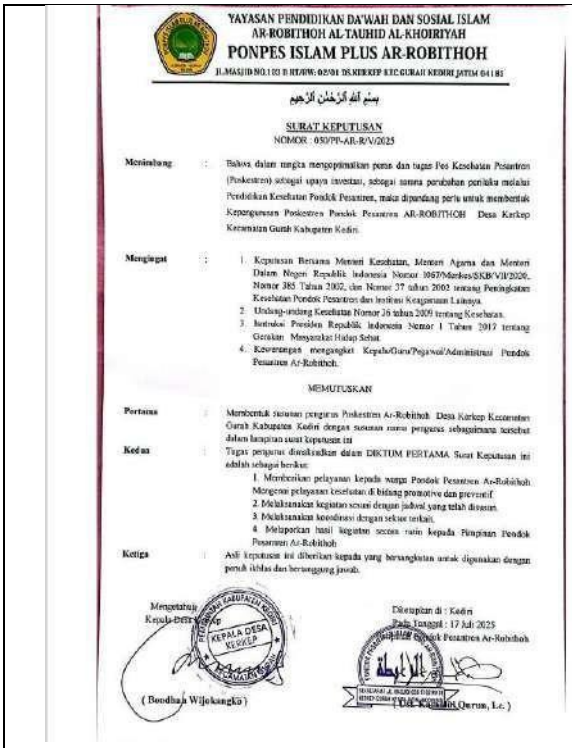
BENDAHARA
Ridho Ahmad Meilandri

POKJA KESLING
1. Aby Zakariya
2. Risky Ahmad Ridhuan

POKJA GIZI
1. Reivan Dava

POKJA PENCEGAHAAN PENYAKIT
1. M. Fayaz Akif
2. M. Arjuna Lail

POKJA PHBS
1. Khafidurrohman
2. Abriel Reyza



YAYASAN PENDIDIKAN DA'WAH DAN SOSIAL ISLAM
AR-ROBITHOH AL-TAUHID AL-KHOIRIYAH
PONPES ISLAM PLUS AR-ROBITHOH
JL.MASJID NO.130 B RT/RW: 02/01 DS.KERKEP KEC.GURAH KEDIRI JATIM 64185

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 050/PP-AR-R/VI/2025

Menimbang : Bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran dan tugas Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) sebagai upaya investasi, sebagai sarana perubahan perilaku melalui Pendidikan Kesehatan Pondok Pesantren, maka dipandang perlu untuk membentuk Kepengurusan Poskestren Pondok Pesantren AR-ROBITHOH Desa Kerkep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

Mengingat :
1. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2020, Nomor 385 Tahun 2002, dan Nomor 37 tahun 2002 tentang Peningkatan Kesehatan Pondok Pesantren dan Institusi Keagamaan Lainnya.
2. Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
4. Kewenangan mengangkat Kepala/Guru/Pejawal/Administrasi Pondok Pesantren Ar-Robithoh.

MEMUTUSKAN

Pertama : Membentuk susunan pengurus Poskestren Ar-Robithoh Desa Kerkep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan susunan nama pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini

Kedua : Tugas pengurus dimaksudkan dalam DIKTUM PERTAMA Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan kepada warga Pondok Pesantren Ar-Robithoh Mengenai pelayanan kesehatan di bidang promotive dan preventif.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
3. Melaksanakan koordinasi dengan sekter terkait.
4. Melaporkan hasil kegiatan secara rutin kepada Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Robithoh

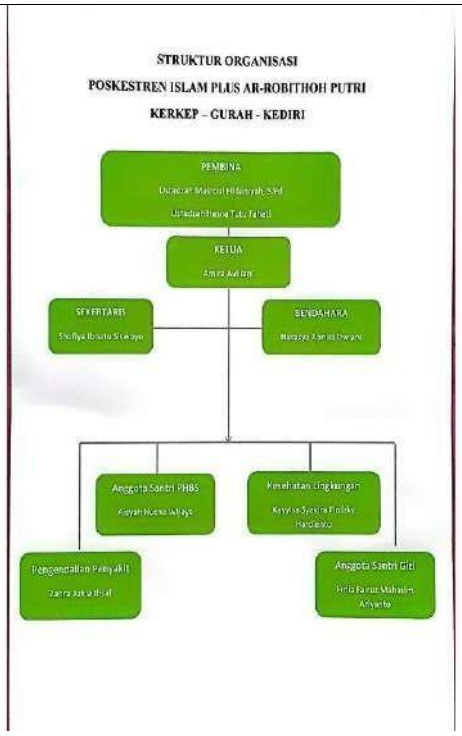
Ketiga : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan dengan penuh ikhlas dan bertanggung jawab.

Mengetahui
Kepala Desa Kerkep

(Boodhan Wijoksangko)

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 17 Juli 2025
Pengasuh Pondok Pesantren Ar-Robithoh

(Dr. Kholilul Qorus, Lc.)



STRUKTUR ORGANISASI
POSKESTREN ISLAM PLUS AR-ROBITHOH PUTRI
KERKEP – GURAH - KEDIRI

PEMBINA
Dr. Hj. Siti Maimunah, S.Sos
Drs. Abdul Hakim Tutu Tafeli

KETUA
Amira Aulia

SEKERTARIS
Shofiya Ibrahim Sholeyah

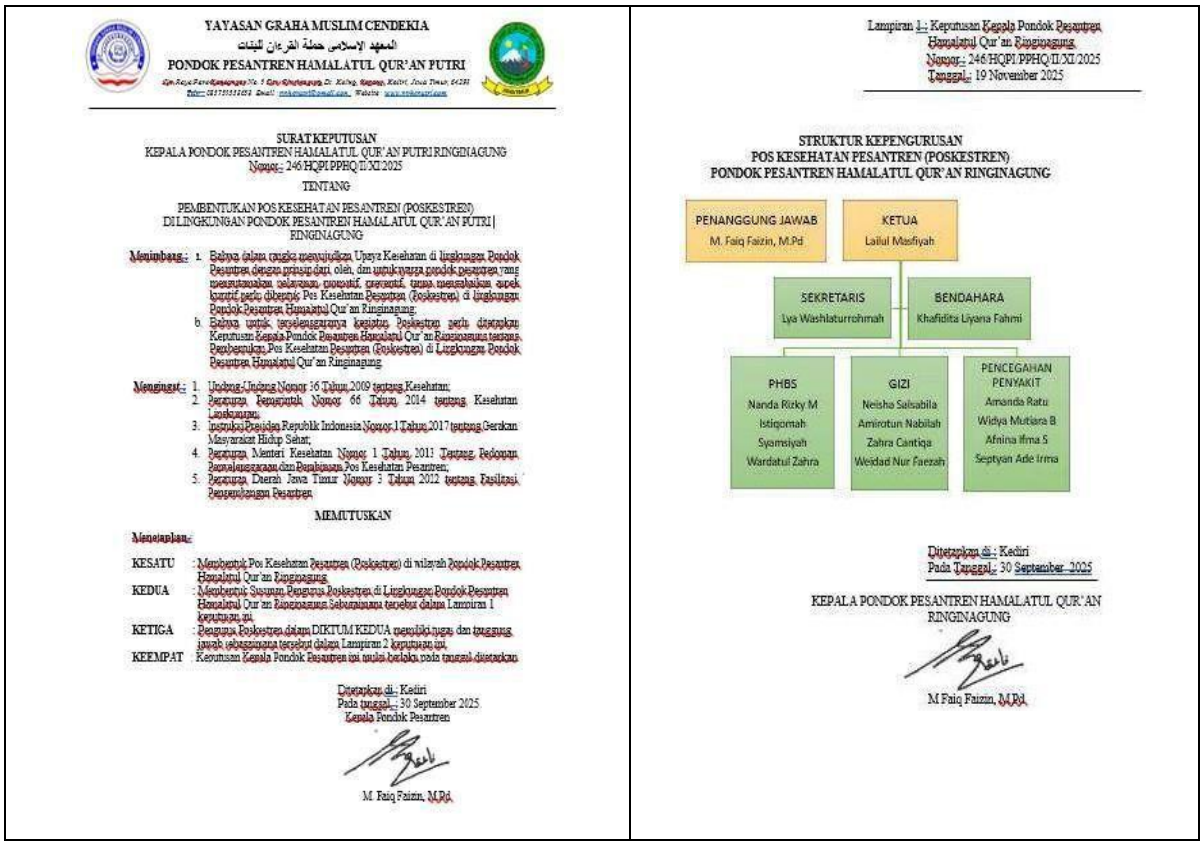
BENDAHARA
Maharani Zahra Dwiyanti

Anggota Santri PHBS
Aisyah Nurul Wijaya

Kesehatan Lingkungan
Keysha Syakira Rinaldy Handoko

Pengendalian Penyakit
Zahra Azka Ilhal

Anggota Santri Gizi
Rida Faruz Mahalim Al-Varita



YAYASAN GRAHA MUSLIM CENDEKIA
المعهد الإسلامي حملة القرءان للبنات
PONDOK PESANTREN HAMALATUL QUR'AN PUTRI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PONDOK PESANTREN HAMALATUL QUR'AN PUTRI RINGINAGUNG
Nomor : 246/HQPI.PPHQ/II/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN)
DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN HAMALATUL QUR'AN PUTRI
RINGINAGUNG

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Upaya Kesehatan di lingkungan Pondok Pesantren dengan prinsip dari oleh, dan untuk warga pondok pesantren yang menyelenggakan pelayanan promotif, preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif perlu dibentuk Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) di lingkungan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Ringinagung;
b. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Poskestren perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Ringinagung tentang Pembentukan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) di Lingkungan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Ringinagung

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren;
5. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) di wilayah Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Ringinagung
KEDUA : Membentuk Susunan Pengurus Poskestren di Lingkungan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Ringinagung Sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 keputusan ini
KETIGA : Pengurus Poskestren dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2 keputusan ini
KEEMPAT : Keputusan Kepala Pondok Pesantren ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kediri
Pada tanggal : 30 September 2025
Kepala Pondok Pesantren

M. Faiq Faizin, M.Pd

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an Ringinagung
Nomor : 246/HQPI.PPHQ/II/XI/2025
Tanggal : 19 November 2025

STRUKTUR KEPENGURUSAN
POS KESEHATAN PESANTREN (POSKESTREN)
PONDOK PESANTREN HAMALATUL QUR'AN RINGINAGUNG

PENANGGUNG JAWAB: M. Faiq Faizin, M.Pd
KETUA: Lailul Masfiyah
SEKRETARIS: Lya Washlaturrohmah
BENDAHARA: Khafidita Liyana Fahmi
PHBS: Nanda Rizky M, Istiqomah, Syamsiyah, Wardatul Zahra
GIZI: Neisha Salsabila, Amirotun Nabilah, Zahra Cantiqa, Weidad Nur Faezah
PENCEGAHAN PENYAKIT: Amanda Ratu, Widya Mutiara B, Afnina Ifma S, Septyan Ade Irma

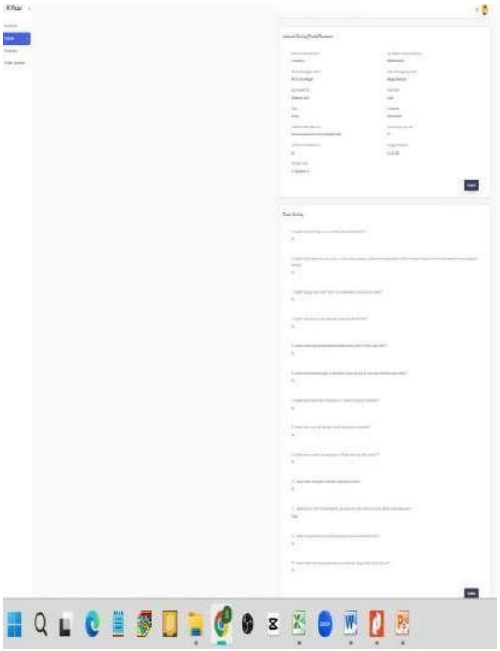
Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 30 September 2025

KEPALA PONDOK PESANTREN HAMALATUL QUR'AN RINGINAGUNG

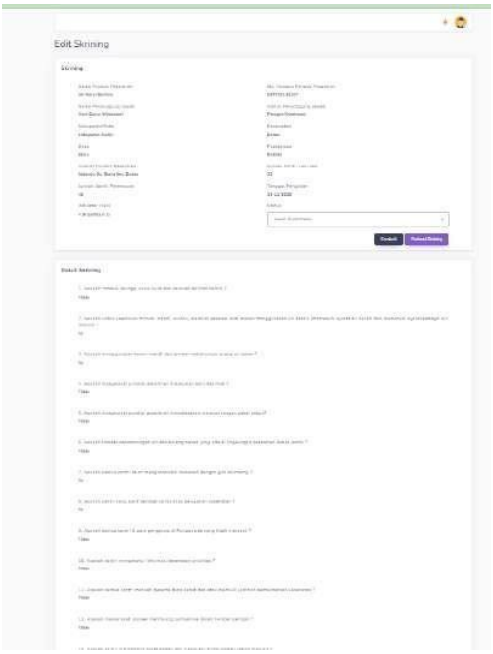
M Faiq Faizin, M.Pd

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

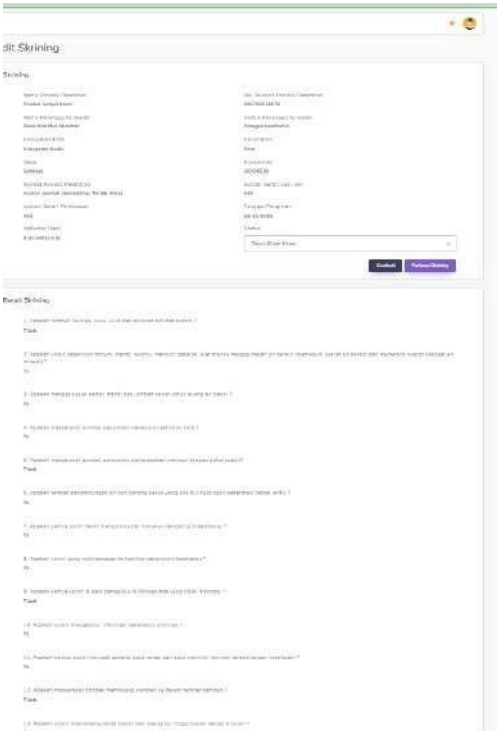
Gambar 37 Hasil Laporan PHBS DATA IKI PESAT



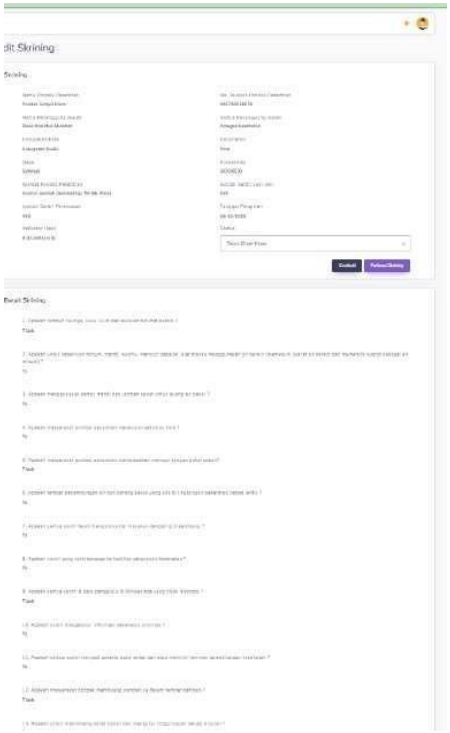
Ar Robitoh



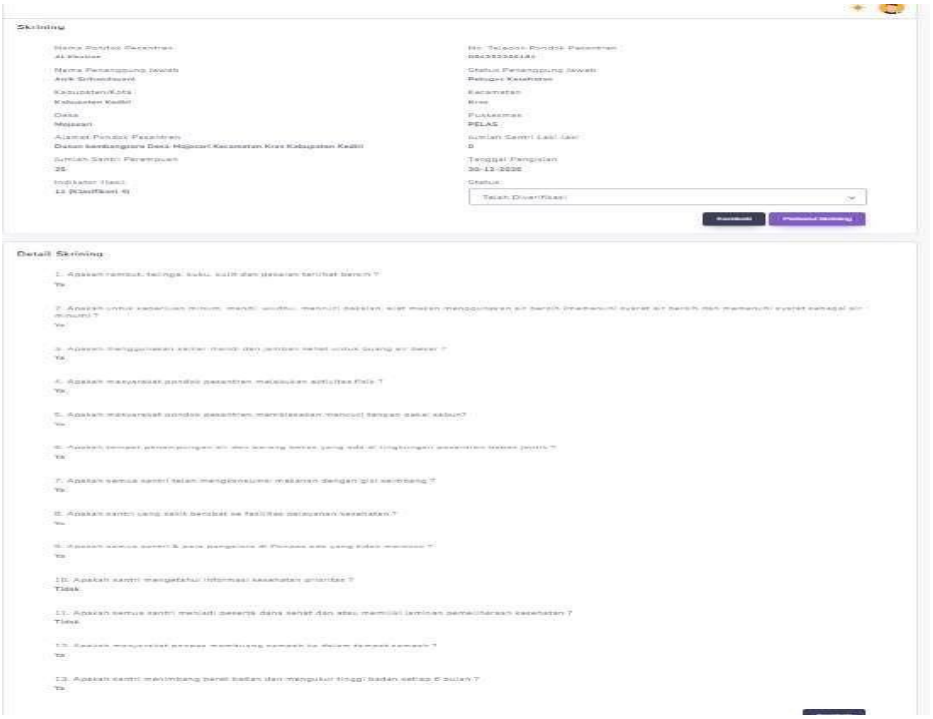
An Nurul Burhan



PP Sirojul Ulum



PP Hamalatul Qur an



PP Al Khoirot

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri

J. Kesimpulan

1. Bantuan keuangan khusus dari Provinsi Jawa Timur sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dari Pos Kesehatan pesantren dan Klasifikasi PHBS, Srata PHBS, capaian konsumsi TTD, peningkatan IKL, skrining TB dan jiwa serta terbentuk kebijakan berwawasan Kesehatan di Pondok Pesantren Kabupaten Kediri
2. Dari kelima Pondok Pesantren yang didampingi semuanya ada peningkatan tingkat kemandirian Pos Kesehatan dan klasifikasi PHBS serta ada peningkatan capaian konsumsi TTD bagi santri putri dan TTD diberikan di sekolah formal
3. Terjalinnya Kerjasama yang baik dengan organisasi keagamaan (NU) dan LDII dalam pembinaan Poskestren sehat

BAB V
P E N U T U P

Substansi pokok yang harus ada dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri adalah hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri selama satu tahun anggaran 2025.

Pada bab-bab di atas, Pemerintah Kabupaten Kediri telah memaparkan dan menjelaskan : *Pertama,* pengelolaan keuangan daerah. *Kedua,* penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. *Ketiga,* tindak lanjut rekomendasi DPRD. *Keempat,* pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Dari paparan diperoleh hasil antara lain untuk pengelolaan anggaran dengan kategori efektif dan efisien serta capaian kinerja meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan mayoritas melampaui target RPJMD. Namun masih terdapat beberapa indikator program kegiatan yang perlu ditingkatkan capaian kinerjanya.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Kediri yang sudah bekerja sama dalam penyusunan LKPJ Pemerintah Kabupaten Kediri ini. Dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada DPRD Kabupaten Kediri berkenan menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025 ini.